



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 7
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 342 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan bila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini serta terjadi perubahan yang mendasar;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 1.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 1.3 Aspek Pelayanan Umum
- 1.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2 Kinerja Pelaksanaan APBD
- 3.3 Neraca Daerah
- 3.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.5 Proporsi Penggunaan Anggaran
- 3.6 Analisis Pembiayaan
- 3.7 Kerangka Pendanaan
 - 3.7.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja
 - 3.7.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

- (2) Rincian Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan

Pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan

Pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA
: 2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayat- Nya, sehingga Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021 ini merupakan bagian dari keluaran atas pentahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Sesuai dengan substansi yang melatarbelakangi perubahan, maka di dalamnya memberikan penambahan porsi atas :

1. Pengaturan Kinerja Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2016, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di dalam instruksi menteri dalam negeri tersebut, terdapat point penting terkait Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengamanatkan agar pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Menyikapi hal tersebut, usulan perubahan RPJMD sebenarnya sudah direncanakan pada Tahun 2017, namun dengan mempertimbangkan usia dokumen RPJMD tersebut saat itu belum genap 1 tahun sehingga belum diperoleh hasil evaluasi, maka penyusunan Perubahan RPJMD ditunda pada tahun 2018 ini.
2. Masih rendahnya hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mana pemerintah pusat telah menempatkan hasil evaluasi SAKIP sebagai salah satu indikator dalam penghitungan pemberian Dana Insentif Daerah (DID). Dalam penilaian tersebut, komponen perencanaan mempunyai bobot terbanyak di antara 4 (empat) komponen lainnya, yaitu sebesar 30%. Oleh karena itu, konstruksi perencanaan yang sesuai dengan arahan dan kebijakan Kementerian PAN dan RB menjadi kebutuhan bagi setiap Daerah. Meskipun nilai SAKIP tahun 2017 yang diterimakan pada tahun 2018 mengalami kenaikan

hingga mencapai 61 (dengan kategori CC), namun kenaikan ini belum cukup untuk memberikan nilai tambah bagi DID.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Nunukan menyusun perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021, yang diawali dengan penyusunan Rancangan Awal, namun demikian, terdapat hal-hal pokok yang akan tetap menjadi komitmen bersama untuk dijaga, yaitu : Visi dan Misi serta Program Pembangunan yang merupakan penterjemahan atas janji yang telah disampaikan pada saat kampanye pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Nunukan.

Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan tahun 2016-2021, dan demi kesempurnaannya maka saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi hasil yang lebih baik di masa depan.

Nunukan, Oktober 2018
Bupati Kabupaten Nunukan

Hj. Asmin Laura Hafid SE MM

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan	I-8
1.5 Sistematika Penyusunan.....	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-41
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-31
2.4 Aspek Daya Saing	II-104
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	
3.3 Kerangka Pendanaan	III-17
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	
.....	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.2 Isu – isu Strategi.....	IV-12
BAB V ISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1 Visi Kabupaten Nunukan Tahun 2016- 2021	V-1
5.2 Misi Kabupaten Nunukan Tahun 2016- 2021	V-2
5.3 Tujuan dan Sasaran	V-4

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 – 2021	VI-1
6.1 Mengakselerasi peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan dan daerah tertinggal untuk mendukung pembangunan agrobisnis berwawasan lingkungan	VI-1
6.2 Meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan.....	VI-3
6.3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	VI-4
6.4 Mewujudkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dengan Mengedepankan Supremasi Hukum	VI-5
 BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
 BAB IX PENUTUP	IX-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang memuat arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program perangkat daerah (PD), program lintas perangkat daerah, disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, RPJMD menjadi sangat strategis sebab akan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terpilihnya Hj. Asmin Laura Hafid, SE MM dan Ir. H. Faridil Murad, SE MT sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, yang telah dilantik pada tanggal 01 Juni 2016, memiliki konsekuensi wajib pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk menyusun RPJMD sebagai pedoman pembangunan jangka menengah daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif yang didasarkan pada kesepahaman dan komitmen bersama yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun keterlibatan peran serta lintas pelaku lain seperti dunia usaha maupun lembaga swadaya masyarakat. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi lintas pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam kurun waktu jangka menengah selama lima tahun ke depan.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD, dipandang perlu melakukan perubahan RPJMD, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Selain hal tersebut di atas, pelaksanaan evaluasi hasil RPJMD tahun pertama menunjukkan kinerja dan pencapaian target-target pembangunan belum mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, maka direkomendasikan untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021. Acuan dasar hukum perubahan RPJMD, sebagai berikut :

1. Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, maka perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 telah memenuhi amanat Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, sebagai berikut:

2. Penyesuaian terhadap regulasi perencanaan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017;
3. Dalam rangka pencapaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu melakukan perubahan RPJMD agar selaras dengan IKU, Renstra dan perjanjian kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan RPJMD juga memperhatikan prinsip *money follows program* dan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Diharapkan dengan beberapa penyesuaian tersebut dapat mewujudkan perencanaan yang efektif, efisien, dan mampu merespon perubahan dan perkembangan keadaan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan 2016-2021, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 dan di ubah kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 4);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-4738 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan dari sisa 5 tahun ke depan pemerintahan Kabupaten Nunukan yang dipimpin oleh Hj. Asmin Laura Hafid, SE., MM dan Ir. H. Faridil Murad, SE., MT sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Penyusunan perubahan RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten Nunukan tahun 2005-2025 dan memperhatikan perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. Perubahan RPJMD berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan umum, program Pembangunan Daerah (program lintas PD), disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Gambar 1.1. menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dan RPJPD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat. Dengan keterkaitan tersebut diharapkan akan tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.

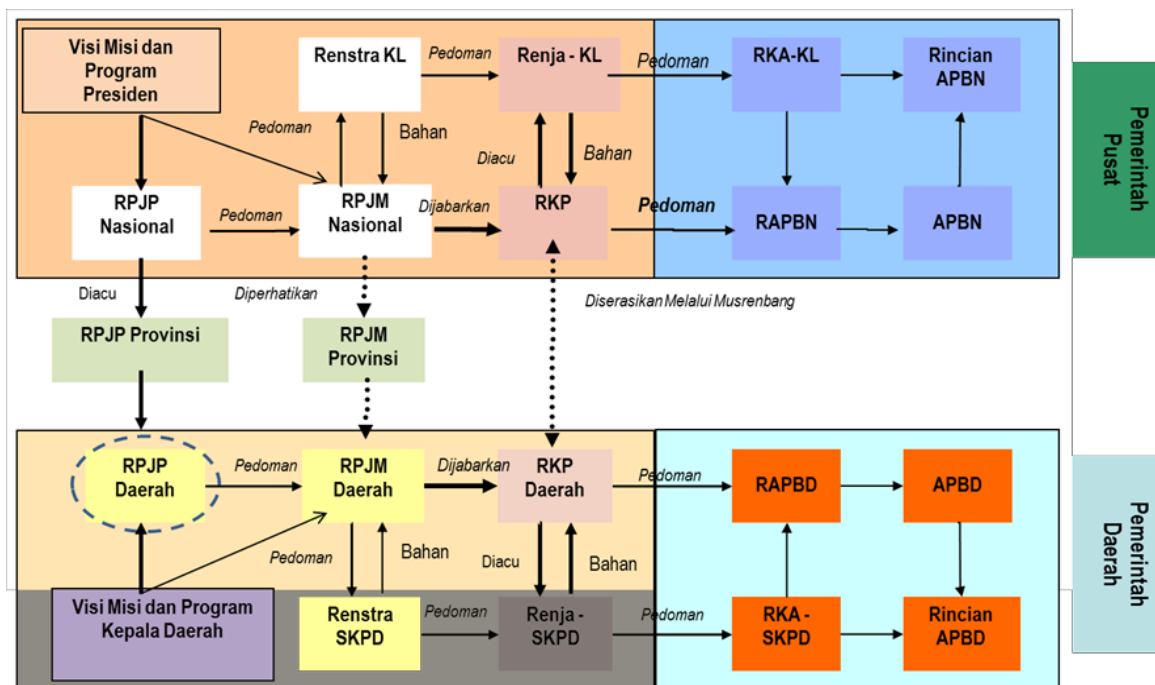
Pada tahap selanjutnya perubahan RPJMD akan dijabarkan dalam perubahan Renstra PD yang berfungsi sebagai pedoman teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai indikasi program dan kegiatan untuk setiap bidang/fungsi pemerintahan dalam kurun waktu yang tersisa. Selanjutnya perubahan RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh PD untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan PD yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar PD dalam mengusulkan RKA-PD dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA PD. Dengan kata lain RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan

menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya.

Penyusunan perubahan RPJMD harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberi acuan mengenai struktur dan pola ruang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan, agar kebijakan dan sasaran dalam RPJMD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Kabupaten Nunukan. RTRW Kabupaten Nunukan merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah.

Disamping memperhatikan RTRW, penyusunan perubahan RPJMD ini juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di Kabupaten Nunukan. Pembahasan lebih lanjut mengenai hubungan antar dokumen ini ditelaah pada Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategis.

Gambar 1.1
Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah



Sumber: Diolah dari UU Nomor 25 Tahun 2004

1.4 Maksud Dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan yaitu:

- 1 Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan pedoman arah penyelenggaraan pembangunan daerah untuk sisa jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah dan sebagai implementasi tahapan ketiga RPJPD Kabupaten Nunukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025;
- 2 Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD);
- 3 Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan;
- 4 Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih;
- 5 Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Nunukan;
- 6 Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.4.2 Tujuan

Berdasarkan maksud tersebut, tujuan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan daerah sekitar dan Provinsi Kalimantan Utara.
4. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional.
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan.
7. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan di wilayah perbatasan negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan terdiri atas 9 (sembilan) bab, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.6 Latar Belakang
- 1.7 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.8 Hubungan Antar Dokumen
- 1.9 Maksud dan Tujuan
- 1.10 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 3.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 3.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 3.3 Aspek Pelayanan Umum
- 3.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.8 Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.9 Kinerja Pelaksanaan APBD
- 3.10 Neraca Daerah
- 3.11 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.12 Proporsi Penggunaan Anggaran
- 3.13 Analisis Pembiayaan
- 3.14 Kerangka Pendanaan

3.14.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

3.14.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.3 Permasalahan Pembangunan

4.4 Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.4 Visi

5.5 Misi

5.6 Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 . Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu dari lima Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan provinsi baru yang terbentuk dari hasil pemekaran Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012. Kabupaten Nunukan sendiri terbentuk pada Tahun 1999 sebagai salah satu kabupaten hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000. Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.247,50 km², atau 18,87% dari luas wilayah Kalimantan Utara dengan batas wilayah administrasinya sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur – Sabah
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Selat Makassar
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau
- d) Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur- Serawak.

Sejak Tahun 2015 secara Administratif Wilayah Kabupaten Nunukan terbagi dalam 19 wilayah kecamatan yang sebelumnya hanya 16 kecamatan.

Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Nunukan

No.	Kecamatan	Ibukota
1	Nunukan	Nunukan Barat
2	Nunukan Selatan	Mansapa
3	Sei Manggaris	Srinanti
4	Tulin Onsoi	Sekikilan
5	Sebuku	Pembeliangan
6	Sembakung	Atap
7	Sembakung Atulai	Saduman
8	Lumbis	Mansalong
9	Lumbis Ogong	Binter
10	Krayan Timur	Long Umung
11	Krayan	Long Bawan
12	Krayan Barat	Lembudud
13	Krayan Tengah	Binuang
14	Krayan Selatan	Long Layu

15	Sebatik Barat	Binalawan
16	Sebatik	Tanjung Karang
17	Sebatik Timur	Sei Nyamuk
18	Sebatik Utara	Sei Panjang
19	Sebatik Tengah	Aji kuning

Sumber data : Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2018

B. Letak dan Kondisi Geografis

Posisi astronomis Kabupaten Nunukan adalah berada pada antara 115° 33' 00" sampai dengan 118°03' 55" Bujur Timur dan antara 3° 15' 00" sampai dengan 4° 24' 55" Lintang Utara yang merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara.

Jika dilihat dari posisi astronomis Kabupaten Nunukan berada di kawasan tropis, hal ini membuat Kabupaten Nunukan selalu disinari matahari sepanjang tahun dan pada umumnya dilimpahkan alam yang luar biasa dan curah hujan tinggi akan membuat tanah subur serta flora dan fauna yang sangat beragam.

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah yang 15 kecamatannya terletak pada garis perbatasan antar Republik Indonesia dengan Negara Malaysia tepatnya Negara Bagian Sabah dan Serawak. Panjang batas daerah sekitar 502 km garis perbatasan antara Kabupaten Nunukan dengan Negara Malaysia.

Posisi geografis Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan juga berada pada Laut Sulawesi dan Selat Makassar yang merupakan jalur pelayaran internasional atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang merupakan jalur laut tersibuk, sehingga membuat Kabupaten Nunukan menjadi strategis.

Dengan posisinya yang strategis tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Nunukan sebagai cermin dan halaman depan dari berbagai aktivitas perekonomian lintas batas antar negara.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Nunukan



Sumber data : RTRW Kab. Nunukan Tahun 2013-2033

C. Topografi

Kemiringan di wilayah Kabupaten Nunukan sangat bervariasi, yang secara umum dikategorikan kedalam 6 (enam) kelas kemiringan, yaitu :

- (1) Kemiringan 0-2 % : datar
- (2) Kemiringan 2-8 % : landai
- (3) Kemiringan 8-15 % : agak landai
- (4) Kemiringan 15-25 % : agak curam
- (5) Kemiringan 25-40 % : curam
- (6) Kemiringan >40 % : sangat curam

Wilayah Kabupaten Nunukan mempunyai kemiringan tanah dari 0 sampai lebih dari 40%. Secara umum dapat dikatakan bahwa kemiringan tanah wilayah Kabupaten Nunukan berkolerasi positif dengan ketinggian. Makin tinggi letak suatu hamparan maka kemiringannya semakin terjal.

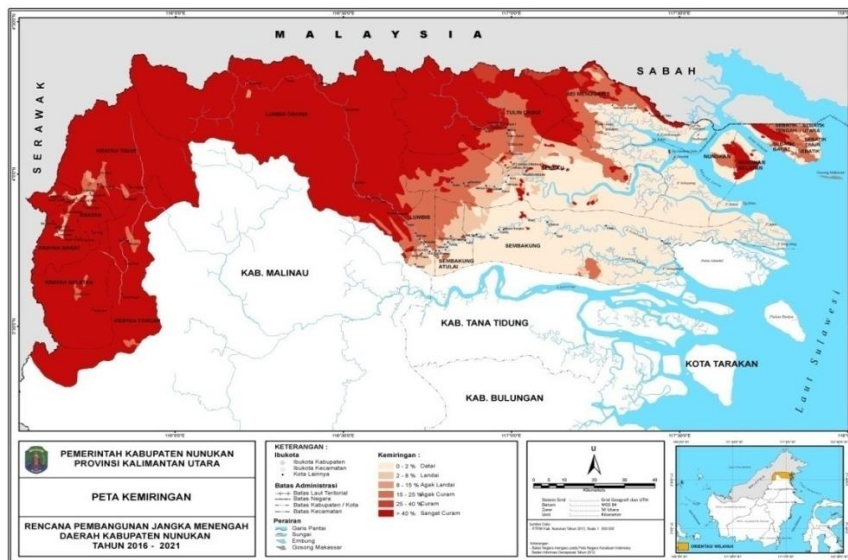
Tabel 2.2
Luas Wilayah Kelas Kemiringan
Di Kabupaten Nunukan (Ha)

Kelas Kemiringan (%)	Luas Wilayah	%
0-2	474.984	33,30
2-8	86.723	6,08
8-15	126.511	8,87
15-25	125.594	8,81
25-40	110.502	7,75
>40	502.054	35,20
Jumlah	1.426.368	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033

Luas kemiringan lahan di Kabupaten Nunukan meliputi datar (0-2%) seluas 474.984 Ha, landai (2-8%) seluas 86.723 Ha, agak landai (8-15%) seluas 126.511 Ha, agak curam (15-25%) seluas 125.594 Ha, curam (25-40%) seluas 110.502 Ha dan sangat curam (>40%) seluas 502.054 Ha.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Kabupaten Nunukan



Sumber Data : RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033

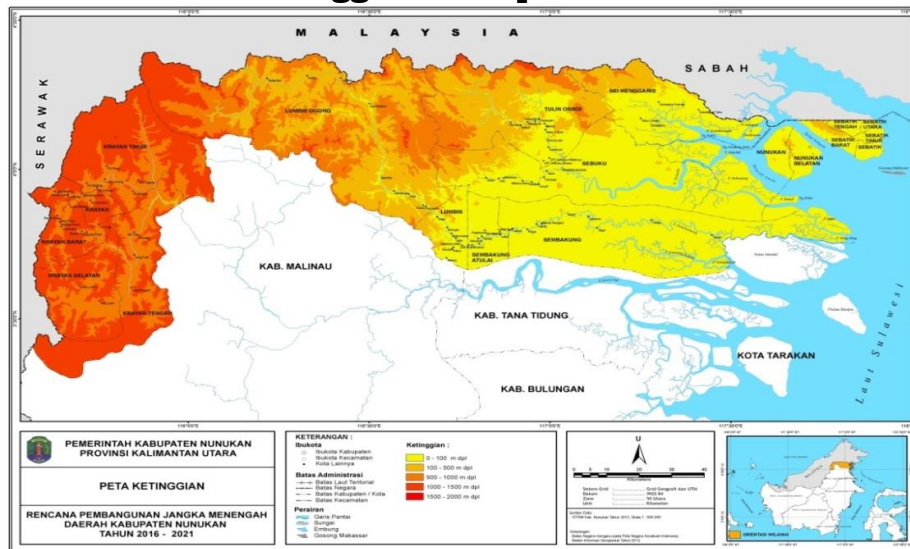
Secara topografi, wilayah daratan Kabupaten Nunukan terdiri atas kawasan perbukitan terjal di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang di bagian tengah dan dataran bergelombang dan landai di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur. Perbukitan terjal disebelah utara merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian berkisar dari 1.500 – 2.000 m di atas permukaan laut, sedangkan perbukitan disebelah selatan bagian tengah ketinggiannya berkisar antara 500 m - 1.500 m di atas permukaan laut.

Tabel 2.3
Penyebaran dan Luas Masing-Masing Ketinggian
Kabupaten Nunukan (Ha)

Ketinggian (m)	Luas	%
0 – 100	559.858	39,30
100 – 500	282.050	19,80
500 - 1.000	309.820	21,57
1.000 - 1.500	272.804	19,15
1.500 - 2.000	219	0,015
Jumlah	1.424.750	100

Sumber Data : RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033

Gambar 2.3
Peta Ketinggian Kabupaten Nunukan



Sumber Data : RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033

D. Geologi

Kondisi geologi atau jenis batuan di kabupaten Nunukan meliputi kondisi geologi/jenis batuan di daratan Pulau Kalimantan maupun pulau-pulau kecil berumur *quaternary, pliocene, miosen* hingga *Oligacene*.

1. Struktur dan Karakteristik

Struktur sesar (*fault*) di kabupaten Nunukan ditunjukkan oleh kelainan bentuk dan kedudukan sungai, pelebaran dan penyempitan/pengecilan sungai, juga ditunjukkan oleh adanya tebing-tebing sesar. Sistem struktur sesar di Kabupaten Nunukan berarah tenggara - barat laut.

- 1.1) Sesar terpanjang dengan arah hampir utara - selatan/tenggara - barat laut berada di wilayah Sebuku berbatasan dengan Kecamatan Nunukan. Di wilayah Krayan Selatan mulai dari Formasi Gunung Api Jelai (dari Kabupaten Malinau) masuk ke Formasi Lurah terus ke Formasi Long Bawan dan terus ke wilayah Serawak.
- 1.2) Sesar berupa torehan - torehan dengan arah utara - selatan/tenggara - barat laut banyak terdapat di pegunungan dan perbukitan bergelombang di Kecamatan Sebuku. Sesar terletak di Formasi Mentarang, Formasi Meliat, Formasi Sajau dan Formasi Naintupo.
- 1.3) Sesar panjang dengan arah tenggara - barat laut dari Formasi Sembakung ke masuk ke Formasi Mentarang. Terletak di Kecamatan Sembakung hingga Kecamatan Lumbis. Sesar dengan arah tenggara - barat laut masih di wilayah Lumbis bagian barat terdapat sesar dari Formasi Mentarang masuk ke Formasi Lurah. Di sebelah utara Semalat (Lumbis) pada formasi Lurah terjadi sesar naik, yang memanjang ke arah utara hingga masuk ke wilayah Sabah (Malaysia Timur).

- 1.4) Sesar memotong formasi batuan dengan arah barat daya - timur laut banyak terdapat di Kecamatan Sebuku, yang terletak di Formasi Mentarang, Formasi Meliat, Formasi Sajau dan Formasi Sembakung.
- 1.5) Sesar dari Long Layu (Krayan Selatan) kearah barat laut masuk ke Wilayah Krayan sebelah selatan Lembudud.
- 1.6) Rangkaian sinklinal dan antiklinal yang luas terdapat pada Formasi Lurah di Kecamatan Krayan tepatnya di Wa' Yagung – Bungayan.
- 1.7) Sinklinal masih di Formasi Lurah terdapat di Kecamatan Krayan bagian timur hampir perbatasan dengan Kabupaten Malinau, terletak di sebelah barat Tedulah dengan arah utara - selatan hingga masuk di wilayah Kecamatan Lumbis.
- 1.8) Sinklinal yang panjang terdapat pada Formasi Long Bawan terletak di sebelah selatan Pa' Padi memanjang dengan arah utara-selatan hingga masuk ke wilayah Kecamatan Krayan Selatan.
- 1.9) Sesar panjang dengan arah tenggara - barat laut dari Formasi Sembakung ke masuk ke Formasi Mentarang. Terletak di Kecamatan Sembakung hingga Kecamatan Lumbis. Sesar dengan arah tenggara - barat laut masih di wilayah Lumbis bagian barat terdapat sesar dari Formasi Mentarang masuk ke Formasi Lurah. Di sebelah utara Semalat (Lumbis) pada formasi Lurah terjadi sesar naik, yang memanjang ke arah utara hingga masuk ke wilayah Sabah (Malaysia Timur).
- 1.10) Sesar memotong formasi batuan dengan arah barat daya - timur laut banyak terdapat di Kecamatan Sebuku, yang terletak di Formasi Mentarang, Formasi Meliat, Formasi Sajau dan Formasi Sembakung.

2. Potensi Kandungan

Jenis batuan Kabupaten Nunukan dapat dibedakan dalam 14 (empat belas) formasi batuan yang mana uraian potensi kandungan setiap jenis batuan sebagai berikut:

- 1.1) Aluvial (Qa) dengan litologi sedimen, yang berupa endapan alluvial dan rawa berumur *resent (quaternary)* terdiri dari lempung, lempung pasiran dan pasir lempung berwarna coklat kemerahan, plastisitas tinggi, lunak. Lempung pasir berwarna coklat muda, plastisitas rendah dan tingkat kekerasan lunak hingga *stiff*. Batu pasir berwarna putih keabu-abuan, berbutir halus-sedang seragam, bentuk butir menyudut tanggung – keras. Komposisi satuan batu lempung/ lumpur, pasir, kerakal, bahan tumbuhan dengan perbandingan tidak selaras, di atas batuan dasar yang terlapuk. Pengisian rawa dari bahan tumbuhan dan *holosen* pasir fluvial berumur

pliosen dari batuan granitik. Sebaran batuan alluvial ini terdapat di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sembakung (menyebar hampir seluruh wilayah), di Kecamatan Sebuku (di sekitar Sungai Sebuku dan perbatasan dengan Sembakung) dan di Kecamatan Lumbis (perbatasan dengan Sembakung).

- 1.2) Sumbat dan Rentas Diorit (Qpi) merupakan batuan terobosan retas dan sumbat diorit, kuarsa (setempat), menerobos formasi Sajau (TQps) dan Formasi Tabul (Tmt). Formasi batu berpasir sebanding dengan terobosan di Serawak. Sumbat dan rentas terdapat di Pulau Nunukan, Kecamatan Sebuku dan Sembakung berumur kwarter (*Quaternary*).
- 1.3) Sumbat Rentas Andisit (Tma), merupakan batuan terobosan retas dan sumbat andisit dan basal (setempat), diorit, menerobos formasi Sembakung (Tas) dan rawa alluvium di wilayah Sembakung. Sumbat rentas ini merupakan awal dari rekahan arah barat laut. Formasi ini berumur Meocene tengah (*Middel Miocene*) dan berupa deposit volkanik subaerial yang mengandung magnetit.
- 1.4) Formasi Sajau (TQps) berupa endapan litoral lumpur, pasir, kerakal, setempat gampingan dan bahan tumbuhan. Komposisi hubungan setara dengan pengisian rawa holosen. Formasi ini terletak pada punggung sungai atau terras sungai, maupun delta-delta sungai. Formasi Sajau berumur mulai Trias hingga kwarter (*Quaternary*). Sebaran Formasi Sajau di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik (terletak di belakang jenis batuan alluvial), di Kecamatan Sebuku bagian utara Sungai Sebuku berselang - seling dengan Formasi Tabul dan Formasi Meliat.
- 1.5) Formasi Sembakung (Tas), yaitu perselingan antara batu pasir, batu lempung, serpih dan batubara. Batuan pasir dan gamping terletak di lapisan bawah, sedangkan lapisan atas berupa basal konglomerat dan tuff. Formasi Sembakung, berupa selang seling antara batu pasir, batu lempung, serpih dan batubara, sangat resistan terhadap proses pelapukan. Batuan ini sangat resistan terhadap proses pelapukan dan dimanfaatkan untuk bahan galian bangunan. Formasi Sembakung yang membentuk bentang alam luas dengan intrusi dari batuan beku andesit dan diorit. Sebaran Formasi Sembakung di Kecamatan Lumbis sekitar Mansalong, membentuk bentang alam kerucut, di Kecamatan Sembakung di pegunungan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Lumbis, di Kecamatan Sebuku bagian tengah menyebar luas di sebelah timur.

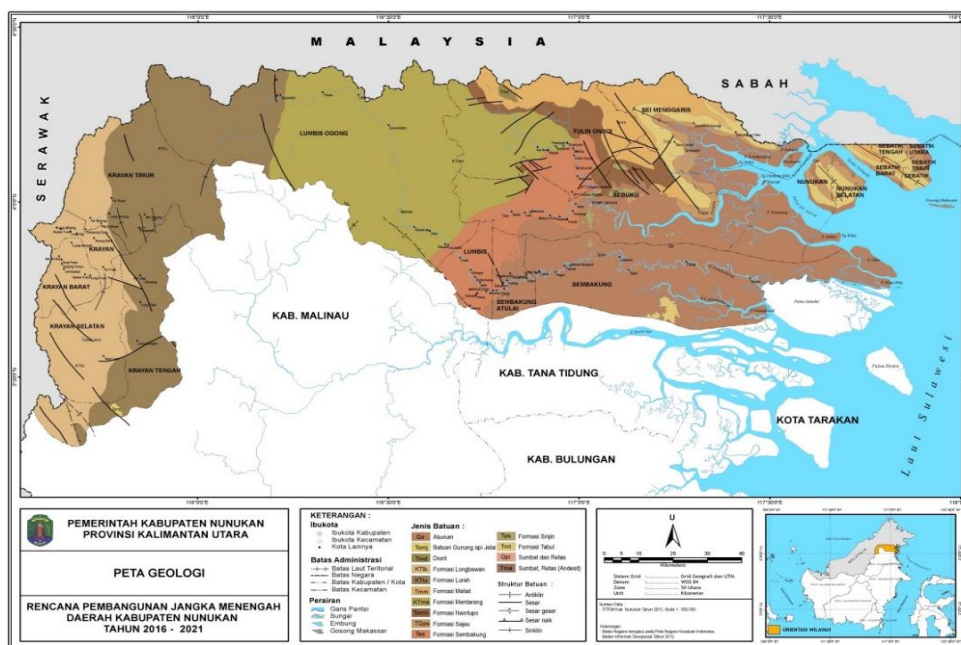
- 1.6) Formasi Mentarang (Ktma) terdiri dari batu pasir berwarna kelabu biru kehijauan, mengandung kuarsa, felspar, mika bersisipan dengan argilit dan serpih, breccia dan konglomerat. Formasi batuan ini membentuk bentang alam perbukitan dan pegunungan. Batuan ini umumnya telah mengalami pelapukan kuat berupa lempung pasir hingga lanauan dengan ketebalan beragam dari beberapa cm s/d 2 m. Formasi Mentarang menempati wilayah Kecamatan Lumbis membentuk bentang alam perbukitan dan pegunungan hingga wilayah Kecamatan Sebuku bagian barat laut.
- 1.7) Diorit (Tmd) merupakan intrusi diorit pada formasi Meliat (Tmm), berupa sesar arah barat laut di Kecamatan Sebuku bagian utara berbatasan dengan Sabah (Malaysia). Formasi ini merupakan kontak batuan metamorfik yang mengandung diorit, gabro, cloride, biotite, actinolite dan epidote, berumur Meocene tengah (*Middel Miocene*).
- 1.8) Formasi Meliat (Tmm), berupa batuan lumpur kerakal berumur *Oligocene* pada Meocene tengah (*Middel Miocene*), gabro berlapis dan pejal, kandungan batubara dan karbonat, kemiringan curam komposisi tidak selaras. Formasi ini mempunyai ketebalan 800-1000m, berhubungan dengan paparan Lumbis, Tarakan dan Sebatik dan posisi selaras dengan Formasi Tabul. Sebaran Formasi Meliat (Tmm) terletak di Nunukan daratan pada perbukitan kasar tertoreh yang berbatasan dengan Malaysia. Batuan lumpur kerakal berumur *Oligocene*, gabro berlapis dan pejal, kemiringan curam komposisi tidak selaras. Sentuhan tektonik mengakibatkan sesar/ patahan memanjang di tengah Pulau Sebatik dengan arah barat laut - tenggara. Sesar/ patahan memotong mulai dari Formasi Meliat (Tmm) dan Formasi Tabul dari Tengah Pulau Sebatik (Malaysia) hingga pantai tenggara Pulau Sebatik (Indonesia). Di Kecamatan Sebuku terletak di perbukitan kasar tertoreh berbatasan dengan Malaysia dan Kecamatan Nunukan.
- 1.9) Formasi Tabul (Tmt) serpih batu lanau, karbonan dan gampingan berwarna kelabu muda berbutir halus hingga kasar. Formasi tidak selaras berumur miosen (*Miocene Undifferentiated*) terletak pada perbukitan rendah di Kecamatan Sebuku yang berbatasan dengan Kecamatan Nunukan. Sentuhan tektonik, sehingga terdapat sesar/ patahan melintang dengan arah barat laut - tenggara. Sesar/ patahan tersebut memotong mulai dari Formasi Meliat (Tmm), Formasi Tabul

(Tmt), Formasi Sajau (TQps) berakhir di Formasi Alluvial. Formasi Tabul di Sembakung terletak berbatasan dengan Kabupaten Bulungan.

- 1.10) Formasi Naintupo (Tomn) berupa batuan yang berasal dari Formasi Meliat, berupa pasir dengan campuran sedikit lempung lanau, gamping dan konglomerat, terdapat lapisan batubara tetapi tidak tebal hanya antara 0,5 hingga 1 meter. Formasi ini banyak terdapat fosil - fosil yang berumur *Oligocene* pada Meocene bawah (*Lower Miocene*). Sentuhan tektonik berupa cekungan (basin) dengan endapan pasir lumpur laut dangkal (*shallow marine*). Sebarannya terletak di perbukitan di Kecamatan Sebuku diantara Formasi Mentarang, Formasi Sembakung dan Formasi Meliat terus menyambung hingga selat Sebatik - Tarakan.
- 1.11) Formasi Sinjin (Tpa) terletak di perbukitan rendah di Kecamatan Sebuku merupakan sebaran perbukitan pada daerah aluvium formasi Sembakung dan Formasi Meliat. Formasi Sinjin tidak selaras pada formasi Tabul, berumur *pliocene*. Formasi Sinjin berupa tuff, breccia, agglomerate. Formasi ini interbedded dengan tuff *pyroxcene* lava andisit yang mengandung magnetit dan mempunyai struktur paralel dengan struktur batuan dengan ketebalan hingga 500 meter. Formasi Sinjin bersentuhan/ Interaksi dengan Formasi Sajau.
- 1.12) Formasi Gunung Api Jelai (Tomj) adalah batuan endapan gunung api, berupa lava, breksi dan tufa, yang dibentuk oleh batuan terobosan granitan berumur tersier dan batuan sumbat rentasnya berumur kuartar. Endapan mineral berupa emas biasanya terdapat berupa sumbat rentas dan di daerah aliran dekat tubuh granodiorit. Formasi Jelai terdapat di Kecamatan Krayan Selatan berupa batuan terobosan terdapat pada fisiografi perbukitan curam/ terjal terisolasi dan terletak berbatasan dengan Kabupaten Malinau.
- 1.13) Formasi Long Bawan (KTlb) merupakan formasi yang sangat luas menempati bagian barat Kabupaten Nunukan, yaitu di wilayah Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan berbatasan dengan Serawak (Malaysia). Formasi Long Bawan merupakan formasi batuan tertua di Kabupaten Nunukan yang terbentuk pada Pra-Trias Akhir, terdiri dari argilit jingga hingga hijau muda, mudah hancur dan bersisipan batu pasir kuarsa, felspart, sedikit konglomerat dan lapisan batubara yang mempunyai tebal 0,5 hingga 1,5 m. Formasi simpang siur membentuk bentang alam perbukitan dan pegunungan di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan.

1.14) Formasi Lurah (Ktlu) terdiri dari batuan pasir kelabu muda sampai kelabu kehijauan, halus hingga kasar, felspart, kerakal berselang - seling dengan batu gamping dan batu lanau kelabu tua - merah, serpih dan konglomerat, aneka bahan dan sedikit mengandung batubara. Batuan dari formasi ini membentuk bentang alam perbukitan dan pegunungan. Sebaran Formasi Lurah terletak di bagian timur dan utara Formasi Long Bawan, yaitu menempati wilayah Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan bagian timur, serta Kecamatan Lumbis bagian barat.

Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Nunukan



Sumber Data : RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033

E. Hidrologi

Informasi kondisi hidrologi berkaitan dengan ketersediaan air untuk pembangunan dan kehidupan sehari - hari. Kriteria Hidrologi dibagi menjadi 3 kategori :

- 1.1) Kawasan dengan kondisi air tanah langka / tak berarti; terutama berada pada Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Lumbis Ogong, Lumbis dan Tulin Onsoi
- 1.2) Kawasan dengan produktivitas akuifer rendah; terletak pada daerah peralihan antara Kawasan dengan kondisi air tanah langka/tak berarti dengan Kawasan setempat akuifer produktif dan berada di Kecamatan Sei Manggaris, Sebuku dan Tulin Onsoi
- 1.3) Kawasan setempat akuifer produktif; terutama berada di wilayah pesisir Kecamatan Sembakung dan Sei Manggaris, pesisir Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik

1. Daerah Aliran Sungai

Kondisi hidrologi permukaan di wilayah Kabupaten Nunukan ditentukan oleh sungai - sungai yang ada di kawasan tersebut. Sebagian besar sungai di wilayah ini berbentuk sempit memanjang, namun berdebit besar sebagai akibat dari panjangnya daerah aliran sungai (DAS), yang terbentuk oleh sistem sungai dengan cabang-cabang aliran (*channel*) yang panjang sehingga membentuk wilayah DAS yang cukup luas. Daerah Aliran Sungai yang ada terbagi menjadi :

- 1.1) Daerah Aliran Sungai Nunukan, Daerah Aliran Sungai Sebatik.
- 1.2) Daerah Aliran Sungai Sebuku, dengan panjang 115 km, memiliki dua anak sungai utama, yaitu Sungai Tulid dan Sungai Tikung. Sungai Tulid berasal dari beberapa anak sungai, yaitu Sungai Apan, Sungai Tampilon di sebelah Utara serta Sungai Sebuda, Sungai Kapakuan, Sungai Agison di sebelah Barat. DAS Sebuku hanya melewati Kecamatan Nunukan (di daratan Pulau Kalimantan).
- 1.3) Daerah Aliran Sungai Sei Manggaris, dengan panjang 36 km, memiliki tiga anak sungai, yaitu Sungai Sei Manggaris, Sungai Sitabul dan Sungai Sebakis. DAS Sei Manggaris hanya melewati Kecamatan Nunukan (di daratan Pulau Kalimantan).
- 1.4) Daerah Aliran Sungai Sembakung, dengan panjang 278 km, memiliki beberapa anak sungai, yaitu Sungai Tagul, Sungai Membuluh, Sungai Sebuluan, Sungai Simalumbeng dan Sungai Selimulan. DAS Sembakung melewati Kecamatan Lumbis di sebelah Barat dan Kecamatan Sembakung di sebelah Timur.

2. Sungai, Danau dan Rawa

Kabupaten Nunukan memiliki banyak sungai besar diantaranya yaitu Sungai Sembakung, Sungai Sebuku, Sungai Sei Manggaris, daerah ini memiliki potensi hidrologi yang cukup besar, diindikasikan oleh adanya aliran beberapa sungai. Sungai di daerah ini memiliki beberapa peranan yang cukup penting, antara lain :

- 1.1) Sebagai sarana transportasi air (mobilisasi penduduk, hasil pertanian/perkebunan, barang dagangan antar daerah pantai dan pedalaman
- 1.2) Sarana pengangkutan hasil hutan berupa kayu tebangan perusahaan HPH
- 1.3) Sumber air bagi aktivitas MCK penduduk yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai.

F. Klimatologi

Proses penggantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfer dalam jangka waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim. Iklim merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfer yang meliputi panas, kelembaban dan gerakan udara.

1. Tipe

Kabupaten Nunukan berada di wilayah utara khatulistiwa yang memiliki iklim tropis dengan karakteristik yang khas, sehingga hanya memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh pergerakan angin muson, yaitu Muson Barat pada bulan November - April dan angin Muson Timur pada bulan Mei - Oktober.

2. Curah Hujan

Curah hujan adalah banyaknya hujan yang tercurah (turun) di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Curah hujan di Kabupaten Nunukan relatif tinggi. Pada tahun 2015 pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Nunukan rata - rata curah hujan mencapai 2569,3 mm, dengan curah hujan tertinggi 378,9 mm³ pada bulan September dan terendah 61,6 mm³ pada bulan November sedangkan kelembaban udara berkisar antara 45,0% sampai dengan 99,0%

3. Suhu

Suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur, panas dan dingin. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Nunukan pada tahun 2015, Nunukan mengalami iklim panas dengan suhu udara rata-rata 27,8C. Suhu udara terendah 21,6^oC terjadi pada bulan Juli dan tertinggi 35,0^oC pada bulan Desember. Suhu udara Nunukan yang cenderung panas dipengaruhi oleh topografi Pulau Nunukan yang dikelilingi laut. Walaupun mengalami suhu udara yang cukup panas, namun karena diimbangi oleh wilayah hutan yang cukup luas, rata - rata kecepatan angin tidak mengalami perubahan dari tahun lalu, yaitu menjadi 5,0 knots. Persentase penyinaran matahari rata - rata 65,92%, terendah 47% pada bulan Juni sedangkan tertinggi mencapai 87% terjadi pada bulan April.

4. Kelembaban

Kelembaban udara adalah tingkat kebasahan udara karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Pada Tahun 2015 kelembaban udara Kabupaten Nunukan berkisar antara 45,0% sampai dengan 99,0%.

G. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan secara umum merupakan gambaran dari kegiatan penduduk di suatu daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin kompleks pola penggunaan lahan disuatu daerah menunjukkan pula semakin kompleksnya kegiatan penduduk didaerah tersebut. Penggunaan lahan di Kabupaten Nunukan didominasi oleh wilayah hutan, selain terdapat juga lahan persawahan dan lahan non sawah. Penggunaan tanah bersifat intensif dan non tani banyak terdapat di kawasan perkotaan, terutama di Pulau Nunukan dan Sebatik.

1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang memiliki kondisi fisik dan potensi sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kepentingan produksi dalam memenuhi kebutuhan manusia dan pembangunan. Kawasan budidaya ini dapat dikelompokkan menjadi kawasan kehutanan, pertanian, perindustrian, pertambangan, pariwisata dan permukiman.

Pengelolaan kawasan budidaya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya dilakukan secara seksama dan berdaya guna bagi masyarakat melalui kegiatan - kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan aspek teknis. Untuk itu, dalam penetapan kegiatan - kegiatan budidaya dibutuhkan pertimbangan teknis sektoral. Dengan menggunakan kriteria teknis sektoral dan kriteria keruangan, yaitu ukuran yang digunakan untuk penentuan suatu kawasan yang ditetapkan untuk kegiatan budidaya.

Upaya pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya lahan didasarkan pada hasil penilaian kesesuaian dan potensi lahan. Hal ini dimaksudkan agar produktivitas lahan dapat dipertahankan secara lestari, optimal dan seimbang melalui program perencanaan penggunaan lahan yang sesuai dengan daya dukungnya. Peran penting dari kegiatan evaluasi lahan adalah menjembatani antara pemanfaatan hasil inventarisasi sumber daya lahan dan kepentingan pemakai. Dengan demikian, hasil evaluasi lahan dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan komoditas atau kelompok komoditas tertentu.

Penggunaan lahan untuk yang berbentuk kawasan budidaya terdiri dari :

- 1.1) Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 17.158 Ha, berada pada Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sei Manggaris.
- 1.2) Hutan produksi tetap seluas 232.097 Ha, tersebar hanya di Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sei Manggaris, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Lumbis dan Lumbis Ogong.
- 1.3) Hutan produksi terbatas seluas 131.448 Ha, tersebar di Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Lumbis Ogong.

Areal penggunaan lain seluas 582.938 Ha yang tersebar merata di semua kecamatan yang pemanfaatannya berupa pemukiman, pertanian, pertambangan, industri, peternakan, perikanan, pariwisata serta pertahanan dan keamanan.

2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kabupaten Nunukan terdiri dari :

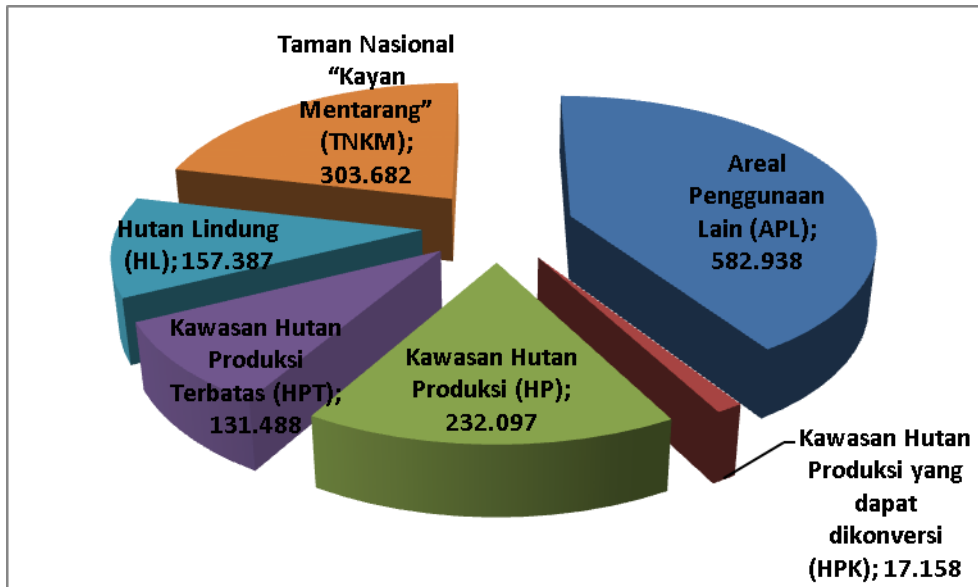
- 1.1) Hutan lindung seluas 157.387 Ha, tersebar di Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Tengah dan Kecamatan Krayan Selatan.
- 1.2) Taman Nasional “Kayan Mentarang” seluas 303.682 Ha yang berada pada Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan Tengah dan Krayan Selatan.

Tabel 2.4
Luas Penggunaan Lahan (Ha)

Kawasan	Luas Lahan
Areal Penggunaan Lain (APL)	582.938
Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	17.158
Kawasan Hutan Produksi (HP)	232.097
Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	131.488
Hutan Lindung (HL)	157.387
Taman Nasional “Kayan Mentarang” (TNKM)	303.682
Jumlah	1.424.750

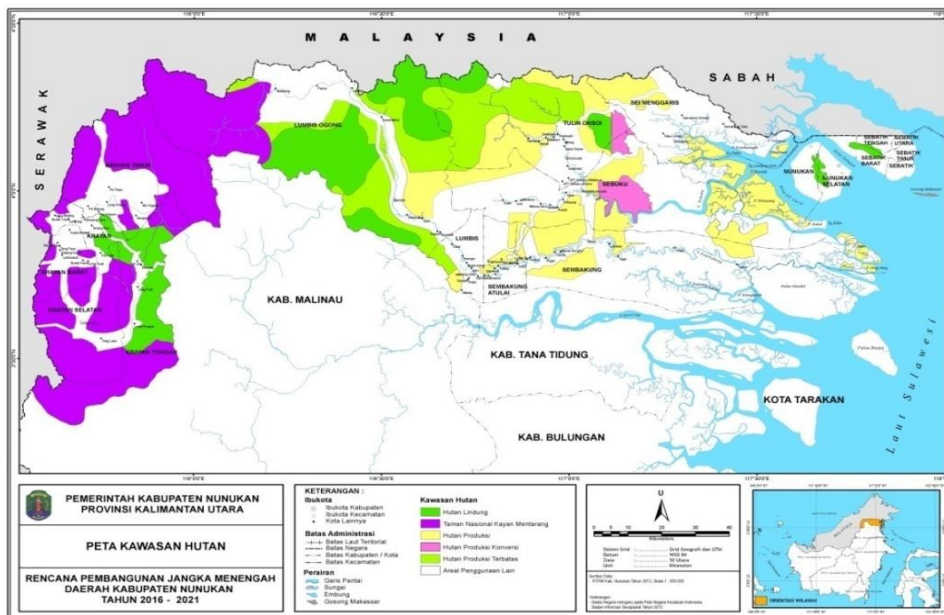
Sumber data: RTRW Kabupaten Nunukan 2013-2033

Grafik 2.1
Luas Penggunaan Lahan Kawasan



Sumber data : RTRW Kabupaten Nunukan 2013-2033

Gambar 2.5
Peta Kawasan Hutan Kabupaten Nunukan



Sumber data : RTRW Kabupaten Nunukan 2013-2033

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Ekonomi Sektoral (Sumber Daya Alam)

1. Sektor Perikanan

Pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Nunukan cukup potensial, terutama jika dikaitkan dengan letak geografisnya yang menguntungkan untuk pemasaran berskala ekspor.

a) Perikanan Tangkap

Pada umumnya seluruh jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan cukup layak untuk dioperasikan di Kabupaten Nunukan. Pengembangan masing - masing alat tangkap untuk meningkatkan produktifitas penangkapan di perairan Kabupaten Nunukan secara lestari adalah sebagai berikut :

- 1.1. Alat tangkap *Trammel Net* dengan tujuan utama untuk menangkap udang masih perlu ditambah jumlahnya mengingat nelayan yang menggunakan alat tangkap tersebut cukup banyak dan alat tangkap tersebut cukup efektif untuk menangkap udang. Alat tangkap trammel nett ini merupakan salah satu alternatif alat tangkap pengganti trawl.
- 1.2. Alat tangkap *Gill Net*, dapat dikembangkan, baik intensitas maupun teknik pengoperasiannya serta penggunaan armada kapal perikanan yang lebih besar dari 10 GT sehingga dapat beroperasi diperairan yang lebih dalam. Pengetahuan nelayan mengenai penggunaan kapal yang lebih besar dan penggunaan teknologi alat penangkapan ikan *gill net* masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan maupun bimbingan teknis.
- 1.3. Alat tangkap *Pole* dan *Line*, perlu dikembangkan pada kualitas armadanya meliputi kelengkapan navigasi dan informasi daerah penangkapan. Hal ini disebabkan karena alat tangkap ini dioperasikan diperairan lepas pantai dengan target jenis ikan pelagis yang berkelompok, seperti ikan tongkol, cakalang dan tuna.
- 1.4. Alat tangkap *Long Line*/pancing rawai, sangat memungkinkan untuk dikembangkan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sehingga daerah operasinya dapat diperluas hingga di atas empat mil dari garis pantai.
- 1.5. Alat tangkap *Kelong*, dioperasikan dengan memperhatikan pola pasang surut di sepanjang pantai pulau - pulau kecil. Pengembangannya perlu dipertahankan karena dapat membantu sebagian nelayan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Namun ukuran mata jaring yang digunakan harus diperhatikan karena dapat berdampak pada kelestarian lingkungan.

Sebagian besar jenis ikan yang terdapat di perairan Kabupaten Nunukan bernilai ekonomis penting, mulai dari ikan - ikan karang, kerapu, baronang, ikan merah, udang, kepiting dan kerang yang tersebar didaerah perairan pantai, hingga ikan bawal, tongkol dan tuna yang tersebar di perairan lepas pantai.

Dalam rangka pemanfaatan kekayaan sumberdaya pesisir dan kelautan Kabupaten Nunukan ini, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan harus dilakukan secara efisien dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

b) Budidaya Tambak

Dilihat dari kondisi fisik lahan terutama dengan keberadaan hutan mangrove yang cukup luas, Kabupaten Nunukan sangat potensial untuk pengembangan kegiatan budidaya tambak. Pada umumnya peningkatan produktifitas tambak di Kabupaten Nunukan harus dilakukan secara intensifikasi mengingat usaha yang dilakukan masih bersifat tradisional dengan tingkat kematian udang yang tinggi. Pengembangan usaha pertambakan dilakukan melalui :

- 1.1) Penyediaan benih yang berkualitas dan terjamin kontinuitasnya melalui panti - panti pembenihan (*hatchery*).
- 1.2) Perbaikan konstruksi tambak (pematang, saluran pemasukan dan pengeluaran air) dan sirkulasi air tambak sehingga kualitasnya terjamin.
- 1.3) Peningkatan padat penebaran benih dengan pemberian pakan yang proposional.
- 1.4) Pengendalian kesuburan tambak dan penyakit melalui pemupukan dan pengapuran.
- 1.5) Penyediaan pakan dan obat - obatan yang memadai
- 1.6) Penyuluhan dan bimbingan mengenai budidaya tambak yang memperhatikan kelestarian lingkungan
- 1.7) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penanganan pasca panen, pemasaran dan distribusi hasil tambak.

c) Budidaya Air Laut

Kesesuaian lokasi untuk kegiatan budidaya air laut dilakukan berdasarkan parameter sebagai berikut :

- 1.1) Keterlindungan lokasi yang dimaksud dari dinamika perairan laut, cukup baik karena berada pada perairan yang semi tertutup.
- 1.2) Indikasi pencemaran yang dapat mengganggu kegiatan budidaya, relatif tidak ada.
- 1.3) Kondisi pasang surut memiliki fluktuasi yang cukup baik, sehingga meskipun terjadi pasang surut maksimum, lokasi budidaya masih tetap dapat tergenang.
- 1.4) Arus yang tidak terlalu besar, sehingga sangat mendukung bagi kehidupan organisme kerang - kerangan.
- 1.5) Oksigen terlarut (DO) dilokasi berkisar antara 6,8 - 6,9 mg/l, yang artinya sangat baik untuk kegiatan budidaya laut
- 1.6) Salinitas yang terdapat dilokasi, yaitu antara 25 - 26%, berada pada kisaran yang baik untuk kegiatan budidaya laut

Faktor - faktor non teknis juga cukup mempengaruhi pengembangan kegiatan budidaya laut di Kabupaten Nunukan, seperti penyediaan sarana produksi, penanganan pasca panen dan pemasaran.

Saat ini usaha budidaya air laut yang mulai berkembang di Kabupaten Nunukan adalah budidaya rumput laut. Selain rumput laut berdasarkan hasil analisa, Kabupaten Nunukan khususnya di perairan Selatan Pulau Tinabasan dan sebelah Timur Pulau Sinelak juga memiliki potensi yang cukup baik untuk pengembangan budidaya laut lainnya seperti sistem jaring apung, usaha budidaya tiram dan kerang dara.

2. Sektor Pertanian

Saat ini produk perkebunan khususnya kelapa sawit cukup menjadi primadona di Kabupaten Nunukan dan sangat penting sebagai bahan dasar bagi kebutuhan bahan pangan dan bahan baku industri. Minat investor pada sektor ini juga cukup besar dan realisasi pengembangan perkebunan juga sangat tinggi. Adapun jenis tanaman perkebunan lain yang telah diusahakan dan minat pengembangannya tinggi, antara lain jenis tanaman kelapa sawit dan kakao.

Pengembangan sektor perkebunan di Kabupaten Nunukan pada masa yang akan datang masih sangat diharapkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama untuk jenis - jenis tanaman yang mempunyai prospek pasar baik dan dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk pengembangan industri seperti kelapa sawit, kakao dan kelapa. Jenis tanaman kelapa sawit merupakan jenis tanaman andalan secara nasional, mempunyai keterkaitan kedepan untuk berkembangnya kegiatan industri dan berorientasi ekspor, mempunyai kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja serta dalam pelaksanaan pengembangannya dapat melibatkan partisipasi masyarakat desa. Demikian juga dengan pengembangan jenis tanaman kakao dan kelapa juga mempunyai keunggulan untuk dikembangkan dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi Kabupaten Nunukan.

Untuk itu, dalam rangka pengembangan pertanian tanaman perkebunan di Kabupaten Nunukan perlu diketahui seberapa besar ketersediaan lahan yang dapat dikembangkan untuk kegiatan tersebut, khususnya pengembangan jenis tanaman kelapa sawit, kelapa dan kakao. Analisis kesesuaian pengembangan tanaman perkebunan dilakukan dengan menggunakan kriteria - kriteria sebagai berikut :

- a) Kawasan pertanian dengan ketinggian <2.000 meter di atas permukaan laut;
- b) Kawasan dengan lereng <45 %;
- c) Kedalaman efektif lapisan tanah > 50cm;
- d) Berada diluar kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas.

Berdasarkan hasil analisa, tanaman perkebunan antara lain kelapa sawit, karet, kakao, pisang, tebu, kelapa, kopi dan cengkeh.

Tabel 2.5
Luas Lahan Potensial Tanaman Perkebunan (Ha)

No.	Jenis Komoditi	Luas Lahan (Ha)
1	Karet	241.904,39
2	KelapaSawit	242.751,54
3	Kelapa	210.489,32
4	Kakao	210.489,32
5	Kopi	210.489,32
6	Cengkeh	210.489,32
7	Pisang	209.642,17
8	Tebu	155.500,75
	Jumlah	

Sumber data : Hasil Analisa

Disamping untuk jenis komoditas unggulan diatas, juga dinilai jenis tanaman perkebunan lainnya yang sesuai untuk dikembangkan, yaitu jenis tanaman buah - buahan, antara lain : tanaman pisang dan tebu. Dalam pengelolaan lahan yang potensial tersebut diperlukan suatu mekanisme pengaturan ruang diantaranya :

- 1.1) Pengembangan perkebunan harus dikaitkan dengan pengembangan masyarakatnya. Pola pengembangan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sebenarnya dapat digunakan, dimana investor dan masyarakat bekerjasama saling menguntungkan. Investor sebagai pemodal mengelola kebun inti, sedangkan masyarakat mengelola lahan plasma dalam besaran 2 s/d 5 hektar. Masyarakat yang mempunyai kemampuan terbatas, baik dalam modal, keterampilan dan pengetahuan dapat dibantu oleh investor. Bantuan modal dapat diberikan melalui penyediaan bibit, pupuk dan sebagainya. Sedangkan keterampilan dan pengetahuan, dapat diadakan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat oleh investor.
- 1.2) Dalam pengembangan perlu adanya pengendalian usaha perkebunan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga.
- 1.3) Tidak diperkenankan adanya bangunan, kecuali bangunan penunjang unit perkebunan seperti pabrik, gudang, pembibitan dan perumahan karyawan.
- 1.4) Luas bangunan maksimum sebesar 2% dari luas perkebunan.
- 1.5) Perkebunan dengan luas < 25 ha, maka kepadatan maksimum lima rumah per hektar.
- 1.6) Pengaturan jalan untuk jalan produksi memiliki lebar badan jalan empat meter dan tidak boleh diperkeras.
- 1.7) Untuk jalan transportasi dengan lebar badan jalan enam meter diperkeras dengan batu, tidak diaspal.
- 1.8) Pengembangan perkebunan pada lahan plasma yang dikelola oleh masyarakat dapat dikaitkan dengan pengembangan peternakan.

a) Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering

Pengembangan tanaman pangan lahan kering di Kabupaten Nunukan sangat penting artinya bagi pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Beberapa produksi pertanian telah dikembangkan, antara lain tanaman padi, jagung, kacang – kacangan dan tanaman pertanian lainnya, walaupun keseluruhan produksi belum maksimal. Beberapa hasil produksi tanaman pangan lahan kering umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sebagian dijual ke pusat perkotaan.

Pengembangan tanaman pangan lahan kering di Kabupaten Nunukan pada masa mendatang masih tetap harus diperbesar, terutama untuk mendukung ketahanan dalam bidang pangan (*food security*) sehingga dapat menghilangkan ketergantungan terhadap daerah sekitarnya. Jika dukungan lahan dan sumberdaya manusia memadai, Kabupaten Nunukan juga dapat dijadikan sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia.

Kawasan yang potensial untuk pengembangan tanaman pangan lahan kering tersebut menyebar di wilayah Kecamatan Nunukan yaitu di Kecamatan Sebuku, Sembakung, Lumbis dan Krayan. Namun, kawasan potensial yang berada di kawasan TNKM tidak direkomendasikan untuk dikembangkan dalam skala besar, kecuali untuk pertanian

penduduk yang telah bermukim di kawasan tersebut. Hal ini disebabkan kawasan ini merupakan kawasan Konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang yang perlu dijaga kelestariannya, disamping juga sebagai kawasan hutan lindung.

Dalam pengelolaan lahan potensial pengembangan tanaman pangan lahan kering tersebut diperlukan suatu mekanisme pengaturan ruang diantaranya perlu adanya perluasan pengembangan tanaman pangan lahan kering secara optimal sesuai dengan kesesuaian lahan, dalam rangka menjaga ketahanan dalam bidang pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain. Dalam pengembangannya perlu mempertimbangkan hal - hal berikut :

- 1.1) diperkenankan adanya budidaya peternakan, permukiman perdesaan dan kegiatan budidaya pertanian lainnya
- 1.2) permukiman perdesaan memiliki kepadatan maksimum lima rumah per hektar

b) Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah

Pengembangan tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Nunukan secara makro juga bertujuan untuk mendukung ketahanan di dalam bidang pangan (*food security*) dan ketergantungan terhadap daerah lain, yaitu melalui pengembangan tanaman pangan padi sawah. Sedangkan secara mikro, dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah sebenarnya sudah diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Nunukan, berdasarkan hasil analisa, luas lahan yang potensial untuk pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan lahan basah /padi sawah adalah 77.337,17 hektar, lahan sesuai bersyarat seluas 63.611,44 hektar dan lahan tidak sesuai seluas 1.285.419,39 hektar.

Kawasan yang potensial untuk tanaman pangan lahan basah menyebar di Kecamatan Sebatik, Nunukan, Sembakung, Lumbis dan Krayan. Kawasan potensial untuk tanaman pangan lahan basah yang berada di Kecamatan Krayan tidak direkomendasikan untuk dikembangkan, kecuali secara terbatas dikembangkan oleh penduduk yang bermukim dikawasan tersebut. Hal ini dilakukan mengingat kawasan tersebut berada dalam Kawasan konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang.

3. Sektor Pariwisata

Kawasan pariwisata di Kabupaten Nunukan diarahkan untuk pengembangan bagi kegiatan pariwisata. Kawasan pariwisata yang akan dikembangkan adalah kawasan yang mempunyai potensi wisata dan selanjutnya dapat menarik wisatawan mancanegara.

Kabupaten Nunukan memiliki potensi budaya dan pariwisata yang tak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Kekuatan wisata seperti obyek wisata alam dan buatan merupakan andalan daerah wisata Nunukan.

Tabel 2.6
Obyek Wisata Unggulan Kabupaten Nunukan

No	Nama & Lokasi Obyek Wisata	Kategori
1	Air terjun Sungai Binusan	Alam
2	Pantai Ecing	Alam
3	Pantai Sedadap	Alam
4	Wana wisata yang didominasi oleh vegetasi spesifik hutan dataran rendah	Alam
5	Agro wisata tambak dan ombak laut di Pulau Tinabasan	Alam
6	Pantai Batu Lamampu	Alam
7	Agrowisata Sungai Nyamuk	Alam
8	Wisata Budaya Suku Dayak Murud (Tegalen)	Budaya
9	Ekowisata Taman Nasional Kayan Mentarang	Alam
10	Pembuatan Garam gunung terletak dihulu Sungai Desa Long Layu	Alam
11	Konservasi Perairan Daerah Setabu	Alam
12	Giram Tutung Mansalong	Alam

Sumber data : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

4. Sektor Industri

Terdapat beberapa jenis industri prospektif di Kabupaten Nunukan diharapkan dapat menjadi penggerak utama perekonomian disamping kegiatan pertanian, perikanan dan perkebunan. Pengembangan industri di Kabupaten Nunukan diarahkan pada industri strategis untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak yang berorientasi ekspor dan berbasis pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan serta industri yang mengembangkan kegiatan ekonomi daerah.

Jenis - jenis industri yang direncanakan dan memiliki potensi pengembangan yang cukup baik berupa : industri makanan dan minuman, kelapa sawit/CPO, pengolahan kayu, pengalengan ikan dan industri kerajinan rakyat. Adapun arahan lokasi untuk pengembangan kegiatan industri adalah sebagai berikut :

- a) Untuk zona - zona industri diarahkan pada lokasi - lokasi yang dekat dengan lokasi bahan baku, yaitu pada kawasan perkebunan, sedangkan industri perikanan diarahkan di lokasi Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.
- b) Untuk lokasi Industri kerajinan rakyat diarahkan pada desa - desa di Kecamatan.
- c) Untuk jenis industri penunjang pariwisata, dapat dikembangkan dekat dengan obyek - obyek wisata dan pusat - pusat kegiatan.

5. Sektor Pertambangan

Pengembangan pertambangan di Kabupaten Nunukan diarahkan pada pertambangan golongan strategis (golongan A), golongan vital (golongan B) dan bahan galian (golongan C).

- a) Bahan galian golongan strategis (golongan A); pertambangan batubara di Sei Manggaris pada areal konsesi pertambangan PT. Dewa Ruci Mandiri, PT. Pipit Mutiara Jaya, PT. Duta Tambang dan PT. Mandiri Inti Perkasa di Kecamatan Sembakung, sedangkan pertambangan minyak bumi di Sebaung pada areal PT. MEDCO.
- b) Bahan galian vital (golongan B); pertambangan emas oleh PT. Sago di hulu sungai Sebuku Kecamatan Sebuku, hulu Sungai Sembakung, sedangkan penambangan gips diarahkan di Pulau Nunukan serta disekitar Sungai Sedadap dan Sungai Sembakung.
- c) Bahan galian (golongan C); pertambangan bahan galian pasir kuarsa diarahkan di Krayan dan bahan galian batu gunung diarahkan di Pulau Nunukan.

Potensi Pengembangan Kegiatan ekonomi

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033, potensi pengembangan kegiatan ekonomi di kabupaten ini yaitu:

1. Kebijakan penataan ruang kabupaten diarahkan untuk pengembangan sentra-sentra pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan terkait dengan pengembangan agroindustri, dimana didalam pengembangan sentra-sentra menuju pengembangan agroindustry tersebut perlu menetapkan strategi danataranya :
 - a. Menetapkan pengembangan klaster ekonomi;
 - b. Memantapkan ekonomi utama yang telah ada dan diversifikasi;
 - c. Mengoptimalkan distribusi spasial kegiatann ekonomi;
 - d. Memperkuat keterkaitan internasional dalam pemasaran produk lokal.
2. Perekonomian Kabupaten Nunukan hingga saat ini masih sangat tergantung pada sektor primer, terutama sektor perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang merupakan sub sector pertanian dalam arti luas disamping sub sektor perkebunan dan tanaman pangan. Disamping itu sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten, namun mengingat sektor ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sektor industri pengolahan (diversifikasi) sebenarnya memiliki peluang sangat besar untuk dikembangkan mengingat *row material* yang tersedia cukup banyak apalagi berbicara pada sub sektor perkebunan dan sub sektor perikanan. Namun sektor ini tidak dapat berjalan optimal mengingat tidak didukung oleh sumber energi listrik dan air yang memadai. Sehingga kedua sub sektor ini hanya dapat mengelola *row material* yang langsung dijual ke pasar akibatnya nilai tambah sebuah produk tidak ada sehingga disisi penerimaan pendapatan baik masyarakat maupun upaya peningkatan PAD menjadi sangat kecil.

3. Pengembangan perekonomian juga dihadapkan pada karakteristik wilayah mengingat jarak dan keterhubungan yang belum dapat dilakukan melalui jalan darat dan air dilakukan melalui udara dalam bentuk. Dampaknya bagi perekonomian adalah harga produk olahan dan manufaktur akan cenderung mahal apabila didatangkan dari luar wilayah karena *diseconomies of scale* jalur transportasi dan pasokan energi. Kondisi demikian terjadi pada daerah perdesaan dan perbatasan. Pada daerah perkotaan, peningkatan *economies of scale* jalur transportasi dan pasokan energi menyebabkan harga produk olahan dan manufaktur cenderung lebih murah. Khusus pada daerah perbatasan, harga produk olahan dan manufaktur yang mahal apabila didatangkan dari luar wilayah karena alasan jalur transportasi dan pasokan energi dihadapkan pada produk impor dari wilayah Malaysia yang lebih murah karena adanya tingkat skala ekonomi yang lebih baik pada kedua aspek tersebut. Oleh karena itu, penduduk daerah perbatasan akan lebih memilih untuk memperoleh produk-produk jadi dari Malaysia yang tersedia dengan biaya yang murah.
4. Kabupaten Nunukan memiliki kawasan konservasi yang masuk dalam *Heart of Borneo* yaitu Taman Nasional Kayan Mentarang yang notabene berada pada wilayah Kecamatan di Krayan dan Lumbis Ogong. Implikasinya bagi perekonomian daerah adalah karena merupakan kawasan konservasi, maka nilai ekonomis kawasan ini terletak pada keanekaragaman hayati, yang terdiri dari flora dan fauna dan sekaligus pula berfungsi sebagai salah satu paru-paru dunia. Kekayaan keanekaragaman hayati membuat daya tarik kepariwisataan dan kebudayaan yang cukup tinggi. Daerah krayan misalnya memiliki pesona daerah yang eksotik khususnya alamnya dan budayanya yang sangat kuat dimasyarakat. Pertanian organic merupakan potensi pariwisata yang memiliki daya tarik tersendiri. Disamping itu wilayah Lumbis Ogong dapat dikembangkan wisata arung jeram karena memiliki potensi sungai yang aliran airnya deras dan menantang untuk dikelola secara arif dan bijaksana. Potensi-potensi ini tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dapat dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang berkelanjutan.

Kawasan pedalaman sebagai basis produksi Pertanian, perkebunan dan penguatan ketahanan pangan.

Kabupaten Nunukan, yang terdiri dari beberapa kecamatan diwilayah pedalaman memiliki potensi pengembangan yang kuat pada sektor pertanian dan perkebunan serta diversifikasi industri yang mengolah hasil pertanian dan perkebunan. Dari sisi aksesibilitas, kawasan ini merupakan kawasan yang paling sulit dijangkau karena umumnya masih berupa kawasan hutan dengan kantong-kantong pemukiman yang berdiri sendiri dan berada di sempadan sungai hal ini terjadi akibat bahwa Sungai merupakan jalur transportasi utama bagi masyarakat dipedalaman.

Kawasan pesisir sebagai basis produksi pertanian, perikanan, serta perdagangan.

Kawasan pesisir merupakan kawasan yang paling berpotensi untuk dikembangkan dengan cepat. Skala ekonomi akan tercipta lebih cepat dibandingkan kawasan pedalaman karena secara alamiah aktivitas / kegiatan perekonomian telah tercipta dan berjalan di kawasan ini. Topografi tanah yang cenderung datar memudahkan pembangunan jalur jalan darat. Posisi yang dekat dengan laut menyebabkan aksesibilitas wilayah dapat ditempuh pula melalui pelabuhan laut dengan frekuensi terus menerus apalagi posisi strategis Nunukan berada di Alur Lalu Libtas Laut ALKI II. Arus barang dan jasa serta arus orang akan sangat banyak mengingat perdagangan lintas Negara yang telah dilakukan sejak lama (kearifan local) memiliki potensi untuk dikembangkan secara legal khususnya pada kawasan-kawasan perbatasan Negara yaitu pulau sebatik.

National Park Kayan Mentarang sebagai kawasan konservasi.

Penetapan sebagian kawasan hutan sebagai TNKM yang berada didalam HoB (*Heart of Borneo*) memberikan implikasi pengendalian atau menjadikan kawasan di dalamnya sebagai kawasan konservasi yang harus dikendalikan pemanfaatannya. Dalam jangka panjang, TNKM diharapkan menjadi bagian dari kalender internasional untuk pengembangan pariwisata mengingat kementerian pariwisata telah menyusun masterplan pengembangan KSPN (Kawasan dan Strategis Pariwisata Nasional) Taman Nasional Kayan Mentarang. Disamping itu Taman Nasional Kayan Mentarang untuk yang kaya akan keanekaragaman Hayati memiliki potensi untuk kegiatan penelitian keanekaragaman flora dan fauna, promosi konservasi hutan tropis, dan wisata hutan. Hal ini tentunya mendukung pembangunan berkelanjutan.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Nunukan dapat diidentifikasi potensi rawan bencana yang terjadi di Kabupaten Nunukan antara lain :

1. Bencana Banjir

Permasalahan banjir merupakan isu lingkungan yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Nunukan terutama pada saat musim hujan. Di Kabupaten Nunukan, kondisi yang sangat mengkhawatirkan adalah fenomena frekuensi kejadian banjir. Bukan hal baru lagi hampir tiap tahun Kecamatan Sembakung terkena banjir.

Pada akhir bulan Maret 2011, terjadi bencana banjir pada 18 desa yang di buat dalam tiga kategori atau tingkatan, sesuai sumber data pihak kecamatan yaitu **Sangat parah**, terdiri dari enam desa yaitu Jumlah Rumah: 856 unit, Jumlah KK: 1215, Jumlah SAB: 1013 **Parah**, terdiri dari tujuh desa yaitu Jumlah Rumah: 309 unit, Jumlah KK: 580, Jumlah SAB: 500 **Sedang**, terdiri dari lima desa yaitu Jumlah Rumah: 221 unit, Jumlah KK: 378, Jumlah SAB: 250. Berdasarkan dari laporan dari Sanitarian Puskesmas Atap bencana banjir di Kecamatan Sembakung tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Tetapi dampak dan kerugian yang dialami akibat bencana banjir ini adalah maslaah penyakit, dan terjadinya gagal panen atau luas lahan sawah yang rusak akibat banjir

Faktor - faktor penyebab banjir di Kabupaten Nunukan antara lain:

- 1.1) Curah hujan yang tinggi dan intensitas hujan tinggi;
- 1.2) Karakteristik Topografi wilayah;
- 1.3) Dimensi sungai belum mampu menampung debit banjir;
- 1.4) Penyempitan dan pendangkalan akibat sampah dan sedimentasi;
- 1.5) Pengaturan tata air sungai/ drainase belum maksimal;
- 1.6) Pemanfaatan tata guna lahan/ perubahan tata guna lahan memperkecil daerah resapan air;
- 1.7) Kegiatan ulah manusia seperti perambahan hutan, pemotongan bukit dan kegiatan pertambangan, pemukiman di bantaran sungai;
- 1.8) Pengaruh gelombang pasang;
- 1.9) Penanganan banjir yang terhambat karena masalah sosial dan kendala teknis;
- 1.10) Sarana pengendali banjir eksisting belum optimal.

Upaya - upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penanganan banjir secara terpadu melalui metode struktur dan metode non struktur adalah:

- 1.1) Penanaman pohon di bantaran sungai sungai secara berkelanjutan
- 1.2) Relokasi perumahan penduduk ke daerah yang lebih tinggi
- 1.3) Mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk membentuk Tim Khusus Penanganan Banjir Lintas Negara

2. Longsor

Kawasan potensi tanah longsor kurang lebih seluas 20.398 hektar meliputi Kecamatan Sei Manggaris, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sembakung Atulai.

3. Abrasi

Kawasan potensi abrasi kurang lebih seluas 1.163 hektar dan tersebar di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.

4. Konflik Gajah Kalimantan

Kabupaten Nunukan merupakan satu-satunya kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki habitat bagi satwa gajah, yang lebih dikenal dengan nama Gajah Kerdil Kalimantan (*Borneo Pygmy Elephant*) dengan nama latin *Elephas maximus borneensis*. Menurut sejarahnya, gajah di Kalimantan tercatat sejak 1930-an dari perkumpulan Hindia Belanda dan menurut beberapa versi merupakan gajah yang didatangkan dari luar Kalimantan.

Dari berbagai manuskrip tentang asal usul gajah yang masih dipertahankan adalah hasil analisis DNA gajah sabah, diketahui bahwa sekitar 300.000 tahun yang lalu gajah Kalimantan terisolasi dari populasi gajah lainnya di daratan Asia lainnya. Dan dari hasil analisa tes DNA bahwa gajah Kalimantan berbeda dengan sub spesies gajah di Sumatra dan daratan Asia lainnya, artinya Gajah Kalimantan adalah binatang pribumi.

Konflik gajah dengan manusia di Kecamatan Sebuku dengan Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan sudah terjadi sejak Tahun 2005, hal ini disebabkan oleh berubahnya atau hilangnya habitat gajah Kalimantan menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan atau HPH. Seiring semakin terdesaknya kehidupan gajah akibat konversi lahan menyebabkan terjadinya benturan kepentingan berupa konflik antara manusia dengan gajah. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- 1.1) Membentuk satuan tugas pengusir gajah di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulin Onsoi yang terdiri dari perwakilan desa - desa yang terkena konflik;
- 1.2) Pengalokasian lahan/tata ruang bagi gajah;
- 1.3) Sosialisasi ke masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan menangani perilaku gajah yang bekerjasama dengan WWF dan BKSDA Kalimantan Timur;
- 1.4) Melakukan studi habitat dan perilaku gajah yang bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

2.1.4 Demografi

A. Struktur Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Pembangunan di suatu wilayah tidak terlepas dari peran serta penduduknya sebagai subjek pembangunan, demikian pula dengan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Jumlah penduduk yang besar di satu sisi merupakan suatu potensi yang dapat mendorong keberhasilan suatu pembangunan jika kuantitas tersebut juga diimbangi dengan kualitas yang tinggi pula. Namun disisi lain jumlah penduduk yang tinggi dapat pula menimbulkan suatu masalah jika penyebarannya kurang merata.

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Jika dilihat secara umum penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2017 berjumlah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 193.390 jiwa.

Tabel. 2.7
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Pertumbuhan 2016- 2017 (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Krayan Selatan	2.111	2.079	2.045	2.010	1970	-1.99
3	Krayan Tengah	-	-	-	-	-	-
2	Krayan	6.902	6.823	6.735	6.642	6533	-1.64
	Krayan Timur	-	-	-	-	-	-
	Krayan Barat	-	-	-	-	-	-
3	Lumbis Ogong	5.176	5.209	5.235	5.256	5263	0.13
4	Lumbis	4.870	4.901	4.926	4.945	4951	0.12
5	Sembakung Atulai	-	2.722	2.593	2.620	2640	0.76
6	Sembakung	8.459	5.844	6.069	6.132	6178	0.75
7	Sebuku	10.826	11.424	12.037	12.672	13305	5.00
8	Tulin Onsoi	7.120	7.513	7.917	8.334	8751	5.00
9	Sei Manggaris	8.262	8.711	9.173	9.650	10125	4.92
10	Nunukan	56.165	59.223	62.358	65.602	68829	4.92
11	Nunukan Selatan	17.043	18.717	20.527	22.491	24578	9.28
12	Sebatik Barat	7.380	7.606	7.837	8.075	8306	2.86
13	Sebatik	4.375	4.510	4.646	4.787	4924	2.86
14	Sebatik Timur	11.794	12.156	12.524	12.904	13274	2.87
15	Sebatik Tengah	6.909	7.121	7.337	7.559	7776	2.87
16	Sebatik Utara	5.319	5.483	5.648	5.820	5987	2.87
	Kabupaten Nunukan	162.711	170.042	177.607	185.499	193.390	4.25

Sumber data : Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2018.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Nunukan selama tahun 2016-2017 adalah 4,25 % dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Nunukan Selatan yaitu sebesar 9,28 %. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dipengaruhi oleh adanya aktivitas ekonomi di Kecamatan Nunukan Selatan yang memadai khususnya yang bergerak disektor perikanan sub sector perikanan budidaya rumput laut. Sedangkan pertumbuhan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Krayan Selatan sebesar -1,99 %.

Pertumbuhan penduduk yang terjadi juga merupakan dampak keberhasilan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Nunukan sehingga menarik minat pendatang baru untuk tinggal di kabupaten ini. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah semakin lengkapnya berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat, kemudian dibukanya lapangan kerja di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan industri pengolahan kayu, sektor jasa dan sector perikanan khususnya perikanan budidaya rumput laut.

2. Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan. Berdasarkan pola persebaran penduduk Kabupaten Nunukan menurut luas wilayah terlihat belum merata, sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan. Dari 19 kecamatan yang ada terlihat bahwa Kecamatan Sebatik Timur memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 338,88 jiwa/km² diikuti oleh Kecamatan Sebatik Tengah dengan kepadatan 162,98 jiwa/km². Sedangkan untuk kecamatan lainnya, kepadatan penduduk yang ada hanya berkisar antara 1,12 – 135,21 jiwa/km².

Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, terlihat bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk laki- laki di Kabupaten Nunukan masih lebih banyak dibanding perempuan. Ini terlihat dari rasio jenis kelamin 113,68 artinya pada setiap 100 orang perempuan terdapat 113-114 orang laki-laki.

Tabel 2.8
Kepadatan Penduduk Tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan

No	Kecamatan	Jml Kelurahan /Desa	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Krayan Selatan	24	1757.66	1970.00	1.12
2	Krayan	65	1834.74	6533.00	3.56
3	Lumbis Ogong	49	3357.01	5263.00	1.57
4	Lumbis	28	290.23	4951.00	17.06
5	Sembakung Atulai	10	277.72	2640.00	9.51
6	Sembakung	10	1764.94	6178.00	3.50
7	Sebuku	10	1608.48	13305.00	8.27
8	Tulin Onsoi	12	1513.36	8751.00	5.78
9	Sei Manggaris	4	850.48	10125.00	11.91
10	Nunukan	5	564.5	68829.00	121.93
11	Nunukan Selatan	4	181.77	24578.00	135.21
12	Sebatik Barat	4	93.27	8306.00	89.05
13	Sebatik	4	51.07	4924.00	96.42
14	Sebatik Timur	4	39.17	13274.00	338.88
15	Sebatik Tengah	4	47.71	7776.00	162.98
16	Sebatik Utara	3	15.39	5987.00	64.19
	Kabupaten Nunukan	240	14.247,5	193.390,00	13.50

Sumber data : Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2018.

Terdapat kesenjangan persebaran penduduk, terutama antara kecamatan yang berada dipedalaman atau perbatasan Daratan dengan Kecamatan Perbatasan dikepulauan. Kemudian factor lain bahwa kepadatan penduduk akan dipengaruhi oleh factor kondisi geografis, dimana kecamatan Lumbis Ogong dan Kecamatan di Wilayah Krayan memiliki totografi bergunung dengan kemiringan lereng sebagian besar diatas 40 %, cukup sulit untuk pengembangan permukiman. Hal ini sangat berbeda dengan Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Di Pulau Sebatik yang memiliki tofografi yang landau sehingga mudah untuk pengembangan permukiman.

3. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Pendudukan Kabupaten Nunukan dengan Komposisi usia 0-4, 5-9 dan 10-14 mempunyai jumlah paling tinggi. Hal ini didapat dilihat dari table dibawah. Kondisi ini berarti bahwa penduduk usia muda cukup dominan di Kabupaten ini. Komposisi penduduk menurut umur ini memperlihatkan bahwa usia produktif harus menanggung warga yang sudah tidak / belum produktif. Semakin besar proporsi [penduduk usia tidak produktif maka akan semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Tebel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Nunukan

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempaun	Jumlah
0-4	11.236	10.393	21.629
5-9	10.866	10.202	21.068
10-14	10.797	10.100	20.897
15-19	9.226	8.480	17.706
20-24	8.383	7.545	15.928
25-29	8.841	8.030	16.871
30-34	9.322	8.024	17.346
35-39	8.748	7.300	16.048
40-44	7.482	6.169	13.651
45-49	5.670	4.401	10.071
50-54	4.319	3.297	7.616
55-59	2.939	2.250	5.189
60-64	2.138	1.785	3.923
65+	2.919	2.528	5.447
Jumlah/Total	102.886	90.504	193.390

Sumber data : Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2018.

4. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan disuatu daerah. Rasio jenis kelamin Kabupaten Nunukan selama 2013-2017 relatif tidak signifikan berbeda jauh antara laki-laki dan perempuan yakni 113 yang artinya bahwa terdapat 113 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Khusus untuk Kabupaten Nunukan Rasio Penduduknya lebih dominan jumlah penduduk laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kabupaten Nunukan Tahun 2017

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kelamin
Krayan Selatan	3.497	3.036	6.533	115.18
Krayan Tengah	-	-	-	-
Krayan Timur	1.035	935	1.970	110.70
Krayan Barat	-	-	-	-
Lumbis Ogong	2.679	2.584	5.263	103.68
Lumbis Sembakung	2.583	2.368	4.951	109.08
Atulai	1.348	1.292	2.640	104.33
Sembakung	3.234	2.944	6.178	109.85
Sebuku	7.255	6.050	13.305	119.92
Tulin Onsoi	5.014	3.737	8.751	134.17
Sei Manggaris	5.617	4.508	10.125	124.60
Nunukan Selatan	36.311	32.518	68.829	111.65
Nunukan Tengah	13.337	11.241	24.578	118.65
Sebatik Barat	4.430	3.876	8.306	114.29
Sebatik Timur	2.640	2.284	4.924	115.59
Sebatik Tengah	6.764	6.510	13.274	103.90
Sebatik Utara	4.104	3.672	7.776	111.76
Sebatik Utara	3.038	2.949	5.987	103.02
Kabupaten Nunukan	102.886	90.504	193.390	113.68

Sumber data : Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2018.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi secara makro diartikan sebagai perkembangan kegiatan usaha dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat diketahui melalui angka PDRB, untuk menghilangkan pengaruh fluktuasi harga dalam penghitungan maka

yang digunakan adalah atas dasar harga konstan. Nilai PDRB dapat menggambarkan sector yang berkontribusi paling besar dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan, sedangkan PDRB per kapiota dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan pada tahun 2017 sebesar 6,78%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sector-sektor penunjang utama seperti pertambangan yang perlahan-lahan sedikit membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Sector pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Nunukan tahun 2017 dengan shrae sebesar 47,96%. Jika dilihat kenaikan laju pertumbuhannya, sector pertambangan menjadi sector dengan kenaikan laju pertumbuhan tertinggi disbanding sector lain.

Struktur perekonomian Kabupaten Nunukan pada tahun 2012-2017 terlihat masih bertumpuh pada eksploitasi sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Hal ini tercermin dari nilai distribusi PDRB atas dasar harga berlaku yang masih didominasi oleh kategori pertambangan penggalian dan pertanian dengan nilai masing-masing 47,96 persen dan 21,59 persen. Hali ini menunjukkan masih diperlukan adanya dorongan dalam proses transformasi ekonomi Kabupaten Nunukan dari sector primer ke sector sekunder dan tersier.

Berikut disajikan Perkembangan perekonomian di Kabupaten Nunukan yang ditunjukkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Angka Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017
Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Nunukan

No	Sektor	2013 Jumlah Rupiah	2014 Jumlah Rupiah	2015 Jumlah Rupiah	2016 Jumlah Rupiah	2017 Jumlah Rupiah
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.236.193,8	2.582.614,5	2.834.848,6	3.130.092,6	3.392.647,6
2	Pertambangan dan Penggalian	5.531.253,3	6.039.226,6	5.908.129,8	5.808.442,3	6.163.634,8
3	Industri Pengolahan	960.716,7	1.021.358,4	1.089.009,7	1.135.642,3	1.176.023,3
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.654,6	2.932,4	3.356,9	3.745,8	3.984,3
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.928,8	6.289,5	6.479,2	6.896,1	7.269,2
6	Konstruksi	773.974,2	791.926,9	809.371,7	858.690,5	938.093,9
7	Perdagangan Besar dan Eceran	616.520,0	636.991,6	663.270,9	710.552,7	768.086,3
8	Transportasi dan pergudangan	215.559,7	244.188,8	262.997,3	270.912,4	289.620
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	109.634,1	116.469,1	124.440,7	133.368,8	145.838,1
10	Informasi dan Komunikasi	205.729,3	224.388,2	246.414,3	259.788,5	282.597,3
11	Jasa Keuangan dan Ausransi	37.976,2	39.189,3	41.810,4	44.502,5	46.362,9
12	Real Estate	68.407,6	71.507,8	74.827,4	77.652,5	80.234,8
13	Jasa Perusahaan	5.019,1	5.322,4	5.580,1	5.267,6	5.346,7
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	235.730,7	318.447,1	336.213,8	358.041,1	375.113,0
15	Jasa Pendidikan	133.200,0	151.630,3	171.251,1	178.632,1	188.682,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.470,9	2.624,2	2.928,2	3.154,4	3.352,0
17	Jasa Lainnya	42.849,0	44.709,2	49.326,4	53.844,6	56.775,0
	PDRB	11.183.813.817,9	12.299.816,3	12.630.456,6	13.039.226,8	13.923.661,1

Sumber : Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2018 dengan hasil olahan

Tabel 2.12
Nilai dan Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017
Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Nunukan

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		Jumlah Rupiah	%	Jumlah Rupiah	%	Jumlah Rupiah	%	Jumlah Rupiah	%	Jumlah Rupiah	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.503.166,4	18,56	3.147.511,7	20,30	3.249.519,9	20,94	3.758.995,0	22,76	4.280.519,2	21,59
2	Pertambangan dan Penggalian	7.111.112,9	52,72	7.960.065,3	51,35	7.441.393,1	47,95	7.400.094,1	44,80	9.509.584,3	47,96
3	Industri Pengolahan	1.059.984,6	7,86	1.190.262,4	7,68	1.290.246,3	8,33	1.368.236,9	8,28	1.502.398,9	7,58
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.286,4	0,02	2.526,2	0,02	3.504,4	0,02	4.356,3	0,03	5.004,3	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.850,4	0,04	6.266,0	0,04	6.617,4	0,04	7.252,5	0,04	8.071,9	0,04
6	Konstruksi	935.539,0	6,94	1.008.847,0	6,51	1.065.343,1	6,87	1.218.109,6	7,37	1.401.938,5	7,07
7	Perdagangan Besar dan Eceran	676.614,2	5,02	737.568,0	4,76	818.312,9	5,35	931.113,6	5,84	1.131.843,2	5,71
8	Transportasi dan pergudangan	248.370,6	1,84	294.441,3	1,90	333.151,5	2,13	356.912,0	2,15	404.021,0	2,04
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	123.880,2	0,92	134.363,6	0,87	149.594,7	0,96	167.857,7	1,02	191.010,0	0,96
10	Informasi dan Komunikasi	210.803,1	1,56	231.160,6	1,49	255.117,1	1,64	275.934,7	1,67	313.795,0	1,58
11	Jasa Keuangan dan Ausransi	45.921,9	0,34	49.629,4	0,32	54.645,1	0,36	61.614,8	0,38	67.789,9	0,34

12	Real Estate	69.963,5	0,52	73.121,5	0,47	77.370,0	0,50	82.871,0	0,50	88.526,7	0,45
13	Jasa Perusahaan	5.580,3	0,04	5.989,6	0,04	6.370,2	0,04	6.222,7	0,04	6.585,2	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	281.467,1	2,09	419.203,8	2,70	457.742,2	2,99	494.634,8	3,12	552.764,0	2,79
15	Jasa Pendidikan	161.229,8	1,20	188.791,1	1,22	221.835,2	1,43	252.860,6	1,53	277.988,0	1,40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.613,4	0,02	2.893,2	0,02	3.591,1	0,02	4.031,0	0,03	4.552,2	0,02
17	Jasa Lainnya	44.490,9	0,33	50.222,4	0,32	62.983,4	0,41	74.288,6	0,45	81.927,0	0,41
	PDRB	13.488.875,0	100,00	15.502.863,0	100,00	15.637.964,2	100,00	16.518.636,8	100,00	19.828.322,4	100,00

Sumber : Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2018 dengan hasil olahan

Tahun 2017 kategori pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi sebesar 47,96% hal ini naik jika dibandingkan pada dua tahun sebelumnya. Sektor pertambangan dan penggalian semakin tahun mengalami kenaikan dimana terjadi pemulihan ekonomi pada sektor ini. Jika terjadi gejolak pada kategori ini maka akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nunukan mengingat sector pertambangan dan penggalian penyumbang PDRB terbesar. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 6,78 % jika dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,24 %. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sektor-sektor penunjang utama seperti pertambangan yang perlahan-lahan sedikit membaik dibandingkan tahun sebelumnya.

Distribusi kategori pertambangan dan penggalian dari Tahun 2011 sampai 2016 terus mengalami penurunan namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi sector Minerba. Distribusi kategori ini pada Tahun 2015 mencapai 47,56%, padahal pada tahun - tahun sebelumnya terus berada diatas 50%.

Kategori sector pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2017 mengalami penurunan dari 22,76 menjadi 21,59 hal ini perlu dilakukan upaya untuk percepatan dalam proses diversifikasi produk pertanian menuju kepada industrialisasi sehingga meningkatkan daya saing produk dan harapannya dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditi tersebut.

Kondisi seperti inilah yang menjadi harapan bagi daerah baru yang sedang berkembang seperti Kabupaten Nunukan untuk lebih mengintensifkan diversifikasi komoditi unggulan menjadi komoditi yang memiliki nilai jual tinggi bukan *row material* melainkan menjadikan komoditi pertanian sebagai komoditi yang diap dijual atau dipasarkan melalui pengembangan industri pertanian dan perikanan sehingga kedepan Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak lagi memprioritaskan dan mengharapkan sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor unggulan didalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi mengingat sektor ini tidak dapat diperbaharui dan suatu saat sektor ini akan habis melainkan

pemerintah berupaya untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian sebagai kontribusi unggulan untuk peningkatan ekonomi sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD 2016-2021 yaitu "Mewujudkan Kabupaten Nunukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis agrobisnis menuju masyarakat yang maju aman adil dan sejahtera" .

2. Laju Inflasi Provinsi

Laju inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi menjadi salah satu aspek yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk.

Tabel 2.13
Nilai Inflasi rata-rata Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Inflasi Provinsi Kalimantan Utara	5,99	10,35	11,91	3,42	4,31

Sumber data : RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2021

Pada periode 2011 - 2016, laju inflasi Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan rata-rata 7,196%. Pada tahun 2012 inflasi Kalimantan Utara berada pada angka 5,99 dan mengalami peningkatan tahun 2014 yaitu pada posisi 11,9. Kondisi ini berarti harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Namun seiring waktu pada tahun 2015 inflasi cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 3,42, namun pada tahun 2016 kembali mengalami kenaikan sebesar 4,31.

3. PDRB Perkapita

PDRB per kapita digunakan untuk menunjukkan nilai PDRB per penduduk. PDRB per kapita digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. PDRB ADHK per kapita Kabupaten Nunukan selama tahun 2011 - 2016 menunjukkan pertumbuhan ekonomi per kapita yang relatif positif.

Tabel 2.14
PDRB ADKH Per Kapita Tahun 2013-2017
di Kabupaten Nunukan

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai PDRB (Juta Rp)¹	11.183.817	12.299.816	12.630.456	13.039.226	13.923.661
Jumlah Penduduk (ribu)¹	162.711	170.042	177.607	185.499	193.390
PDRB perkapita (Rp/jiwa)²	68.734.244	72.333.988	71.114.632	70.292.706	71.997.833

Sumber Data : 1. Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2014-2018
2. Data diolah berdasarkan Publikasi BPS 2014-2018

Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kapita. Pada Tahun 2013 PDRB per kapita penduduk Kabupaten Nunukan sebesar 67,81 juta. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 91,17 juta pada Tahun 2014 dan pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 102,53 Juta hal ini disebabkan seiring dengan pemulihan sector pertambangan dan penggalian yang mengalami peningkatan sebesar 47,96 % dan sector-sektor lainnya yang juga mengalami peningkatan diantaranya sector pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor jasa dan konstruksi sehingga terjadi peningkatan pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Nunukan.

Tabel 2.15
PDRB ADHB Per Kapita Tahun 2013-2017
di Kabupaten Nunukan

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai PDRB (Juta Rp)¹	11.034.111	15.502.783	15.517.931	16.518.636	19.828.322
Jumlah Penduduk (ribu)¹	162.711	170.042	177.607	185.499	193.390
PDRB perkapita (Rp/jiwa)²	67.814.167	91.170.031	87.372.293	89.049.730	102.530.234

Sumber Data : 1. Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2014-2018
2. Data diolah berdasarkan Publikasi BPS 2014-2018

4. Indeks Gini/Koefisien Gini

Indeks gini/koefisien gini merupakan salah satu indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan atau dengan kata lain indikator pengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing - masing kelompok penduduk. Angka koefisien gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Angka koefisien gini yang semakin mendekati nol berarti dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati 1, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar

Tabel 2.16
Indeks Gini Kabupaten Nunukan Tahun 2013– 2017

Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017
Nunukan	0,361	0,306	0,337	0,280	0,284
Kalimantan Utara	0,33	0,33	0,314	0,305	n/a
Nasional	0,41	0,41	0,402	0,394	n/a

Sumber data : Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2014-2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indeks gini Kabupaten Nunukan mengalami perbaikan dari Tahun 2013 sebesar 0,361 dan pada tahun 2015 sebesar 0,306 hingga pada tahun 2017 terus mengalami penurunan sebesar 0,284. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi masih dalam kategori ketimpangan rendah dan semakin kesenjangan itu semakin kecil dari tahun ke tahun antara 0,280 – 0,284. Koefisien gini Kabupaten Nunukan masih lebih kecil dibandingkan dengan koefisien gini Provinsi Kalimantan Utara dan tingkat nasional. Artinya kondisi distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Nunukan masih dapat dikatakan lebih baik dibandingkan rata-rata wilayah lain di Indonesia.

5. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan (Jumlah Penduduk Miskin)

Kemiskinan masih menjadi persoalan prioritas untuk diselesaikan di beberapa wilayah di Indonesia mengingat kemiskinan erat hubungannya dengan kesejahteraan hidup. Indikator ini menggambarkan penduduk yang telah berada di atas garis kemiskinan. Pada Tahun 2013, persentase penduduk miskin Kabupaten Nunukan mencapai 9,51 % atau setara dengan 14,94 ribu jiwa dari total penduduk. Persentase penduduk miskin tahun 2014-2015 cenderung mengalami penurunan hingga 5,25 % atau setara dengan 9,63 ribu jiwa dari total jumlah penduduk. Sementara untuk tahun 2017 penduduk miskin cenderung mengalami kenaikan menjadi 6,15 % atau setara dengan 11,91 ribu jiwa dari total jumlah penduduk. Kondisi ini dengan rincian bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Nunukan pada tahun 2017 sebanyak 11,91 ribu atau 6,15 %.

Tabel 2.17
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, serta Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan

Tahun	Jumlah penduduk miskin (000 jiwa)	Persentase penduduk miskin	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
2013	14,94	9,51	90,49
2014	14,98	8,69	91,31
2015	9,84	5,61	94,39
2016	9,63	5,25	94,75
2017	11,91	6,15	93,85

Sumber data : 1. *Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2014-2018*
2. *Hasil Olahan 2018*

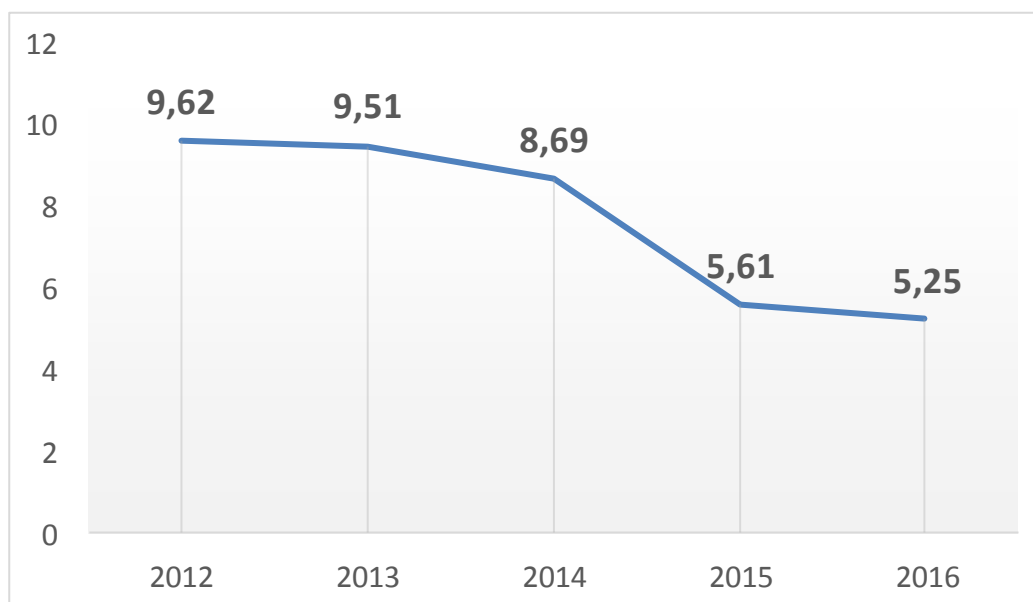
Jumlah penduduk miskin di atas garis kemiskinan paling tinggi pada tahun 2015 – 2016 sebesar 94,75 % sedangkan yang terendah di tahun 2013 sebesar 90,49 %. Kondisi ini masih dibawah rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan utara 6,99% dan secara nasional mencapai 10,07 %. Hal ini diharapkan tetap bertahan dan semakin baik, dalam arti semakin menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Nunukan.

6. Kemiskinan

Secara umum persentase penduduk miskin di Kabupaten Nunukan memiliki trend yang menurun dari tahun 2013-2016. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan mencapai 6,22 % jika dibandingkan tahun 2016 tingkat kemiskinan Kabupaten Nunukan sebesar 5,25 %. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nunukan dari tahun 2010-2015 masih menggunakan basis data terpadu hasil PPLS sebanyak 59.268 jiwa.

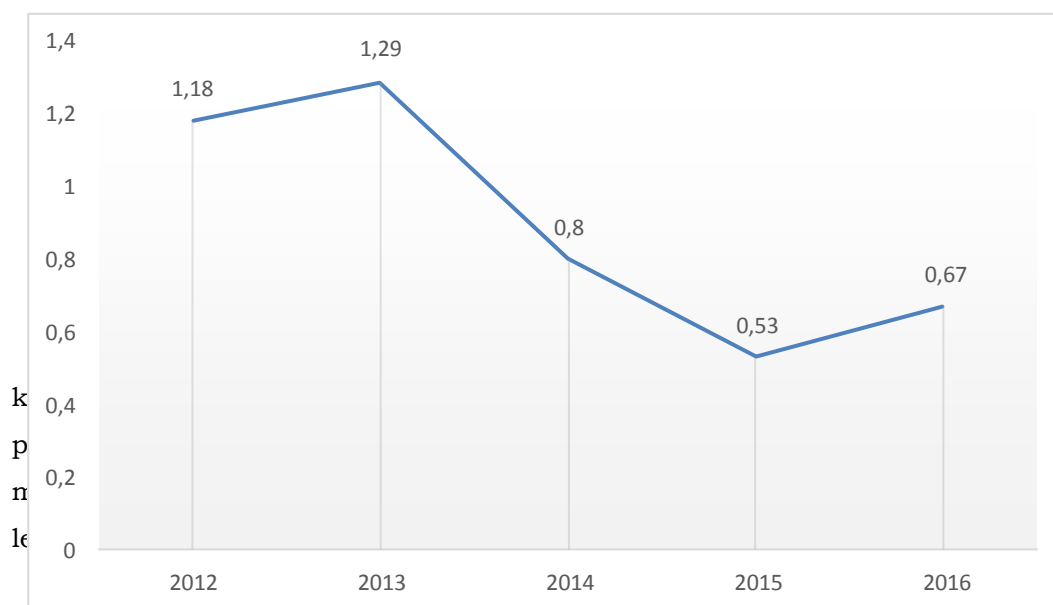
Peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2016-2017 meningkat sebesar 0,97 %. Peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 tidak terlalu signifikan dan paling terendah jika dibandingkan di Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Utara.

Grafik 2.2
Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Nunukan
Tahun 2012-2016



Jika dilihat pada grafik diatas perkembangan tingkat kemiskinan dari tahun 2012 – 2016 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan telah sesuai dengan sasaran yang di tetapkan walaupun masih harus di tingkatkan lagi baik dari segi jumlah program maupun penganggarnya.

Grafik 2.3
Perkembangan Indeks Kedalam Kemiskinan (P1) Kab. Nunukan
Tahun 2012-2016



kin, indeks
 unkan arah
 yang ada
 ppatan yang

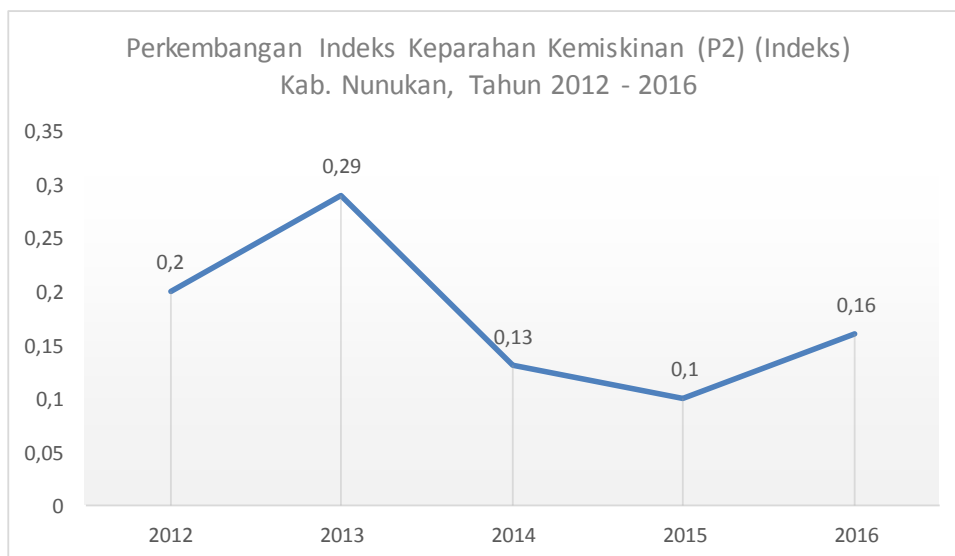
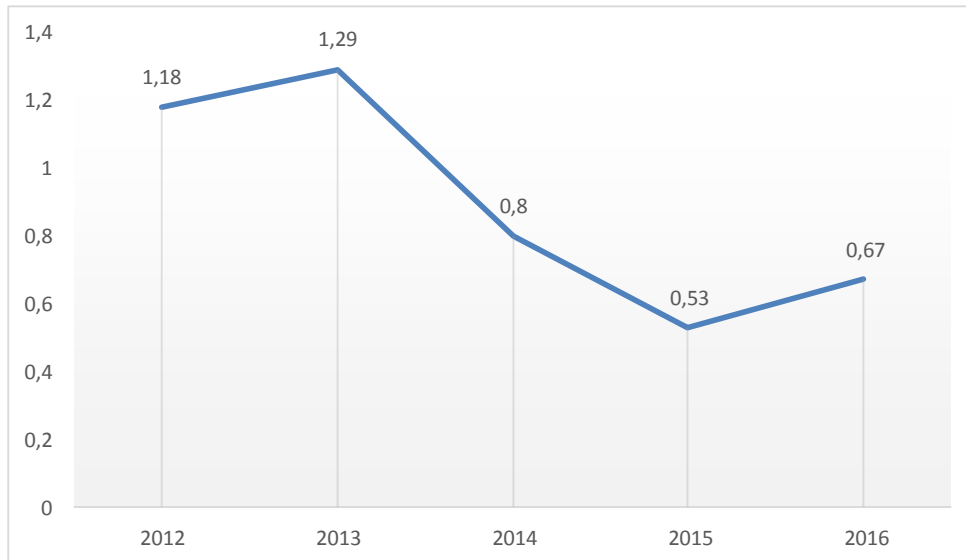
6.1. Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan (P2)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P 1*) dan keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index- P2*) yang merupakan indikator turunan garis kemiskinan yang dirumuskan oleh *Foster-Greer-Thorbecke* (FGT, 1984).

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata - rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini semakin besar rata - rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan mencapai 0,53 % pada tahun 2015 namun pada tahun 2016 indeks kedalaman kemiskinan naik menjadi 0.67 %.

Poverty Severity Index (P2) sampai batas tertentu dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Berdasarkan Indeks Keparahan Kemiskinan, Kabupaten Nunukan mengalami penurunan dari 3.13 % pada tahun 2014 menjadi 0.1 % pada tahun 2015. Dari kedua indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan mengalami penurunan pada tahun 2014.

Grafik 2.4
Perkembangan Indeks Kedalam Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kab. Nunukan Tahun 2012-2016



Dari grafik diatas menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat dalam menentukan program dan kegiatan dalam pengentasan kemiskinan sehingga ketimpangan antar penduduk miskin semakin berkurang. Namun demikian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan harus tetap ditingkatkan mengingat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nunukan cukup tinggi.

Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Nunukan masih berada diatas rata - rata kedalaman kemiskinan Propinsi dan Nasional sejak tahun 2014 hingga Tahun 2015. Namun, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Nunukan berada dibawah rata - rata kedalaman kemiskinan Propinsi dan Nasional mulai tahun 2013 hingga tahun 2014. Hal ini menjelaskan bahwa kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin di Kabupaten Nunukan mulai membaik pada tahun tersebut.

Pemerintah telah berhasil menurunkan kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin di Kabupaten Nunukan, namun hal tersebut tetap harus diperhatikan. Namun pada tahun 2017 persentasde kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,96 %. Untuk itu perlu intervensi program kegiatan yang mengarah atau focus kepada kegiatan indicator sosial yaitu penanganan kemiskinan yang lebih diintegrasikan dengan program-program pembangunan daerah lainnya.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Angka Melek Huruf

Angka melek aksara menurut Badan Pusat Statistik Indonesia merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Semakin tinggi angka melek aksara suatu kabupaten/kota, maka semakin banyak pula masyarakat yang mampu membaca dan menulis dibandingkan dengan total keseluruhan penduduk di wilayah tersebut. Berikut adalah data angka melek huruf di Kabupaten Nunukan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.

Tabel 2.18
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2017

Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017
Nunukan	93.47	96.88	92,49	94,32	n/a
Provinsi Kalimantan Utara	n/a	97,66	80	94,76	n/a

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan Tahun 2018

Berdasarkan data di atas, angka melek aksara di Kabupaten Nunukan mengalami fluktuasi. Dimana pada Tahun 2013 dari angka 93,47 % naik menjadi 96,88% pada Tahun 2014, namun pada Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 92,49% dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar 94,32 %. Sementara angka melek aksara di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 97,66% pada Tahun 2014 namun pada tahun 2016 turun menjadi 94,76 %.

2. Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata - rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata - rata lama sekolah dihitung berdasarkan partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun keatas. Semakin tinggi angka rata - rata lama sekolah maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi sekolah masyarakat di wilayah tersebut.

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Rata - Rata Lama Sekolah
Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah	7.07	7.21	7.22	7,57	7,65

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan

3. Angka Partisipasi Kasar / APK

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang seharusnya berada pada jenjang pendidikan tersebut.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di tingkat pendidikan tertentu. APK merupakan indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing - masing tingkat pendidikan.

APK di Kabupaten Nunukan menunjukkan angka yang fluktuatif tetapi tidak terlalu signifikan. APK jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) mengalami peningkatan pada Tahun 2013 yaitu dari 84,28 % terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga menjadi 108,20% di tahun 2017.

Pada jenjang pendidikan SMP juga mengalami hal yang sama yaitu mengalami peningkatan dimana pada tahun 2013 mencapai 66,99 % hingga tahun 2017 mengalami peningkatan hingga mencapai 94,50 %

Sedangkan untuk jenjang SMA, APK Kabupaten Nunukan juga mengalami kenaikan pada tahun 2013 mencapai 56,12 % dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi 74,8 %

APK SD/MI yang lebih dari 100 % menunjukkan bahwa lebih banyak siswa bersekolah SD/MI dari berbagai usia daripada penduduk usia 7 - 12 tahun (usia yang memang seharusnya SD). Adanya siswa dengan usia lebih tua/muda dibanding usia standar di tingkat pendidikan tersebut menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Hal ini juga terjadi pada jenjang SMP/MTs.

Tabel 2.20
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA, SMP/MTS, SD/MI di Kabupaten Nunukan Tahun 2012-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA	56,12	58,23	63,06	65,00	74,8
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS	66,99	71,16	73,56	81,47	94,5
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI	84,28	91,43	91,76	99,55	108,2

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan

4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah indikator yang mengukur besaran dan persentase masyarakat pada tahun tertentu yang berada pada jenjang pendidikan tertentu. Angka pendidikan yang ditamatkan berbeda dengan angka rata - rata lama sekolah. Jika angka rata - rata lama sekolah menunjukkan berapa lama waktu suatu masyarakat bersekolah pada suatu kabupaten/kota. Angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan terbagi menjadi beberapa jenjang pendidikan. Dengan mengetahui angka rata - rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut. Dengan demikian dapat dirumuskan rekomendasi dan masukan untuk meningkatkan angka ini, apabila kondisi yang terjadi sangat buruk.

Tabel 2.21
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Menurut Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak/Belum Tamat SD Sekolah/Tidak/Belum	Na	na	27,93	24,85
2.	SD/Sederajat	Na	na	27,28	29,53
3.	SMP/Sederajat	Na	20,33	19,11	14,87
4.	SMA/Sederajat	Na	26,64	18,68	24,39
5.	Perguruan Tinggi	Na	na	5,83	6,35

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018

5. Angka Partisipasi Murni / APM

APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan tingkat pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama (baik sekolah dan tidak bersekolah). Seperti APK, APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap tingkat pendidikan.

Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di tingkat pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu wilayah dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah.

Semakin besar nilai APM suatu kabupaten/kota pada jenjang pendidikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu wilayah.

Tabel 2.22
Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA Menurut
Kabupaten Nunukan Tahun 2012-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	40,06	41,62	45,22	49,47	28,32
Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMP/MTS	47,86	53,90	56,80	59,13	131,96
Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI	70,67	78,61	81,29	85,04	98,41

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa perkembangan APM jenjang SD/MI/Paket A, jenjang SMP/MTs/Paket B dan jenjang SMA/SMK/MA/Paket C di Kabupaten Nunukan menunjukkan angka yang fluktuatif.

APM jenjang jenjang SD/MI/Paket A mengalami peningkatan yaitu 70,67 % pada tahun 2013 meningkat menjadi 98,12% tahun 2017. Kemudian APM jenjang SMP/MTs/Paket B dari 47,86 % pada tahun 2013 meningkat menjadi 131,96 % pada tahun 2017. Sementara APM jenjang SMA/SMK/MA/Paket C juga mengalami perkembangan yang sama yaitu 40,06 % pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 28,32 % pada tahun 2017. Berdasarkan uraian tersebut diatas secara keseluruhan menunjukkan menurunnya partisipasi sekolah yang sesuai dengan standar kelompok usia sekolahnya.

6. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Indikator angka kematian bayi ini untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian dihitung. Angka kematian bayi ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Sedangkan angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka ini dihitung dari nilai 1 dikurangi dengan AKB, di mana angka 1 mewakili per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel. 2.23
Angka Kematian Bayi Tahun 2013-2017 Kab Nunukan
Provinsi Kalimantan Utara

Uraia	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kematian bayi	38	6	57	57	18
Jumlah bayi lahir hidup	3.46	3.54	3.74	3.57	3.56
Angka Kematian Bayi per 1.000	11	2	15,2	26,8	19,9
Angka Kelangsungan Hidup	10,9	1,69	15,2	16,3	5,05

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Tahun 2018

Dari tahun 2013 ke tahun 2017, Angka Kematian bayi mengalami peningkatan di tahun 2015-2016 sebanyak 57 kasus kematian sedangkan angka kelangsungan hidup bayi terendah sejak tahun 2014. Pada tahun 2017 angka kematian bayi mengalami perbaikan. Jumlah kematian bayi pada tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun 2016 yaitu 57 kasus menjadi 18 kasus sehingga angka kematian bayi turun menjadi 19,9 per 1.000 kelahiran.

Upaya –upaya untuk mempertahankan keadaan ini harus terus dilakukan dan dipantau. Secara khusus intervensi program-program seperti imunisasi, pencegahan penyakit menular terutama pada bayi dan anak-anak, upaya untuk promosi gizi dan pemberian makanan sehat bagi ibu hamil dan anak termasuk program 1.000 hari pertama kelahiran yang menekankan pada bayi mulai dari kandungan hingga berusia 2 tahun terus menjadi perhatian untuk diintensifkan pelaksanaannya.

Tabel 2.24
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Menurut Kabupaten
Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Bayi Lahir Hidup	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	AKHB
Nunukan	32	3.747	8,5	991,5
Kaltara	154	11.848	13,0	987,0

Sumber data : 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Tahun 2018
2. Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021

7. Angka Kematian Balita

Kematian balita merupakan kematian yang dialami pada anak sebelum mencapai usia 5 tahun. AKB menunjukkan banyaknya kasus kematian anak balita per 1.000 kelahiran hidup disuatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu. Kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, program penerangan penyakit meular yang terjadi pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak-anak dibawah usia 5 tahun.

Tabel 2.25
Angka Kematian Balita Tahun 2012-2017
Kab Nunukan

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kematian Anak Balita (org)	23	9	9	7	9
Jumlah Bayi Lahir Hidup (org)	3.469	3.548	3.747	3.577	3.560
Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup (org)	7	3	2,4	17,9	2,5

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Tahun 2018

Pada tahun 2017 Angka Kematian Balita sebesar 2,5 per 1.000 kelahiran hidup. Kondisi tersebut mengalami perbaikan jika dibandingkan tahun 2016 dengan AKBA sebesar 17,9 per 1.000 kelahiran hidup. Tentunya upaya-upaya pencegahan dan penurunan AKBA ini harus terus diintensifkan guna menurunkan kasus angka kematian balita dalam suatu wilayah Kabupaten.

8. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka kematian ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kematian terkait kesehatan masyarakat. Salah satunya digunakan dalam pemantauan terkait dengan kehamilan dan persalinan. Indikator ini juga dapat dipengaruhi oleh status kesehatan ibu secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4) dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Pada tahun 2013-2017 angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan dan penurunan. Tahun 2016 AKI sebesar 112 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2017 AKI meningkat menjadi 197 per 100.000 kelahiran hidup, angka ini cukup besar jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah Kabupaten khususnya upaya pencegahan terhadap kematian ibu saat melahirkan sehingga penurunan AKI ini dapat terus ditekan.

Tabel 2.26
Angka Kematian Ibu Tahun 2013-2017
Kab Nunukan

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kematian Ibu (org)	6	5	6	4	7
Jumlah Bayi Lahir Hidup (org)	3469	3.548	3.747	3.577	3.560
Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (org)	173	141	160	112	197

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Tahun 2018

9. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata - rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Tabel 2.27
Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2012-2017
Kabupaten Nunukan

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Usia Harapan	70,74	70,82	70,83	71,23	71,25

Sumber: Dinas Kesehatan 2018

Angka usia harapan hidup di Kabupaten Nunukan dari tahun 2013-2017 kecenderungan mengalami peningkatan dengan usia harapan hidup sebesar 70,74 tahun 2013 hingga menjadi 71,25 di tahun 2017.

Angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh banyak variabel yang erat kaitannya dengan masalah kesehatan penduduk. Oleh karena itu, untuk meningkatkan angka usia harapan hidup perlu memperhatikan hal-hal seperti penanganan terhadap kehamilan yang beresiko, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, jumlah tenaga medis dan kesehatan yang lain, angka kesakitan, kondisi geografis tempat tinggal, penyediaan air bersih, akses terhadap sarana kesehatan, hingga latar belakang pendidikan masyarakat.

10. Persentase Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score < -3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwasiorkor dan marasmus - kwasiorkor). Presentase balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah balita di wilayah tersebut pada waktu yang sama.

Tabel 2. 28
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2012-2017
Kab Nunukan

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Balita Gizi	48	15	27	65	49
Jumlah Balita	17.116	17.612	19.359	20.219	21.079

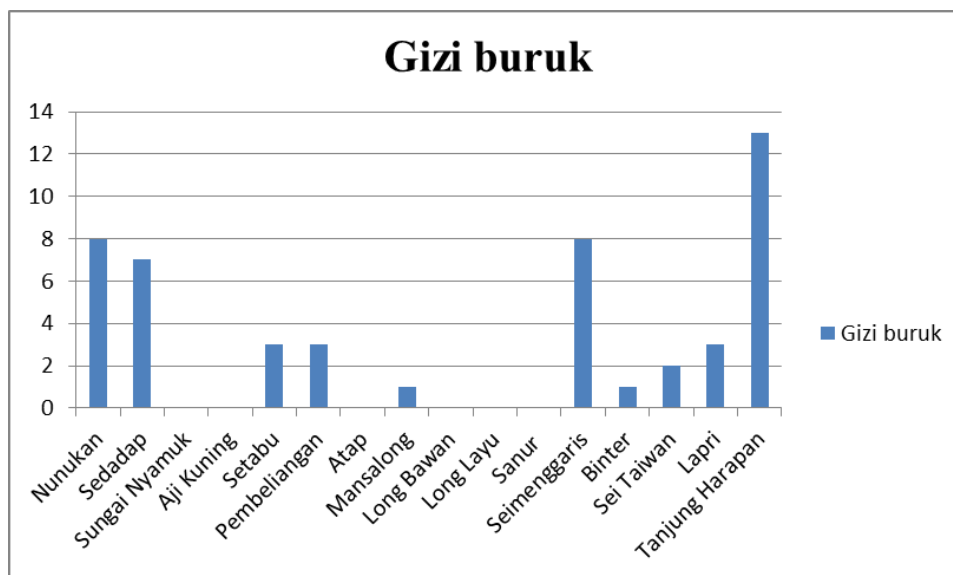
Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan 2018

Berdasarkan data yang tersedia jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan dan peningkatan dimana tahun 2014 kasus gizi buruk sebanyak 15 kasus namun meningkat lagi di tahun 2015-2016 menjadi 27-65 kasus. Sedangkan pada tahun 2017 turun menjadi 49 kasus. Jika dibandingkan dengan kriteria yang ditentukan oleh WHO (1999), persentase balita gizi buruk di Provinsi Kalimantan Utara tergolong rendah.

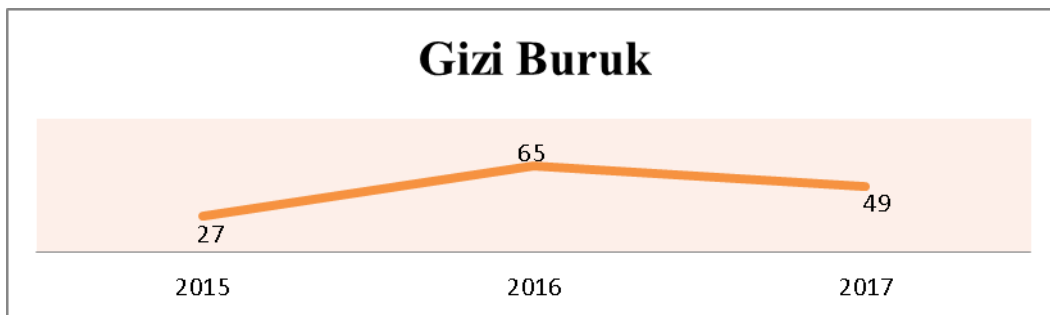
Gizi buruk dapat terjadi pada semua kelompok umur, tetapi yang perlu lebih diperhatikan pada kelompok bayi dan balita. Pada usia 0-2 tahun merupakan masa tumbuh kembang yang optimal (*golden period*) terutama untuk pertumbuhan janin sehingga bila terjadi gangguan pada masa ini tidak dapat dicukupi pada masa berikutnya dan akan berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus.

Sebaran gizi buruk menurut wilayah kerja puskesmas di wilayah Kabupaten Nunukan, dimana kasus gizi buruk banyak terjadi di wilayah kerja puskesmas Tanjung Harapan, Puskesmas Seimenggaris, puskesmas Nunukan dan puskesmas sedadap.

Grafik 2.5
Sebaran Gizi Buruk Menurut Wilayah Kerja Puskesmas
Di Kabupaten Nunukan Tahun 2018



Tren jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Nunukan dalam 3 tahun terakhir fluktuatif seperti pada grafik berikut :



Sumber Data: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan 2018

11. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja pada kelompok umur produktif. Rasio penduduk yang bekerja akan menunjukkan ketersediaan lapangan kerja dan daya serapnya terhadap jumlah angkatan kerja yang tersedia. Semakin tinggi nilai rasio penduduk yang bekerja, maka semakin besar daya serap tenaga kerja.

Tabel 2.29
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2013-2017
kabupaten Nunukan

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Penduduk yang bekerja	0,62	0,67	0,96	n/a	0,65

Sumber data : 1. RPJMD Provinsi Kaltara 2016-2021
2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan 2018

Peningkatan rasio penduduk yang bekerja ini disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja muda dan usia sekolah (15-19 tahun) yang memilih bekerja (menjadi angkatan kerja) dimana pada tahun 2015 sebesar 1.911 orang dan tahun 2017 naik menjadi 6.669 orang atau mengalami kenaikan sebesar 349%. Jadi ada peralihan yang besar dari penduduk bukan angkatan kerja menjadi penduduk angkatan kerja. Hal ini diindikasikan dimana terlihat penurunan jumlah penduduk bukan angkatan kerja tahun 2015 sebanyak 46.476 orang dan tahun 2017 menurun menjadi 39.376 orang sementara jumlah angkatan kerja naik dari 75.016 orang pada tahun 2015 menjadi 94.137 orang pada tahun 2017.

12. Indek Pembangunan Manusia

Keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga harus memperhitungkan sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya. Indikator keberhasilan pembangunan manusia meliputi berbagai dimensi, diantaranya keberhasilan dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan serta terpenuhinya berbagai fasilitas pelayanan sosial lainnya.

Ukuran pembangunan yang digunakan selama ini yaitu PDB (Nasional) dan PDRB (Wilayah/Daerah), yang hanya mampu memotret pembangunan ekonomi saja. Sedangkan untuk mampu melihat keberhasilan suatu pembangunan manusia dari sisi aspek sosial dan kesejahteraan maka indikator Indeks pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang digunakan secara konprehensif sebagai dasar merencanakan kebijakan dan evaluasi pembangunan. Karena melalui IPM dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan.

IPM dikabupaten Nunukan saat ini merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan 4 Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi Kalimantan utara, dimana tahun 2016 IPM Kabupaten Nunukan adalah 64,35 namun angka ini terus mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 62,18 hingga tahun 2017 IPM Kabupaten Nunukan sebesar 65,10. Artinya IPM di Kabupaten Nunukan termasuk kategori sedang. Artinya kualitas manusia penduduk di Kabupaten Nunukan cukup baik namun harus terus ditingkatkan.

IPM memotret kondisi kualitas hidup manusia di suatu wilayah yang terdiri dari komponen Angka Harapan Hidup, Angka Lama Sekolah, Angka Rata-Rata lama Sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan. IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia dpata menjadi isyarat seberapa besarnya pembangunan yang telah dijalankan mampu memberi peluang penduduk untuk hidup secara layak, melalui hidup sehat, dan panjang untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi, keterampilan yang lebih baik serta mempunyai kemampuan pendapatan yang diperlukan untuk hidup layak dimaksud. Berikut disajikan data IPM di Kabupaten Nunukan dari tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan.

Tabel 2.30
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2013-2017
kabupaten Nunukan

Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017
Nunukan	62,18	63,13	63,35	64,35	65,10

Sumber Data : BPS Kabupaten Nunukan 2018

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Jumlah Grup Kesenian

Pembangunan bidang seni salah satunya ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah grup kesenian di suatu daerah. Jumlah grup kesenian menunjukkan jumlah grup kesenian yang terbentuk dimasyarakat melalui pembinaan dari pemerintah daerah.

Organisasi struktural yang menangani kesenian ada dua, yaitu paguyuban dan sanggar. Sanggar yang ada di Kabupaten Nunukan sebanyak 46 sanggar dan tersebar di beberapa kecamatan. Sementara Lembaga/ dewan kesenian berada di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga. Dengan adanya dua organisasi tersebut, sudah dapat mengakomodir seluruh cakupan organisasi kesenian.

Tabel 2.31
Perkembangan Group Kesenian Jumlah 2013-2017
Kabupaten Nunukan

	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah	33	66	110	140	170
	Cakupan grup kesenian	33,30%	66,67%	110,11%	140,13%	170,15%

Sumber data : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kab. Nunukan

2. Jumlah Gedung Kesenian

Pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat di suatu daerah. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu wilayah.

Dari data yang ada jumlah gedung kesenian di Kabupaten Nunukan hanya terdapat 2 (dua), yaitu yang berada di Desa Lembudud Kecamatan Krayan dan GOR Dwi Kora.

Tabel 2.32
Perkembangan Cakupan Organisasi Kesenian
Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2015

	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Cakupan tempat kesenian	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber data : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 2018

3. Jumlah Klub Olahraga

Jumlah klub olahraga merupakan indikator yang menjelaskan tolok ukur sejumlah kelompok kegiatan untuk mendukung aktivitas bidang olahraga. Indikator ini berguna untuk melihat perkembangan sumber daya manusia melalui kegiatan olahraga. Jumlah klub olahraga dihitung dalam satuan 10.000 penduduk.

Tabel 2.33
Jumlah Organisasi Olahraga Kabupaten Nunukan
Tahun 2013 - 2017

	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah organisasi olahraga	31	48	32		

Sumber data : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 2018

Data jumlah klub olahraga yang tersedia hanya Kabupaten Nunukan untuk tahun 2013 sebanyak 31 organisasi. Tahun 2014 sebanyak 48 organisasi dan pada Tahun 2015 sebanyak 32 organisasi.

4. Jumlah Gedung Olahraga

Gedung olahraga merupakan sarana pendukung kegiatan olahraga di suatu daerah. Indikator ini berguna untuk menjelaskan adanya potensi pendukung sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga. Data jumlah gedung olahraga yang tersedia di Kabupaten Nunukan untuk tahun 2013 - 2017 hanya sebanyak 1 buah yaitu Gedung Olahraga (GOR) Dwikora.

Berikut ini merupakan tabel perkembangan jumlah gedung olahraga di Kabupaten Nunukan.

Tabel 2.34
Jumlah Gedung Olahraga Kabupaten Nunukan
Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah gedung olahraga	1	1	1	1	1

Sumber data : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 2018

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

1. Pendidikan Dasar

1.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) jenjang SD/MI dan SMP/MTs merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS diketahui berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah yaitu 7 - 12 tahun yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar dan jumlah murid masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan SMP/MTs.

Berikut adalah data angka partisipasi sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun 2011 s/d Tahun 2015.

Tabel 2.35
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI					
1.1.	Jumlah Murid Usia 7-12 tahun					23.816
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	APS SD/MI					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 tahun					9.202
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	APS SMP/MTs					

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan

1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia sekolah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini jenjang pendidikan yang digunakan adalah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Tabel 2.36
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
2.	SD/MI					
1.1.	Jumlah Murid Usia 7-12 tahun					23.816
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	APS SD/MI					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 tahun					9.202
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	APS SMP/MTs					

Sumber data : 1. Kabupaten Dalam Angka 2018
2. Data diolah

1.3. Rasio Guru/Murid

Rasio guru dan murid tingkat SD/MI dan SMP/MTs adalah merupakan perbandingan jumlah guru dibanding jumlah murid untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar (guru) dan digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Berikut adalah data rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Nunukan Tahun 2011 s/d Tahun 2015.

Tabel 2.37
Perkembangan Rasio Guru dan Murid
tingkat SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI					
1.1.	Jumlah guru					1.738
1.2.	Jumlah murid					23.816
1.3.	Rasio					7,29
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah guru					637
2.2.	Jumlah murid					9.202
2.3.	Rasio					6,92

Sumber data : 1. Kabupaten Dalam Angka 2018
2. Data diolah

Tabel 2.38
Jumlah guru dan murid jenjang pendidikan Dasar menurut Kecamatan
Tahun 2017 di Kabupaten Nunukan

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio	Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio
1	Krayan Selatan	54	441	12.24	25	128	19.53
2	Krayan Tengah	0	0	0.00	0	0	0.00
3	Krayan	0	0	0.00	0	0	0.00
4	Krayan Timur	234	987	23.71	60	442	13.57
5	Krayan Barat	0	0	0.00	0	0	0.00
6	Lumbis Ogong	72	832	8.65	13	163	7.98
7	Lumbis	120	1222	9.82	28	574	4.88
8	Sembakung Atulai	0	0	0.00	0	0	0.00
9	Sembakung	180	1271	14.16	47	410	11.46
10	Sebuku	94	1447	6.50	29	257	11.28
11	Tulin Onsoi	81	1251	6.47	28	603	4.64
12	Seimanggaris	60	1122	5.35	23	335	6.87
13	Nunukan	375	7478	5.01	135	2894	4.66
14	Nunukan Selatan	104	2320	4.48	90	1421	6.33
15	Sebatik Barat	80	1224	6.54	33	456	7.24
16	Sebatik	55	725	7.59	33	352	9.38
17	Sebatik Timur	109	1779	6.13	26	302	8.61
18	Sebatik Tengah	68	882	7.71	24	440	5.45
19	Sebatik Utara	52	835	6.23	43	425	10.12
	Kabupaten Nunukan	1738	23816	6.87	637	9202	6.95

Sumber data : 1. Kabupaten Dalam Angka 2018

2. Data diolah

3. Pendidikan Menengah

2.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) jenjang SMA/SMK/MA merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS diketahui berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah yaitu 16 - 18 tahun yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Berikut adalah data angka partisipasi sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Tahun 2013 s/d Tahun 2017.

Tabel 2.39
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
4.	SD/MI					
1.1.	Jumlah Murid Usia 7-12 tahun					23.816
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	APS SD/MI					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 tahun					9.202
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	APS SMP/MTs					

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018

2.2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia sekolah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini jenjang pendidikan yang digunakan adalah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Tabel 2.40
Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
SMA/SMK/MA di Kabupaten Nunukan
Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah sekolah (SMA/MA/SMK)	24	24	22	22	22
2.	Jumlah penduduk usia SMA/Sederajat (16 s/d 19) thn	11481	11641	10383	16503	n/a
3.	Rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk	na	20.62	21.19	13.33	n/a

Sumber data : Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2015, 2016,2017

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SMA/SMK/MA di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan. Pada tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Nunukan mencapai 21,19. Hal ini berarti, jumlah sekolah di Kabupaten Nunukan masih cukup banyak dapat menampung penduduk usia 16 - 18 tahun. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan mencapai 13.33 hal ini ada beberapa sekolah yang sudah tidak dapat

menampung penduduk usia 16-18 tahun untuk bersekolah. Ketersediaan data untuk jumlah penduduk usia SMA/Sederajat dan jumlah sekolah pada tahun 2017 belum tersedia (minim), sehingga belum dapat dianalisis lebih lanjut.

2.3. Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA

Rasio guru dan murid jenjang SMA/SMK/MA adalah merupakan perbandingan jumlah guru dibanding jumlah murid untuk jenjang SMA/SMK/MA. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar (guru) dan digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Berikut adalah data rasio guru/murid SMA/SMK/MA di Kabupaten Nunukan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.

Tabel 2. 41
Perkembangan Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA Menurut Kabupaten Nunukan Tahun 2012 s.d 2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah guru Guru	416	622	n/a	544	481
2.	Jumlah Murid SMA/SMK/MA	6515	6638	n/a	7411	6788
3.	Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA	6,38	9,37	n/a	7,34	7,09

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018

3. Fasilitas Sekolah

3.1. Sekolah pendidikan dalam Kondisi Bangunan Baik

Sekolah pendidikan dalam kondisi bangunan baik dihitung berdasarkan persentase jumlah kelas kondisi baik dibandingkan dengan jumlah seluruh kelas yang ada. Kondisi ruang kelas yang baik pastinya akan mendukung dan menciptakan situasi belajar yang nyaman dan kondusif bagi masyarakat. Berikut data persentase sekolah yang bangunannya dalam baik di Kabupaten Nunukan.

Tabel 2.42
Perkembangan Sekolah dengan Kondisi Baik di Kabupaten Nunukan
Tahun 2013 – 2017

Jenjang SD/MI

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	559	577	576	647	845
2.	Jumlah seluruh sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	966	1003	1010	996	996
3.	Persentase sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	57,87	57,53	57,03	64,96	82,78

Jenjang SMP/MTs

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi	369	368	419	388	252
2.	Jumlah seluruh sekolah SMP/MTS kondisi	476	483	514	541	259
3.	Persentase sekolah pendidikan SMP/MTS	77,52	76,19	81,52	74,72	97,30

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018

Dari data diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2017 persentase sekolah pendidikan SD/MI kondisi baik terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 57,87 % hingga tahun 2017 mencapai 82,78 % . Sedangkan SMP/MTS kondisi baik mengalami kenaikan dari 77,52 % di tahun 2013 menjadi 97,30 % ditahun 2017.

4. Angka Putus sekolah

Indikator ini menggambarkan perbandingan jumlah siswa yang putus sekolah dengan jumlah siswa baik ditingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa angka putus sekolah baik di tingkat SD, SMP maupun SMA mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan program pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan standar untuk pencapaian keberhasilan dan kesadaran masyarakat tentang pendidikan terjadi peningkatan meskipun perlu perbaikan dalam sistem pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan. Hingga tahun 2017 angka putus sekolah jenjang SD/MI mencapai 0,19, jenjang SMP/MTs 0,36 sedangkan jenjang SMA/MA/SMK turun 0,27. Berikut data APS jenjang pendidikan di Kabupaten Nunukan 2013 hingga 2017.

Tabel 2.43
Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan
Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang SD/MI	0,09	0,24	0,31	0,21	0,19
Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang SMP/MTS	0,52	0,24	0,36	0,36	0,36
Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang SMA/MA/SMK	0,56	0,00	0,00	0,33	0,27

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018

5. Angka Kelulusan

5.1. Angka Kelulusan SD/MI

Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berikut merupakan data angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Nunukan.

Tabel 2.44
Angka Kelulusan SD/MI Menurut Kabupaten Nunukan
Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah lulusan pada Jenjang SD/MI	3172	3372	3519	3555	2380
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI	3189	3374	3534	3558	3366
3.	Angka Kelulusan SD/MI	99,47	99,94	99,58	99,92	97,45

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa angka kelulusan jenjang SD/MI di Kabupaten Nunukan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dimana pada Tahun 2013 sebesar 99,47% naik menjadi 99,58% pada Tahun 2014, namun pada tahun 2017 angka tersebut turun lagi menjadi 97,45%.

5.2. Angka Kelulusan SMP/MTs

Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berikut merupakan data angka kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Nunukan.

Tabel 2.45
Angka Kelulusan SMP/MTS Menurut Kabupaten Nunukan
Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah lulusan pada Jenjang SMP/MTS	2430	2750	3091	2873	2415
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTS	2448	2767	3110	2887	2762
3.	Angka Kelulusan	99,26	99,39	99,71	99,52	87,44

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa angka kelulusan jenjang SMP/MTs di Kabupaten Nunukan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 secara umum mengalami kenaikan yaitu 99,26 % pada tahun 2013 naik menjadi 99,52 % pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 87,44 %.

5.3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA

Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berikut merupakan data angka kelulusan SMA/SMK/MA di Kabupaten Nunukan hingga tahun 2017.

Tabel 2.46
Angka Kelulusan SMA/MA/SMK Menurut Kabupaten Nunukan
Tahun 2012-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah lulusan pada Jenjang SMA/SMK/MA	1794	1876	1945	2298	1482
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA	1783	1905	1960	2306	2370
3.	Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	99.62	99.33	99,33	99,65	62,37

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa angka kelulusan jenjang SMA/SMK/MA di Kabupaten Nunukan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dimana pada Tahun 2013 sebesar 99,62 % dan turun menjadi 98,33 % pada tahun 2014, namun pada tahun 2016 angka tersebut naik lagi menjadi 99,65 % dan turun lagi pada tahun 2017 menjadi 62,37 %. Karena untuk tahun 2017 penetapan kelulusan mengikuti standar nasional dengan perubahan kurikulum dimana pelaksanaan ujian nasional menggunakan kurikulum 2013 sementara untuk Kabupaten Nunukan masih menggunakan kurikulum KTSP tahun 2006 sehingga banyak angka kelulusan tidak memenuhi *passingred* yang telah ditentukan dari kementerian pendidikan.

5.4. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada di kabupaten. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Berikut merupakan data guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Nunukan.

Tabel 2.47
Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Menurut
Kabupaten Nunukan Tahun 2012 s.d. 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV untuk SD	87,7	71,04	73,03	78,84	94,74
Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV untuk SMP	87,12	91,56	92,60	92,94	97,22

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018

Dari data di atas terlihat kenaikan kualifikasi S1/D-IV untuk SD dan SMP mengalami kenaikan. Dimana untuk tingkat SD tahun 2013 mencapai 87,7 % terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga tahun 2017 mencapai 94,74 %. Sedangkan untuk tingkat SMP juga mengalami peningkatan dimana tahun 2013 87,12 % namun hingga tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 97,22 %. Hal ini tentunya merupakan gambaran untuk terus meningkatkan kompetensi bagi tenaga pengajar baik dijenjang SD maupun SMP terus dipacu sehingga kompetensi lulusan juga diharapkan akan naik dan meningkat.

6. Kesehatan

6.1. Rasio posyandu per satuan balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tabel 2.48
Rasio Posyandu per 100 Balita Kabupaten
Nunukan Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Posyandu	228	219	217	255	224
Jumlah balita	17.116	19862	21704	23.26	21079
Rasio posyandu per 100	1,33	1,10	0,9	0,93	1,06

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018

Dari data diatas rasio posyandu per tahun 100 balita tahun 2017 naik sebesar 1,06 % jika dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,93 %.

6.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas, poliklinik dan pustu adalah salah satu sarana upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan tersedianya pelayanan kesehatan yang mudah, merata dan murah pada semua lapisan masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu.

Tabel 2.49
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 100.000 Penduduk Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2017

Uraia	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah	15	16	16	16	16
Jumlah Poliklinik	0	0	0	0	0
Jumlah Pustu	61	61	92	92	92
Jumlah Penduduk	163.40	170042	17760	18549	19339
Rasio Puskesmas	9,12	9,4	9,0	8.63	8,27
Rasio Poliklinik	0	0	0	0	0
Rasio Pustu	37,33	35,87	51,80	49,59	47,57

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan 2018

6.3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 terdapat 1 unit RSUD dan pada Tahun 2015 telah bertambah 2 unit rumah sakit pratama kelas D yaitu Rumah Sakit Pratama Sebuku dan Rumah Sakit Pratama Krayan, dan rencana pada Tahun 2016 kedua rumah sakit pratama tersebut akan beroperasi. Sementara tahun 2018 Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Sebatik telah Berdiri sehingga saat ini Jumlah penambahan Rumah sakit saat ini ada 1 unit.

Tabel 2.50
Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Tahun Kabupaten Nunukan 2012-2017

Uraia	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	0
Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
Jumlah Rumah Sakit Swasta	0				
Jumlah seluruh Rumah	1	1	1	1	1
Jumlah Penduduk	16340	17004	17760	18549	19339
Rasio	0,61	0,59	0,56	0,54	0,52

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Nunukan

Dari data diatas digambarkan bahwa rasio rumah sakit per 100.000 penduduk tahun 2017 mencapai 0,52 %. Pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk terus meningkatkan layanan kesehatan masyarakat dengan mengusulkan pembangunan rumah sakit pratama di Kecamatan Krayan, Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sebatik dengan harapan meningkatkan layanan kesehatan rumah sakit.

7. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

7.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sampai dengan Tahun 2017 panjang jalan di daerah ini adalah 1.044,76 Km. Dari data tersebut, diketahui bahwa jalan yang sudah diaspal dan rigid sepanjang 205,10 Km, yang masih agregat sepanjang 270,51 Km dan masih dalam bentuk tanah sepanjang 569,15 Km. Sementara berdasarkan kondisi jalan diketahui bahwa jalan yang masih baik sepanjang 572,82 Km, kondisi sedang 217,22 Km, sedangkan kondisi jalan yang rusak sepanjang 254,72 Km kondisi jalan ini terus mengalami peningkatan panjang.

Pembangunan jaringan jalan tersebut merupakan prasarana transportasi yang penting untuk memperlancar distribusi barang antar daerah serta meningkatkan mobilitas penduduk.

Tabel 2.51
Panjang Jalan berdasarkan Jenis di Kabupaten Nunukan Tahun 2017

No.	Jalan Menurut Jenis	Total S/D 2016		2017		Total S/D 2017	
		Panjang (Km)	Bobot (%)	Panjang (Km)	Bobot (%)	Panjang (Km)	Bobot (%)
1	Aspal & Rigid	204.94	23.35	0.17	0.02	205.10	19.63
2	Agregat	242.43	27.63	28.08	2.69	270.51	25.89
3	Tanah	430.21	49.02	138.93	13.30	569.15	54.48
Total		877.58	100.00	167.18	16.00	1,044.76	100.00

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum PRPKP 2018

Tabel 2.52
Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2017

No.	Jalan Menurut Kondisi	Total S/D 2016		2017		Total S/D 2017	
		Panjang (Km)	Bobot (%)	Panjang (Km)	Bobot (%)	Panjang (Km)	Bobot (%)
1	Baik	392.80	44.76	180.02	17.23	572.82	54.83
2	Sedang	208.76	23.79	8.46	0.81	217.22	20.79
3	Rusak	276.02	31.45	(21.30)	(2.04)	254.72	24.38
Total		877.58	100.00	167.18	16.00	1,044.76	100.00

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum PRPKP 2018

7.2. Rasio Jaringan Irigasi

Untuk mendukung pembangunan agrobisnis dalam arti luas untuk mencapai ketahanan pangan pemerintah telah menyediakan infrastruktur irigasi untuk sektor pertanian berupa jaringan irigasi Primer, Sekunder dan Tersier. Upaya itu terus dilakukan untuk meningkatkan rasio jaringan irigasi di Kabupaten Nunukan khususnya melalui Program Irigasi yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahunnya.

Tabel 2.53
Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2017 di Kabupaten Nunukan

No.	Nama D.I	Lokasi	Luas Potensial (Ha)	Luas Fungsional (Ha)	Rasio Jaringan (%)
A	Daerah Irigasi		4,206.43	1,594.82	37.91
1	D.I. Tg. Harapan	Nunukan Selatan	400.00	100.00	25.00
2	D.I. Mansapa	Nunukan Selatan	524.00	300.00	57.25
3	D.I. Sei. Jepun	Nunukan Selatan	102.00	30.00	29.41
4	D.I. Sei. Apuk	Nunukan	150.00	30.00	20.00
5	D.I. Fatimah	Nunukan	80.00	50.00	62.50
6	D.I. Kp. Tator Binusan	Nunukan	300.00	176.32	58.77
7	D.I. Kp. Enrekang & Tellang	Sebatik Barat	231.00	50.00	21.65
8	D.I. Kebakil	Sebatik Barat	95.00	40.00	42.11
9	D.I. Tembaring Bawah	Sebatik Barat	127.00	40.00	31.50
10	D.I. Liang Bunyu	Sebatik Barat	80.00	35.00	43.75
11	D.I. Tanjung Aru	Sebatik Timur	475.00	100.00	21.05
12	D.I. Long Api	Krayan	100.00	50.00	50.00
13	D.I. Pa' Nado	Krayan	200.00	50.00	25.00
14	D.I. Pa' Rupai	Krayan	150.00	50.00	33.33
15	D.I. Sungai Lancang	Nunukan Selatan	200.00	30.00	15.00
16	D.I. Semengkadu	Nunukan Selatan	50.00	30.00	60.00
17	D.I. Sei. Manurung	Sebatik	100.00	40.00	40.00
18	D.I. Sei. Nyamuk	Sebatik Timur	250.00	143.50	57.40
19	D.I. Binalawan	Sebatik Barat	192.43	45.00	23.39
20	D.I. Binasalam	Sebatik Barat	50.00	30.00	60.00
21	D.I. Kp. Sinjai	Sebatik Utara	50.00	30.00	60.00
22	D.I. Balansiku	Sebatik	100.00	50.00	50.00
23	D.I. Seberang	Sebatik Utara	100.00	45.00	45.00
24	D.I. Sei. Pancang	Sebatik Utara	100.00	50.00	50.00
B	Daerah Irigasi Rawa		2,105.00	572.20	27.18
1	D.I.R. Pembelianan	Sebuku	500.00	277.00	55.40
2	D.I.R. Sekaduyan Taka	Seimanggaris	230.00	85.20	37.04
3	D.I.R. Lubakan	Sembakung	77.00	35.00	45.45
4	D.I.R. Pa Lo Lumbis	Lumbis	700.00	50.00	7.14
5	D.I.R. Tagul	Sembakung	150.00	25.00	16.67
6	D.I.R. Plaju	Sembakung	148.00	25.00	16.89
7	D.I.R. Tepian	Sembakung	200.00	25.00	12.50
8	D.I.R. Sembakung Atulai	Sembakung Atulai	100.00	50.00	50.00
Total Rasio Jaringan Irigasi			6,311.43	2,167.02	34.33

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum PRPKP 2018

Dari data diatas menunjukkan bahwa jaringan irigasi di Kabupaten Nunukan terbagi menjadi Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa. Terdapat 24 daerah irigasi dengan total luas potensial 4.206,43 Ha dan luas fungsionalnya 1.594,82 Ha dengan rasio 37,91. Sementara untuk daerah irigasi rawa luas potensial 2.105,00 Ha dan Luas fungsional 572,20 Ha dengan rasio 27,18. Sehingga total rasio irigasi dan irigasi rawa 34,33 %.

Hal ini tentunya perlu terus ditingkatkan sehingga seluruh jaringan irigasi terus mengalami peningkatan khususnya secara fungsional dari potensi luasan irigasi yang ada. Hal ini tentunya sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi pangan terutama padi untuk menunjang sektor agrobisnis yang berkembang dan mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah bahkan nasional.

Tabel 2.54
Panjang dan luas Jaringan Irigasi Tahun 2017
di Kabupaten Nunukan

No.	Keterangan	Volume	Satuan
1	Panjang Jaringan Irigasi	142.207.	M
3	Luas Irigasi dalam Kondisi Baik	9.495.000	M ²

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan

Dari data diatas diperoleh bahwa sepanjang Tahun 2017 jaringan irigasi yang sudah terbangun di Kabupaten Nunukan adalah 142.207,0 m, dengan luas jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Nunukan seluas 9.495.000 M² atau sebesar 10% dari potensi luas irigasi yang ada di Kabupaten Nunukan.

7.3. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Indikator tempat ibadah per satuan penduduk didapatkan dari perbandingan jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk per 1000 penduduk. Berkaitan dengan tempat ibadah, indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk ini akan lebih tepat apabila pembanding yang digunakan dalam penghitungan indikator tersebut menggunakan jumlah pemeluk agama. Dengan demikian, indikator ini berganti menjadi rasio tempat ibadah per satuan pemeluk agama.

Tabel 2.55
Jumlah Sarana Ibadah Menurut Kabupaten Nunukan
Tahun 2013 - 2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
Masjid/Musolah	219	208	208	209
Gereja Katolik	30	39	40	40
Gereja Protestan	128	74	110	118
Pura	0	0	0	0
Vihara	1	-	0	0
Klenteng	1	1	1	1

Sumber data : Nunukan Dalam Angka Tahun 2018

Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Nunukan secara umum memiliki kecenderungan meningkat dalam kurun waktu Tahun 2013 hingga Tahun 2016. Jumlah masjid/musolah hingga Tahun 2016 tercatat sebanyak 209 unit. Jumlah gereja Katolik sebanyak 40 unit. sedangkan untuk jumlah gereja Protestan sebanyak 118 unit.

Tabel 2.56
Jumlah Pemeluk Agama Di Kabupaten Nunukan
Tahun 2011 - 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Islam	106.408	106.406	106.406	124.646	136.202
Katolik	10.660	10.815	10.615	11.930	14.917
Protestan	42.754	43.995	43.995	31.521	34.477
Hindu	15	415	415	98	101
Budha	146	687	687	280	279

Sumber data : Nunukan Dalam Angka Tahun 2012 - 2017

Jumlah pemeluk agama di Kabupaten Nunukan hingga Tahun 2015 didominasi oleh pemeluk agama Islam, yakni sebanyak 136.202 jiwa, pemeluk agama Protestan sebanyak 34.477 jiwa dan pemeluk agama Katolik sebanyak 14.917 jiwa. Secara umum, jumlah pemeluk agama pada masing - masing agama memiliki kecenderungan meningkat, kecuali pada pemeluk agama Hindu dan Budha yang memiliki kecenderungan menurun dalam kurun waktu Tahun 2014 hingga Tahun 2015.

8. **Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**

Rumah tinggal bersanitasi merupakan salah satu faktor yang menjadi sebuah indikator dalam penilaian kriteria rumah layak huni. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang - kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, diantaranya adalah fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas) dan pembuangan sampah. Indikator persentase rumah tinggal bersanitasi didapatkan dari perbandingan antara jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dengan jumlah rumah tinggal dikalikan dengan bilangan 100. Data yang tersedia tidak dapat menjelaskan mengenai kondisi rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Kalimantan Utara, hal ini dikarenakan tidak setiap kabupaten/kota didapatkan datanya.

Tabel 2.57
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Nunukan
Tahun 2013 - 2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	n/a	n/a	18.431	22.468
Jumlah rumah tinggal	n/a	n/a	35.207	35.207
Persentase rumah tinggal bersanitasi	n/a	n/a	52,35	63,82

Sumber Data : Perubahan RPJMD Prov. Kaltara Tahun 2016-2021

Saat ini pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan akses rumah tinggal bersanitasi tentunya program pemerintah daerah yang sejalan dengan pemerintah provinsi dan pusat memacu peningkatan rumah tinggal yang berakses sanitasi misalnya program pembangunan rumah layak huni, penyediaan air bersih dan rehabilitasi MCK untuk mendukung kesehatan masyarakat serta terus berupaya mengurangi lingkungan sekitar yang buruk menjadi lebih baik.

9. **Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk.**

Indikator rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk merupakan hasil perbandingan antara jumlah daya tampung TPU dengan jumlah penduduk per 1000 penduduk. Pemakaman dapat dibedakan menjadi tiga, yakni Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK). Indikator rasio tempat pemakaman umum (TPU) per satuan penduduk di Kabupaten Nunukan tidak dapat dihitung, hal ini dikarenakan tidak ditemukannya data mengenai jumlah daya tampung tempat pemakaman itu sendiri.

10. Rasio Rumah Layak Huni

Indikator rasio rumah layak huni merupakan hasil perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Data yang tersedia dalam tabel berikut tidak dapat menggambarkan kondisi rasio rumah layak huni di Kabupaten Nunukan. Program-program bantuan rumah layak huni yang dicanangkan pemerintah pusat dan provinsi serta pemerintah daerah diharapkan akan meningkatkan nilai rasio rumah layak huni di Kabupaten sehingga masyarakat bisa memiliki rumah sendiri untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Berikut rasio rumah layak huni di Kabupaten Nunukan tahun 2016 dimana rasio rumah layak huni masih sangat kecil sekitar 10,70%.

Tabel 2.58
Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Nunukan
Tahun 2011 - 2015

Uraian	Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015	2016
Jumlah rumah layak huni	Nunukan	-	-	-	21.963
Jumlah penduduk	Nunukan	-	-	-	205.293
Rasio rumah layak huni	Nunukan	-	-	-	10,70%

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum PRPKP Kabupaten Nunukan 2018

11. Panjang Jalan di Lalui Roda 4

Indikator panjang jalan dilalui roda empat merupakan hasil perbandingan dari jumlah panjang jalan baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa (lokal) dengan jumlah penduduk. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan rasio panjang jalan di suatu wilayah yang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat untuk melayani per 1000 penduduk.

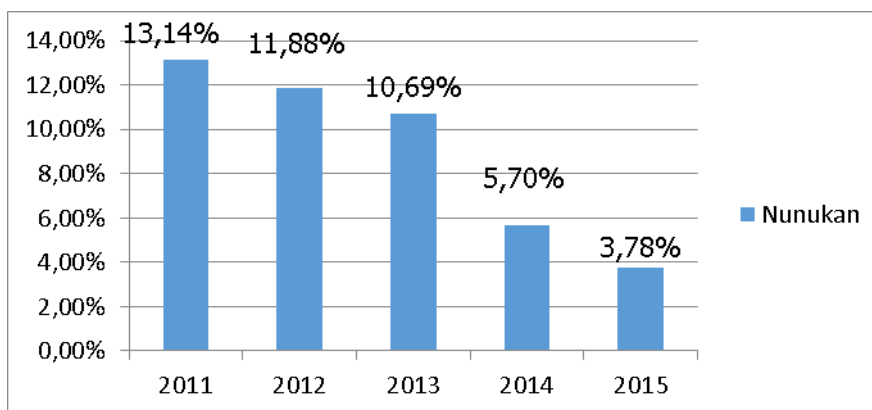
2.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Nunukan memiliki trend yang menurun dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015. Tingkat Pengangguran terbuka kabupaten Nunukan menurun dari 13.14% pada Tahun 2011 menjadi 3.78% pada Tahun 2014.

Hal ini menunjukkan bahwa program pengurangan jumlah pengangguran yang dilakukan pemerintah kabupaten Nunukan telah efektif pada periode tersebut. Jumlah lapangan kerja tidak terus meningkat akan mengimbangi jumlah pencari kerja sehingga daya serap penduduk pencari kerja naik secara signifikan.

Grafik 2.59
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Nunukan
Tahun 2011 – 2015

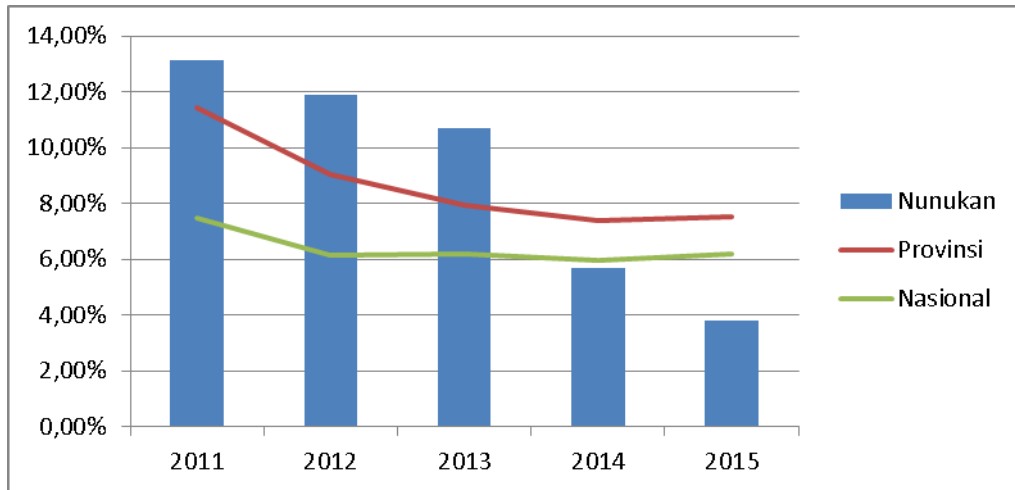


Sumber data : BPS Kabupaten Nunukan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nunukan, Provinsi dan Nasional memiliki trend yang sama. Trend TPT Nunukan memiliki tingkat kemiringan/slope yang lebih tajam dibandingkan tingkat kemiringan TPT Provinsi dan Nasional. TPT Kabupaten Nunukan mengalami penurunan dari 13.14% pada Tahun 2011 menjadi 3,78% pada Tahun 2015. Sejalan dengan itu, angka TPT Provinsi juga mengalami penurunan dari 11,43% pada Tahun 2011 menjadi 7,55% pada Tahun 2015. Nilai TPT Nasional juga mengalami penurunan dari 7.48% pada Tahun 2011 menjadi 6.48% pada Tahun 2015.

Dalam kurun waktu 2013 hingga 2014juga dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Nunukan berada dibawah target nilai TPT Provinsi dan Nasional. Hal tersebut menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Nunukan sudah cukup efektif sehingga harus dipertahankan dan juga terus ditigkatkan. Namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi

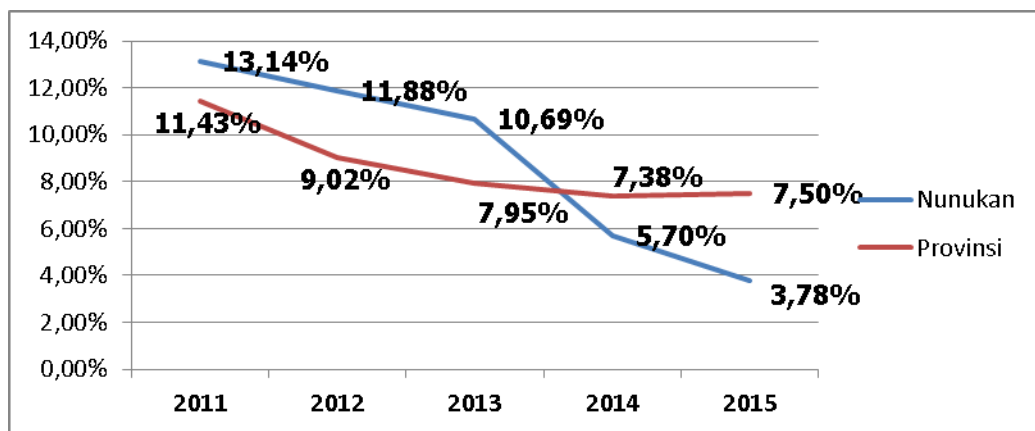
Grafik 2.60
Perbandingan TPT Kabupaten Nunukan
dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional



Sumber data : BPS Kabupaten Nunukan

Berikut ini grafik analisis Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nunukan dan Propinsi Kalimantan Timur :

Grafik 2.6
Analisis Relevansi dan Efektifitas Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nunukan
dan Propinsi Kalimantan Timur



Sumber data : BPS Kabupaten Nunukan

Grafik diatas menggambarkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Seperti terlihat pada grafik di atas, dari 13,14 % pada Tahun 2011 menjadi 3,78 % pada Tahun 2015. Di tingkat pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari 11,43 % pada Tahun 2011 menjadi 7,50 % pada Tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa ada relevansi perkembangan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Nunukan dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur.

Selain itu perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di tingkat Kabupaten Nunukan yang terus mengalami penurunan menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan cukup efektif dalam membuka kesempatan kerja .

Peningkatan produktifitas tenaga kerja (Sumber Daya Manusia) harus menjadi perhatian penting mengingat persaingan dalam dunia kerja setiap tahunnya semakin tinggi. Peningkatan SDM yang dilaksanakan tidak akan bermanfaat secara maksimal jika tidak diimbangi dengan penyediaan pasar kerja. Untuk itu Peningkatan Produktifitas dan penyediaan pasar harus dilakukan secara seimbang sehingga tingkat pengangguran dapat terus menurun.

2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

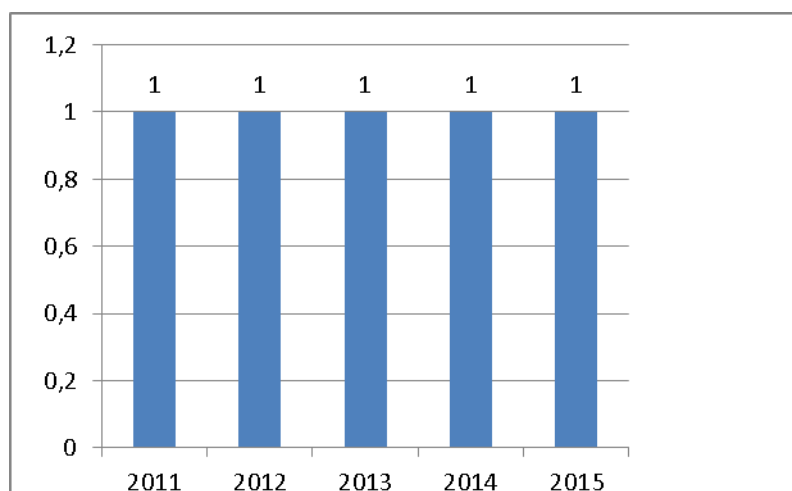
2.1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan masyarakat.

Selain merupakan lembaga yang sifatnya dari, oleh dan untuk rakyat, LPM adalah mitra pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Indikator jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini seharusnya dapat menggambarkan jumlah kelompok binaan LPM, sehingga dapat diketahui berapa banyak kelompok binaan yang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oleh LPM. LPM pada umumnya memiliki fungsi koordinatif dengan Pemda dan tidak memiliki kelompok binaan.

Grafik 2.7
Rata - rata Jumlah Kelompok Binaan LPM
Kabupaten Nunukan 2011 - 2015



Sumber data : BPS Kab. Nunukan

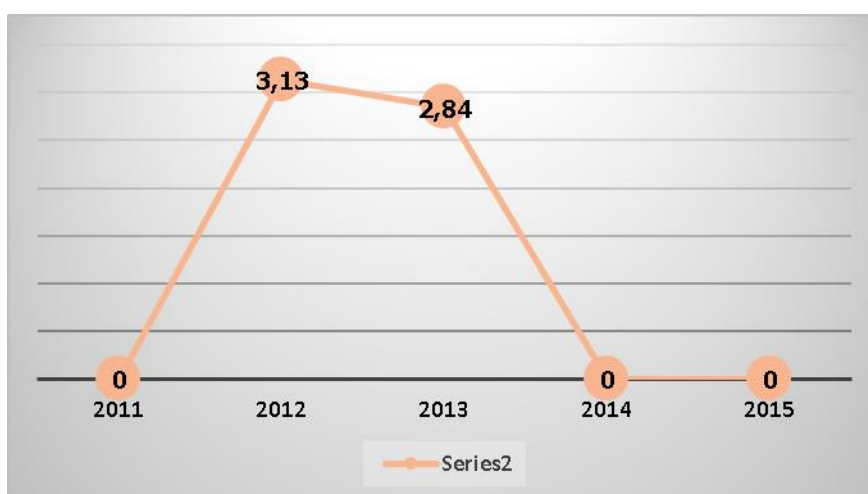
LPM hendaknya menjadi mitra yang efektif dalam pembangunan. Mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dapat menjadi kontributor yang efektif. Untuk itulah pemerintah yang mampu memfungsikan LPM ini akan mencapai tujuan pembangunan sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah. Koordinasi yang intensif perlu dilakukan di tingkat kelurahan, agar optimalisasi peran LPM menjadi lebih nyata kiprahnya dalam pembangunan.

2.2. Rata - rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

PKK atau yang biasa dikenal sebagai Pembinaan Kesejahteraan Keluarga merupakan wadah kegiatan untuk kaum wanita dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas. Tujuan PKK adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera seperti tujuan awal pergerakan PKK adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah serta mampu berperan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga, PKK memiliki 10 program pokok PKK. Dalam gerakannya PKK berorientasi kepada 10 program pokok tersebut. Melalui 10 program pokok ini maka aktivitas dan kreativitas ibu - ibu dapat tersalurkan. Upaya menyumbangkan ide, karya dan pengabdian para wanita melalui PKK ini dapat lebih efektif. Pertemuan yang bersifat rutin bulanan dapat menjadi media kekompakan warga dalam saling menginformasikan pembangunan yang berjalan di tingkat kampung maupun kelurahan. Bahkan PKK juga merupakan wadah koordinasi strategis yang menyambungkan program - program Kabupaten Nunukan hingga menyentuh ke masyarakat terbawah.

Grafik 2.8
Rata - rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Nunukan



Sumber data : PKK Kab. Nunukan

2.3. Jumlah LSM

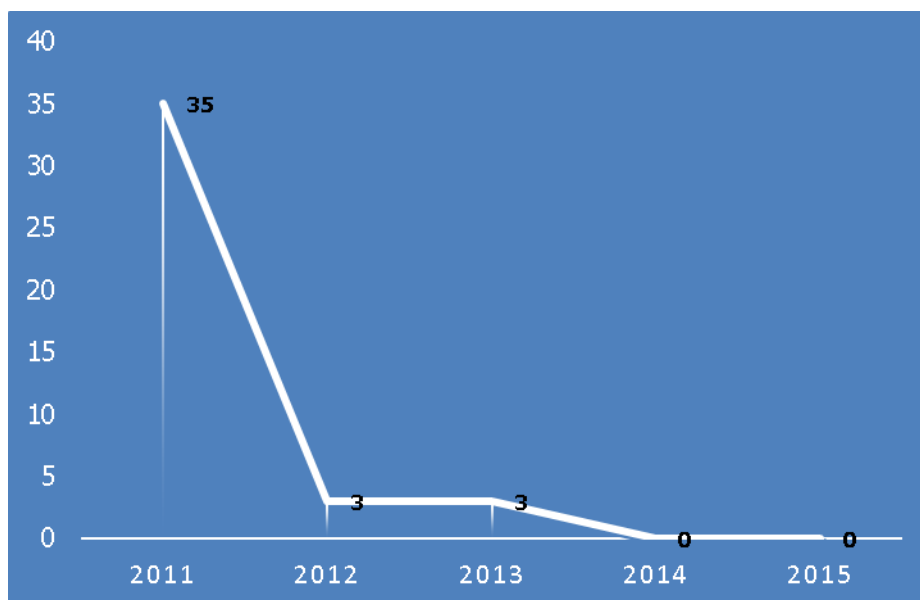
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan sebuah organisasi nirlaba yang didirikan oleh perorangan atau kelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Fungsi LSM melakukan fungsi pelayanan, fungsi kemanusiaan dan terkadang berperan sebagai jembatan penyalur aspirasi masyarakat.

Dilihat dari bentuknya, lembaga ini merupakan inisiatif dan bentukan dari masyarakat, maka bersifat mengikat secara sosial budaya di dalam lingkungan masyarakat. Kebutuhan terhadap lembaga ini didasarkan pada ikatan sosial budaya baik itu sifatnya kegotongroyongan. Untuk itulah maka lembaga ini memiliki tingkat kepedulian yang tinggi di dalam menyelesaikan masalah - masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Setiap masyarakat yang memiliki LSM tentunya memiliki daya tanggap yang lebih baik dalam pembangunan segala bidang.

Di bawah ini merupakan tabel informasi jumlah LSM di Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu 2010 hingga 2015.

Di Kabupaten Nunukan pada tahun 2011 - 2013 terjadi penurunan terbesar jumlah LSM dari 35 menjadi 3.

Grafik 2.9
Jumlah LSM Kabupaten Nunukan

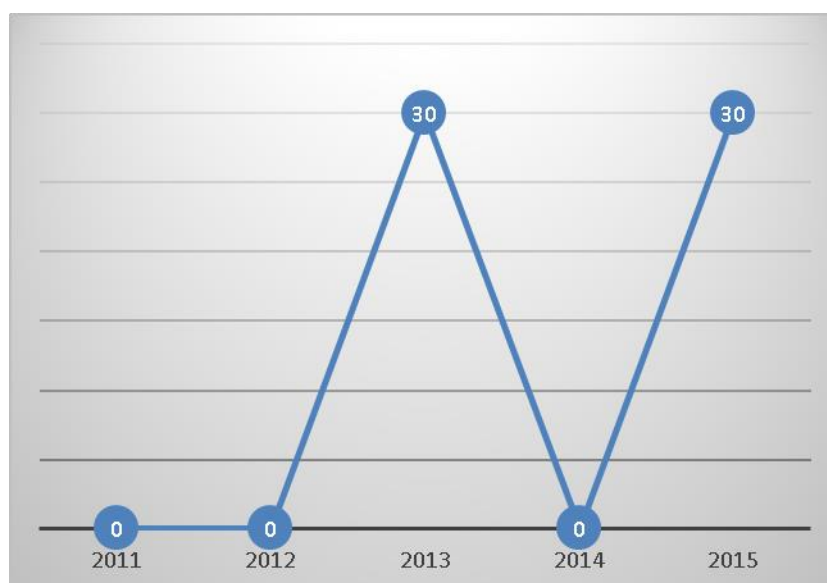


Sumber data : Badan Kesbangpol Kab. Nunukan

2.4. LPM Berprestasi

Untuk menggapai hasil pembangunan yang optimal, maka peran serta kelembagaan sosial masyarakat perlu diberikan rangsangan untuk mencapai prestasi. Untuk itulah dilakukan seleksi terhadap LPM untuk mendapatkan LPM berprestasi merupakan kebijakan yang sangat startegis untuk meningkatkan gerak keaktifan lembaga - lembaga tersebut. LPM berprestasi merupakan salah satu bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk LPM yang memiliki prestasi baik.

Grafik 2.10
LPM Berprestasi Kabupaten Nunukan



Sumber data : Badan Kesbangpol Kab. Nunukan

Tabel di atas menunjukkan bahwa di tahun 2013 dan 2015 memiliki kecenderungan yang sama jumlah LPM berprestasi.

2.5. **PKK Aktif**

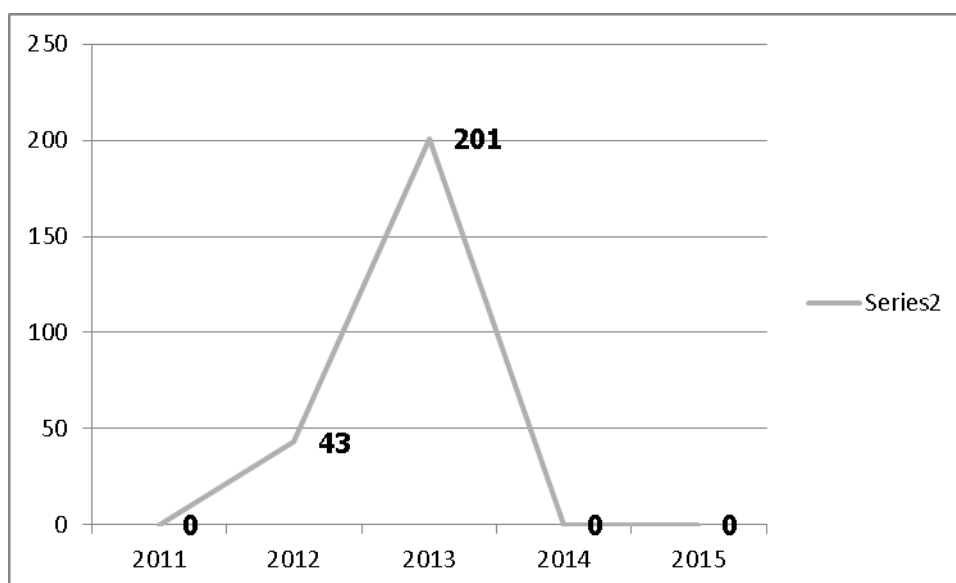
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangga masing - masing. Untuk itu peran PKK menjadi sangat strategis untuk merealisasikan visi dan misi pemerintah pada skup yang paling kecil. Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha - usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan.

Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran serta dalam mencapai tujuan. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu - ibu untuk meningkatkan kreativitas di berbagai bidang, yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga.

Kabupaten Nunukan memiliki kecenderungan peningkatan jumlah PKK aktif yang cukup tinggi pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012.

Pada organisasi PKK ini sesungguhnya terjadi integrasi antara pemerintah yang secara struktural menjadi pengatur dengan institusi terbawah sebagai pembentuk suatu pemerintahan, yaitu unsur keluarga. Sebenarnya jika mampu memaknai secara lebih hakiki kekuatan PKK ini maka suatu daerah akan berkembang. Namun sayangnya untuk mencapai pemaknaan hakiki tersebut masih butuh komitmen dari pemerintah dan para Pembina PKK untuk menggali hakikat organisasi ini.

Grafik 2.11
PKK Aktif Kabupaten Nunukan Tahun 2011 - 2015

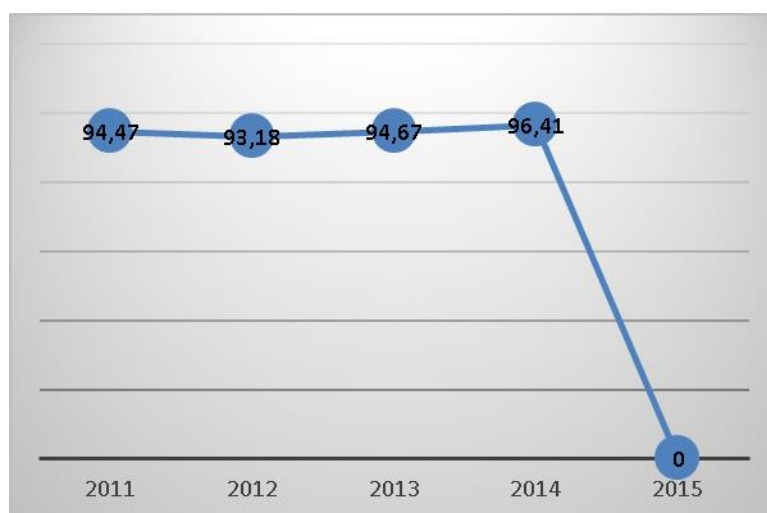


Sumber data : PKK Kab. Nunukan

2.6. Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyadaran akan kesehatan. Indikator posyandu aktif melihat jumlah posyandu yang aktif dibandingkan dengan total seluruh posyandu yang ada di wilayah tersebut. Presentase posyandu aktif di Kabupaten Nunukan dari tahun 2011 - 2013 mengalami Penurunan Pada tahun 2013 - 2014 mengalami kenaikan.

Grafik 2.12
Posyandu Aktif Kabupaten Nunukan 2011 – 2015



Sumber data : BPMPD Kab. Nunukan

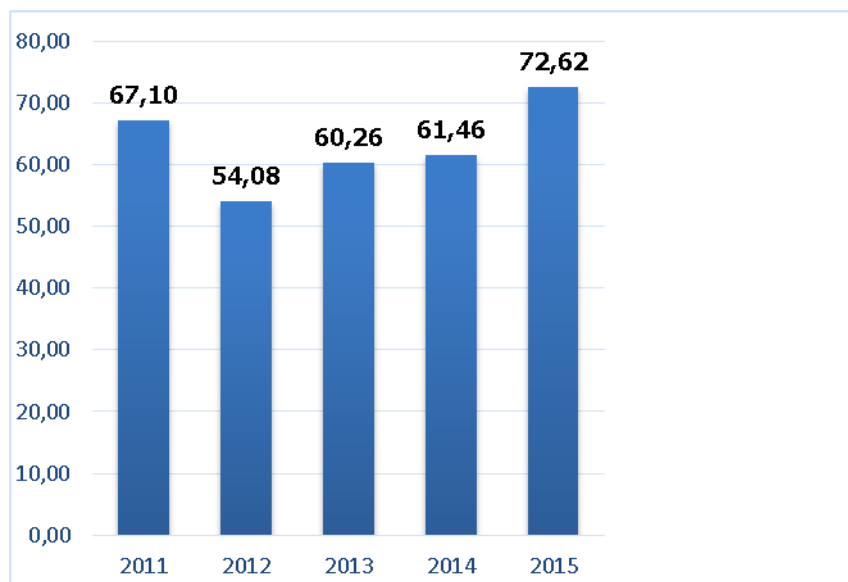
2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut. Pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 15 - 49 tahun. Angka cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS.

Sejak tahun 2011 - 2015 cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Nunukan bersifat fluktuatif. Hal tersebut terjadi karena jumlah peserta KB aktif mengalami naik turun yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Sedangkan jumlah pasangan usia subur cenderung mengalami kenaikan yang stabil dari tahun ke tahun. Jumlah peserta KB aktif tertinggi adalah pada tahun 2015 hingga mencapai 72,62% peserta Cakupan terendah terjadi pada tahun 2012 yang hanya sebesar 54,08%. Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN No 55/HK-010/B5/2010 target SPM untuk indikator cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif adalah 65% pada tahun 2014.

Grafik 2.13
Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Nunukan



Sumber data : BP2KBD Kab. Nunukan

2.8. Perhubungan

1) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis.

Keberhasilan pembangunan di Nunukan secara nyata telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut akan berdampak meningkatnya mobilisasi masyarakat dalam memenuhi aktifitasnya yang pada gilirannya akan membutuhkan pelayanan jasa transportasi baik darat, laut, udara dan pos telekomunikasi yang memadai. Pelayanan jasa transportasi yang diharapkan masyarakat yaitu tingkat keselamatan, keamanan, kelancaran dan kenyamanan yang lebih tinggi dengan kapasitas yang lebih besar, serta terpadu baik inter moda maupun antar moda transportasi lainnya.

Selain itu dalam menghadapi arus globalisasi, informasi dan reformasi sehingga mengakibatkan perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan masyarakat dimana transportasi adalah sebagai urat nadi perekonomian dengan demikian pada gilirannya membutuhkan pelayanan transportasi darat yang lebih efisien.

Tabel 2.61
Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Transportasi
Tahun 2011-2015

Komponen Transportasi	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Transportasi Darat					
Terminal					3
• Kelas A (unit)	0	0	0	0	0
• Kelas B (unit)	0	0	0	0	0
• Kelas C (unit)	0	0	0	0	3
Jumlah Jembatan Timbang					
Dermaga					20
• Komersil (unit)	0	0	0	0	1
• Perintis (unit)	0	0	0	0	19
Transportasi Laut					
Pelabuhan					
• Yang Diusahakan (unit)	0	0	0	1	2
• Luas Pelabuhan Penumpang (Ha)	0	0	0	0	3,5
• Luas Pelabuhan Angkutan Barang(Ha)	0	0	0	0	3
Transportasi Udara					
Bandara					
• Internasional	0	0	0	0	0
• Domestik	0	0	0	0	2
• Perintis	0	0	0	0	8

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan

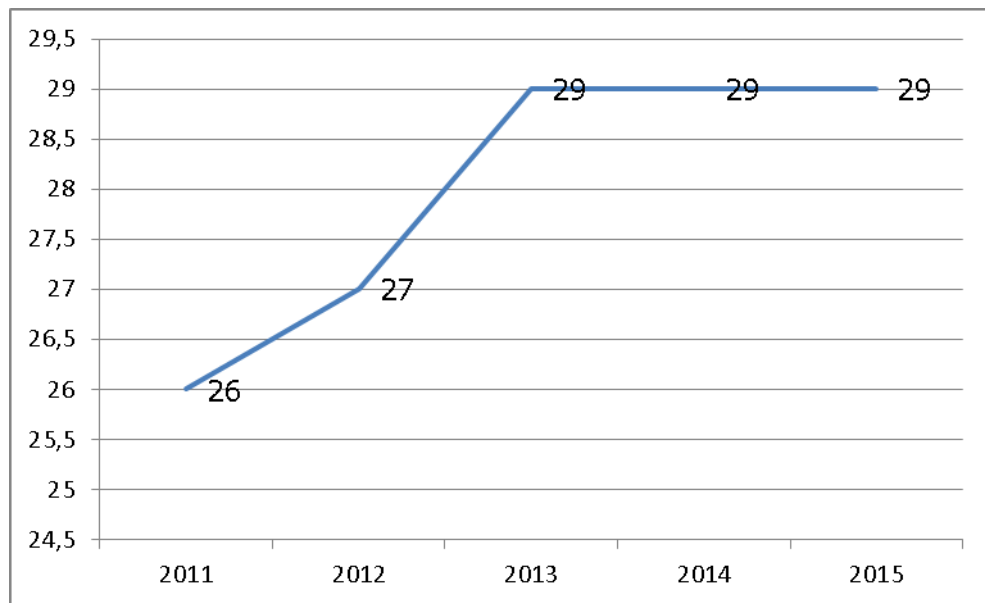
2.9. Perpustakaan

2.9.1. Jumlah Perpustakaan.

Perpustakaan merupakan sumber ilmu dan sumber referensi dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal. Untuk itu eksistensi perpustakaan menjadi sangat penting di daerah.

Jumlah perpustakaan yang berada di Kabupaten Nunukan sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami kenaikan.

Grafik 2.14
Jumlah perpustakaan Kabupaten Nunukan
Tahun 2011 - 2015



Sumber data : KPAD Kab. Nunukan

Jumlah perpustakaan yang semakin meningkat memiliki dampak bahwa pelayanan pendidikan bidang perpustakaan semakin meningkat. Kondisi ini harus disadari betul sebagai upaya melihat perkembangan sumber daya manusia karena jumlah perpustakaan tentu memiliki imbas terhadap peluang perkembangan garda depan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

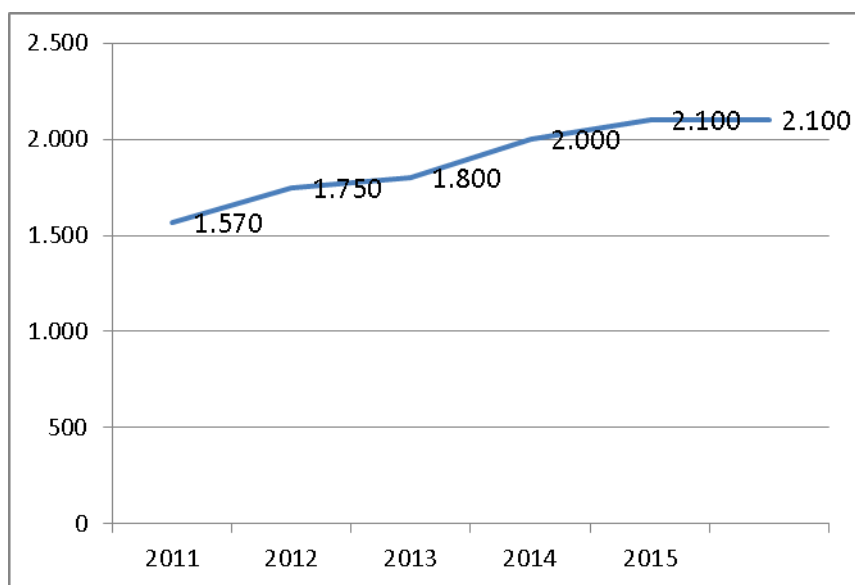
Jika keaktifan pelayanan perpustakaan ditingkatkan dengan alokasi buku - buku yang dibutuhkan masyarakat, maka ke depan akan semakin meningkat daya tarik perpustakaan di mata masyarakat. Kesanggupan manajemen perpustakaan yang efisien dan efektif dengan menggunakan pelayanan *on line* dan SIM yang selalu ditingkatkan maka akan menambah gairah para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk mengakses pelayanan tersebut.

2.9.2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun.

Keberadaan sebuah perpustakaan tidak terlepas dari pengunjungnya. Untuk itulah pengunjung perlu dimonitor sehingga dapat diketahui animo pengunjung dari waktu ke waktu. Indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menunjukkan pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam kurun waktu satu tahun.

Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Berdasarkan informasi yang tersedia terlihat bahwa Kabupaten Nunukan memiliki kecenderungan kenaikan pada tahun 2011 sampai tahun 2015.

Grafik 2.15
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Kabupaten Nunukan Per Tahun



Sumber data : KPAD Kab. Nunukan

Data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan. Kenaikan jumlah pengunjung ini menunjukkan minat membaca masyarakat yang semakin besar. Dengan demikian daya tarik perpustakaan dalam memberikan pelayanan juga meningkat. Namun kondisi ini perlu ditingkatkan dengan pelayanan yang lebih baik, dengan melengkapi informasi yang selalu *up date* dan fasilitas yang lebih baik.

2.10. Kearsipan

2.10.1. Pengelolaan Arsip Secara Baku

Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis dan perkembangan kekinian. Untuk itu sistem informasi kearsipan mestinya tersedia agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kearsipan ini. Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan aktivitas kegiatan pengelolaan arsip secara baku di kabupaten Nunukan. Pengelolaan arsip secara baku menjadi penting artinya mengingat pasal 3 UU No. 7 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kearsipan menyebutkan bahwa tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan

penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah.

Kabupaten Nunukan mengalami kenaikan jumlah pengelolaan arsip secara baku dari 6 SKPD sampai 8 SKPD (tahun 2012 ke 2013).

2.10.2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan aktivitas peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Nunukan. Kendati telah terjadi kenaikan jumlah kegiatan peningkatan SDM untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di tingkat daerah, khususnya ke dalam SKPD, akan tetapi masih perlu dioptimalkan terus menerus, seiring dengan kebutuhan yang semakin meningkat.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan secara optimal. Dimana sektor ini memberikan peluang yang sangat menjanjikan dengan luas areal laut ± 304,867 hektar menjadikan daerah ini dapat mengembangkan berbagai jenis budidaya kelautan dan perikanan. Mengingat posisi strategis Kabupaten Nunukan yang berada di ALKI II dan berbatasan langsung dengan Malaysia yang mana sektor kelautan dan perikanan sangat menjanjikan untuk dikembangkan secara optimal demi menggerakkan perekonomian daerah yang berdaya saing.

2.10.2.1. Produksi Perikanan Tangkap

Kabupaten Nunukan sebagai Kabupaten yang memiliki wilayah pesisir dengan panjang garis pantai kurang lebih 314, 59 KM tentunya memiliki potensi perikanan tangkap baik laut maupun perairan sungai dan danau dengan produksi perikanan tangkap tahun 2017 sebesar 4.108,34 ton turun jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 4.352,95 ton. Hal ini dikarenakan banyaknya nelayan tangkap dan perairan umum yang memerlukan armada yang baru dengan kapasitas minimal 30 GT untuk penangkapan ikan sehingga diharapkan hasil tangkapan dapat mengalami kenaikan. Rata-rata kapal yang digunakan saat ini oleh nelayan-nelayan di Kabupaten Nunukan berukuran 1-10 GT sehingga kapasitas hasil tangkapannya lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran kapal yang mencapai 35 GT yang merupakan bantuan dari kementerian sebanyak 3 unit dari tahun 2013-2015.

Tabel 2.62
Produksi Perikanan (ton) Tangkap Perairan Umum
di Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2017

Produksi Perikanan Penangkapan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1. Perikanan Laut	4.200,80	4.250,79	4.301,76	4062,33	4.014,34
2. Perairan Umum	128,50	134,40	144,91	290,62	94,00

Sumber data: Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2013-2018

2. Produksi Perikanan Budidaya

Budidaya ikan di Kabupaten Nunukan sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, meskipun tidak terjadi secara merata. Pengembangan budidaya ikan di Kabupaten Nunukan meliputi budidaya di tambak (kolam air payau), kolam ikan tawar maupun kegiatan budidaya rumput laut. Berdasarkan data eksisting yang ada perikanan budidaya terbesar didominasi oleh budidaya rumput laut dimana produksi rata-rata pertahun rumput laut basah adalah sebesar 329.349,69 ton dan produksi ini membuat Kabupaten Nunukan merupakan salah Kabupaten penghasil rumput terbesar di Indonesia dengan rantai pemasaran ke Makassar dan Surabaya. Pada tahun 2017 produksi perikanan budidaya sebesar 330.292,98 ton mengalami kenaikan produksi jika dibandingkan produksi tahun 2016 sebesar 298.003,63 ton.

Tabel 2.63
Produksi Perikanan (ton) Budidaya
di Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2017

Produksi Perikanan Budidaya	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1. Laut/Rumput laut	206.713,13	250.300,00	271.717,68	297.337,50	329.349,69
2.3. Tambak	2.056,71	824,89	1.084,50	626,18	914,82
2.4. Kolam	0,00	0,00	22,92	17,86	28,47
2.5. Keramba	0,10	5	0,00	19,00	0,00
2.6. Jaring Apung	0	0	0,00	0,00	0,00
2.7. Sawah	10,63	4,80	4,45	3,09	0,00

Sumber data: Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2013-2018

Jumlah produksi perikanan budidaya tambak erat kaitannya dengan luas tambak yang ada di Kabupaten Nunukan. Namun demikian, apakah luasan tambak yang berkurang justru menyebabkan jumlah produksi tambak meningkat.

3. Jumlah Rumah Tangga Perikanan

Rumah tangga perikanan tangkap adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual. Jumlah rumah tangga perikanan (RTP) berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah RTP di Kabupaten Nunukan tercatat 2.117 rumah tangga atau turun sebesar 4,47 persen dibandingkan tahun 2015 sebesar 2.216 rumah tangga.

Tabel 2.64

Jumlah RTP di Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2018

Jumlah RTP	2013	2014	2015	2016	2017
Perikanan Laut	1.746	1.895	1.918	2.050	1.935
Perairan Umum	162	177	177	166	182
Total	1.908	2.072	2.095	1.216	2.117

Sumber data: Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2013-2018

B. Pariwisata

1. Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang memengaruhi perekonomian daerah. Eksistensinya mampu menjadi penggerak sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan penyedia akomodasi. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sektor pariwisata turut berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian di suatu daerah atau wilayah adalah melalui besarnya jumlah kunjungan maupun jumlah wisatawan yang menginap di hotel/penginapan.

Sebagai Kabupaten yang letaknya di perbatasan Negara, pariwisata memegang peranan penting didalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pariwisata bukan merupakan sektor ekonomi yang perlu dibangun dari awal. Mengingat banyaknya potensi pariwisata di Kabupaten Nunukan maka pengelolaannya perlu dilakukan secara baik dan benar.

Kedatangan tamu asing atau jumlah wisatawan asing dengan dan tanpa visa yang mengunjungi Kabupaten Nunukan pada tahun 2015 mencapai 11.650 pengunjung asing. Dari keseluruhan wisatawan asing tersebut sekitar 97,67 % atau 11.379 pengunjung merupakan wisatawan yang berasal dari Negara Malaysia. Tamu asing dari Negara eropa dengan dan tanpa visa pada tahun 2015 mencapai 92 wisatawan. Sedangkan tahun 2017 kedatangan tamu asing tahun 2017 mengalami kenaikan mencapai 11.674 pengunjung asing. Dari keseluruhan wisatawan asing tersebut sekitar 96,27 % atau 11.239 pengunjung merupakan wisatawan yang berasal dari Negara Malaysia. Sedangkan kunjungan tamu asing dari Negara eropa dengan dan tanpa visa mengalami kenaikan pada tahun 2017 mencapai 175 wisatawan.

Melihat kenaikan kunjungan wisatawan atau kunjungan tamu diatas maka potensi pengembangan obyek wisata, akomodasi dan jasa hatrus terus dimaksimalkan sehingga minat dan daya tarik wisatawan akan terus naik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tabel 2.65
Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Nunukan
Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Keseluruhan Tamu Asing	12.902	12.468	11.650	10.854	11.674
Jumlah Tamu Asing Negara Eropa	106	101	92	94	175

Sumber data: Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2013-2018 diolah

2. Jumlah Obyek Wisata

Jumlah obyek wisata yang ada dikabupaten Nunukan terbagi menjadi dua bagian yaitu alam dan buatan. Obyek wisata andalan di Kabupaten Nunukan adalah obyek wisata alam sebanyak 89 obyek dan obyek wisata buatan 4 obyek untuk tahun 2015. Obyek wisata alam kebanyakan berada di Wilayah Krayan yang notabene merupakan Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang. Kawasan ini merupakan obyek yang diminati oleh wisatawan mancanegara (eropa) khususnya wisatawan minat khusus *Adventure*. Hingga tahun 2017 obyek wisata alam di Kabupaten Nunukan bertambah menjadi 55 obyek wisata, sedangkan obyek buatan bertambah menjadi 18 obyek wisata. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan terus menerus berbagai pelaku pariwisata (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Nunukan mengingat posisi strategisnya di wilayah perbatasan Negara.

Tabel 2.66
Banyaknya Obyek Wisata Di Kabupaten Nunukan
Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Keseluruhan Tamu Asing	12.902	12.468	11.650	10.854	11.674
Jumlah Tamu Asing Negara Eropa	106	101	92	94	175

Sumber data: Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2013-2018 diolah

C. Pertanian

Salah satu sektor yang memiliki peran dalam penggerak ekonomi daerah Kabupaten Nunukan adalah sektor pertanian dalam arti luas yang terbagi atas pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Potensi luas wilayah pertanian yang digunakan di Kabupaten Nunukan adalah seluas 77.337,17 Ha. Untuk itu maka kegiatan pertanian di Kabupaten Nunukan harus didorong untuk berkembang dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan penduduk di Kabupaten Nunukan dan meningkatkan pendapatan demi kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan konsep pengembangan dan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, yaitu dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Sebagai pilar ekonomi masyarakat, maka dalam pembangunan pertanian ini harus memperhatikan komoditi unggulan yang ramah lingkungan, memiliki nilai ekonomi tinggi serta kontinuitas komoditi yang berkelanjutan.

Pertanian tanaman pangan di Kabupaten Nunukan yang potensial dikembangkan adalah padi (sawah dan gunung) dan palawija, ubi-umbian, hortikultura (sayuran dan buah). Mengingat beras merupakan bahan makanan pokok masyarakat di Kabupaten Nunukan, sehingga dalam upaya mencukupi kebutuhan beras secara aman dan mandiri, maka tanaman padi mendapat skala prioritas dalam pengembangannya serta peningkatan produksi yang tujuannya untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi ancaman bahaya kelaparan. Namun hingga saat ini Kabupaten Nunukan belum mampu berswasembada beras dan mencukupi kebutuhan beras penduduk masih harus didatangkan dari luar Kabupaten terutama dari pulau Jawa dan Sulawesi. Akan tetapi khusus untuk wilayah Krayan produksi pertanian justru mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya (swasembada) bahkan sebagian dijual ke Malaysia (Negara tetangga).

Sejalan dengan visi dan misi dalam RPJMD 2016-2021 yaitu mewujudkan Kabupaten Nunukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis agrobisnis menuju masyarakat yang maju aman adil dan sejahtera maka sektor pertanian dalam arti luas memegang peranan yang sangat penting dan utama untuk mewujudkannya. Disamping itu sektor pertanian merupakan sektor primer yang mendominasi aktivitas perekonomian di Kabupaten Nunukan, sehingga revolusi di bidang pertanian perlu ditingkatkan untuk memberikan hasil yang lebih baik dari segi kuantitas dan kualitas sehingga diupayakan sektor ini menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi daerah.

Upaya-upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya padi telah ditempuh dengan berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi baik lahan basah maupun lahan kering atau sawah tadah hujan. Dengan demikian budidaya padi dilakukan dilahan sawah yang memiliki irigasi baik. Pada tahun 2017 luas panen padi (sawah dan lading) di Kabupaten Nunukan mengalami kenaikan sebesar 11,75%. Kecamatan krayan adalah daerah yang mempunyai luas panen padi sawah yang paling besar dibandingkan kecamatan yang lain, yaitu 46,90 % dari total luas panen.

Produksi padi hingga pada tahun 2017 mencapai 28.231 ton dengan produktivitas 49,02 kuintal per hektar. Produksi ini naik dari target yang ditentukan sebesar 26.925 ton. Hal ini tentunya program intensifikasi dan ekstensifikasi berjalan dengan baik. Namun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk peningkatan produksi tentunya harus terus diupayakan untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah sehingga dapat mengurangi konsumsi bersa dari luas daerah.

Tanaman palawija dan buah - buahan yang dibudidayakan oleh masyarakat di Kabupaten Nunukan diantaranya jagung, ubi kayu, ubi jalar, semangka, melon dan jeruk juga memiliki potensi yang cukup besar dan menjanjikan kedepan dengan total luasan tanaman palawija 1.557 ha dan tanaman buah - buahan sebesar 2.670 ha yang akan mendukung program agrobisnis di kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan. Tanaman palawija dan buahan-buaha ini sangat potensial untuk ditingkatkan dalam kaitannya untuk pemanfaatan lahan, peningkatan kecukupan gisi masyarakat dan pendapatan petani.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produksi pertanian diantaranya sarana-prasarana irigasi yang belum memadai dan perlunya di bangun sarana-prasarana irigasi yang sesuai dengan kondisi eksisting lahan sawah masyarakat khususnya di daerah krayan selatan. Kendala yang lainnya adalah sumber daya manusia patninya yang semakin tahun-semain berkurang mengingat banyak anak dari petani yang lebih tertarik bekerja dilar bidang pertanian.

Sementara untuk komoditas perkebunan yang ada di Kabupaten Nunukan adalah kelapa sawit, karet, kakao, kopi yang hingga saat ini belum secara optimal memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produksi yang tentunya tidak memberikan dampak yang lebih baik kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat pekebun. Pada tahun 2017 komoditi kelapa sawit menjadi salah satu komoditi dengan produksi terbesar yaitu menjadi sebesar 367.879,70 ton (hanya perkebunan rakyat), diikuti oleh komoditi kakao dengan produksi sebesar 1.194,71 ton.

Jumlah populasi hewan ternak terbesar di Kabupaten Nunukan tahun 2017 didominasi oleh ternak sapi potong yaitu sebesar 46,17%, ternak babi sebesar 22,62%, ternak kerbau sebesar 18,35% dan ternak kambing 12,50%. Pada tahun 2017 populasi unggas didominasi oleh ayam ras pedaging, yaitu 88,47% dari total pupulasi unggas.

1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Saat ini sektor unggulan yang ada di Kabupaten Nunukan dalam mendukung potensi pendapatan daerah adalah sektor non pertanian (pertambangan dan penggalian) namun dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan utama bagi masyarakat Kabupaten Nunukan dan sesuai dengan visi RJPMD 2016-2021 yang menekankan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis agrobisnis maka sektor pertanian khususnya tanaman pangan perlu mendapat perhatian dalam pembangunannya yang dituangkan kedalam RPJMD ini. Produksi suatu tanaman merupakan pengukuran dari tanaman yang dipanen per satuan luas lahan. Sedangkan produktivitas tanaman menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan suatu produk atau komoditi tanaman per satuan luas lahan. Ada beberapa factor yang mempengaruhi produktivitas tanaman diantaranya factor genetic,

Tabel 2.67
Produktivitas padi (kwt/ha) Tahun 2013-2017
di Kabupaten Nunukan

Provinsi/Kabupaten	Produktivitas (kwt/ha)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Nunukan	43,02	45,00	45,80	45,91	41,66
Provinsi Kalimantan Utara	34,72	34,71	27,27	N/a	N/a

Sumber Data : Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2018 diolah.

Produktivitas rata-rata padi Tahun 2013-2017 adalah 41,66-45,91 kuintal per hektar jauh diatas produksi rata-rata provinsi Kalimantan Utara berkisar antara 27,27-34,72 kuintal per hektar. Meskipun produktivitas padi ditahun 2017 mengalami penurunan menjadi 41,66 kuintal per hektar disbanding tahun sebelumnya 45,91 kuintal per hektar. Hal ini membuktikan dengan adanya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian serta penggunaan bibit unggul dan didukung dengan irigasi yang baik dan tersedia maka produksi padi terus mengalami peningkatan.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses/upaya pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada akan membentuk suatu kemitraan antara pemerintah daerah dunia usaha untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan tentunya dari sisi pengembangan ekonomi wilayah tersebut akan terus mengalami pertumbuhan. Salah satu yang terus diupayakan adalah pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian atau dalam pengertian agribisnis mengingat sektor ini merupakan sektor yang dapat terus diupayakan (dapat diperbaharui) sehingga kelanjutannya akan terus dirasakan oleh masyarakat.

2. Luas Lahan Sawah

Ketersediaan lahan sawah di Kabupaten Nunukan terus mengalami perubahan dan fluktuatif dari tahun ketahun. Salah satunya semakin maraknya diversifikasi komoditi SDA khususnya sektor perkebunan dalam hal ini kelapa sawit. Disamping itu adanya aktivitas masyarakat seiring dengan bertambah jumlah penduduk menjadikan lahan-lahan yang tadinya berpotensi untuk pengelolaan pertanian justru mengalami konversi lahan yang cukup banyak guna memenuhi kebutuhan lahan baik tempat tinggal maupun usaha.

Potensi luas lahan sawah paling besar terdapat di Kecamatan Krayan dengan luas 2.635 Ha jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sehingga menjadikan krayan sebagai penyumbang lahan sawah tersbesar di Kabupaten Nunukan dengan nilai kontribusi sebesar 41,62%. Sedangkan luas lahan sawah yang terus mengalami penurunan adalah Kecamatan di pulau sebatik (lima kecamatan). Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah bagaimana mempertahankan luas lahan yang ada saat ini untuk terus berproduktivitas dengan intensifikasi teknik pertanian yang dikembangkan sehingga tidak mengganggu ketersediaan pangan.

Tabel 2.68
Luas Lahan Sawah Tahun 2013-2017 (Ha)
di Kabupaten Nunukan

No	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Krayan Selatan	846	838	969	969	969
2	Krayan	2.376	3.345	2.634	2.634	2.635
3	Lumbis Ogong	5	5	2	2	2
4	Lumbis	720	728	279	279	279
5	Sembakung	0	0	0	0	0
6	Atulai	634	634	490	489	490
7	Sembakung	253	279	287	288	287
8	Sebuku	44	14	11	0	1
9	Tulin Onsoi	130	130	130	130	130
10	Sei Menggaris	162	365	389	389	389
11	Nunukan	478	395	395	395	393
12	Nunukan Selatan	736	421	368	285	285
13	Sebatik Barat	133	122	86	88	86
14	Sebatik	102	281	284	284	280
15	Sebatik Timur	20	16	3	3	3
16	Sebatik Tengah	63	157	101	101	101
	Sebatik Utara					
	Kab. Nunukan	6.702	7.730	6.428	6.336	6.330

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2018.

Ketersediaan lahan pertanian hanya akan memberikan fungsi produksi apabila didukung dengan ketersediaan air dan jaringan irigasi sampai ke petak sawah, sehingga produksi padi dapat terus menerus meningkat. Disamping itu untuk menyediakan benih padi sampai saat ini produksi penangkar benih masig terbatas di Kabupaten Nunukan dengan luas dan produksi benih yang masih perlu ditingkatkan.

Disamping itu ada beberapa lahan sawah tadah hujan khususnya di daerah Krayan yang belum didukung secara keseluruhan saran irigasinya. Dan sampai saat ini penanaman padi hanya satu kali dalam setahun. Khususnya di Krayan perlu adanya perlakuan khusus dalam upaya peningkatan produksinya secara khusus melalui percetakan sawah organik sehingga peningkatan produksi bisa meningkat tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Luas Lahan dan Produksi Palawija

Pemanfaatan lahan untuk pertanian dengan berbagai komofitas di Kabupaten Nunukan, meliputi jenis tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar.

Tabel 2.69
Luas Lahan dan Produksi Palawija Tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan

No	Komoditi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jagung					
	Produksi (Ton)	225	177	175	39	806,12
	Luas Panen (Ha)	109	83	80	18	372
	Produktivitas (Ku/Ha)	20,67	21,00	21,86	21,87	21,66
2	Kedelai					
	Produksi (Ton)	17	19	19	15	12
	Luas Panen (Ha)	16	17	17	14	11
	Produktivitas (Ku/Ha)	10,87	11,00	10,94	10,71	10,90
3	Kacang Tanah					
	Produksi (Ton)	103	80	94	97	90,97
	Luas Panen (Ha)	96	92	86	90	84
	Produktivitas (Ku/Ha)	10,74	11,00	10,94	10,78	10,82
4	Kacang Hijau					
	Produksi (Ton)	31	9	17	32	30
	Luas Panen (Ha)	28	8	15	29	27
	Produktivitas (Ku/Ha)	10,91	11,00	11,06	11,03	11,11
5	Kacang Ubi Kayu					
	Produksi (Ton)	20.186	26.846	23.922	21.800	21.398,18
	Luas Panen (Ha)	1.465	1.238	1.101	218.22	950
	Produktivitas (Ku/Ha)	137,79	217,00	217,28	21,800	225,24
6	Ubi Jalar					
	Produksi (Ton)	1.272	988	943	853	779
	Luas Panen (Ha)	142	110	105	95	87
	Produktivitas (Ku/Ha)	89,57	90,00	89,77	89,79	89,54

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2018.

Jumlah komoditas palawija paling banyak ditanami jenis dengan luasan panen dan produksi adalah ubi kayu, ubi jalar, jagung, kacang tanah, kacang hijau dan kedelai. Luasan panen palawija khususnya ubi kayu mencapai 950 Ha dengan produksi 21.398,18 ton.

Perkembangan luasan lahan palawija di Kabupetn Nunukan untuk setiap jenis palawija secara umum menunjukkan penurunan jumlah luasan panen dan produksi hingga tahun 2017. Padahal palawija merupakan salah satu bentuk diversifikasi pangan selain pangan utama (beras) sangatlah penting keberadaannya untuk terus ditingkatkan dan diusahakan. Dengan semakin banyaknya palawija yang tersedia disuatu daerah maka akan semakin memberikan dampak terhadap kecukupan bahkan peningkatan gizi masyarakat sehingga pola-pola pengembangan diversifikasi pangan dianggap berhasil dengan peningkatan dan jaminan kecukupan gizi bagi masyarakat.

4. Luas Lahan Perkebunan

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomi dan sosial berperan besar dalam perekonomian nasional. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengamanatkan tujuan perkebunan adalah untuk :

- a). Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b). Meningkatkan sumber devisa negara;
- c). Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d). Meningkatkan produksi, produktifitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar;
- e). Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- f). Memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
- g). Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung-jawab dan prestasi, serta
- h). Meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Sumbangan sub sektor perkebunan dalam dalam struktur ekonomi pertanian nasional sangat besar, baik berupa pertumbuhan sektoral maupun bagi perekonomian nasional. Secara umum hal ini dapat dilihat dari pembentukan PDB, devisa, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, perdagangan internasional dan sumber bahan baku industri.

Pertambahan luas tanaman komoditas perkebunan akan memberikan pertambahan nilai bagi PDRB Kabupaten Nunukan. Hal ini berkaitan dengan jumlah komoditas perkebunan diharapkan akan meningkat pula seiring dengan penambahan luas lahan tanaman, sehingga memberikan dampak positif pada kontribusinya terhadap perekonomian dalam hal ini kontribusi terhadap PDRB.

Tabel 2.70
Luas Areal (Ha) Tanam Komoditas Perkebunan
di Kabupaten Nunukan Tahun 2017

No	Komoditas	Perkebunan Besar	Perkebunan Rakyat	Jumlah	%
1	Kelapa Sawit	77.155,50	29.991,50	107.147,00	97,95
2	Kakao	-	1.427,00	1.427,00	1,30
3	Kelapa dalam	-	366,39	366,39	0,33
4	Karet	-	173,00	173,00	0,16
5	Kopi	-	54,70	54,70	0,05
6	Lada	-	97,10	97,10	0,09
7	Panili	-	3,00	3,00	0,00
8	Cengkeh	-	100,80	100,80	0,09
9	Tebu	-	16,00	16,00	0,01
Jumlah		77.155,50	32.229,49	109.384,99	100

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2018.

Luas tanam perkebunan di Kabupaten Nunukan didominasi tanaman perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan untuk perkebunan besar swasta 77.155,50 Ha perkebunan rakyat 29.991,50 Ha. Sementara untuk tanaman kakao seluas 1.427,00 Ha. Tren untuk penambahan luas tanam komoditi perkebunan adalah kelapa sawit, kelapa dalam dan karet.

5. Populasi dan Produksi Peternakan

Populasi unggas di Kabupaten Nunukan pada Tahun 2017 didominasi oleh ayam pedaging dengan populasi sebanyak 611.170 ekor, ayam buras 70.072 ekor, diikuti oleh ternak ayam Nunukan sebanyak 250 ekor, lalu ternak itik sebanyak 9.374 ekor. Sedangkan ternak besar ataupun kecil seperti kerbau dan sapi potong dengan populasi masing - masing sebanyak 3.698 dan 9.182 ekor, sedangkan ternak babi dan kambing dengan populasi sebanyak 4.499 ekor, ternak kambing sebanyak 2.485 ekor, lalu ternak Domba sebanyak 69 dan Kuda 1 ekor.

Sementara untuk produksi peternakan didominasi oleh ayam ras pedaging sebanyak 456.544 kg, ternak sapi potong sebanyak 73.456 Kg, lalu diikuti oleh produksi ayam buras sebanyak 50.766 Kg. Ternak itik jumlah produksi sebanyak 10.336 Kg, ternak babi 2.117 Kg, ternak kerbau sebesar 2.715 Kg. Rata-rata produksi peternakan dari tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif dimana untuk ternak besar seperti sapi, kerbau, kambing, babi terus mengalami penurunan. Sedangkan jumlah ternak unggas justru terus mengalami peningkatan produksi daging dimana produksi tertinggi adalah ayam ras pedaging.

Tabel 2.71
Jumlah Populasi dan Produksi Peternakan Menurut Jenis Ternak
di Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2017

No	Komoditi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	Populasi (Ekor)					
1	Sapi Potong	8.847	8.266	8.150	8.632	9182
2	Kerbau	3.242	3.473	3.332	3.663	3698
3	Kuda	7	7	1	1	1
4	Kambing	2.529	2.964	2.342	2.430	2485
5	Domba	13	66	187	189	69
6	Babi	3.845	4.660	4.349	4.106	4499
7	Ayam Buras	78.300	60.784	69.643	65.036	70072
8	Ayam Ras Petelur	9.000	25.100	25.100	0	0
9	Ayam Ras Pedaging	330.25 0	96.928	128.30 0	330.20 0	611170
10	Ayam Nunukan	604	150	150	150	250
11	Itik	13.688	13.721	12.490	12.453	9374
B	Produksi Daging (Kg)					
1	Sapi Potong	100.15 9	130.80 7	125.12 0	71.565	73456
2	Kerbau	15.464	7.925	9.472	580	2715
3	Kuda	0	0	0	0	0
4	Kambing	18.954	6.751	4.409	11.043	5282
5	Domba	0	0	0	127	0
6	Babi	47.306	40.768	29.999	14.999	2117
7	Ayam Buras	80.451	85.739	74.057	83.897	50766
8	Ayam Ras Petelur	4.050	4.050	11.295	11.295	0
9	Ayam Ras Pedaging	246.69 7	147.23 0	95.840	246.65 9	456544
10	Ayam Nunukan	0	0	0	0	0
11	Itik	8.966	9.585	9.459	5.183	10336
C	Produksi Telur (Kg)					
1	Ayam Buras	34.115	38.408	31.292	29.519	26501
2	Ayam Ras Petelur	75.145	71.190	198.54 1	198.54 1	0
3	Itik	47.475	51.338	53.737	48.786	49429

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2018.

6. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Potensi perkebunan juga merupakan salah satu potensi yang sangat menjanjikan dan dapat membuka peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kabupaten Nunukan yang cukup banyak. Dengan beroperasinya 6 (enam) buah pabrik CPO untuk perkebunan Kelapa Sawit di daerah ini tentu akan lebih menjadikan sektor ini menjadi salah satu andalan didaerah. Disamping itu, tanaman Kakao yang ada di Pulau Sebatik yang sejak dahulu memiliki kualitas yang sangat baik sebagai salah satu komoditi ekspor yang memiliki peluang yang sangat besar.

Pada tahun 2016 sumbangan sub sektor perkebunan terhadap pembentukan PDB Nasional adalah IDR 471,307 triliun atau 26,40% dari PDB Sektor Pertanian senilai IDR 1.785 triliun. Saat ini sektor pertanian menghidupi sejumlah 26,1 juta rumah tangga. Peranan yang cukup besar juga terlihat dari sumbangan ekspor komoditas perkebunan senilai USD 33,05 miliar dan penyediaan bahan baku industri, sebagai bagian dari ketahanan pangan dan energi nasional. Pada tahun 2017, kelapa sawit menjadi penghasil devisa terbesar dari ekspor komoditas non migas.

Di Kabupaten Nunukan sub sektor perkebunan memiliki peranan yang strategis, baik dalam struktur ekonomi daerah maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2016, sumbangan sub sektor perkebunan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Nunukan mencapai 6,48% atau senilai IDR 1.423.263.640.000,-. Ini merupakan 35,83% dari sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB senilai IDR 3.972.255.540.000,-. Hal ini meningkat dari IDR 1.044.517.200.000,- pada tahun 2016 atau 36,26%. Peningkatan kontribusi terbesar dari sektor pertanian dalam periode yang sama.

Tabel 2.72
Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Perkebunan di Kabupaten Nunukan Tahun 2013 - 2017

No	Komoditi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A Luas Areal (Ha)						
1	Karet	0	293	270	268	173,00
2	Kelapa	11,40	498,1	410,10	407,1	366,39
3	Kelapa Sawit	18.592	22.404	22.404,30	23.752,30	107.147,00
4	Kopi	63,70	122,7	92,40	85,2	54,70
5	Lada	20,46	34,05	31,05	41,25	97,10
6	Kakao	6.514	5.487,7	5.455,50	5.165	1.427,00
7	Panili	12,26	8,51	0	8,51	3,00
8	Cengkeh	0	0	0	0	100,80
B Produksi (Ton)						
1	Karet	0	0	0	0	0
2	Kelapa	167.937	239.834,0	120,12	254,520	175.110,00
3	Kelapa Sawit	32.036.262	303000	191.525,00	371.989,785	1.657.799.120,00
4	Kopi	168.232,00	175.527	71,87	63.450	58.140,00

5	Lada	3.501	28.420	13,51	29.400	70.750,0 0
6	Kakao	7.151. 550	11.881 .670	6.309,8 4	5.371.014	1.194.70 5,00
7	Panili	0	0	0	0	0
8	Cengkeh	0	0	0	0	4.420,00
C	Produktivitas (Kg/Ha)					
1	Karet	0	0	0	0	0
2	Kelapa	420	421	0	840	642,13
3	Kelapa Sawit	14.233	14.233	0	21.189,6	16.363,8 1
4	Kopi	700	696	0	1.350	938,21
5	Lada	700	700	0	1.400	1.538,04
6	Kalkao	1.281	1.213	0	1.225,14	624,14
7	Panili	0	0	0	0	0
8	Cengkeh	0	0	0	0	

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2018.

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2018.

D. Kehutanan

Hutan mempunyai tiga fungsi pokok yaitu fungsi lindung, konservasi dan produksi. Tiga fungsi pokok tersebut diatur didalam UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Menurut UU kehutanan berdasarkan fungsi pokok sebagai Hutan Lindung dan Konservasi terbagi atas Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), hutan produksi terbagi atas Hutan Produksi Tetap (HT) hutan Produksi terbatas (HPT) dan hutan Produksi Konservasi (HPK). Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara sekitar 5.629.110 ha atau 74,59 % dari total daratan Provinsi Kalimantan Utara kurang lebih 75.467,70 km². Luas hutan dikabupaten Nunukan untuk KSA/KPA adalah 269.677 Ha, Hutan Lindung 156,2 Ha, Hutan Produksi Terbatas 189.061 Ha, Hutan Produksi 274.432 dan Hutan Produksi Konservasi 13.514 Ha.

Sementara untuk luas lahan reboisasi sampai Tahun 2015 mencapai 158 hektar dan untuk lahan penghijauan luasnya 1.713,7 hektar. Kegiatan reboisasi dan penghijauan tersebut bersumber dari dana APD, DBH dan APBN yang dikerjakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan. Berdasarkan Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan kehutanan berada pada Dinas Kehutanan Provinsi.

Tabel 2.73
Luas dan sebaran Kawasan Hutan di Kabupaten Nunukan

Kabupaten	Luas Wilayah	KSA/ KPA	HL	HPT	HP	HPK	Luas Kawasan Hutan	
	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	%
Nunukan	1.384.150	269.677	156.2	189.061	274.432	13.514	902.884	11,96

Sumber data : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2012 (termasuk Luas wilayah perairan)

2. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-II/2014

3. RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021

E. Energi dan Sumber daya Mineral

Sektor pertambangan merupakan salah satu dari tiga sektor dengan persentase kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Nunukan dan merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Nunukan. Melihat kecenderungan kontribusi pertambangan terhadap PDRB mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 kontribusi pertambangan dan penggalian terhadap PDRB mencapai 52,72 %, sementara tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar 51,35-47,95 %, namun pada tahun 2016-2017 mencapai 44,80 – 47,96 % hal ini dikarenakan adanya perbaikan ekonomi global sehingga terjadi perbaikan terhadap komoditas pertambangan dan penggalian sehingga distribusi sektor pertambangan mengalami kenaikan.

Tabel 2.74
Kontribusi Sub Sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan.

Lapangan Usaha	Kontribusi Sub Sektor (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertambangan dan penggalian	52,72	51,35	47,95	44,80	47,96

Sumber data : Kabupaten Nunukan Dalam Angka tahun 2014-2018

Tabel 2.75**Jumlah Produksi Bahan Tambang/Mineral 2013-2017**

Bahan Tambang	2013	2014	2015	2016
Batubara (M3)	5.314.576	6.253.123	4.777.154	3.736.408
Minyak (Oil) MBBL	-	542.920	480.590	n/a
Gas (LNG) MMBTU	-	434.510	768.850	n/a
Emas (Ton)	-	2.550	2.395	2.789

Sumber : Publikasi BPS 2018

F. Perdagangan**1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB**

Perubahan klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 turut mengubah klasifikasi sub sektor perdagangan. Sub sektor perdagangan termasuk didalam kategori sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun kini berubah menjadi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Sektor ini meliputi kegiatan ekonomi perdagangan skala besar maupun eceran.

Tabel 2.76**Kontribusi Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan dan sepeda motor tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB sektor perdagangan (juta Rp)	676.614,2	636.991,6	663.270,9	710.552,7	768.086,3
Kontribusi (%)	5,02	4,76	5,35	5,84	5,71
Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	5,18	3,32	4,13	7,13	8,10

Sumber data : Kabupaten Nunukan dalam Angka Tahun 2018

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten relative mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dimana tahun 2013 sebesar 5,02 menurun di tahun 2014 sebesar 4,76%. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sehingga mencapai 5,71 %.

Dalam upaya meningkatkan produktivitas pengusaha kecil menengah, Pemerintah daerah sering menyelenggarakan program pembinaan dan pemberian bantuan modal kepada pedagang/pelaku usaha informal. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan bantuan modal usaha untuk membantu keberlanjutan usaha ekonomi masyarakat serta dalam upaya meningkatkan kualitas produk.

G. Perindustrian

1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Sektor industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang

Tabel 2.77
Kontribusi Sektor perindustrian tahun 2013-2017 di Kabupaten Nunukan

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB sektor Industri Pengolahan (juta Rp)	1.059.984,6	1.190.262,4	1.292.477,3	1.368.154,9	1.502.398,9
Kontribusi terhadap PDRB (%)	7,86	7,68	8,33	8,28	7,58
Pertumbuhan (%)	5,18	6,31	6,62	4,28	3,56

Sumber data : Kabupaten Nunukan dalam Angka Tahun 2018

Bahan baku industri pengolahan dapat berasal dari pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan, pertambangan dan penggalian. Kontribusi ini hanya meliputi industri pengolahan non migas.

Jika dilihat dari sisi pengembangan kontribusinya terhadap PDRB dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif, dimana kecenderungan pada tahun 2014 menurun. Namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan mencapai 8,33 % namun terus menurun tahun 2016-2017 yang mencapai 7,58 % dengan rata-rata pertumbuhan 5,19 % selama periode 2013-2017. Penyumbang sektor industri di kabupaten Nunukan adalah sektor pengolahan kepala sawit disusul industri pengolahan makan dan minum.

2. Jumlah Koperasi dan Industri Kecil Menengah

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum operasi dengan melandaskan kegiatnnya berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jumlah koperasi di Kabupaten Nunukan tahun 2017 sebanyak 339 koperasi terdiri dari 5 koperasi unit desa, 3 koperasi karyawan, 331 koperasi lainnya.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Kapasitas ketersediaan daya listrik

Listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Karena kebutuhan listrik merupakan kebutuhan pelayanan dasar yang harus dipenuhi untuk masyarakat dan secara khusus bagi dunia usaha. Untuk sumber energi listrik di Kabupaten Nunukan masih mengandalkan dari pasokan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Tabel 2.78
Daya Terpasang, produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN pada cabang/Ranting PLN di Kabupaten Nunukan, 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Daya listrik terpasang (VA)	27	33 702	36 808	40 545	41 314
		785	145	287	632	000
		074				
2.	Produksi Listrik (KWh)	55	64 221	71 642	75 968	78 425
		500	367	621	134	475
		471				
3.	Listrik terjual	47	56 866	62 142	68 803	69 830
		531	720	114	031	013
		026				
4.	Dipakai Sendiri (KWh)	192	113 215	693	191 429	464 070
		894		664		
5.	Susut/Hilang (KWh)	7 776	7 241	8 806	6 973	8 131
		550	432	842	674	662

Sumber data : Kabupaten Nunukan dalam Angka Tahun 2018

Produksi tenaga listrik Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan pada tahun 2017. Peningkatan ini diiringi dengan meningkatnya daya terpasang sebesar 1,89% dari tahun lalu. Jumlah pelanggan listrik juga mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah pelanggan sebesar 60,22%.

Tabel 2.79
Jenis Pembangkit Listrik dan Daya Listrik Terpasang Tahun 2015

Kecamatan/ Sub Districts	PLTA (Mwatt)	PLTG (MWatt)	PLTU (MWatt)	PLTD (MWatt)	PLTS (MWatt)	PLTMH (MWatt)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Krayan	-	-	-	0,30	-	0,03
Krayan Selatan	-	-	-	-	-	-
Lumbis	-	-	-	-	-	-
Lumbis Ogong	-	-	-	0,40	0,12	-
Sembakung	-	-	-	0,26	-	-
Nunukan	-	7.2	-	3.81	-	-
Sebuku	-	-	-	1	0,1	-

Kecamatan/ Sub Districts	PLTA (Mwatt)	PLTG (MWatt)	PLTU (MWatt)	PLTD (MWatt)	PLTS (MWatt)	PLTMH (MWatt)
Sebatik	-	-	-	0	0,34	-
Sebatik Tengah	-	-	-	2	-	-
Sebatik Timur	-	-	-	0.98	-	-
Seimenggaris	-	-	-	1,2	0,1	-
Tulin Onsoi	-	-	-	1,5	0,15	-
Jumlah	-	-	-	17,88	0,99	0,15

Sumber data : Distamben Kab. Nunukan

Tabel 2.80
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Kabupaten Nunukan Tahun 2010 - 2014

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pelanggan listrik	31.227	31.509	33.402	53 516	n/a
2.	Jumlah rumah tangga	31.821		35.708	37.997	49.345
3.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	24,22		36,82	42,13	48,63

Sumber data : Distamben Kab. Nunukan

Tabel 2.81
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
di Kawasan Lokpri Tahun 2010 - 2014

Kabupaten	Kecamatan	Keluarga Pegguna Listrik PLN	Keluarga Pegguna Non - PLN	Keluarga Tanpa Listrik
Nunukan	Sebatik	1.325	29	0
	Sebatik Barat	996	582	284
	Sebatik Timur	3.154	0	45
	Sebatik Utara	1.575	0	61
	Sebatik Tengah	548	1.102	94
	Nunukan	12.157	110	78
	Nunukan Selatan	2.433	565	213
	Lumbis Ogong	72	560	843
	Krayan	663	1.717	149
	Krayan Selatan	0	379	687
	Tulin Onsoi	0	1.616	487
	Sei Manggaris	0	1.818	102
	Total	22.923	10.951	3.115

Sumber data : Distamben Kab. Nunukan

2.4.2 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Ketenagakerjaan

1.1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

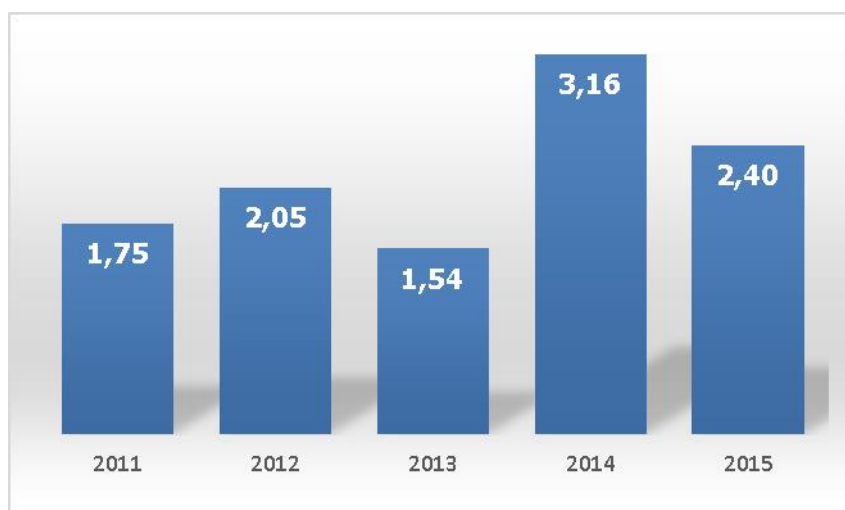
Dalam rangka melaksanakan pembangunan pemerintah daerah berupaya melaksanakan pembangunan diberbagai sektor seperti infrasturktur, pendidikan dan kesehatan. Disamping itu, sektor yang juga sangat penting adalah sektor peningkatan SDM. Semakin tinggi kualitas SDM suatu daerah maka akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Salah satu faktor pendukung peningkatan kualitas SDM adalah tingginya kelulusan S1/S2/S3. Semakin tinggi rasio lulusan perguruan tinggi menunjukkan daerah tersebut mempunyai potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk menggerakkan roda pembangunan. Ketersediaan kualitas SDM yang tinggi membuat daerah mempunyai daya saing di sektor SDM.

Era modern ini menuntut ketersediaan SDM yang tidak hanya memiliki kuantitas yang besar, namun juga dengan kualitasnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah.

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, yang artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1/S2/S3 ini dihitung dengan rumus formula jumlah lulusan S1/S2/S3 dibagi dengan jumlah penduduk dan dikalikan dengan 10000. Tabel di bawah ini menunjukkan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Nunukan tahun 2011 - 2015.

Grafik 2.16
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Nunukan
Tahun 2011 - 2015



Kab. Nunukan

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa rasio lulusan S1/S2/S3 dari tahun 2011 – 2015 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan rasio rata - rata 2 : 10.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan lulusan S1/S2/S3 masih rendah. Dengan demikian diperlukan program khusus dari pemerintah daerah untuk meningkatkan angka kelulusan S1/S2/S3 dari masyarakat.

Sehubungan dengan tingginya biaya kuliah dari suatu perguruan tinggi baik di negeri maupun di swasta, maka diperlukan intervensi dari pemerintah daerah berupa penyediaan dan peningkatan beasiswa, khususnya pada masyarakat yang kurang mampu serta penyediaan beasiswa berprestasi bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan diatas rata - rata.

1.2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi pula beban yang ditanggung, begitu pula sebaliknya.

Indikator ini dihitung dengan rumus formula jumlah penduduk usia tidak produktif (usia <15 tahun + usia >64 tahun) dibagi jumlah penduduk usia produktif (usia 15 - 64) dan dikalikan 100. Grafik di bawah ini menunjukkan rasio ketergantungan di Kabupaten Nunukan tahun 2011 - 2015.

Grafik 2.17
Rasio Ketergantungan Kabupaten Nunukan
Tahun 2011 - 2015



Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Nunukan

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2011 - 2015 rasio ketergantungan di daerah ini kecenderungan mengalami penurunan namun masih pada tingkat sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Nunukan selama tahun 2011 - 2015 ini rata - rata di atas 50%. Ini menandakan bahwa beban usia produktif masih cukup tinggi sehingga dimungkinkan akan mengganggu kinerja pembangunan daerah dan mengakibatkan tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Rasio ketergantungan Kabupaten Nunukan secara umum dapat diketahui pada tingkat sedang dari tahun 2011 - 2015 karena memiliki rasio di atas 50%. Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengendalikan angka ini karena rasio ketergantungan yang rendah dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi daerah karena dapat mengurangi beban kerja usia produktif.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah " Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ". Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila didukung oleh sumber-sumber penerimaan yang cukup di daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam APBD yang akan disampaikan pertanggungjawabannya pada setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk laporan keuangan daerah yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Oleh karena itu dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pemahaman mengenai jenis obyek pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah nantinya akan digunakan untuk menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai semua yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan daerah. Kemampuan atau kapasitas keuangan daerah pada dasarnya adalah sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah.

A. Pendapatan Daerah

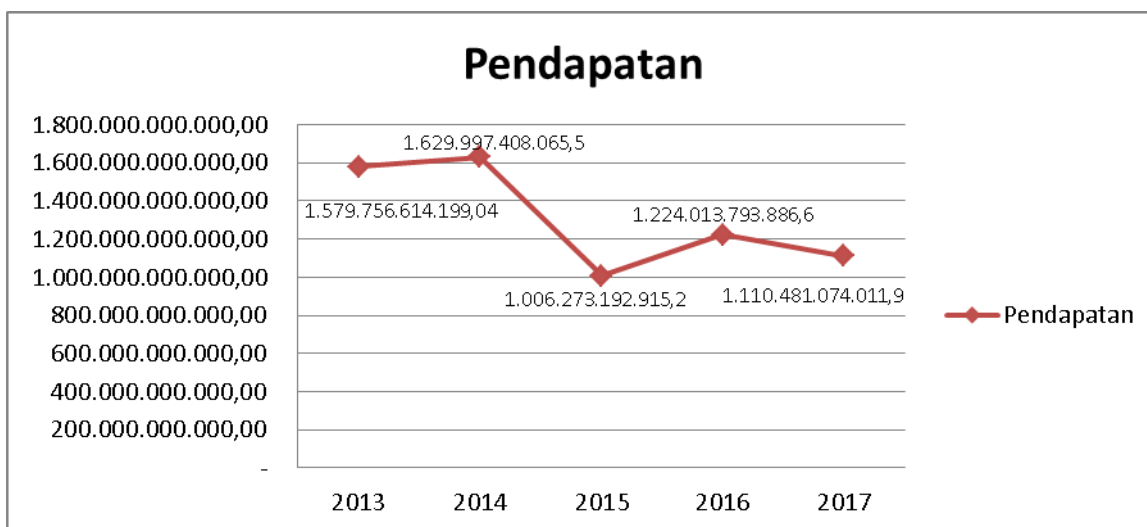
Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Dana Transfer, dan Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari kelompok pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah dan dana penyesuaian

otonomi khusus. Analisis pendapatan daerah termasuk pertumbuhan didalamnya akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang.

Sumber Pendapatan Kabupaten Nunukan terbesar adalah dari Dana Perimbangan/Transfer yang mencapai 1 triliun rupiah pada tahun 2017, Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami fluktuasi akibat ketergantungan pendapatan dari dana transfer.

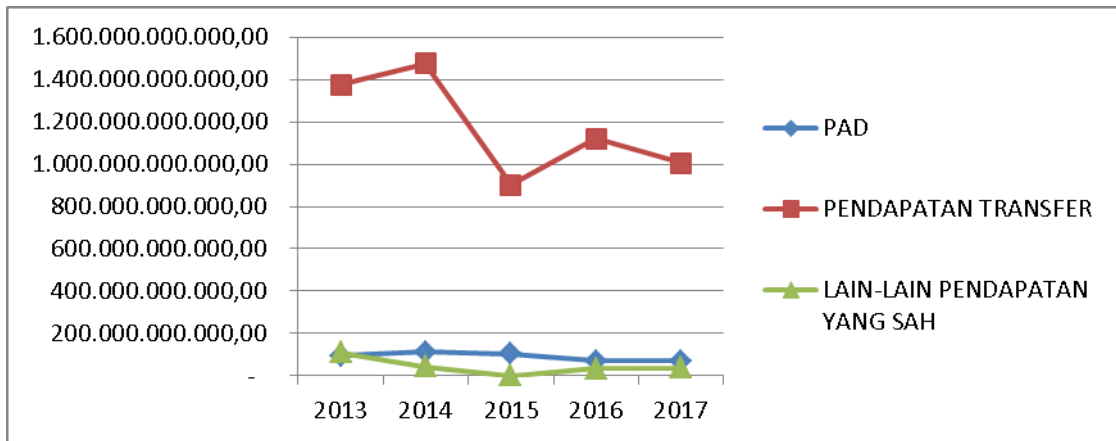
Gambar 3.1
Grafik Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2013-2017 Kabupaten Nunukan



Sumber: Hasil olahan, 2017

Perkembangan jenis-jenis sumber pendapatan daerah menunjukkan kecenderungan yang berbeda-beda. Dari grafik di bawah dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah memiliki kecenderungan yang tidak stabil. Sumber Pendapata Daerah yang tergambar dalam grafik dibawah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapata Daerah yang Sah.

Gambar 3.2
 Grafik Sumber Pendapatan Daerah
 Tahun Anggaran 2013-2017 Kabupaten Nunukan



Sumber: Hasil Olahan, 2017

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2013-2017 Kabupaten Nunukan

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuh an(%)
1	PENDAPATAN	1.579.756.614.199,04	1.629.997.408.065,52	1.006.273.192.915,20	1.224.013.793.886,59	1.110.481.074.011,91	(15,77)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	95.570.877.449,04	111.968.757.895,52	104.983.991.524,01	71.767.977.320,12	70.708.518.737,70	(21,09)
1.1.1	Pajak Daerah	15.611.688.353,85	14.078.056.718,18	19.056.066.301,00	11.343.661.615,03	13.585.729.499,65	(9,99)
1.1.2	Pendapatan Asli Daerah	2.502.723.220,00	2.484.583.714,47	3.943.117.920,00	4.537.899.272,03	3.600.904.294,60	67,90
1.1.3	Pendapatan Asli Daerah	3.830.395.512,10	3.605.926.564,44	6.931.839.723,77	5.013.331.562,27	6.213.262.827,70	64,68
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang	73.626.070.363,09	91.800.190.898,43	75.052.967.579,24	50.873.084.870,79	47.308.622.115,75	(27,53)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.373.701.908.467,00	1.474.080.677.070,00	900.409.934.126,19	1.119.378.895.333,04	1.003.887.555.274,21	(9,87)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana	1.271.039.246.667,00	1.372.158.441.595,00	827.084.664.184,00	1.075.759.845.548,00	973.984.259.784,00	(4,07)
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	130.191.913.346,00	97.514.019.026,00	77.491.273.650,00	90.563.981.330,00	51.106.920.303,00	(39,66)
1.2.1.1.1	Dana bagi hasil Pajak	737.531.859.321,00	870.928.628.569,00	329.241.883.534,00	292.001.949.854,00	99.714.545.762,00	(71,88)
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	307.765.777.000,00	311.776.974.000,00	282.437.662.000,00	400.260.543.000,00	411.464.046.000,00	34,31
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus	95.549.697.000,00	91.938.820.000,00	75.891.024.000,00	154.144.265.063,00	226.260.932.719,00	93,58
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Desa	-	-	62.022.821.000,00	138.789.106.301,00	177.937.815.000,00	137,87
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah					7.500.000.000,00	
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	24.761.597.000,00	31.685.203.000,00	30.814.091.000,00	-	-	26,59
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	24.761.597.000,00	31.685.203.000,00	30.814.091.000,00	-	-	26,59
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	77.901.064.800,00	70.237.032.475,00	42.511.178.942,19	43.619.049.785,04	29.903.295.490,21	(54,57)
1.2.3.1	Pendapatan bagi Hasil Pajak	77.901.064.800,00	70.237.032.475,00	42.511.178.942,19	43.619.049.785,04	29.903.295.490,21	(54,57)
4.2.3	Bantuan Keuangan			64.660.767.265,00	103.348.421.233,43	63.694.000.000,00	40,65
4.2.3.1	Bantuan keuangan Dari Pemerintah			63.781.500.000,00	70.481.500.000,00	63.694.000.000,00	5,69
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	110.483.828.283,00	43.947.973.100,00	879.267.265,00	32.866.921.233,43	35.885.000.000,00	3.482,06
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.022.428.283,00	884.473.100,00	879.267.265,00	-	20.000.000.000,00	(12,08)
1.3.3	Pendapatan Lainnya	109.461.400.000,00	43.063.500.000,00	-	32.866.921.233,43	15.885.000.000,00	(177,88)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 2017

B. Belanja Daerah

Realisasi belanja Kabupaten Nunukan memberikan gambaran tren yang menurun dari tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017. Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Analisis belanja daerah digunakan untuk melihat realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini kemudian dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa yang akan datang.

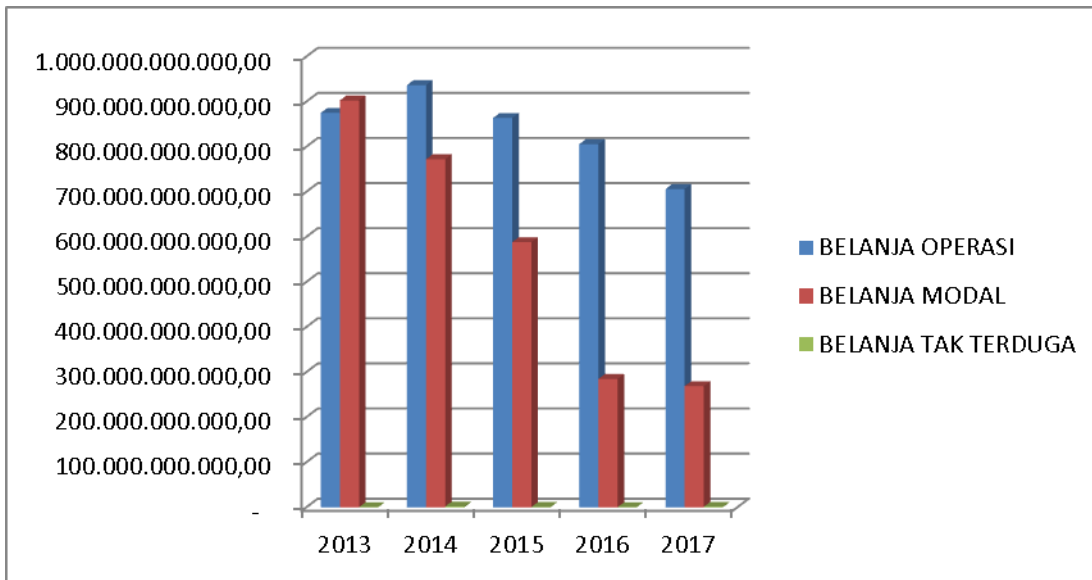
Selama periode Tahun 2013 hingga 2017, realisasi belanja daerah Kabupaten Nunukan memiliki kecenderungan menurun, baik Belanja Operasi, Belanja Modal maupun Belanja Takterduga. Perkembangan realisasi belanja dari tahun 2013 hingga 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013-2017
Kabupaten Nunukan

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan(%)
2	BELANJA	1.777.647.890.399,37	1.710.507.278.417,04	1.452.438.711.136,75	1.090.372.097.113,07	975.371.755.517,04	(46,43)
2	BELANJA OPERASI	874.972.227.775,59	936.591.760.201,66	863.705.922.442,27	805.534.698.782,45	705.903.396.662,60	(10,57)
2	Belanja Pegawai	445.065.529.200,50	525.713.686.271,00	413.163.718.931,76	458.505.111.108,00	431.078.426.826,70	6,19
2	Belanja Barang	306.871.308.143,97	301.866.674.220,66	366.143.122.570,86	322.490.044.715,27	244.005.736.096,90	1,66
2	Belanja Subsidi	10.692.261.051,00	9.253.801.002,00	10.422.447.066,67	6.478.879.200,00	8.903.413.749,00	(29,31)
2	Belanja Hibah	51.565.361.850,00	34.373.807.564,00	70.880.673.872,98	17.963.663.759,18	21.714.819.990,00	3,43
2	Belanja Bantuan Sosial	9.183.136.000,00	14.138.192.975,00	3.095.960.000,00	97.000.000,00	201.000.000,00	(94,21)
2	Belanja Bantuan Keuangan	51.594.631.530,12	51.245.598.169,00	-			(0,68)
2	BELANJA MODAL	902.505.662.623,78	772.059.299.737,38	588.241.282.297,48	284.615.182.330,62	268.529.608.388,44	(91,29)
2	Belanja Tanah	6.259.055.175,00	8.227.157.800,00	10.540.204.510,00	15.121.400,00	729.865.227,00	1.141,38
2	Belanja Peralatan dan Mesin	76.675.335.541,67	58.822.911.327,00	31.955.805.582,27	14.390.007.660,03	53.250.584.550,00	(56,41)
2	Belanja Bangunan dan Gedung	225.406.286.745,48	181.400.169.211,24	245.554.248.604,34	78.282.889.833,17	56.097.795.035,80	(59,36)
2	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	592.470.704.291,63	522.986.584.449,14	299.505.615.575,87	191.601.825.437,42	158.411.395.075,64	(94,82)
2	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.694.280.870,00	622.476.950,00	685.408.025,00	325.338.000,00	39.968.500,00	(127,61)
2	BELANJA TAK TERDUGA	170.000.000,00	1.856.218.478,00	491.506.397,00	222.216.000,00	938.750.466,00	944,20
2	Belanja Tak Terduga	170.000.000,00	1.856.218.478,00	491.506.397,00	222.216.000,00	938.750.466,00	944,20
2	TRANSFER			117.871.963.977,47	164.808.227.399,43	226.998.121.713,30	58,69
2	BANTUAN KEUANGAN			117.871.963.977,47	164.808.227.399,43	226.998.121.713,30	58,69
2	Bantuan Keuangan ke Desa			117.153.632.817,60	163.995.207.447,80	226.185.101.761,67	58,94
2	Bantuan Keuangan Lainnya			718.331.159,87	813.019.951,63	813.019.951,63	13,18
	SURPLUS / (DEFISIT)	(197.891.276.200,33)	(80.509.870.351,52)	(500.255.982.199,02)	39.314.969.374,09	(28.204.803.218,43)	311,25

Realisasi belanja Kabupaten Nunukan periode Tahun 2013 hingga 2017 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 3.3
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013-2017
Kabupaten Nunukan



Sumber: Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data tabel 3.1 dan tabel 3.2 diatas dapat dilakukan analisis kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan Permendagri No 62 tahun 2017, yaitu kemampuan keuangan daerah yang dihitung dari besaran pendapatan daerah dengan belanja dan pembiayaan Kabupaten Nunukan berdasarkan Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019-2021
Kabupaten Nunukan

NO	URAIAN	2019	2020	2021
I	PENDAPATAN	1.006.402.348.296,89	1.107.042.583.126,58	1.216.948.613.439,24
	PAD	83.599.240.000,00	91.959.164.000	100.486.852.400,00
	Dana Perimbangan	655.096.782.000,00	942.862.031.100	1.037.148.234.210,00
	Lain-lain Pendapatan yang Sah	267.706.326.296,89	72.221.388.026,58	79.313.526.829,24
II	BELANJA	981.821.094.550,88	1.117.503.204.005,97	1.227.953.524.406,56
	Belanja Tidak Langsung	663.296.327.120,87	729.125.959.832,96	801.538.555.816,25
	Belanja Langsung	318.524.767.430,01	388.377.244.173,01	426.414.968.590,31
	Pembiayaan	0	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
III	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah	343.106.021.176,02	374.916.623.293,62	412.410.057.622,99

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Seperti halnya kegunaan analisis Pendapatan dan Belanja Daerah, analisis Pembiayaan Daerah juga digunakan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang. Analisis pembiayaan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013-2017
Kabupaten Nunukan

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN DAERAH	866.929.528.067,24	619.038.251.866,91	532.528.371.515,26	30.272.389.316,24	69.587.358.690,33
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	866.929.528.067,24	619.038.251.866,91	532.528.371.515,26	30.272.389.316,24	69.587.358.690,33
Pinjaman Dalam Negeri					-
PENGELUARAN DAERAH	50.000.000.000,00	6.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	6.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	-				
PEMBIAYAAN NETTO	816.929.528.067,24	613.038.251.866,91	530.528.371.515,26	30.272.389.316,24	67.587.358.690,33

3.1.2. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.5
Neraca Daerah Tahun 2013-2017
Kabupaten Nunukan

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET	6.202.749.598.060	6.870.381.168.510	5.334.850.130.494	5.646.173.881.113	4.925.929.895.414	(8,94)
1.1.	ASET LANCAR	644.172.401.499	717.153.550.469	147.613.706.336	99.617.003.732	68.399.473.810	(108,44)
1.1.1.	Kas	619.168.618.692	532.573.343.580	30.278.175.602	72.281.054.019	27.186.773.739	14,83
1.1.2.	Piutang Pendapatan	9.354.853.630	172.296.495.426	98.129.532.894	10.988.149.514	13.668.564.950	1.616,04
	Piutang lainnya	4.781.124.322	4.750.296.712	8.235.013.973	12.876.219.635	19.242.951.595	141,43
	Penyisihan piutang	(406.858.361)	(2.700.521.252)	(6.128.401.734)	(6.193.787.082)	(6.703.139.646)	693,81
	Beban dibayar dimuka	2.428.375.844		5.914.794.627	737.052.500	830.925.333	(81,17)
1.1.3.	Persediaan	8.846.287.372	10.042.142.176	11.013.736.726	8.837.728.053	14.173.397.839	18,53
	Asuransi dibayar dimuka		191.793.828	170.854.249	90.587.093	-	(34,41)
	INVESTASI JANGKA PANJANG	90.474.840.777	92.812.339.305	98.200.019.383	98.645.399.983	103.740.630.049	10,13
	Investasi dana bergulir	15.681.324.498	15.469.164.464	15.469.164.464	15.469.164.464	15.469.164.464	(1,35)
	Penyisihan investasi nonpermanen (SPER)	(12.628.843.584)	(15.469.164.464)	(15.469.164.464)	(15.469.164.464)	(15.469.164.464)	22,49
	Penyertaan modal pemerintah daerah	87.422.359.862	92.812.339.305	98.200.019.383	98.645.399.983	103.740.630.049	13,72
1.2.	ASET TETAP	5.298.273.171.114	5.988.827.870.025	4.970.385.844.960	5.315.319.075.419	4.547.419.861.082	(0,64)
1.2.1.	Tanah	366.843.795.376	377.395.900.176	1.224.785.080.686	1.443.689.804.257	1.214.589.272.515	241,32
1.2.2.	Peralatan dan mesin	371.839.194.475	416.858.715.918	442.568.224.598	457.684.447.740	506.702.981.436	24,37
1.2.3.	Gedung dan bangunan	908.560.490.863	1.010.569.087.048	1.241.015.007.399	1.580.000.238.490	1.477.172.873.865	59,72
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	2.845.037.210.924	3.808.154.142.958	4.213.533.592.145	4.584.287.310.620	3.806.712.627.631	49,06
1.2.5.	Aset tetap lainnya	13.468.838.549	13.763.776.199	13.625.258.635	14.357.625.706	15.641.341.918	8,79
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	792.523.640.927	539.908.209.197	428.405.808.215	78.753.055.593	82.610.408.768	(132,92)
1.2.7.	Akumulasi penyusutan		(177.821.961.471)	(2.593.547.126.717)	(2.843.453.406.988)	(2.556.009.645.051)	1.367,91

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuh an (%)
1.3.	ASET LAINNYA	169.829.184.671	71.587.408.709	118.650.559.814	132.592.401.978	206.369.930.473	33,56
1.3.1.	Tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-	-	
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-	-	-	26.874.814.227	
1.3.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	21.205.320.000	21.205.320.000	21.205.320.000	21.205.320.000	26.279.052.147	5,98
1.3.4.	Aset tak berwujud	3.107.427.861	3.683.032.860	4.269.488.512	4.571.619.626	4.788.704.626	42,71
1.3.5.	Aset lain-lain	145.516.436.810	46.699.055.849	122.796.981.433	114.215.322.353	234.146.748.377	114,31
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud			(2.802.352.218)	(3.296.259.867)	(3.777.974.287)	# DIV/0!
	Akumulasi penyusutan aset lainnya			(26.818.877.913)	(4.103.600.134)	(81.941.414.617)	# DIV/0!
							# DIV/0!
	JUMLAH ASET DAERAH	6.202.749.598.060	6.870.381.168.510	5.334.850.130.494	5.646.173.881.113	4.925.929.895.414	(8,94)
							# DIV/0!
2.	KEWAJIBAN	40.330.161.069	6.143.195.025	7.824.787.249	104.268.356.154	245.940.458.509	1.209,11
							# DIV/0!
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	40.330.161.069	6.143.195.025	7.824.787.249	104.268.356.154	245.940.458.509	1.209,11
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)			694.559	(9.266.205)	241.218.639	# DIV/0!
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah				-	-	# DIV/0!
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	14.094.000	20.915.550	152.471.211	175.749.213	259.795.800	704,61
2.1.4.	Utang beban			4.069.781.867	27.471.071.849	43.389.962.351	# DIV/0!
	Utang transfer				-	93.152.711.064	# DIV/0!
	Utang jangka pendek lainnya	40.316.067.069	6.122.279.475	3.601.839.612	76.630.801.298	99.288.865.294	1.908,96
	Utang BLUD				-	9.607.905.360	# DIV/0!
							# DIV/0!
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	# DIV/0!
							# DIV/0!
3.	EKUITAS DANA	6.162.419.436.991	6.864.237.973.485	5.327.025.343.245	5.541.905.524.959	4.679.989.436.905	(10,86)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6.202.749.598.060	6.870.381.168.510	5.334.850.130.494	5.646.173.881.113	4.925.929.895.414	(8,94)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jabaran rasio keuangan Kabupaten Nunukan tahun 2013-2017 sebagai berikut.

Tabel 3.6
Rasio Keuangan Daerah
Tahun 2013-2017
Kabupaten Nunukan

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Lancar (Rp)	15,97	116,740	18,865	0,955	0,27
Rasio Quick (Rp)	15,75	115,105	17,457	0,871	0,220
Rasio total hutang terhadap	0,007	0,001	0,001	0,018	0,050
Rasio hutang terhadap modal	0,007	0,001	0,001	0,019	0,053

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan 2017

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, merupakan sub sistem dari sistem keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. oleh sebab itu, keuangan daerah dikelola dengan memperhatikan asas asas umum dalam kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar pengelolaan keuangan daerah itu berlaku secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien dan ekonomis serta dapat dipertanggung jawabkan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat, maka seluruh penerimaan dan pengeluaran yang menjadi hak dan kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan wajib dimasukkan dalam APBD, sehingga dalam mengadministrasikan keuangan daerah baik APBD murni maupun perubahannya serta pertanggung jawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Analisis terkait kebijakan pengelolaan keuangan menjadi penting untuk mengetahui gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan adanya dasar bahwa keuangan daerah digunakan dalam

rangka mendanai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta pengembangan jaminan sosial.

Mengetahui kebijakan pengelolaan keuangan pada periode sebelumnya digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana pembangunan daerah. Analisis kebijakan pengelolaan keuangan kemudian dilakukan dengan analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis sumber penutup defisit riil, analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran keuangan daerah antara lain untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pembangunan. Analisis terkait proporsi penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan.

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Berpedoman pada prinsip - prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Nunukan ditampilkan pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Analisis Proporsi Pemenuhan Belanja Aparatur
Tahun 2013-2017 Kabupaten Nunukan

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2013	52.300.571.120.330,00	234.798.760.957.124,00	22,27
2	Tahun anggaran 2014	58.171.541.671.302,00	216.544.926.307.342,00	26,86
3	Tahun anggaran 2015	44.446.142.521.333,00	165.274.365.176.153,00	26,89
4	Tahun anggaran 2016	44.680.066.640.900,00	125.518.032.451.250,00	35,60
5	Tahun anggaran 2017	43.004.633.247.567,00	123.437.232.592.613,00	34,84

Sumber: bahan olahan, 2017

Pada tahun 2013 persentase belanja kebutuhan aparatur adalah sebesar 22,27%, angka ini naik menjadi 26,86% di tahun 2014, tahun 2015 sebesar 26,89% serta tahun 2016 sebesar 35,60% dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 34,84%. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan masi mendapat alokasi yang lebih besar proporsinya dalam APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan di tahun yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan dan Pembiayaan Daerah untuk mengukur kinerja APBD.

A. Analisis Penutup Defisit Riil

Analisis sumber penutup defisit riil dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Langkah yang dilakukan adalah dengan mencari nilai defisit riil anggaran terlebih dahulu dan melihat apakah ada penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Tabel
3.8
Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2013-
2017
Kabupaten Nunukan

						(000.000)
NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.579,76	1.630,00	1.070,05	1.224,01	1.110,48
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1.777,65	1.710,51	1.570,31	1.090,37	975,37
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	50,00	6,00	2,00	-	2,00
	Defisit riil	(247,89)	(86,51)	(502,26)	133,64	133,11

Komposisi penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit riil anggaran adalah seperti pada tabel di bawah.

Tabel 3.9
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2013-2017
Kabupaten Nunukan

c	Uraian					
		2013(%)	2014(%)	2015 (%)	2016(%)	2017(%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	619,04	532,53	30,27	69,58	26,92
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang diPisahkan	0	0	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0

Analisis sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA periode

sebelumnya, dapat diketahui kinerja APDB yang lebih rasional dan terukur pada tahun tersebut. Melalui analisis ini, juga dapat diketahui dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan.

Tabel 3.10
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2013-2017
Kabupaten Nunukan

Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	619,04		532,53		30,27		69,58		26,92	
Pelampauan penerimaan PAD	36,01	5,82	55,51	10,42	207	683,85	0	0,00	0	0,00
Pelampauan penerimaan dana	58,65	9,47	28,23	5,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-0,18	-0,03	0,13	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sisa penghematan b	518,34	83,73	441,94	82,99	200,3	661,71	191,6	275,31	228,8	849,85
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0,00	0	0,00	0,0006	0,00	-0,009	-0,01		0,00
Kegiatan lanjutan										

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, 2017

3.3. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah, baik terkait dengan pembelanjaan pada katagori belanja wajib maupun pengeluaran pembiayaan. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kapasitas riil keuangan daerah membutuhkan proyeksi penerimaan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan daerah, yang masing-masing telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah di Kabupaten Nunukan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Pendapatan daerah terbesar berasal dari dana perimbangan yang bersumber dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang alokasinya ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan pendapatan asli daerah terbesar bersumber dari pajak daerah. Serta Belanja di bagi dengan belanja tidak langsung dan belanja langsung, proporsi alokasi belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dialokasikan berdasarkan proporsi tahun dasar yaitu tahun 2017

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut:

No.	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020) (Rp)	2021 (Rp)	Pertumbuhan %
1	PENDAPATAN	1.216.053.475.260,85	1.223.541.613.190,99	1.313.181.848.020,68	1.423.082.690.733,34	4,08
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	83.231.600.000,00	94.599.240.000,00	91.959.164.000,00	100.481.664.800,00	5,03
1.1.1.	Pajak daerah	11.872.800.000,00	12.716.440.000,00	13.988.084.000,00	15.386.692.400,00	6,78
1.1.2.	Retribusi daerah	5.810.800.000,00	5.834.800.000,00	6.418.280.000,00	6.386.892.400,00	2,48
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	5.100.000.000,00	5.100.000.000,00	5.610.000.000,00	6.171.000.000,00	5,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	60.448.000.000,00	70.948.000.000,00	65.942.800.000,00	72.537.080.000,00	5,08
1.2.	Dana Perimbangan	1.046.734.487.894,10	1.063.286.565.894,10	1.149.001.295.994,10	1.243.287.499.104,10	4,46
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	185.302.908.000,00	201.854.986.000,00	222.040.484.600,00	244.244.533.060,00	7,23
1.2.2.	Dana alokasi umum	453.241.796.000,00	453.241.796.000,00	498.565.975.600,00	548.422.573.160,00	5,00
1.2.3.	Dana alokasi khusus	206.139.264.894,10	206.139.264.894,10	206.139.264.894,10	206.139.264.894,10	-
1.2.4.	Dana alokasi desa	166.800.519.000,00	166.800.519.000,00	183.480.570.900,00	201.828.627.990,00	5,00
1.2.5.	Dana insentif daerah	35.250.000.000	35.250.000.000	38.775.000.000	42.652.500.000	5,00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	86.087.387.367	65.655.807.297	72.221.388.027	79.313.526.829	(0,98)
1.3.1	Hibah	4.500.000.000	3.000.000.000	3.300.000.000	3.500.000.000	(4,32)
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	55.095.287.366,75	36.163.707.296,89	39.780.078.026,58	43.758.085.829,24	(3,59)
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)					
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	26.492.100.000,00	26.492.100.000,00	29.141.310.000,00	32.055.441.000,00	5,00
2	BELANJA	1.286.114.718.524,20	1.223.541.613.190,99	1.313.181.848.020,68	1.423.082.690.733,34	2,71
2.1	Belanja Tidak Langsung	643.680.444.628,41	612.363.577.102,88	657.227.122.617,68	712.230.787.752,23	2,71
2.1.1	Belanja Pegawai	408.451.337.441,27	388.579.028.857,06	417.047.464.275,29	451.950.374.214,32	2,71
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	8.936.087.990,00	8.501.322.127,35	9.124.153.834,62	9.887.758.812,08	2,71
2.1.4	Belanja Hibah	14.850.520.000,00	14.128.000.353,17	15.163.058.953,28	16.432.062.906,99	2,71
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.050.000.000,00	998.914.541,10	1.072.097.940,07	1.161.822.350,49	2,71
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	207.642.499.197,14	197.540.106.473,71	212.012.472.057,10	229.755.901.407,56	2,71
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.750.000.000,00	2.616.204.750,49	2.807.875.557,32	3.042.868.060,80	2,71
2.2	Belanja Langsung	642.434.273.895,79	611.178.036.088,11	655.954.725.403,00	710.851.902.981,11	2,71
2.2.1	Belanja Pegawai	130.313.058.061,00	123.972.960.563,55	133.055.582.010,70	144.191.069.919,44	2,71
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	242.580.938.894,12	230.778.692.622,75	247.686.214.179,33	268.415.196.770,47	2,71
2.2.3	Belanja Modal	269.540.276.940,67	128.088.960.288,30	137.473.131.905,80	148.978.326.764,81	(9,20)
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	73.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	38.000.000.000,00	(10,87)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan atas proyeksi pendapatan daerah untuk periode 2018-2021, maka disusun rencana kerangka pendanaan sebagai gambaran kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan Pembangunan Daerah hingga tahun 2021 mendatang. Kerangka pendanaan ini bersifat indikatif dimana besaran kapasitas riil keuangan daerah akan sangat bergantung pada realisasi penerimaan pendapatan daerah yang ditopang adanya program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, serta disisi lain adanya efisiensi penganggaran pada bidang belanja aparatur. Proyeksi tentang Kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah dapat dilihat seperti yang tercantum pada tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.12
 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah 2019-2021
 Kabupaten Nunukan

No.	Uraian	Proyeksi			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Pendapatan	1.216.053.475.260,85	1.223.541.613.190,99	1.313.181.848.020,68	1.423.082.690.733,34
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	35.000.000.000	35.000.000.000	25.000.000.000	20.000.000.000
	Total penerimaan	1.251.053.475.260,85	1.258.541.613.190,99	1.338.181.848.020,68	1.443.082.690.733,34
	Dikurangi:				
4.	Belanja Tidak Langsung	643.680.444.628,41	663.296.327.120,87	729.125.959.832,96	801.538.555.816,25
5.	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	604.373.030.632,44	592.245.286.070,12	606.055.888.187,72	638.544.134.917,09

4) Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh para aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program prioritas) dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua). Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Prioritas II.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

- a. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- b. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.

Secara keseluruhan Realisasi dan Proyeksi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2018-2021 disajikan pada Tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.13
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Nunukan

No	Uraian	Proyeksi			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	604.373.030.632,44	592.245.286.070,12	606.055.888.187,72	638.544.134.917,09
	Prioritas I	410.973.660.830,06	402.726.794.527,68	412.118.003.967,65	434.210.011.743,62
	Prioritas II	193.399.369.802,38	189.518.491.542,44	193.937.884.220,07	204.334.123.173,47

Alokasi belanja Prioritas 1 ditujukan untuk Belanja yang bersifat Wajib dan Mengikat dan juga belanja yang mendukung pencapaian visi dan misi. Alokasi belanja Prioritas 2 ditujukan untuk pendanaan program prioritas sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Dengan kemampuan keuangan daerah yang secara umum belum optimal dengan melihat kondisi, maka proporsi alokasi anggaran untuk Belanja Wajib dan Mengikat dan prioritas utama atau prioritas I masih cukup besar berkisar pada angka 68%, sedangkan belanja untuk prioritas II sebesar 32% yang dialokasikan secara spesifik untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Permasalahan pembangunan daerah merupakan kondisi terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang telah di capai saat ini dengan yang direncanakan maupun antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul akibat belum optimalnya pendayagunaan **kekuatan**, kurangnya kemampuan mengatasi **kelemahan**, belum dimanfaatkan berbagai **peluang**, dan rendahnya antisipasi terhadap **ancaman**.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau terhadap beberapa urusan tertentu yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Pada hakekatnya identifikasi permasalahan merupakan upaya pemetaan masalah dalam rangka penentuan kebijakan program sebagai solusi penanganan masalah sesuai dengan kewenangan yang di miliki pemerintah daerah.

Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan antara lain :

1. Terkait pelayanan dasar yang memerlukan penanganan secara konsisten dan berkelanjutan;
2. Memiliki potensi negatif dan kecenderungan untuk meningkat/membesar pada masa mendatang.

RPJPD Kabupaten Nunukan 2005-2025 telah mengamanatkan arah, tahapan dan prioritas pembangunan daerah setiap lima tahunan, secara teknis operasional diformulasikan lebih lanjut dalam RPJMD. Oleh karena itu, capaian kinerja berdasarkan RPJMD 2011 – 2016 menjadi sangat penting sebagai data dasar bagi perencanaan menengah daerah Tahun 2016 - 2021.

4.1.1 Bidang Sosial

1. Kesehatan

- a. Akses pelayanan kesehatan daerah terpencil masih rendah terutama untuk wilayah pedalaman meliputi Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Krayan Barat, Krayan Timur, Krayan Tengah, Lumbis, Lumbis Ogong, Tulin Onsoi, Sebuku, Sei Manggaris, Sembakung dan Sembakung Atulai. Hal ini dapat berpengaruh terhadap status kesehatan masyarakat.
- b. Pemenuhan tenaga medis terutama dokter umum masih kurang hampir di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Nunukan baik puskesmas maupun rumah sakit. Kekurangan tenaga medis dapat mengurangi akses pelayanan kepada masyarakat.
- c. Terdapat indikator yang terlihat kontradiksi dan tidak signifikan mengikuti faktor yang mempengaruhi, misalnya dalam hal angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Artinya ketika indikator antara yang berpengaruh meningkat seharusnya diiringi penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- d. Tidak tersedianya jaminan kesehatan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga beban pembiayaan kesehatan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dibebankan kepada fasilitas kesehatan. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan dari fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Nunukan.

2. Pendidikan

- a. Aksebilitas pendidikan yang mudah dan terjangkau
Kondisi ini dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).
Secara umum APS dan APM untuk Pendidikan Dasar di Kabupaten Nunukan belum mencapai target akhir RPJMD 2011-2016:
 - 1) APS SD/Sederajat sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 0,31% dari target 0.20%.
 - 2) APS SMP/Sederajat sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 0,38% dari target 0,05%.
 - 3) APM SD/Sederajat sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 81,92% dari target 90%.
 - 4) APM SMP/Sederajat sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 56,80% dari target 75,15%.

Adapun untuk jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Paket C) yang kewenangannya telah beralih kepada Pemerintah Provinsi, capaian APS dan APM telah melebihi target akhir yang di tetapkan. Ada beberapa kendala yang dapat menjelaskan masih tingginya APS, antara lain :

- 1) Anggapan (Budaya) sebagian masyarakat bahwa tujuan sekolah hanya untuk belajar baca tulis sehingga ketika kemampuan baca tulis sudah dikuasai dianggap sudah cukup.
- 2) Masih adanya beberapa kasus putus sekolah karena pernikahan dini (di bawah umur).
- 3) Sebagian anak terpaksa membantu orang tuanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

b. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun kualitas sarana dan prasarana pendidikan mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan kondisi ideal yang akan dicapai pada Tahun 2016 (akhir RPJMD), maka kondisi tersebut masih di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 90,10% untuk jenjang SD/MI dan 99,85% untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Berikut tren perkembangan kualitas sarana dan prasarana pendidikan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dari Tahun 2013 – 2015.

c. Pendidikan moral dan budi pekerti belum menjadi pilihan sebagai alternatif muatan lokal.

3. Kependudukan

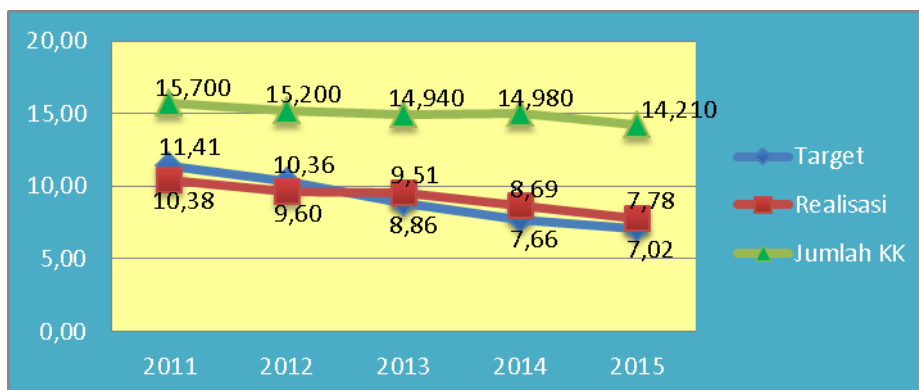
- a. Letak geografis Kabupaten Nunukan yang terletak di wilayah perbatasan berpengaruh terhadap keakuratan data kependudukan. Hal ini disebabkan banyaknya warga dari berbagai wilayah negara Indonesia menjadikan Nunukan sebagai pintu masuk dan keluar aktivitas mencari pekerjaan ke negara Malaysia dengan mengabaikan mekanisme administrasi kependudukan.
- b. Belum tertibnya administrasi kependudukan dan catatan sipil. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2011-2016. Berdasarkan data sampai dengan Tahun 2015, kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk baru mencapai 35% dari 100% yang ditargetkan, kepemilikan KTP yang baru mencapai 63,81% dibandingkan target sebesar 90%.
- c. Potensi masalah kesejahteraan sosial akibat pemulangan tenaga kerja Indonesia ilegal dari negara Malaysia.
- d. Heterogenitas masyarakat yang kompleks berpotensi konflik SARA memerlukan perhatian yang lebih.

4.1.2. Bidang Ekonomi

1. Angka kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks dan berdampak kepada keberlanjutan pembangunan daerah. Secara umum Pemerintah Kabupaten Nunukan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan, bahkan sejak Tahun 2011 – 2015 trennya mengalami penurunan, sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik 4.1
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Nunukan Tahun 2011 - 2015



Sumber data : LAKIP Pemkab Nunukan 2011 - 2015

Parameter yang sangat mendukung penurunan prosentase dan jumlah penduduk miskin adalah :

- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 10,69% pada Tahun 2013 menjadi 5,70% pada Tahun 2014 dan pada Tahun 2015 sebesar 3,92%.
- Pertumbuhan ekonomi dari 6,4% pada Tahun 2011, naik menjadi 7,98% pada Tahun 2012 dan pada Tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 6,88%.
- Indeks Pembangunan Manusia dari 62,18 pada Tahun 2013 menjadi 63,13 pada Tahun 2014.

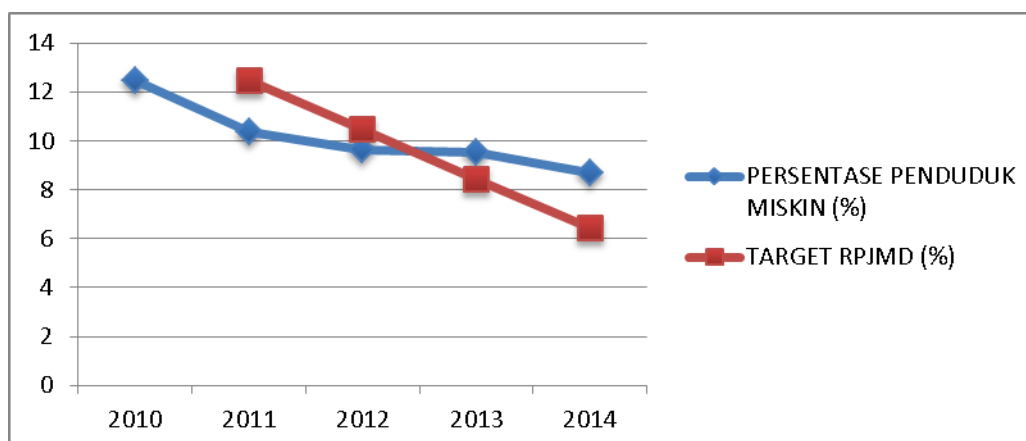
Namun demikian apabila di dibandingkan dengan target RPJMD maka prosentase penduduk miskin Kabupaten Nunukan masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sebagaimana dapat di lihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nunukan
Tahun 2010-2014

Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Persentase Penduduk Miskin	%	12.45	10.38	9.62	9,51	8.69
Target RPJMD			12,45	10,45	8,45	6,45

Sumber data : BPS Kab. Nunukan 2015 dan RPJMD Kab. Nunukan 2010-2014

Grafik 4.2
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nunukan
Tahun 2010-2014



Sumber data : BPS Kab. Nunukan 2015 dan RPJMD Kab. Nunukan 2010-2014

2. Revitalisasi Pertanian Dalam Arti Luas

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Nunukan, dalam perkembangannya sektor pertanian cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam hal penyerapan angatan kerja, karena sektor industri olahan belum berkembang secara optimal.

Tabel 4.2
Persentase peningkatan produksi dan produktivitas
tanaman pangan dan hortikultura

Jenis	Realisasi Indikator			
	2012	2013	2014	2015 ^{*)}
Produksi				
a. Padi (ton)	-2,64%	-	-29,99%	-25.73%
b. Ubi Kayu (ton)	-3,52%	21,98%	72,02%	53.29%
c. Durian (ton)	19,55%	33,89%	101,75	-62,19%
d. Pisang (ton)	3.26%	24,66%	%	-5,71%
e. Jeruk (ton)	142	-	-63,10%	133,24
	41.35	50,55%	149,08	%
Produktivitas	135.45	897	%	
a. Padi (kwt/ha)	66,86	43,02	45,06	

b. Ubi kayu (kw/ha)	186	137,78	217	
c. Durian (kg/pohon)	89.36	262	127,73	45,06
d. Pisang (kg/pohon)		94,25	61,23	217
e. Jeruk (kg/pohon)		81	86,24	58.89
				125,83
				84,98

Sumber data : *Dispertanak Kabupaten Nunukan, 2015*

Sampai dengan Tahun 2015, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan menargetkan peningkatan produksi padi sampai dengan 3% (39.655 ton, dengan angka awal 38.500 ton). Sementara itu, realisasi produksi padi pada Tahun 2014 hanya mencapai 26.953 ton (turun 29,99%) sedangkan pada Tahun 2015 (sampai dengan triwulan 3) produksi padi mencapai 28.555 ton. Dibanding dengan Tahun 2015 dan 2014 terdapat kenaikan produksi padi sebesar 5,94%. Adapun permasalahan yang dihadapi sehingga target produksi padi belum tercapai adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pengurangan lahan sawah yang produktif akibat alih fungsi lahan yang berdampak pada penurunan luas tanaman padi dari 5.910 ha pada Tahun 2013 menjadi 5.618 ha pada Tahun 2014 atau turun 292 ha. Sedangkan pada Tahun 2015 sampai dengan triwulan ke-3 luas tanam baru mencapai 4.661 ha dan diharapkan sampai dengan bulan Desember 2015 luas tanam bertambah demikian pula luas panen, sehingga dapat meningkatkan produksi padi sampai dengan akhir Tahun 2015.
- b. Adanya sawah produktif yang ditelantarkan oleh pemiliknya karena beralih profesi dari petani padi menjadi petani rumput laut yang lagi tren di masyarakat sampai awal Tahun 2015. Namun seiring dengan menurunnya harga rumput laut, maka diharapkan petani dapat menggarap kembali sawahnya sehingga dapat menambah luas tanam.
- c. Penurunan produksi padi di Kabupaten Nunukan juga disebabkan oleh adanya tanaman padi yang mengalami fuso (gagal panen). Hal ini disebabkan oleh banjir di wilayah Kecamatan Sembakung, Lumbis dan kekeringan meliputi wilayah Kecamatan Sebatik Barat dan Sebatik Timur serta Kecamatan Krayan yang pada Tahun 2014 mencapai 623 ha.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tantangan sektor pertanian di Kabupaten Nunukan pada masa mendatang adalah adanya alih fungsi lahan, turunnya kualitas kesuburan tanah, banyaknya hama dan penyakit tanaman, gagal panen, perubahan iklim serta harga yang tidak menentu.

Produksi budidaya rumput laut mendominasi produksi budidaya di Kabupaten Nunukan dibandingkan dengan budi daya perikanan lainnya (Tabel 4.8), namun demikian hasil rumput laut sebagai komoditas unggulan sebagian besar dijual dalam bentuk bahan mentah. Produk-produk pertanian dalam arti luas belum dimanfaatkan secara lebih baik para petani menjadi produk olahan, baik setengah jadi maupun jadi sehingga dapat

meningkatkan nilai jual. Pada Tahun 2014 target produksi perikanan budidaya adalah sebesar 133,59% dari Tahun 2011 sebagai tahun dasar. Target tersebut pada Tahun 2014 dapat direalisasikan bahkan melebihi target yakni sebesar 502,28% dengan capaian 375,99%. Produksi perikanan budidaya pada Tahun 2011 tercatat sebesar 120.022,30 ton meningkat menjadi sebesar 251.142,4 ton pada Tahun 2014.

Peningkatan produksi perikanan budidaya ini disumbangkan oleh sub sektor:

- a. Perikanan budidaya rumput laut sebesar 250.300 ton atau sebesar 99,67%;
- b. sub sektor budidaya tambak dengan komoditas ikan bandeng (536,7 ton), udang windu (116,15 ton), udang putih (9,95 ton), udang bintik (158,4 ton) dan ikan mujair (3,6 ton) memberikan kontribusi total sebesar 824,80 ton atau sebesar 0,33%;
- c. sub sektor budidaya kolam dengan komoditas ikan mas (3,6 ton), ikan nila (4,8 ton), ikan lele (3,8 ton), dan ikan patin (0,6 ton) memberikan kontribusi total sebesar 12,80 ton atau sebesar 0,01%;
- d. sub sektor budidaya sawah dengan komoditas ikan mas (2,20 ton) dan ikan nila (2,60 ton) memberikan kontribusi total sebesar 4,80 ton atau sebesar 0,005%;
- e. Sub sektor budidaya keramba belum dapat memberikan kontribusi yang memadai dikarenakan baru dalam tahap pengembangan.

Data produksi per sub sektor dan kontribusinya terhadap peningkatan produksi sektor perikanan budidaya dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Data Produksi Per Sub Sektor dan Kontribusinya Terhadap
Peningkatan Produksi Sektor Perikanan Budidaya

Sub Sektor	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Kontribusi Terhadap Sektor Perikanan Budidaya (%)	
	2013	2014	2013	2014
Budidaya Laut	206,713.00	250,300.00	98.99	99.66
Budidaya Kolam	44.40	12.80	0.02	0.01
Budidaya Tambak	2,057.01	824.80	0.99	0.33
Budidaya Sawah	10.64	4.80	0.01	0.00
Budidaya Keramba	0.10	-	0.00005	0.00000
Jumlah	208,825.15	251,142.40	100.00	100.00

Sumber

data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan, 2015

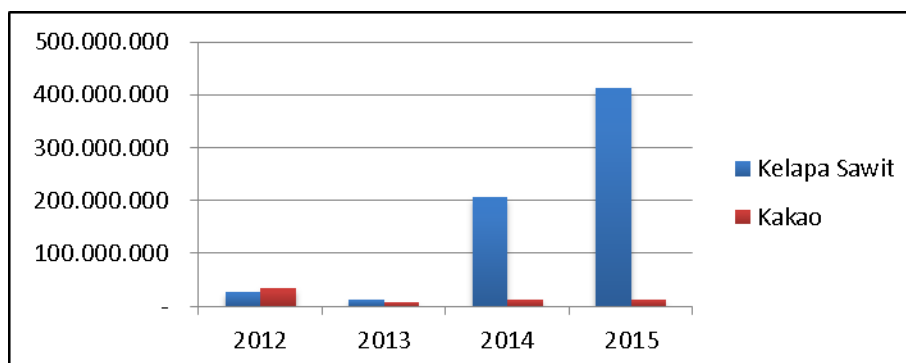
Pada sektor perkebunan untuk komoditas sawit dan kakao secara umum pada Tahun 2015 mengalami peningkatan produksi dibandingkan tahun sebelumnya, sektor perkebunan dengan komoditas kelapa sawit mampu meningkatkan produksi sebesar 411.734.000 kg/ha yang ditandai dengan pencapaian sebesar 3.657,54 % dari target sebesar 11.257.100,05 kg.

Sedangkan produksi kakao mampu meningkatkan 12.620.880 kg/ha yang ditandai dengan capaian 88,72% dari target sebesar 14.224.284,81 kg.

Tantangan sektor perkebunan ke depan adalah:

- a. Pemeliharaan perkebunan sawit belum optimal terutama dalam hal pemberian pupuk, meskipun pemerintah daerah telah memberikan bantuan pupuk yang bersifat stimulan mengingat lokasi perkebunan tersebar secara sporadis di 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan.
- b. Khusus tanaman kakao, mengingat tanaman ini di Kabupaten Nunukan rata-rata telah berumur \pm 25 tahun dan rentan terhadap serangan hama dan penyakit sehingga mengalami penurunan produktivitas secara perlahan dan adanya pengalihan lahan komoditas kakao ke komoditas lain dan berdampak juga pada produksinya.

Grafik 4.3
Produksi Kelapa Sawit dan Kakao 2012-2105



Sumber data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, 2015

Dalam hal pengelolaan budidaya, sektor pertanian masih belum mampu menggunakan sistem pertanian secara profesional atau modern. Hampir sebagian besar sektor pertanian dikerjakan secara tradisional termasuk fasilitas dukung sarana prasarana termasuk irigasinya. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi sektor pertanian, dengan harapan sektor ini mampu untuk menjawab permasalahan pertanian yang diakibatkan oleh permasalahan ekonomi.

3. Kurangnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok lokal

a. Disparitas harga barang/bahan kebutuhan pokok

Kurangnya ketersediaan sarana ekonomi berupa pasar dan mahalanya biaya transportasi barang dari tempat produksi menuju ke wilayah perbatasan berdampak pada kurangnya jumlah pasokan barang kebutuhan pokok sehingga harganya menjadi tinggi.

Kondisi ini mengakibatkan tingginya harga bahan kebutuhan pokok lokal dibandingkan dengan barang sejenis yang tersedia melalui jalur tidak resmi dari Malaysia, dengan demikian harga barang di Kabupaten Nunukan relatif lebih mahal dibandingkan dengan wilayah sekitar.

b. Aksesibilitas masyarakat perbatasan terhadap pusat kegiatan ekonomi

Aspek ini terkait erat dengan dengan ketersediaan sarana transportasi, saat ini akses menuju dan/atau dari kawasan perbatasan secara umum menggunakan transportasi udara, laut, dan darat. Namun pelayanannya hingga saat ini masih sangat terbatas, baik dari segi kapasitas moda transportasi, ongkos atau biaya, maupun kualitas infrastruktur pendukung layanan transportasi.

Hal ini berbanding terbalik dengan kemudahan akses untuk pemenuhan kebutuhan pokok melalui jalur perdagangan lintas batas ke Malaysia yang lebih mudah dan murah.

c. Perdagangan tidak resmi

Mahalnya biaya transportasi dan keterbatasan akses terhadap pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Nunukan ke wilayah terdekat di dalam negeri dibandingkan dengan ke luar negeri (Malaysia) berdampak pada maraknya kegiatan perdagangan tidak resmi. Hampir sebagian besar kebutuhan pokok warga Kabupaten Nunukan dipenuhi dari sumber perdagangan tidak resmi yang tentunya berpengaruh kepada hilangnya devisa negara.

d. Rendahnya daya saing produk lokal

Kabupaten Nunukan memiliki potensi unggulan pada bidang pertanian dalam arti luas, namun hasil produksi masih dalam bentuk barang mentah belum mendapatkan sentuhan berupa pengolahan menjadi komoditas turunan yang lebih memiliki nilai tambah. Di sisi lain aspek pemasaran yang masih lemah terkait mahalnya biaya transportasi antar wilayah dan ke luar daerah.

4.1.3. BIDANG INFRASTRUKTUR

1. Keterbatasan akses infrastruktur dasar berupa ketersediaan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara yang belum memadai.
2. Akses kebutuhan listrik dan air bersih yang belum merata dan memadai.
3. Fasilitas komunikasi dan teknologi informasi yang terbatas.
4. Kesenjangan dan rendahnya konektivitas antar wilayah pedalaman, perbatasan dan perkotaan.
5. Ketersediaan jaringan irigasi dibandingkan jumlah kawasan pertanian padi sawah.

4.1.4. BIDANG TATA PEMERINTAHAN

Permasalahan bidang tata pemerintahan dikaitkan dengan tantangan reformasi birokrasi tahap II (periode 2015 – 2019) dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel
 - a. Penyelenggaraan pemerintah belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN, di tandai dengan peran APIP yang belum optimal mendorong pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
 - b. Manajemen kinerja belum sepenuhnya diterapkan, di tandai dengan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penilaian LAKIP Kabupaten Nunukan mengalami penurunan dari kategori CC pada Tahun 2015 menjadi C pada Tahun 2016. Dalam rekomendasi perbaikan SAKIP Kabupaten Nunukan dari Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB, diperlukan perbaikan mendasar terhadap aspek perencanaan kinerja pemerintah daerah dengan menerapkan target indikator yang berorientasi kepada hasil (*outcome*), kesesuaian antara perumusan tujuan, sasaran dan target serta indikator. Masih terdapat beberapa catatan dalam

- memberian Opini BPK yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik.
- c. Sinergitas dan integrasi mulai sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan yang belum terbangun secara baik. Hal ini antara lain berkaitan dengan kesesuaian perencanaan pembangunan dengan dokumen pelaksanaan anggaran, penentuan alokasi anggaran SKPD belum didasarkan kepada capaian kinerja instansi pemerintah, belum terbangunnya data dasar yang baku, sistem monitoring dan pelaporan yang terkesan tumpang tindih di mana dilaksanakan oleh lebih dari satu institusi.
2. Birokrasi belum efektif dan efisien
 - a. Manajemen aparatur (ASN) belum berjalan dengan baik, di tandai dengan belum optimalnya sistem pembinaan karir dimana belum ada kejelasan karir bagi ASN yang berprestasi baik, ketidaksesuaian antara jabatan dengan kompetensi.
 - b. Belum dirumuskannya pemberian tunjangan daerah berbasis kinerja.
 - c. Inefisiensi penggunaan anggaran, di tandai dengan belum terbangunnya sistem dan budaya kerja yang mendorong efisiensi untuk menghindari pemborosan, besarnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan atau dampak pembangunan yang dihasilkan.
 - d. Penerapan *e-government* belum berjalan efektif dan efisien, ditandai dengan belum terintegrasinya berbagai sistem aplikasi, termasuk Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK.
 3. Pelayanan publik belum memiliki kualitas yang diharapkan
 - a. Pelayanan perijinan masih belum berjalan efektif dan efisien, masih terdapat pelayanan perizinan yang memakan waktu lama terutama terkait dengan perizinan dasar. Perlu kajian komprehensif terhadap regulasi dalam rangka penyederhanaan prosedur pelayanan dan kemudahan berusaha.
 - b. Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Kabupaten Nunukan belum sepenuhnya menerapkan aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada UU Pelayanan Publik, antara lain adanya standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

- c. Rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta penggunaan *e-services* sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum merata.

4.2 ISU-ISU STRATEGIS

Sumber Isu strategis dapat digali berdasarkan permasalahan pembangunan yang telah berjalan selama ini, atau berasal dari kebijakan nasional maupun regional. Oleh karenanya, ulasan terhadap berbagai kebijakan yang relevan dengan isu strategis dapat dijadikan pedoman sebagai penentuan arah pembangunan pada masa mendatang.

4.2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sembilan agenda prioritas pembangunan nasional:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sasaran pokok pembangunan nasional 2015-2019 diarahkan untuk mencapai:

1. Perekonomian yang tumbuh relatif tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, yang didukung dengan terjaganya ketahanan pangan, energi, dan air, pengembangan sektor ekonomi utama, ketersediaan infrastruktur, dan percepatan pembangunan kelautan.
2. Pembangunan yang berkelanjutan mengamankan kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan dan penanganan bencana pada tingkat daerah terus ditingkatkan.
3. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.
4. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam taraf pendidikan, derajat kesehatan dan gizi masyarakat, menguatnya karakter dan jati diri bangsa, serta menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat.
6. Menurunnya tingkat kesenjangan antar wilayah (menurunnya jumlah kabupaten tertinggal).

Di bidang tata kelola pemerintahan yang baik antara lain diarahkan pada upaya penguatan kapasitas pemerintah, meningkatnya kapasitas birokrasi, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dibidang penanggulangan kemiskinan adalah menurunnya tingkat kemiskinan pada kisaran 7-8 persen pada akhir 2019.

Di bidang pendidikan sasaran utama adalah pemenuhan hak seluruh warga negara untuk setidaknya menyelesaikan pendidikan dasar. yang ditandai dengan partisipasi sekolah anak usia 7-15 tahun yang mendekati 100%, angka partisipasi jenjang pendidikan menengah sebesar 91,6%, pendidikan tinggi sebesar 36,7%. Angka melek aksara menjadi 96,1%. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun.

Sasaran pengembangan wilayah perbatasan di Pulau Kalimantan Tahun 2015- 2019 diantaranya adalah pembangunan kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan; pembangunan pusat-pusat kegiatan strategis nasional baru dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman dalam upaya untuk mendorong pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara. Kabupaten Nunukan merupakan wilayah yang memiliki indeks resiko bencana yang tinggi, sehingga merupakan wilayah Pulau Kalimantan yang ditetapkan sebagai sasaran penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana.

Selanjutnya, dalam upaya penguatan konektivitas dan sislognas di kawasan perbatasan direncanakan pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi di desa-desa terisolir dan kawasan perbatasan; pembangunan rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana bandara perintis; pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan penghubung nasional di kawasan perbatasan menuju pusat pertumbuhan (Nunukan dan Malinau) dengan ruas Malinau – Binuang – Long Bawan, Tabur Lestari dan Wasan di Kecamatan Sei Menggaris, ruas Malinau-Binuang – Long Bawan, ruas Long Umung – Long Bawan – Long Midang (Kabupaten Nunukan), serta ruas Long Ampung – Long Nawang - Batas, ruas jalan Malinau Kota – Paking – Semamu – Binuang-Long Bawan-Long Midang (Kabupaten Malinau).

Arah kebijakan untuk pengembangan kawasan perbatasan difokuskan untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia di perbatasan darat dan laut, dengan fokus pengembangan di Provinsi Kalimantan Utara diarahkan pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yakni PKSN Long Nawang, PKSN Sei Menggaris, PKSN Nunukan, PKSN Tao lumbis, dan PKSN Tarakan.

Pengembangan ekonomi lokal secara terpadu pada kawasan perbatasan dilakukan dengan beberapa strategi, diantaranya adalah meningkatkan nilai tambah produk hasil perkebunan dan pertanian (PKSN Seimanggaris);

pengembangan program transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara dalam bentuk Kota Terpadu Mandiri

4.2.2 Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan 2011-2025

Kebijakan nasional telah menetapkan beberapa kota kecamatan di kawasan perbatasan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), hal ini merupakan pendekatan dari aspek hankam sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan PKSN merupakan *entry point* pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu. PKSN di Kabupaten Nunukan adalah di Kecamatan Seimanggaris dan Nunukan. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dilakukan dengan prinsip manajemen berbasis wilayah, dengan mengembangkan potensi kawasan dan memecahkan permasalahan strategis perbatasan di wilayah-wilayah konsentrasi pengembangan secara terpadu. Sasaran wilayah pengelolaan kawasan perbatasan diarahkan pada Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) dengan fokus lokasi penanganan prioritas (Lokpri) yakni: Sebatik, Krayan, Nunukan sebagai Lokpri I, Krayan Selatan (Lokpri II), Sebuku dan Sebatik Barat (Lokpri III).

Terwujudnya perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, tertib dan maju merupakan visi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dengan misi:

1. Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, melalui peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta penguatan sistem pertahanan perbatasan darat dan laut;
2. Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang tertib, melalui peningkatan kerjasama internasional, penegakan hukum, kesadaran politik serta penegasan dan penetapan tata batas negara;
3. Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang maju, melalui peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Tujuan utama pengelolaan perbatasan, yakni:

1. Menjaga integrasi NKRI sebagai amanat konstitusi;
2. Membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, dan komprehensif untuk kesejahteraan rakyat;
3. Mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayah perbatasan dalam konteks persaingan global.

Agenda prioritas pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan yang terkait dengan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan darat adalah: (1) Optimalisasi dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, (2) Percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan peningkatan iklim investasi di perbatasan darat, (3) Penataan ruang di kawasan perbatasan darat, (4) Percepatan pengembangan sarana dan prasarana PKSN di kawasan perbatasan darat, (5) Pengembangan kegiatan usaha produktif masyarakat, (6) Perintisan model transmigrasi kawasan perbatasan darat, (7) Pengembangan perdagangan lintas batas dan kerja sama ekonomi sub regional.

Agenda prioritas yang terkait dengan percepatan dan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan sosial dasar perbatasan, adalah: (1) Pengembangan sistem pelayanan khusus kawasan perbatasan, (2) Percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan sosial dasar.

Agenda prioritas yang terkait dengan pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan darat, adalah: (1) Pengembangan manajemen berbasis wilayah, (2) Pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan perbatasan, (3) Pengembangan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan darat, dan (4) Pengembangan sistem pendukung pengelolaan perbatasan dan adopsi teknologi informasi.

4.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional .

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi rencana sistem pusat pelayanan wilayah dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten.

a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Wilayah meliputi :

- Hirarki 1 yang berfungsi sebagai PKW meliputi: Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Sebatik Timur (PKWp); Kecamatan Krayan;

- Hirarki 2 yang berfungsi sebagai PKL dan PKL Promosi (PKLp) meliputi: Kecamatan Sebuku; Kecamatan Lumbis; Kecamatan Lumbis Ogong; Kecamatan Tulin Onsoi; Kecamatan Sebatik; Kecamatan Sebatik Tengah; Kecamatan Sebatik Timur; Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebatik Utara; Kecamatan Sembakung; Kecamatan Sei Menggaris (PKLp);
- Hirarki 3 yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi: Kecamatan Krayan; Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik.

b. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pembentukan struktur ruang wilayah Kabupaten Nunukan melalui sistem pusat - pusat didukung oleh sistem prasarana wilayah sesuai dengan lokasi dan fungsi masing-masing prasarana. Sistem Prasarana Wilayah yang mendukung pembentukan struktur ruang wilayah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Pengembangan Sistem Transportasi

Sebagai kawasan yang memiliki wilayah yang terpisah, maka sistem transportasi yang terintegrasi merupakan kebutuhan pokok pengembangan infrastruktur di Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu, pengembangan sistem transportasi direncanakan secara terpadu, melalui kombinasi transportasi darat, air (sungai dan laut), dan udara.

- Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Darat

Jaringan jalan antar kabupaten yang sudah berkembang dengan adanya jalur trans Kalimantan. Sedangkan untuk Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik jalur darat berkembang sebagai pelayanan regional pulau.

- Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Laut dan Sungai

Dengan memperhatikan kondisi geografis kepulauan dari Kabupaten Nunukan maka rekomendasi untuk sistem angkutan penyeberangan di pelabuhan Nunukan secara umum diarahkan untuk melakukan peningkatan pelabuhan yang lebih besar karena jalur yang di layani merupakan jalur antar negara.

Selain pelabuhan antar regional dan antar negara perlu peningkatan pelabuhan penyeberangan antar pulau ke pulau dan Main Land Pulau Kalimantan. Untuk itu perlu penyeberangan perintis yang terintegrasi dalam pengembangan moda transportasi lainnya.

- Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Udara

Guna mendukung pengembangan sistem transportasi udara, maka rute -rute penerbangan sejalan dengan berkembangnya bandara perlu diciptakan sehingga keterkaitan antar wilayah dapat lebih terpadu dan diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi melalui jasa pengangkutan orang dan barang.

2) Rencana Sistem Prasarana Pengairan

Pelaksanaan reformasi pengelolaan SDA untuk meningkatkan keandalan pasokan air, pola pembiayaan dengan sistem korporasi wilayah sungai, dan arah pengelolaan SDA yang berbasis wilayah sungai ditekankan dengan integrasi pemakaian air permukaan dan air tanah, serta peningkatan kualitas air dengan pendekatan partisipatoris berdasarkan prinsip "satu sungai, satu rencana terpadu, dan satu pengelolaan yang terkoordinasi".

Konservasi sumber daya air dilaksanakan dengan memberikan perlindungan sumber air, dan pengelolaan kualitasnya tetap dilaksanakan secara seiring dengan prinsip pengembangan kimpraswil secara berkelanjutan, yaitu yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan.

3) Rencana Sistem Prasarana Telekomunikasi

Arah pengembangan sektor pos dan telekomunikasi ditujukan untuk melayani kemudahan hubungan antar wilayah. Sasaran pokoknya adalah meningkatkan pelayanan pos dan telekomunikasi pada kota-kota kecamatan yang diperkirakan akan berkembang. Selain itu untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota, diupayakan melalui dukungan prasarana pos pedesaan dan pos sungai. Beberapa pokok arahan pengalokasian prasarana ini, antara lain:

- Mempercepat peningkatan prasarana telekomunikasi pada kota-kota kecamatan di Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Tengah dan Kecamatan Krayan Selatan yang diperkirakan akan berkembang sektor - sektor unggulan, khususnya industri pertanian dan Pariwisata;
- Memperluas jaringan telekomunikasi kabel listrik (*internet*) di tiap daerah;

- Upaya pelayanan pos dan telekomunikasi pedesaan dan angkutan sungai.

4) Rencana Sistem Prasarana Energi

Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik meliputi upaya untuk:

- Mengamankan pasokan energi kepada pusat-pusat pemukiman perkotaan dan pedesaan serta kawasan - kawasan strategis lain meliputi industri, pariwisata dan pelabuhan.
- Mengembangkan jaringan tenaga listrik interkoneksi lintas wilayah antara Kecamatan, Kabupaten termasuk dengan negara tetangga.
- Mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), mikrohidro, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, *biomassa* sebagai upaya mengatasi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan atas tenaga listrik di Kabupaten Nunukan - baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
- Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang ketenagalistrikan sebagai acuan bagi usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan dengan cara: inventarisasi sumber listrik dan menilai potensi masing-masing sumber tersebut untuk dilakukan penetapan sumber pembangkit listrik paling potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Nunukan.

5) Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri dari sistem penyediaan air bersih, sistem jaringan drainase dan air limbah serta sistem pengelolaan persampahan.

2. Rencana Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Telaahan terhadap rencana pola ruang

Dalam rangka memperoleh kondisi yang lebih seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan lahan dalam jangka waktu rencana tata ruang, maka perencanaan pola ruang dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang memadukan pendekatan sektoral dan kewenangan vertikal menurut dimensi keruangan.

Dalam hal ini, perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Nunukan merupakan upaya untuk memadukan dan menyerasikan kepentingan antar sektor, antartingkat kewenangan, pertahanan dan keamanan negara, dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan ruang.

Pola ruang wilayah Kabupaten Nunukan merupakan arahan bagi penggunaan ruang di wilayah Kabupaten Nunukan yang didasari prinsip pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar bagian wilayah Kabupaten Nunukan yang lebih berimbang secara proporsional, tanpa mengganggu kelestarian lingkungannya.

Rencana alokasi pola ruang wilayah Kabupaten Nunukan dapat dikelompokkan menjadi dua kawasan, yaitu: kawasan berfungsi lindung dan kawasan berfungsi budidaya. Kawasan berfungsi lindung meliputi kawasan dengan pemanfaatan hutan lindung, Taman Nasional Kayan Mentarang, kawasan pesisir, sempadan sungai, dan kawasan perlindungan gajah. Sedangkan kawasan berfungsi budidaya meliputi kawasan budidaya kehutanan dan kawasan budidaya non kehutanan termasuk didalamnya kawasan pemukiman, industri, pertambangan, transmigrasi, pertanian tanaman pangan lahan kering, pertanian tanaman pangan lahan basah, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

4.2.4 TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: (1) kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan (2) segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi ketersediaan program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel 4.4
Kajian Dokumen KLHS Kabupaten Nunukan

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS
1.	Daya dukung lingkungan	<p>Persentase sebaran luas kemampuan lahan Kabupaten Nunukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas a sebesar 60 %, dengan kemampuan pengembangan sangat rendah untuk menahan konstruksi sehingga diperlukan rekayasa. 2. Kelas b sebesar 1 %, dengan kemampuan pengembangan rendah untuk dikembangkan sebagai areal perkampungan penduduk secara terbatas maupun perkebunan. 3. Kelas c sebesar 10 %, dengan kemampuan pengembangan sedang dan daya dukung pondasi bangunan rendah-tinggi. 4. Kelas d sebesar 8 %, dengan kemampuan pengembangan agak tinggi sehingga memiliki alternatif lebih banyak dalam pengembangan kawasan meliputi : areal perkotaan, perkampungan penduduk, pertanian lahan basah dan kering, perkebunan serta budidaya lainnya. 5. Kelas e sebesar 21 %, dengan kemampuan pengembangan sangat tinggi sehingga memiliki alternatif lebih banyak dalam pengembangan kawasan meliputi : areal perkotaan, perkampungan penduduk, pertanian lahan basah dan kering, perkebunan serta budidaya lainnya.
2.	Dampak dan resiko lingkungan hidup	-
3.	Layanan jasa ekosistem	-
No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS
4.	Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	-
5.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	-
6.	Keanekaragaman hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan komposisi nilai PDRB antar sektor maka Kabupaten Nunukan termasuk wilayah dengan struktur ekonomi kurang berkembang. 2. Dominasi sektor pertambangan dan penggalian belum memberikan <i>multiplier effect</i> untuk mendorong sektor lain seperti listrik, gas dan air bersih, transportasi komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

		<p>3. Optimalisasi dan pemerataan pengembangan sektor hulu dan hilir.</p> <p>4. Penyusunan program pembangunan daerah ke depan lebih fokus pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas mengingat daya dukung potensi daerah yang strategis.</p>
--	--	--

Sumber data : KLHS Kabupaten Nunukan

4.2.5 RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2016 – 2021

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Utara secara umum visi misi tujuan sasaran arah kebijakan dan indikator pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7
Matrik Visi Misi Sasaran dan Indikator RPJMD
Provinsi Kalimantan Utara

VISI			
BERPADU DALAM KEMAJEMUKAN UNTUK MEWUJUDKAN KALTARA 2020 YANG MANDIRI, AMAN, DAN DAMAI, DENGAN DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang mandiri	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rendah	Berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah	Angka kemiskinan Angka pengangguran
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (<i>green economy</i>)	Angka pertumbuhan ekonomi
	Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang
		Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga	Persentase peningkatan kuantitas jalan yang terbangun di kecamatan perbatasan (1055,66 km)
			Persentase kabupaten/kota yang dijangkau <i>Broadband</i>
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		

	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka harapan lama sekolah Angka rata - rata lama sekolah
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai	Menjaga kedaulatan negara	Terjaganya keutuhan NKRI	Cakupan PLB yang dapat dijangkau
			Layanan pemerintahan sampai tingkat desa kawasan perbatasan
		Terjaganya keamanan	Persentase gangguan keamanan
	Membangun daerah perbatasan yang aman	Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tenteram	Persentase gangguan keamanan di perbatasan
	Mewujudkan penegakan hukum	Terwujudnya penegakan hukum	Persentase pelanggaran perda/pergub
Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase kesesuaian pengisian struktur organisasi dengan analisis jabatan dan analisis beban
			Desa memiliki status Mandiri dalam IDM
		Terwujudnya pemerintahan akuntabel	Nilai SAKIP
			Opini BPK
	Mewujudkan pelayanan publik yang prima	Menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Meningkatnya pelayanan perizinan
		Meningkatnya pelayanan kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan

Sumber data : RPJMD Provinsi Kaltara 2016

4.2.6 RPJPD KABUPATEN NUNUKAN 2005 - 2025

Telaah dokumen RPJP Kabupaten Nunukan Tahun 2005 – 2025 menunjukkan bahwa perencanaan pada Tahapan ke-3 Tahun 2017 – 2021 ditujukan untuk lebih memantapkan

pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada:

1. Peningkatan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang maju dan terjangkau oleh masyarakat serta penguasaan dan pendayagunaan IPTEK;
2. Peningkatan daya saing kompetitif perekonomian daerah yang berbasis agrobisnis dan agroindustri dengan mengutamakan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Peningkatan sarana prasarana publik yang maju dan memadai;
4. Peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan yang mandiri, maju dan berdaya saing.

Pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang menghasilkan indikator keberhasilan, yaitu:

1. **Kesejahteraan masyarakat terus membaik**, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing.
2. **Kualitas sumber daya manusia semakin membaik** yang ditunjukkan oleh indikator: Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; Meningkatnya kesetaraan gender; Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih; Meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak; Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk menuju tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan Mantapnya budaya dan karakter masyarakat sebagai bangsa Indonesia yang berbudi luhur dan berorientasi IPTEK.
3. **Meningkatkan daya saing perekonomian daerah**, yang ditunjukkan oleh indikator : Daya saing perekonomian daerah semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha; Makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri; serta Terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

4.2.7 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)

Upaya pengentasan kemiskinan secara global sebagai kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDG's) telah dicanangkan sampai dengan Tahun 2030 melalui agenda yang bertujuan :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan *modern* bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara.
11. Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan mendesak untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumberdaya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbaharui serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggundulan hutan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses yang sama bagi semua orang, serta membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. Memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Beberapa isu internasional yang terkait dengan permasalahan pembangunan di Kabupaten Nunukan diantaranya adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia, ketersediaan bahan pangan, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur di wilayah perbatasan dan pedalaman, ketersediaan dan pengelolaan sumber daya air, pelestarian lingkungan.

4.2.8 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Nunukan perlu meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD. Identifikasi terhadap isu strategis dari masing-masing Kabupaten/Kota sekitar sebagaimana Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Identifikasi Isu Strategis RPJMD Kabupaten Lain

Kabupaten Malinau	Kabupaten Tanah Tidung	Kota Tarakan
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan Pelayanan Publik	Pembangunan Politik, Hukum, Keamanan, Dan Pemerintahan
	Meningkatkan Jaminan Keamanan	
Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah	Pengembangan Budaya dan Pariwisata berbasis kearifan lokal	
	Pembukaan Lapangan Kerja	
	Meningkatkan keunggulan daerah	Pengembangan Ekonomi Kota
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	
Belum tertatanya infrastruktur daerah	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan Infrastuktur Perkotaan
Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan	Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Pembangunan Lingkungan Hidup
	Menyelesaikan Batas Wilayah	Kerja Sama Antar Daerah
	Mengupayakan Kemandirian Pangan	

Sumber data : RPJMD Kabupaten Tanah Tidung dan Kota Tarakan, Rancangan Ahir RPJMD Kabupaten Malinau, diolah

4.2.9 RUMUSAN ISU STRATEGIS

Isu strategis yang diangkat dalam RPJMD ini ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan permasalahan pembangunan sebagaimana dijelaskan terdahulu, maka dapat digambarkan beberapa isu strategis Kabupaten Nunukan yang dikelompokan sesuai dengan kedekatan bidang atau aspek sebagai berikut :

1. Pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani
2. Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian Keanekaragaman hayati
4. Peningkatan daya saing produk lokal
5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan sosial
6. Peningkatan pelayanan kesehatan
7. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
8. Penguatan data dan informasi kependudukan
9. Peningkatan Kualitas Pendidikan
10. Pendidikan kewarganegaraan dan karakter untuk mendukung revolusi mental
11. Konektivitas pusat pertumbuhan
12. Integrasi pengelolaan dan pembangunan perbatasan
13. Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) berbasis IPTEK;
14. Peningkatan penerimaan dan Investasi di daerah
15. Pengembangan perdagangan, jasa dan pariwisata
16. Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi Pembangunan Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021

Visi pembangunan Kabupaten Nunukan adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Nunukan yang disampaikan kepada masyarakat ketika proses pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam menterjemahkan visi kedalam misi, visi diuraikan terlebih dahulu mengenai pokok-pokok yang terkandung didalam visi. Kemudian pokok-pokok visi tersebut dijelaskan mengenai kesesuaiannya dengan kebutuhan, permasalahan, dan potensi daerah. Selain itu, juga dijabarkan mengenai kriteria keberhasilan dan indikator keberhasilan dari pelaksanaan program-program pembangunan dari masing-masing pokok visi.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD harus terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Keterkaitan ini dimaksudkan menjaga kesinambungan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk itu, pokok-pokok visi juga harus memiliki rujukan dari sasaran pokok dalam RPJPD. Visi RPJMD 2016-2021 yaitu:

***“Mewujudkan Kabupaten Nunukan Sebagai Pusat Pertumbuhan
Ekonomi Berbasis Agrobisnis Menuju Masyarakat Yang Maju
Aman Adil Dan Sejahtera”***

Makna Visi:

- **Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis Agrobisnis** adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang berlandaskan pada pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan (pertanian dalam arti luas), sehingga dapat berpengaruh pada kenaikan pendapatan daerah yang ditandai dengan kenaikan Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*) Riil dengan tujuan percepatan pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat memperhatikan keseimbangan atau kesenjangan pembangunan antar sektor, antar golongan penduduk, dan antar wilayah.

- **Masyarakat Nunukan yang maju adalah** terwujudnya sumber daya manusia Kabupaten Nunukan yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berpendidikan yang berkualitas tinggi; sehat; kualitas lingkungan sosial yang baik; toleran menghargai perbedaan; demokratis; kreatif; inovatif; konstruktif dan taat hukum.
- **Masyarakat Nunukan yang aman adalah** terwujudnya kehidupan masyarakat yang tenteram, bebas dari konflik, bebas mengemukakan aspirasi, tidak mendapat perlakuan diskriminatif, bebas dari tindakan yang sewenang-wenang oleh kekuatan manapun sehingga masyarakat dapat menjalankan aktifitasnya dengan tenang dan damai.
- **Masyarakat Nunukan yang adil adalah** terwujudnya kesejahteraan, keharmonisan sosial dan kelestarian budaya serta kesetaraan di mata hukum yang menjangkau seluruh elemen masyarakat secara proporsional.
- **Masyarakat Nunukan yang sejahtera adalah** terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Nunukan yang ditandai oleh meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatnya kualitas pendidikan, dan meningkatnya derajat kesehatan dengan memperhatikan keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi.

5.2. Misi Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka ada empat misi yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan yaitu:

1. Mengakselerasi peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan dan daerah tertinggal untuk mendukung pembangunan agrobisnis berwawasan lingkungan.

Penjelasan:

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan daerah, dan mengembangkan sistem transportasi massal, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan mempercepat peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, indeks kualitas lingkungan hidup, berkurangnya resiko bencana, cakupan lahan yang dikonservasi, dan cakupan RTH (Ruang Terbuka Hijau).

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas harus diikuti dengan peningkatan kuantitas dan kualitas UMKM, wirausahawan (orang), Koperasi dan industri dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil produksi sektor agrobisnis. Nilai tambah hasil produksi akan meningkat signifikan jika investasi daerah yang berfokus pada sektor agrobisnis dapat direalisasikan.

Peningkatan hasil dan nilai tambah produk unggulan lokal harus memiliki daya saing dan berorientasi pasar yang didukung oleh peningkatan kelayakan infrastruktur wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, infrastruktur strategis di kawasan pengembangan agrobisnis yang terdiri dari *Technopark* pertanian organik di Krayan Selatan dan *Marine Technopark* di Nunukan Selatan, serta meningkatnya koordinasi antar urusan dalam pembangunan perbatasan yang dapat menggairahkan sektor pariwisata dalam bentuk wisata pendidikan di kawasan *technopark*.

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan daerah bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan daerah; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah daerah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

Pembangunan pertanian dalam arti luas telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan daerah, baik sumbangan langsung dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, menyediakan sumber pangan dan bahan baku, pemicu pertumbuhan ekonomi di pedesaan, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan

Penjelasan :

Peningkatan kualitas pelayanan dasar dititikberatkan dengan meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memperhatikan aksesibilitas masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan serta layanan dasar sosial lainnya. Dengan demikian akan terwujud generasi penerus yang cerdas, trampil, mandiri dan berwawasan sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan zaman.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Penjelasan :

Dalam rangka mendukung *grand design* reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Nunukan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pencegahan dan pemberantasan KKN, melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel dengan dukungan aparatur pemerintah yang berkapasitas dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat.

4. Mewujudkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan supremasi hukum.

Penjelasan :

Keberlanjutan proses pembangunan sangat ditentukan oleh kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta supremasi hukum. Keamanan, ketenteraman dan ketertiban ditandai dengan adanya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama serta harmoni antar kelompok masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peningkatan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, keterbukaan akses partisipasi politik masyarakat, perlindungan dan penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif serta peningkatan kualitas dan integritas Aparat Penegak Produk Hukum Daerah.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sisa lima tahun ke depan.

Berdasarkan isu strategis, visi dan misi yang telah diuraikan diatas maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan tujuan dari keempat misi RPJMD Kabupaten Nunukan adalah seperti berikut:

1. Tujuan untuk melaksanakan upaya Misi I : Mengakselerasi peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan dan daerah tertinggal untuk mendukung pembangunan agrobisnis berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan misi tersebut, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan yaitu :

Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam enam sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Sektor Agrobisnis
- 2) Meningkatnya kapasitas infrastruktur yang layak
- 3) Meningkatnya konektifitas antar wilayah
- 4) Meningkatnya investasi daerah
- 5) Meningkatnya sarana dan prasarana sektor pariwisata
- 6) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- 7) Menurunnya masyarakat berpenghasilan rendah

2. Tujuan untuk melaksanakan upaya Misi II : Meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan misi tersebut, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan yaitu

Meningkatkan daya saing masyarakat kabupaten Nunukan.

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya aksesibilitas kualitas pendidikan
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan

3. Tujuan untuk melaksanakan upaya Misi III : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Untuk mewujudkan misi tersebut, telah ditetapkan 1(satu) tujuan, yaitu:

Mewujudkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih.

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 2) Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat.

4. Tujuan untuk melaksanakan upaya Misi IV : Mewujudkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan supremasi hukum.

Untuk mewujudkan misi tersebut, telah ditetapkan 1(satu) tujuan, yaitu

Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Tertib dan Sejahtera

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya rasa aman dan kepatuhan terhadap hukum dikalangan masyarakat

TABEL.5.1

**Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Nunukan**

VISI : Mewujudkan Kabupaten Nunukan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agrobisnis Menuju Masyarakat Yang Maju Aman Adil Dan Sejahtera

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAHUN						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL RPJMD (2016)	TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD (2021)			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021				2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	20			
1	Mengakselerasi Peningkatan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Dan Daerah Tertinggal Untuk Mendukung Pembangunan Agrobisnis Berwawasan Lingkungan	1 Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,24	6,78	6,8	6,85	6,9	6,95	1 Meningkatkan Sektor Agrobisnis	1 PDRB sektor Pertanian (%)	21,59	23,81	21,59	22,36	22,50	22,65	22,76	22,76			
											2 PDRB sektor Perdagangan (%)	5,71	5,58	5,71	6,00	6,30	6,58	6,70	6,70			
										2 Meningkatkan kapasitas infrastruktur yang layak	1 Persentase peningkatan kualitas jalan yang terbangun dalam kondisi baik	30,00%	30%	54,83%	58,62%	62,41%	66,20%	70%	70%			
									2 Persentase peningkatan areal lahan yang dialiri jaringan irigasi		34,33%	34,33%	45%	50%	55%	57%	61%	61%				
										3 Meningkatkan konektivitas antar wilayah	1 Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi	NA	NA	17,14%	18,57%	20%	22,86%	25,71%	25,71%			
										4 Meningkatkan investasi daerah	1 Nilai realisasi Investasi (milyar rupiah)	649	649	1.265	700	720	740	760	760			
									5 Meningkatkan sarana dan prasarana sektor pariwisata	1 Persentase destinasi wisata yang terbangun	0	0	50%	50%	50%	100%	100%	100%				
									6 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,98%	82,98%	81,02%	81,30%	81,50%	81,55%	81,60%	81,60%				
						Angka Kemiskinan (%)	5,25	6,22	6	5,8	5,5	5	1 Menurunnya masyarakat berpenghasilan rendah	1 Indeks Gini	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27
													2 Tingkat Pengangguran Terbuka	7,24	NA	7,24	6,74	6,24	5,74	5,24	5,24	

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAHUN						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL RPJMD (2016)	TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	20
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Yang Berkeadilan	1 Meningkatkan daya saing masyarakat kabupaten nunukan	Indeks pembangunan manusia / IPM	64,35	65,1	66,1	67,01	67,9	68,81	1 Meningkatkan aksesibilitas kualitas pendidikan	1 Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,65	7,57	7,65	7,91	8,13	8,54	9,00	9
										2 Meningkatkan derajat kesehatan	2 Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,61	12,58	12,61	12,64	13,35	13,65	14,15	14,15
											1 Angka Harapan Hidup (tahun)	71,25	71,23	71,25	71,27	72	72,5	73	73
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	1 Mewujudkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih	Indeks RB	NA	NA	NA	C	CC	B	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Nilai Capaian SAKIP	C	C	CC	CC	B	B	B	B
										2 Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat	2 Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
											1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
4	Mewujudkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Dengan Mengedepankan Supremasi Hukum	1 Terwujudnya masyarakat yang tentran, aman dan tertib	Persentase gangguan keamanan yang ditangani	NA	NA	NA	100%	100%	100%	1 Meningkatkan rasa aman dan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat	1 Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	73%	73%	80%	83%	85%	90%	90%	90%
											2 Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	94%	94%	95%	96%	97%	98%	99%	99%

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyusun agenda pembangunan berupa Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah selama lima tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan Kabupaten Nunukan saat ini dan yang akan datang sebagaimana telah diuraikan dalam isu strategis.

Strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan tersebut nantinya menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk melaksanakan 4 (empat) misi pembangunan dalam periode sisa lima tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1 Mengakselerasi peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan dan daerah tertinggal untuk mendukung pembangunan agrobisnis berwawasan lingkungan

Agenda pembangunan pada misi pertama secara garis besar ingin mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menitikberatkan pada peningkatan daya saing daerah dan sektor pertanian yang berbasis agrobisnis. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada diharapkan menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah (keunggulan kompetitif) sehingga mampu bersaing dalam tingkat nasional maupun tingkat global.

Selain ingin mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah pembangunan ekonomi harus merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pembangunan Infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi dan listrik).

Peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas harus diikuti dengan peningkatan kuantitas dan kualitas UMKM, wirausahawan (orang), koperasi dan industri dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil produksi sektor agrobisnis.

Agenda pembangunan pada misi pertama ini mempunyai 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatnya perekonomian Kabupaten Nunukan. Tujuan tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) sasaran strategis, yaitu:

- (1) Meningkatnya sektor agribisnis
- (2) Meningkatnya kapasitas infrastruktur yang layak
- (3) Meningkatnya konektivitas antar wilayah
- (4) Meningkatnya investasi daerah
- (5) Meningkatnya sarana dan prasarana sektor pariwisata
- (6) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- (7) Menurunnya masyarakat berpenghasilan rendah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut digunakan 9 (sembilan) strategi, yaitu :

- (1) Peningkatan keterpaduan program pembangunan pertanian dalam arti luas.
- (2) Peningkatan kemudahan iklim berinvestasi
- (3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi yang berdaya saing
- (4) Meningkatkan standar/kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal melalui pengembangan teknologi, pemanfaatan SDA dan SDM secara optimal dan efisien serta mengurangi hambatan ekspor
- (5) Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di kawasan pengembangan agrobisnis dan pariwisata
- (6) Memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal
- (7) Peningkatan kemudahan berinvestasi
- (8) Pengembangan sistem informasi manajemen dan pemasaran pariwisata
- (9) Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup

5. Arah kebijakan yang ditempuh terdiri:

- (1) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya pertanian secara berkelanjutan;
- (2) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan secara berkelanjutan;
- (3) Meningkatkan ketahanan pangan dan keamanan pangan;
- (4) Pemberian kemudahan pelayanan perizinan;
- (5) Pemberian insentif terhadap investor;
- (6) Pembinaan, pengembangan kelembagaan dan diversifikasi usaha UKM yang berdaya saing;
- (7) Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas Koperasi yang berdaya saing;
- (8) Pengembangan dan peningkatan kapasitas IKM yang berdaya saing;
- (9) Pemberian peluang bagi pelaku IKM menjadi mitra pemerintah daerah;
- (10) Peningkatan daya saing komoditas unggulan dan memperluas akses pasar (ekspor);
- (11) Mengembangkan sistem informasi pasar dan pariwisata yang terpadu;
- (12) Peningkatan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
- (13) Mengendalikan pencemaran air, udara, tanah dan limbah tambang dengan meningkatkan ketaatan perusahaan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan;
- (14) Peningkatan perlindungan dan Konservasi sumberdaya alam
- (15) Peningkatan Sistem Pengelolaan Persampahan;
- (16) Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola;
- (17) Meningkatnya mitigasi bencana.

6.2 Meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan

Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dititikberatkan dengan meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memperhatikan aksesibilitas masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan serta layanan dasar sosial lainnya. Dengan demikian akan terwujud generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri, berwawasan yang berlandaskan iman dan taqwa

sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan zaman. Agenda pembangunan pada misi kedua ini diarahkan pada 1 (satu) tujuan, yaitu: meningkatnya daya saing masyarakat Kabupaten Nunukan. Tujuan tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

- (1) Meningkatnya aksesibilitas kualitas pendidikan
- (2) Meningkatnya derajat kesehatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut digunakan 4 (empat) strategi, yaitu :

- (1) Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan
- (2) Peningkatan upaya aktualisasasi karakter dan budaya bangsa
- (3) Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan
- (4) Meningkatkan pembinaan keolahrgaan bagi atlet

Arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- (1) Pembangunan layanan pendidikan pada wilayah perbatasan dan tertinggal serta terpencil;
- (2) Pemerataan layanan pendidikan khususnya pada wiayah perbatasan dan tertinggal serta terpencil;
- (3) Pelestarian khasanah budaya bangsa;
- (4) Pelestarian, perlindungan dan pengembangan khasanah budaya bangsa;
- (5) Peningkatan Sarana dan prasarana kesehatan;
- (6) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan;
- (7) Pemerataan pelayanan kesehatan;
- (8) Peningkatan kemampuan kepemimpinan pemuda kader;
- (9) Peningkatan fasilitas olahraga prestasi dan pemberian *reward*/penghargaan;

a. 6.3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Dalam rangka mendukung *Grand Desain* Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Nunukan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pencegahan dan pemberantasan KKN, melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel dengan dukungan aparatur pemerintah yang berkapasitas dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat.

Dengan misi tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten

Nunukan telah menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu, mewujudkan kinerja tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Tujuan tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

- (1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Terwujudnya Pelayanan Publik yang prima kepada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut digunakan 2 (dua) strategi, yaitu:

- (1) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- (2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

Arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
- (2) Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan secara berkelanjutan;
- (3) Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dalam pemberian pelayanan sesuai standar pelayanan;
- (4) Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik sesuai dengan standar pelayanan;
- (5) Evaluasi pelayanan publik;

6.4 Mewujudkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dengan Mengedepankan Supremasi Hukum

Keberlanjutan proses pembangunan sangat ditentukan oleh kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta supremasi hukum. Keamanan, ketenteraman dan ketertiban ditandai dengan adanya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama serta harmoni Antar Kelompok Masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peningkatan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, keterbukaan akses partisipasi politik masyarakat, perlindungan dan penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif serta peningkatan kualitas dan integritas Aparat Penegak Produk Hukum Daerah.

Untuk memenuhi misi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Nunukan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera. Tujuan tersebut dijabarkan kedalam 2 (dua) sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatkan rasa aman dikalangan masyarakat
- b. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum
- c. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut digunakan 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - (1) Meningkatkan Wawasan dan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara serta kewaspadaan dini masyarakat
 - (2) Meningkatkan Ketaatan masyarakat terhadap produk hukum daerah
 - (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Arah kebijakan yang diambil dalam menjalankan strategi di atas berupa:

- 1) Pembinaan dan pengawasan pembangunan;
- 2) Pembinaan dan pengawasan organisasi-organisasi kemasyarakatan;
- 3) penyelenggaraan dialog forum kemasyarakatan dan antar forum kemasyarakatan;
- 4) pembinaan pendidikan politik.
- 5) pembinaan ketertiban, ketentraman dan keamanan serta keindahan lingkungan;
- 6) pengawasan, pembinaan dan penegakan produk hukum daerah;
- 7) peningkatan kualitas aparat penegak produk hukum daerah;
- 8) Peningkatan kualitas sistem deteksi dini kebakaran.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta upaya pencapaiannya yang terdiri strategi, kebijakan dan program dapat dilihat pada tabel 6.1 tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi. Tabel 6.2 arah kebijakan pembangunan dan tabel 6.3 program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kabupaten Nunukan

VISI : Mewujudkan Kabupaten Nunukan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agrobisnis Menuju Masyarakat Yang Maju Aman Adil Dan Sejahtera				
Tujuan	Sasaran		Strategi	
MISI 1 : Mengakselerasi Peningkatan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Dan Daerah Tertinggal Untuk Mendukung Pembangunan Agrobisnis Berwawasan Lingkungan				
Meningkatnya perekonomian Kabupaten Nunukan	1	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	1	Peningkatan keterpaduan program pembangunan pertanian dalam arti luas
			2	Peningkatan kemudahan iklim berinvestasi
			3	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi yang berdaya saing
			4	Meningkatkan standar/kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal melalui pengembangan teknologi, pemanfaatan SDA dan SDM secara optimal dan efisien serta mengurangi hambatan ekspor
	2	Meningkatnya kapasitas infrastruktur yang layak	1	Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di kawasan pengembangan agrobisnis dan pariwisata
	3	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1	Memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal
	4	Meningkatnya investasi daerah	1	Peningkatan kemudahan berinvestasi
	5	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	1	Pengembangan sistem informasi manajemen dan pemasaran pariwisata
	6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup
	7	Menurunnya masyarakat berpenghasilan rendah	1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Yang Berkeadilan				
Meningkatkan daya saing masyarakat kabupaten nunukan	1	Meningkatnya aksesibilitas kualitas pendidikan	1	Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan
			2	Peningkatan upaya aktualisasasi karakter dan budaya bangsa
	2	Meningkatnya derajat kesehatan	1	Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan
MISI 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi				
Mewujudkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
	2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat	1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
MISI 4 : Mewujudkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan supremasi hukum				
Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera	1	Meningkatnya rasa aman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum di kalangan masyarakat	1	Meningkatkan Wawasan dan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara serta kewaspadaan dini masyarakat
			2	Meningkatkan Ketaatan masyarakat terhadap Produk hukum Daerah

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Nunukan

Arah Kebijakan				
Tahun-1 (2017)	Tahun-2 (2018)	Tahun-3 (2019)	Tahun-4 (2020)	Tahun-5 (2021)
1) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya pertanian secara berkelanjutan;	1) Meningkatkan ketahanan pangan dan keamanan pangan;	1) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan secara berkelanjutan	1) Pemberian peluang bagi pelaku IKM menjadi mitra pemerintah daerah.	1) Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk;
2) Pemberian kemudahan pelayanan perizinan	2) Pemberian insentif terhadap investor;	2) Pengembangan dan peningkatan kapasitas IKM yang berdaya saing;	2) Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola;	2) Melanjutkan arah kebijakan tahun 2020
3) Pembinaan, pengembangan kelembagaan dan diversifikasi usaha UKM yang berdaya saing	3) Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas Koperasi yang berdaya saing;	3) Peningkatan Sistem Pengelolaan Persampahan;	3) Meningkatkan etos kerja dan kapasitas ASN	
4) Peningkatan daya saing komoditas unggulan dan memperluas akses pasar (ekspor)	4) Peningkatan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;	4) Pemerataan pelayanan kesehatan;	4) Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	
5) Mengembangkan sistem informasi pasar dan pariwisata yang terpadu;	5) Peningkatan perlindungan dan Konservasi sumberdaya alam;	5) Evaluasi pelayanan publik;	5) Meningkatkan akses dan kualitas data dan informasi pembangunan	
6) Mengendalikan pencemaran air, udara, tanah dan limbah tambang dengan meningkatkan ketaatan perusahaan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan;	6) Meningkatkan Sarana Penunjang Keamanan dan Keselamatan Pengguna Jalan;	6) penyelenggaraan dialog forum kemasyarakatan dan antar forum kemasyarakatan	6) meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan	
7) Meningkatnya mitigasi bencana.	7) Pemerataan layanan pendidikan khususnya pada wiayah perbatasan dan tertinggal serta;	7) peningkatan kualitas aparat penegak produk hukum daerah;	3) Melanjutkan arah kebijakan tahun 2019.	
8) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur, sarana prasarana daerah di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal.	8) Pelestarian, perlindungan dan pengembangan khasanah budaya bangsa;	8) Melanjutkan arah kebijakan tahun 2018		
9) Membangun infrastruktur strategis di kawasan pengembangan agrobisnis dan pariwisata;	9) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan;			
10) Pembangunan layanan pendidikan khususnya pada wilayah perbatasan dan tertinggal sertaterpencil;	10) Peningkatan perlindungan perempuan dan anak;			
11) Pelestarian khasanah budaya bangsa;	11) Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan secara berkelanjutan;			
12) Peningkatan Sarana dan prasarana kesehatan;	12) Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik sesuai dengan standar pelayanan;			

13) Peningkatan kemampuan kepemimpinan pemuda kader;	13) Pembinaan Ormas;			
14) Peningkatan fasilitas olahraga prestasi dan pemberian reward/penghargaan;	14) pengawasan, pembinaan dan penegakan Produk hukum daerah;			
15) Pemberdayaan dan rehabilitasi sosial;	15) Melanjutkan arah kebijakan tahun 2017			
16) Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;				
17) Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dalam pemberian				

Tabel 6.3
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
KABUPATEN NUNUKAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Misi I : Mengakselerasi Peningkatan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Dan Daerah Tertinggal Untuk Mendukung Pembangunan Agrobisnis Berwawasan Lingkungan															
	Tujuan 1 : Meningkatkan perekonomian Kabupaten Nunukan	Laju Pertumbuhan Ekonomi		6,78		6,8		6,85		6,9		6,95		6,95		
	Sasaran 1.1 : Meningkatkan Sektor Agrobisnis	PDRB Sektor Pertanian		21,59		22,36		22,50		22,65		22,76		22,76		
	1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani							643.083.000							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)							3.230.005.800							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan							390.800.000							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	4	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan							1.190.755.000							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	5	Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian							990.050.000							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	6	Program peningkatan penerapan teknolog peternakan							366.988.000							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	7	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah Bidang Pertanian							214.720.600							Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	8	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Bidang Perikanan							221.189.200							Dinas Perikanan
	9	Program pengembangan budidaya perikanan							2.778.012.556							Dinas Perikanan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	10 Program perizinan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan								180.000.000							Dinas Perikanan
		PDRB Sektor Perdagangan		5,71		6,00		6,30		6,58		6,70		6,70		
	11 Program peningkatan dan pengembangan ekspor								298.294.000							Dinas Perdagangan
	12 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri								240.522.200							Dinas Perdagangan
	13 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan								375.000.000							Dinas Perdagangan
	14 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi								267.697.800							Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil dan Perindustrian
	15 Program peningkatan kemampuan teknologi industri								738.119.900							Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil dan Perindustrian
	16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah								253.766.299							Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil dan Perindustrian
	17 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah															Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil dan Perindustrian
	Sasaran 1.2 : meningkatnya kapasitas infrastruktur yang layak	Persentase peningkatan kualitas jalan yang terbangun antar kecamatan		78,95%		84,21%		89,47%		94,74%		100%		100%		
	18 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan								30.242.265.400							DPUPRKP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	19 Program pembangunan jalan dan jembatan								17.114.942.000							DPUPRPKP
	20 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan								947.125.000							DPUPRPKP
		Persentase peningkatan areal lahan yang dialiri jaringan irigasi														
	21 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya								7.930.000.000							DPUPRPKP
	Sasaran 1.3 : Meningkatnya konektifitas antar wilayah	Persentase desa yang terhubung dengan jaringan komunikasi/ persentase desa yang blankspot	36%	36%				68%		84%		100%				
	22 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								50.000.000							Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	23 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan								25.000.000							Dinas Perhubungan
	24 Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan								390.454.400							Dinas Perhubungan
	Sasaran 1.4 : Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi Investasi (Milyar Rupiah)						720		740		760		760		
	25 Program peningkatan kualitas pelayanan publik								463.378.800							Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	26 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi															Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Sasaran 1.5 : Meningkatkan sarana dan prasarana sektor pariwisata	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Pariwisata (%)		0,96		1,01		1,06		1,11		1,17		1,17		
	27 Program pengembangan pemasaran pariwisata								99.385.000							Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	28 Program pengembangan destinasi pariwisata								50.000.000							Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	29 Program pengembangan Kemitraan								20.000.000							Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	30 Program pengembangan ekonomi kreatif								50.000.000							Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	Sasaran 1.6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	57,51% (kurang)					60,85% (cukup)		60,95% (cukup)		61% (cukup)		61% (cukup)		
	31 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								7.079.030.600							Dinas Lingkungan Hidup
	32 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup								176.220.000							Dinas Lingkungan Hidup
	33 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam								2.100.000.000							Dinas Lingkungan Hidup
	34 Program penataan hukum lingkungan								20.000.000							Dinas Lingkungan Hidup
	Sasaran 1.7 : Menurunnya masyarakat berpenghasilan rendah	Indeks gini	0,284	0,284		0,280		0,276		0,272		0,268		0,268		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya								221.185.200							Dinas Sosial
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								283.427.500							Dinas Sosial
	Program Pelayanan dan Jaminan Sosial								96.008.500							Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								44.400.000							Dinas Sosial
	Program pengembangan perikanan tangkap								494.000.000							Dinas Perikanan
	Program pemberdayaan nelayan kecil								221.010.640							Dinas Perikanan
	Program pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan								338.252.120							Dinas Perikanan
	Misi II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Yang Berkeadilan															
	Tujuan I : Meningkatkan daya saing masyarakat kabupaten nunukan	Indeks pembangunan manusia														
	Sasaran 2.1 : Meningkatkan aksesibilitas kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah		7,65		7,91		8,13		8,34		8,56		8,56		
	35 Program Pendidikan Anak Usia Dini								<u>97.486.000</u>							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	36 Program Pendidikan Non Formal								<u>1.386.370.000</u>							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	37 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan								<u>1.950.715.000</u>							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	38 Program Akhir Sekolah dan Ujian Nasional								<u>721.976.400</u>							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	39 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya								<u>399.827.600</u>							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Harapan Lama Sekolah		12,61		12,64		13,35		13,65		14,15		14,15		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	40 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								16.603.915.130							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	41 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan								1.117.201.200							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sasaran 2.2 : Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (tahun)		71,25		71,27		72		72,5		73		73		
	42 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan								47.454.394.700							Dinas Kesehatan
	43 Program Upaya Kesehatan Masyarakat								7.708.390.000							Dinas Kesehatan
	44 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat								49.800.000							Dinas Kesehatan
	45 Program Perbaikan Gizi Masyarakat								150.000.000							Dinas Kesehatan
	46 Program Pengembangan Lingkungan Sehat								101.576.000							Dinas Kesehatan
	47 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								349.205.300							Dinas Kesehatan
	48 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin								87.124.000							Dinas Kesehatan
	49 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya								339.200.000							Dinas Kesehatan
	50 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan								7.000.000.000							Dinas Kesehatan
	51 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita								133.168.840							Dinas Kesehatan
	52 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia								50.000.000							Dinas Kesehatan
	53 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan								166.189.000							Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	54	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak							148.616.500							Dinas Kesehatan
	55	Program Perbaikan Kesehatan Ibu Hamil							130.760.000							Dinas Kesehatan
	56	Program Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga							30.000.000							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
	57	Program keluarga berencana							54.318.000							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
	58	Program perencanaan pengendalian penduduk							49.994.000							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
		Sasaran 2.3 : Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase atlet berprestasi			40%		45%		49%		53%		53%		
	59	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan							399.988.000							Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	60	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga							259.840.000							Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Misi III : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi															
	Tujuan 1 : Mewujudkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih	Indeks RB														
	Sasaran 3.1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Capaian SAKIP				CC		B		B		B		B		
	61 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								310.257.400							Sekretariat Daerah
	62 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								1.589.050.900							Inspektorat
	63 Program perencanaan pembangunan daerah								616.499.900							Bappeda Litbang
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah															Sekretariat DPRD
	Program Penganggaran, pengawasan/ monev dan kode etik															Sekretariat DPRD
		Nilai LPPD				ST		ST		ST		ST		ST		
	64 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								310.257.400							Sekretariat Daerah
		Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
	65 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								1.589.050.900							Inspektorat
	66 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah								5.791.457.900							BPKAD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Sasaran 3.2 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				75%		80%			95%		100%		100%	
	67 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi								57.540.000							Sekretariat Daerah
	68 Program Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik								76.383.564							Sekretariat Daerah
	69 Program peningkatan kualitas pelayanan publik								463.378.800							Dinas Pelayanan Modal dan PTSP
	70 Program Penataan Administrasi Kependudukan								29.963.600,00							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Misi IV : Mewujudkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan supremasi hukum															
	Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera	Indeks rasa aman														
	Sasaran 4.1 : Meningkatkan rasa aman di kalangan masyarakat	Indeks rasa aman														
	71 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								29.480.000							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	72 Program pengembangan wawasan kebangsaan								668.482.500							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	73 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)								29.480.000							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	74 Program pendidikan politik masyarakat								900.000.000							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	75 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan								99.878.000							Dinas Pemadam Kebakaran

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	76	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran							287.767.000							Dinas Pemadam Kebakaran
	77	Program Penanggulangan Bencana Daerah							451.492.500							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Sasaran 4.2 : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum	cakupan kasus K3 yang diselesaikan	87%		100%		100%		100%		100%		100%		
	78	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal							289.990.000							Satuan Polisi PP
	79	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di Daerah							89.935.000							Satuan Polisi PP
			Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	94%		96%		97%		98%		99%		99%		
	80	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan							50.000.000							DPPPAPPKB
	81	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak							146.460.000							DPPPAPPKB
	82	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan							35.070.000							DPPPAPPKB
	83	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR							74.225.000							DPPPAPPKB
	84	Program Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga							30.000.000							DPPPAPPKB

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	85 Program Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan								74.225.000							DPPPAPKB
		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	7,24	7,24		6,74		6,24		5,74		5,24		5,24		
	93 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja								57.503.000							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	94 Program Peningkatan Kesempatan Kerja								227.667.000							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	95 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan								62.936.000							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	96 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi								138.400.000							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Rencana program Perangkat Daerah yang disertai kebutuhan pendanaan merupakan langkah akhir dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya. Rencana program perangkat daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Setelah program perangkat daerah diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, maka langkah selanjutnya adalah membuat alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah strategis dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan 6 (enam) urusan pilihan, dan 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah

Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016-2021
KABUPATEN NUNUKAN

Kode	Kapabilitas Riil / Belanja	Tahun				
		Tahun 2018 (proyeksi)	Tahun 2019 (proyeksi)	Tahun 2020 (proyeksi)	Tahun 2021 (proyeksi)	Tahun 2022 (proyeksi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	604.373.030.632	592.245.286.070	606.055.888.188	638.544.134.917	674.790.328.279
	BELANJA					
	Belanja Tidak Langsung	643.680.444.628	663.296.327.121	729.125.959.833	801.538.555.816	881.692.411.398
	Belanja Pegawai	408.451.337.441	393.912.655.454	433.303.920.999	476.634.313.099	524.297.744.409
	Belanja Bunga					
	Belanja Subsidi	8.936.087.990	8.936.087.990	9.829.696.789	10.812.666.468	11.893.933.115
	Belanja Hibah	14.850.520.000	10.129.720.000	11.142.692.000	12.256.961.200	13.482.657.320
	Belanja Bantuan Sosial	1.050.000.000	1.050.000.000	1.155.000.000	1.270.500.000	1.397.550.000
	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	207.642.499.197	244.267.863.677	268.694.650.045	295.564.115.049	325.120.526.554
	Belanja Tidak Terduga	2.750.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.500.000.000
	Belanja Langsung	642.434.273.896	482.840.613.475	518.214.928.096	561.584.593.455	609.610.525.436
	Belanja Pegawai	130.313.058.061	123.972.960.564	133.055.582.011	144.191.069.919	156.522.089.319
	Belanja Modal	242.580.938.894	230.778.692.623	247.686.214.179	268.415.196.770	291.369.690.418
	Belanja Barang dan Jasa	269.540.276.941	128.088.960.288	137.473.131.906	148.978.326.765	161.718.745.700

Tabel 7.2
**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
 KABUPATEN NUNUKAN**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi awal RPJMD (2017)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 182.674.119.648																
Bidang Pendidikan																
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	72,3%	72,3%	2.181.692.000	72,35%	40.150.000	72,4%	97.486.000	72,45%	97.486.000	72,52%	97.486.000	72,52%	2.514.300.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM)			25.636.596.150		42.208.000.150		16.603.915.130		16.603.915.130		16.603.915.130		117.656.341.690	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		a. SD/MI	83%	83%		85%		89%		89%		92%		92%		
		b. SMP/MTS	59%	59%		60%		65%		65%		67%		67%		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)														
		a. SD/MI	92%	92%		94%		98%		98%		100%		100%		
		b. SMP/MTS	65%	65%		67%		71%		71%		74%		74%		
	Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf	91,45%	91,45%	2.023.745.300	92,12%	1.448.370.000	92,12%	1.386.370.000	92,12%	1.386.370.000	92,12%	1.386.370.000	92,12%	7.631.225.300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proporsi guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	75%	75%	8.670.737.800	76%	1.128.625.000	78%	1.950.715.000	80%	1.950.715.000	81,25%	1.950.715.000	81,25%	15.651.507.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase lembaga pendidikan yang tertib administrasi	70%	70%	3.029.469.000	75%	1.275.121.200	78%	1.147.201.200	90%	1.117.201.200	100%	1.117.201.200	100%	7.686.193.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah
	Program Akhir Sekolah dan Ujian Nasional	Angka kelulusan			818.890.000		746.867.500		721.976.400		721.976.400		721.976.400		3.731.686.700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		a. SD/MI	99,58%	99,58%		99,6%		99,7%		99,75%		99,75%		99,75%		
		b. SMP/MTS	99,71%	99,71%		99,8%		99,95%		99,95%		99,95%		99,95%		
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pelestarian budaya lokal	70%	70%	1.516.000.000	75%	500.000.000		399.827.600	83%	399.827.600	85%	399.827.600	85%	3.215.482.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Kesehatan																
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase terpenuhinya Obat & alat kesehatan di Faskes	91%	91%	28.783.450.000	92%	2.714.335.910	93%	47.454.394.700	94%	47.454.394.700	95%	47.454.394.700	95%	173.860.970.010	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100	100	7.941.188.186	100	2.128.910.000	100	7.748.389.500	100	7.708.390.000	100	7.708.390.000	100	33.235.267.686	Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	10%	10%	270.315.000	20%	41.170.000	30%	49.800.000	40%	49.800.000	50%	49.800.000	60%	460.885.000	Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk yg mendapat perawatan	100%	100%	441.760.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	1.041.760.000	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan rumah sehat	65%	65%	-	66%	94.336.000	67%	101.576.000	68%	101.576.000	70%	101.576.000	70%	500.640.000	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penderita penyakit menular yang ditangani	50%	50%	348.620.000	60%	76.250.000	70%	349.205.300	80%	349.205.300	90%	349.205.300	90%	1.472.485.900	Dinas Kesehatan
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin yang terlayani	60%	60%	81.730.000	70%	379.599.168	80%	87.124.000	90%	87.124.000	1000%	87.124.000	1000%	722.701.168	Dinas Kesehatan
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang tersedia	109 Unit	109 unit	250.000.000	110	-	112	339.200.000	113	339.200.000	113	339.200.000	113	1.267.600.000	Dinas Kesehatan
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah peserta JKN	80%	80%	5.000.000.000	90%	6.000.000.000	100%	7.000.000.000	100%	7.000.000.000	100%	7.000.000.000	100%	32.000.000.000	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	80%	80%	-	80%	519.200.000	80%	133.168.840	81%	133.168.840	82%	133.168.840	82%	918.706.520	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase lansia yang di skrining	30%	30%	46.281.500	40%	60.458.070	50%	50.000.000	50%	50.000.000	70%	50.000.000	70%	256.739.570	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi awal RPJMD (2017)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase sarana penyedia jasa boga yang diawasi	72%	72%	110.212.500	73%	250.000.000	74%	166.189.000	75%	166.189.000	75%	166.189.000	75%	858.779.500	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	82%	82%	50.340.000	83%	1.400.000.000	84%	148.616.500	85%	148.616.500	85%	148.616.500	85%	1.896.189.500	Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	76%	76%	-	78%	184.000.000	80%	130.760.000	82%	130.760.000	82%	130.760.000	82%	576.280.000	Dinas Kesehatan
	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
	Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang Jalan Kabupaten yang terbangun (KM)	817,08	110	55.111.375.000	87	90.527.449.800	111	17.114.942.000	128	17.114.942.000	107	17.114.942.000	543	196.983.650.800	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase Panjang jalan dan jembatan yang di pelihara	31.23 KM	2 km	2.203.044.520	2 km	1.970.215.000	2 km	947.125.000	2 km	947.125.000	2 km	947.125.000		7.014.634.520	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program pengelolaan areal pemakaman	Luas Areal Pemakaman	26.0 Ha	26.10 Ha	1.664.700.000	26.10 Ha	0	29.10 Ha	1.915.700.000	31.10 Ha	1.915.700.000	31.10 Ha	1.915.700.000	31.10 Ha	7.411.800.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rasio Jaringan Irigasi	0,41	0	680.000.000	1	7.306.746.000	1	7.930.000.000	1	7.930.000.000	1	7.930.000.000	1	31.776.746.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase penyediaan air baku	0,27	0	200.000.000	0	3.476.380.000	1	1.750.000.000	1	1.750.000.000	1	1.750.000.000	1	8.926.380.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai	Persentase normalisasi sungai	0,3	0,35	5.755.000.000	0,4	2.884.151.000	0,45	5.500.000.000	0,55	5.500.000.000	0,6	5.500.000.000	0,6	25.139.151.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	0,4137	0	26.286.625.000	0,47	41.824.323.000	0,49	30.242.265.400	0,53	30.242.265.400	1	30.242.265.400	1	158.837.744.200	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Produk Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah yang tersedia	4 Dokumen	2 Dokumen	573.609.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	3.170.520.000	2 Dokumen	3.170.520.000	2 Dokumen	3.170.520.000	14 Dokumen	10.085.169.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,2158	0	1.616.362.800	0	360.633.300	0	484.655.000	0	484.655.000	0	484.655.000	0	3.430.961.100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang dikelola	0,5	0,54	4.086.832.500	0,58	116.575.000	0,62	5.562.830.000	0,66	5.562.830.000	0,7	5.562.830.000	0,7	20.891.897.500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Tata Bangunan Keciaptakarya	Persentase jumlah bangunan gedung pemerintahan yang dibangun / dipelihara	63%	65%	3.105.100.000	74%	6.740.865.787	83%	17.202.900.378	92%	17.202.900.378	100%	17.202.900.378	100%	61.454.666.921	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Air Bersih Keciaptakarya	Rumah tangga pengguna air bersih (KK)	7966	7.966	530.000.000	9.025	9.349.218.000	9.928	1.501.000.000	10.424	1.501.000.000	10.946	1.501.000.000	10.946	14.382.218.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat															
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	59,00%	59,00%	563.571.000	63,00%	100.000.000	67,00%	99.878.000	71,00%	99.878.000	75,00%	99.878.000	75,00%	963.205.000	Dinas Pemadam Kebakaran
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Rasio satuan pengamanan per jumlah desa atau kelurahan	0,26%	0,26%	283.568.000	0,52%	300.000.000	0,78%	287.767.000	1%	287.767.000	1%	287.767.000	1%	1.446.869.000	Dinas Pemadam Kebakaran
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penyelesaian permasalahan K3	100%	100%	645.319.400	100%	220.000.000	100%	289.990.000	100%	289.990.000	100%	289.990.000	100%	1.735.289.400	Satpol PP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi awal RPJMD (2017)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di Daerah	Persentase meningkatnya Ketaatan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah	73%	73%	447.419.500	80%	100.000.000	83%	89.935.000	85%	89.935.000	90%	89.935.000	90%	817.224.500	Satpol PP
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								29.630.000							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah Peserta dan Jumlah Kegiatan	2 Keg & 75 Orang	2 Keg & 75 Orang	298.000.000	2 Keg & 75 Orang	220.000.000	2 Keg & 75 Orang	678.882.500	2 Keg & 75 Orang	668.482.500	2 Keg & 75 Orang	668.482.500	2 Keg & 75 Orang	2.533.847.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KECAMATAN NUNUKAN SELATAN
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah Peserta, Jumlah Pertemuan, Jumlah kec. yg dipantau	0 Orang 4 Kali 5 Kec	0 Orang 4 Kali 5 Kec	175.000.000	0 Orang 4 Kali 5 Kec	30.000.000	0 Orang 4 Kali 5 Kec	36.499.000	0 Orang 4 Kali 5 Kec	29.480.000	75 Orang 4 Kali 5 Kec	29.480.000	75 Orang 10 kali 25 Kec.	300.459.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KECAMATAN SEBATIK BARAT
	Program pendidikan politik masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	0 kec. 9 parpol, 75 org dan 15 ormas	0 kec. 9 parpol, 75 org dan 15 ormas	165.000.000	0 kec. 9 parpol, 75 org dan 15 ormas	900.000.000	19 kec. 9 parpol, 1.500 org dan 15 ormas	900.000.000	0 kec. 9 parpol, 75 org dan 15 ormas	900.000.000	0 kec. 9 parpol, 75 org dan 15 ormas	900.000.000	38 kec. 45 parpol, 3.225 org dan 75 ormas	3.765.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Bidang Sosial															
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah PMKS yang ditangani dan mampu berintegrasi sosial		0rg	168.492.500	25 org	175.000.000	25 org	221.185.200	25 org	221.185.200	25 org	221.185.200	100 org	1.007.048.100	Dinas Sosial dan Sekretariat Daerah
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapat kesejahteraan sosial yang harmoni	20 org	20 org	490.446.255	15 org	285.000.000	15 org	283.427.500	15 org	283.427.500	10 org	283.427.500	75 org	1.625.728.755	Dinas Sosial
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								39.599.000							Sekretariat Daerah
	Pelayanan dan Jaminan Sosial	Presentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial			19.950.700		100.000.000		96.008.500		100.000.000		100.000.000		415.959.200	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan	1 kegiatan	1 kegiatan	124.925.625	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	83.465.000	1 kegiatan	44.400.000	1 kegiatan	44.400.000	5 kegiatan	337.190.625	Dinas Sosial, Sekretariat Daerah
II.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								171.671.317.243							
	Bidang Tenaga Kerja															
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang meningkat kapasitasnya	67%	67%	57.356.950	69%	141.660.000	71%	89.208.000	73%	57.503.000	75%	57.503.000		403.230.950	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah lapangan Kerja Baru	67%	67%	45.272.000	69%	103.050.000	364 LKB	227.667.000	397 LKB	227.667.000	430 LKB	227.667.000		831.323.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja	66 Perusahaan	86 Perusahaan	57.839.649	76 Perusahaan	19.272.000	86 Perusahaan	62.936.000	96 Perusahaan	62.936.000	106 Perusahaan	62.936.000	86 Perusahaan	265.919.649	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase warga yang dibina	20%	20%	123.665.000	20%	198.725.000	20%	138.400.000	20%	138.400.000	20%	138.400.000	100%	737.590.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja	Persentase jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerja	100%	100%	343.516.569	100%	387.628.432	100%	617.242.080	100%	617.242.080	100%	617.242.080	100%	2.582.871.241	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak															

	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak	5%	5%	Rp	242.585.000	10%	-	15%	79.233.600	20%	50.000.000	25%	50.000.000	25%	421.818.600	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sekretariat Daerah
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi awal RPJMD (2017)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan komprehensif.	95%	95%	Rp	380.810.000	96%	175.000.000	97%	146.460.000	98%	146.460.000	99%	146.460.000	99%	995.190.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Cakupan PUS yang dibina	95%	95%	Rp	91.310.000	96%	50.000.000	97%	35.070.000	98%	35.070.000	99%	35.070.000	99%	246.520.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama		66,50	Rp	208.077.500	66,3	50.000.000	65,5	50.000.000	65,5	50.000.000	65	50.000.000	65	408.077.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi melalui media, audiensi, dan momentum KKBPK	70%	70%	Rp	139.906.800	72,50%	75.000.000	75%	30.000.000	77,50%	30.000.000	80%	30.000.000	80%	304.906.800	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program keluarga berencana	Cakupan peserta KB aktif	62,3	62,3	Rp	202.050.000	64,3	-	66,3	54.318.000	68,3	54.318.000	70,30	54.318.000	70,30	365.004.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program perencanaan pengendalian penduduk									49.994.000		49.994.000		49.994.000		149.982.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam pengelolaan program KKBPK	N/A	N/A	Rp	-	40%	-	50%	74.225.000	60%	74.225.000	70%	74.225.000	70%	222.675.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Bidang Pangan																
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Tingkat Pola Pangan Harapan	86,50%	69,70%		612.655.000	75,60%	649.641.800	81,80%	678.737.800	88,00%	678.737.800	94,20%	678.737.800	94,20%	3.298.510.200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari)		1.788			1.861		1.933		2.055		2.077		2.077		
	Bidang Pertanahan																
	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase pemanfaatan data nilai tanah untuk meningkatkan potensi PAD	n/a	20%		802.720.000	40%	834.828.800	40%	300.000.000	40%	300.000.000	40%	300.000.000	40%	2.537.548.800	Dinas Pertanahan
	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase Kebijakan daerah Bidang Pertanahan yg selaras dgn per UU	n/a	1 laporan		150.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	75.000.000	1 laporan	75.000.000	1 laporan	75.000.000	5 laporan	525.000.000	Dinas Pertanahan dan Sekretariat Daerah
	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Persentase Kecamatan yang memiliki sistem informasi pertanahan berbasis IT	5,26%	15,79%		205.600.000	21,05%	213.824.000	31,58%	46.500.000	36,84%	46.500.000	42,11%	46.500.000	42,11%	558.924.000	Dinas Pertanahan
	Bidang Lingkungan hidup																
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	67%	67%		7.467.202.050	69,0%	7.079.210.611	72%	7.079.030.600	74%	7.079.030.600	76%	7.079.030.600	76%	35.783.504.461	Dinas Lingkungan Hidup

	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Angka Indeks Kualitas Lingkungan	57,91% (cukup)	57,91% (cukup)	1.294.239.400	60% (cukup)	617.864.900	60,85% (cukup)	229.200.000	60,95% (cukup)	176.220.000,00	61% (cukup)	176.220.000	61% (cukup)	2.493.744.300	Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan Luasan Lahan yang di Pantau	47,37%	47,37%	162.398.300	52,63%	1.050.500.000	63,16%	2.100.000.000	70,84%	2.100.000.000	73,68%	2.100.000.000	73,68%	7.512.898.300	Dinas Lingkungan Hidup
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi awal RPJMD (2017)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Program penataan hukum lingkungan	Persentase Penanganan Jumlah pengaduan yg ditindaklanjuti	100%	100%	73.380.000	100%	28.110.000,00	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	161.490.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Bidang Administrasi Kependudukan dan CAPIL															
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan Kepemilikan Dokumen Adminduk dengan Database Kependudukan Kabupaten yang Akurat	80%	80%	Rp 980.424.000	85%	500.000.000	90%	356.013.600	95%	326.050.000	100%	326.050.000		2.488.537.600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat Daerah
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase Desa yang memiliki BUMDES	80%	80%	249.009.700	80%	50.000.000	80%	66.320.000		66.320.000		66.320.000		497.969.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, KECAMATAN SEBATIK BARAT
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase peningkatan status desa	80%	80%	166.178.200	80%	50.000.000	80%	109.784.000		109.784.000		109.784.000		545.530.200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, KECAMATAN SEBATIK BARAT
	Program penataan dan penguatan kelembagaan administrasi desa	Persentase pemilihan kepala desa dan penataan kelembagaan administrasi desa	80%	80%	855.855.600	80%	50.000.000	80%	46.580.000		46.580.000		46.580.000		1.045.595.600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase penyerapan keuangan desa berdasarkan APBDes	80%	80%	536.753.920	80%	185.000.000	80%	178.170.000		178.170.000		178.170.000		1.256.263.920	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program pendayagunaan SDA dan TTG	Persentase Posyantek aktif	80%	80%	147.840.000	80%	40.000.000	80%	40.000.000		40.000.000		40.000.000		307.840.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Persentase sarana dan prasarana desa yang terdata	0	0	0	80%	100.000.000	80%	66.430.000		66.430.000		66.430.000		299.290.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Bidang Perhubungan															
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase Pelabuhan Laut dan sungai /Terminal yang ditangani	80%	80%	450.000.000	80%	44.000.000	85%	25.000.000	90%	25.000.000	95%	25.000.000	100%	569.000.000	Dinas Perhubungan
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah uji kir angkutan umum	744	744	350.000.000	751	0	758	59.670.000	765	59.670.000	772	59.670.000	772	529.010.000	Dinas Perhubungan
		Prosentase kepemilikan KIR angkutan umum	80,65%	80,65%		81,85%		83,05%		84,25%		85,45%		85,45%	-	
		Prosentase Penerimaan Retribusi Uji KIR angkutan umum	91,54%	91,54%		92,47%		93,42%		94,37%		95,33%		95,33%	-	
		Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	55	55		50		45		45		40		40	-	
	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan	Persentase Angkutan darat yg ditangani	0,065%	0,065%	1.650.000.000	0,065%	52.520.000	0,066%	390.454.400	0,066%	390.454.400	0,066%	390.454.400	0,066%	2.873.883.200	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio ijin trayek	0,0054	0,0054	1.900.000.000	0,0054	10.000	0,0054	1.181.862.800	0,0054	1.181.862.800	0,0054	1.181.862.800	0,0054	5.445.598.400	Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi awal RPJMD (2017)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase kecamatan yang terkoneksi dgn internet	36%	36%	0	52%	-	68%	50.000.000	84%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Persentase implementasi tahapan dalam road map IT	0	0%	0	6%	-	10%	58.199.400	14%	58.199.400	20%	58.199.400	20%	174.598.200	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Program kerjasama informasi dan Media Massa	Prosentase Pembentukan / Penerapan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada SKPD	0	60%	0	70%	4.176.400,00	80%	1.499.820.000	90%	1.499.820.000	100%	1.499.820.000	100%	4.503.636.400	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			60%		70%	-	80%	154.775.000	90%	154.775.000	100%	154.775.000	100%	464.325.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Kecamatan Sebatik
Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah																
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pertumbuhan UKM	2505 UKM	1%	573.659.400	1%	214.654.000	1%	100.000.000	1%	100.000.000	1%	100.000.000	5%	1.088.313.400	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase Pertumbuhan Koperasi	268	11,00%	180.428.400		216.691.200	11,00%	267.697.800	11,00%	267.697.800	11,00%	267.697.800	55,00%	1.200.213.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Prosentase pelaku usaha IKM yang mendapat binaan	490 IKM	8,16%	1.288.790.000	6,12%	1.430.341.600	8,16%	738.119.900	7,14%	738.119.900	8,16%	738.119.900	37,74%	4.933.491.300	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Prosentase pertumbuhan industri	490 IKM	3,06%	370.130.400	3,67%	370.130.400	3,67%	253.766.299	3,67%	253.766.299	3,67%	253.766.299	17,74%	1.501.559.697	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
Bidang Penanaman Modal																
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase Jumlah Izin yang terbit	100%	16 Kec	Rp. 1.122.375.218	16 Kec	832.604.800	16 Kec	463.378.800	16 Kec	463.378.800	16 Kec	463.378.800	16 Kec	3.345.116.418	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu
Bidang Perpustakaan																
	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase Peningkatan Kunjungan ke Perpustakaan	6%	6%	278.370.000	8%	190.000.000	9%	247.420.200	9%	212.420.200,00	10%	212.420.200,00	10%	1.140.630.600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Daerah
	program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase OPD yang dibina dalam rangka penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah		21,57	160.842.000	41,17647	150.000.000	60,78	117.691.000	80,39	117.691.000,00	100	117.691.000,00	100	663.915.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	2	118.087.000	2	60.000.000	2	54.708.800	2		2		2	232.795.800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III. Urusan Pilihan																
Bidang Kelautan dan Perikanan																

		Program pengembangan budidaya perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	272,828.55 Ton	8%	6.259.038.000	16%	1.467.357.450	24%	2.778.012.556	32%	2.778.012.556	40%	2.778.012.556	40%	16.060.433.118	Dinas Perikanan
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi awal RPJMD (2017)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		Program pengembangan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	3,933.89 Ton	2%	3.000.000.000	4%	3.662.567.204,20	6%	494.000.000	8%	494.000.000	10%	494.000.000	10%	8.144.567.204	Dinas Perikanan
		Program pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	272,828.55 Ton	8%	486.272.800	16%	28.529.000	24%	221.010.640	32%	221.010.640	40%	221.010.640	40%	1.177.833.720	Dinas Perikanan
		Program pemberdayaan nelayan kecil	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	3,933.89 Ton	2%	550.000.000	4%	546.354.400	6%	338.252.120	8%	338.252.120	10%	338.252.120	10%	2.111.110.760	Dinas Perikanan
		Program perizinan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Jumlah TPI yang di kelola	N/A	0	450.000.000	1	297.500.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	2	1.287.500.000	Dinas Perikanan
		Bidang Pariwisata															
		Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah pengembangan pemasaran pariwisata	0	2	600.000.000	2	214.890.000	2	99.385.000	2	99.385.000	2	99.385.000		1.113.045.000	Dinas Pariwisata , Kepemudaan dan Olahraga
		Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah obyek wisata yang di bina	0	1	2.825.000.000	1	3.957.877.320	1	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		6.932.877.320	Dinas Pariwisata , Kepemudaan dan Olahraga
		Program pengembangan Kemitraan	Jumlah kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat	0	1	150.000.000	1	10.565.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		220.565.000	Dinas Pariwisata , Kepemudaan dan Olahraga
		Program pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah sarana prasarana ruang kreatif	0	1	125.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		375.000.000	Dinas Pariwisata , Kepemudaan dan Olahraga
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan /generasi muda yang berperan serta dalam kegiatan kepemudaan	0	15	375.000.000	15	261.442.000	20	399.988.000	20	399.988.000	25	399.988.000		1.836.406.000	Dinas Pariwisata , Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Presentase kegiatan olahraga yang difasilitasi	33,33	33,33	656.000.000	33,33	183.568.000	66,67	259.840.000	66,67	259.840,00	100,00	259.840,00			Dinas Pariwisata , Kepemudaan dan Olahraga
		Bidang Pertanian															
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Keikutsertaan petani/Gapoktan dalam PEDANA dan PENAS		30	650.768.600	-	61.195.000	-	643.083.000	-	638.583.000	80	638.583.000	110	2.632.212.600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Pemberdayaan Gapoktan penerima dana PUAP (Gapoktan)	9	9		9		9		9		9		9		
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Prod. Tan. Pangan			1.600.127.000,00		2.369.934.600		3.230.005.800		3.230.005.800		3.230.005.800		13.660.079.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			1. Padi	26.658	26.925		27.328		27.875		28.433		29.001		30		
			2. Ubi Kayu	23.922	23.922		23.922		23.922		23.922		23.922		1.200		
			Prod. Hortikultura :											20			
			1. Pisang	8.806	9.070		9.342		9.623		9.911		10.209				
			2. Durian	1.452	1.481		1.511		1.541		1.572		1.603		45		
			3. Jeruk	1.011	1.062		1.115		1.170		1.229		1.290				
			Produktivitas Tan												50		
			Pangan :														
			1. Padi (kw/ha)	48,5	49,00		49,50		49,90		50,40		50,90		40		
			2. Ubi Kayu(kw/ha)	217,28	217,28		217,28		217,28		217,28		217,28				
			Produktivitas												20		
			Hortikultura :														
			1. Pisang(Kg/rump)	58,89	60,66		62,48		64,35		66,28		68,27		20		
			2. Durian(Kg/Phn)	125,83	128,35		130,91		133,53		136,20		138,93				
			3. Jeruk(Kg/Phn)	84,99	89,24		91,92		96,51		101,34		106,41		200		

		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1.	Tersedianya sarana dan alat mesin pertanian dan mekanisasi pertanian (%)	27	28,5	625.210.000	29,5	341.470.000	31,3	390.800.000	32,7	390.800.000	34,1	390.800.000	34	2.139.080.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			2.	Menumbuhkan hom	-	1		2		2		2		2		9		
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi awal RPJMD (2017)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		Produktivitas Tanaman Perkebunan		1.092.180.000		1.429.146.400		1.190.755.000		1.190.755.000		1.190.755.000		6.093.591.400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			1.	Sawit (Ton/Ha)	28	28		29		29		30		30		30		
			2.	Kakao (Kg/Ha)	1.000	1.000		1.050		1.100		1.150		1.200		1.200		
			3.	Pengembangan tanaman kopi (Ha)	0	0		5		5		5		5		5		
			4.	Pengembangan tanaman cengkeh (Ha)	0	5		10		10		10		10		10		
			5.	Pengembangan tanaman lada (Ha)	0	10		10		10		10		10		10		
			6.	Pengembangan tanaman karet (Ha)	0	0		10		10		10		10		10		
			7.	Pengembangan tanaman aren (Ha)	5	0		5		5		5		5		5		
			8.	Pengembangan kelapa (Ha)				5		5		5		5		5		
			9.	Pengembangan kakao (ha)	0	0		50		50		50		50		50		
		Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian				2.340.056.400		2.342.413.200		990.050.000								Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	1.	Jumlah Kelahiran dengan Iseminasi Buatan (ekor)	100	150	287.910.000	150	371.629.000	150	366.988.000	150	364.478.000	150	364.478.000	750	1.755.483.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			2.	Terpeliharanya demplot peternakan (unit)	3	3		3		3		3		3		3		
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		Persentase peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian	50%	60%	239.949.000	70%	193.250.000	75%	114.945.000	80%	114.945.000	85%	114.945.000	85%	1.653.139.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1.	Menurunnya tingkat kematian ternak	3,3%	3,3%	306.595.000	3,1%	456.875.800	2,9%	352.775.000	2,7%	352.775.000	2,5%	352.775.000	2,5%	1.821.795.800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			2.	Jumlah pelaku usaha peternakan yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	0	0		0		0		1		1				
		Bidang Perdagangan																
		Program peningkatan dan pengembangan ekspor		Pesentase komoditi unggulan yang diserap pasar				402.088.200		298.294.000		298.294.000		298.294.000		596.588.000		Dinas Perdagangan
				* Padi (ton)	60%	60%	835.421.600	60%		60%		60%		60%		60%		
				* Pisang	30%	30%		30%		30%		30%		30%		30%		
				* Sawit (ton)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				* Kakao (kg/ha)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				* Ikan (ton)	3.933,89	4.012,57		4.091,25		4.169,92		4.248,60		4.327,28		4.327,28		
				* Rumpun Laut	272.828	294.654		316.481		338.307		360.133		381.959		381.959		
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		Persentase efisiensi jumlah usaha dan perdagangan	1,03%	1,06%	992.154.400	1,16%	295.565.800	1,18%	269.922.200,00	1,23%	240.522.200	1,29%	240.522.200	1,29%	2.038.686.800	Dinas Perdagangan, Sekretariat Daerah
		Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan		Cakupan Pasar Murah dan Pembinaan Pedagang Pasar (%)	36,84%	36,84%	488.150.000	42,11%	368.000.000	42,11%	375.000.000,00							Dinas Perdagangan / Dinas Kop UKM
		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		Persentase peredaran komoditas perdagangan yang diawasi	75%	100%	433.531.400	100%	450.872.656		193.450.600,00							Dinas Perdagangan
IV.	Urusan Pemerintahan fungsi penunjang																	
	Bidang Administrasi Pemerintahan																	
	Sub Bidang Sekretariat Daerah																	

	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD dlm pelaksanaan Tusi	90,90%	100%	8.169.825.000	100%	7.467.134.814		4.868.080.288	100%		100%					Sekretariat DPRD
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi awal RPJMD (2017)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
	Sub Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah								104.005.000								
	Program mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat								18.320.000							Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase pemanfaatan data nilai tanah untuk meningkatkan potensi PAD	n/a	20%	432.910.000,00	40%	450.226.400,00		85.685.000							Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	Sub Bidang Pengelolaan Perbatasan daerah								101.560.000								
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan								101.560.000							Sekretariat Daerah	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana								451.492.500								
	Program Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase penurunan tingkat kerentanan bencana	7.5%	7.12%	1.838.164.250	6.57%	1.836.090.820		451.492.500		1.716.956.381		1.888.652.019		7.731.355.971	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Kecamatan								209.919.600								
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga								34.100.000		34.100.000,00		34.100.000,00		102.300.000	KECAMATAN SEBATIK BARAT, KECAMATAN SEBATIK UTARA	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemberdayaan Perdesaan								15.000.000		15.000.000,00		15.000.000,00		45.000.000	Kecamatan	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	rata -rata jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	N/A	80%	1.197.764.780	80%	907.252.506		160.819.600							8 Kecamatan	
	Bidang Pengawasan																
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	86%	87%	2.663.195.800	88%	2.718.548.049		1.589.050.900							Inspektorat	
	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP	1	2 DC	200.000.000	2	208.000.000		154.000.000							Inspektorat	
	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tingkat maturitas	NA	Level 2	66.900.000	Level 2	69.576.000	Level 3	30.000.000	Level 3			Level 3			Inspektorat	
	Program Penganggaran, pengawasan/ monev dan kode etik	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan sesuai program kerja pemerintah daerah	98,29%	100%	208.750.000	100%	165.924.417		181.250.000							Sekretariat DPRD	
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Adanya Peraturan Daerah Kab. Nunukan sebagai acuan kegiatan sosial kemasarakatan	96,74%	100%	423.875.000	100%	452.080.218		1.011.893.200							Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, DINAS PERHUBUNGAN	
	Bidang Perencanaan																
	Program perencanaan pembangunan daerah				555.000.000		627.200.000		1.137.440.220							Bappeda Litbang dan 48 OPD	
	Program Perencanaan Pembangunan perekonomian	Prosentase perencanaan bidang ekonomi	2 dokumen	20%	197.300.400	40%	405.192.416		449.979.700		449.979.700		449.979.700		1.952.431.916	Bappeda Litbang	

	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Prosentase perencanaan bidang sosial budaya	2 dokumen	20%	780.000.000	40%	961.200.000		313.691.000		313.691.000		313.691.000		2.682.273.000	Bappeda Litbang
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana								399.699.900		399.699.900		399.699.900		1.199.099.700	Bappeda Litbang
	Program Peningkatan Kemampuan IPTEK dan Inovasi	Prosentase perencanaan IPTEK dan Inovasi	0%	40%	750.000.000	20%	780.000.000		149.999.900		149.999.900		149.999.900		1.979.999.700	Bappeda Litbang
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi awal RPJMD (2017)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		2	0	186.000.000	2	193.440.000		457.789.800		457.789.800		457.789.800		1.752.809.400	Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan..
	Program Pengembangan Data / Informasi	Optimalisasi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Data	100%	1 Thn	78.420.000,00	1 Thn	81.556.800,00		179.388.000		179.388.000		179.388.000		698.140.800	Bappeda Litbang, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kesehatan, Kec. Nunukan Selatan dan Sekretaris Daerah
	Bidang Keuangan															
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				27.695.069.700		29.904.653.721		13.410.741.300							BPKAD dan 48 OPD
	Bidang Kepegawaian															
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				5.974.419.090		6.199.794.045		1.574.295.000							Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Sekretariat Daerah
V.	Program Penunjang Pemerintahan															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran			107.226.891.640		112.593.594.808		90.079.977.825							Seluruh OPD
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan			971.071.478		1.053.425.267		938.104.250		2.963.757.948		3.260.133.743		9.186.492.685	Seluruh OPD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			8.007.569.730		10.159.038.577		11.546.143.437							Seluruh OPD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			1.639.661.150		2.813.976.576		410.304.000							Seluruh OPD
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Penurunan jumlah ASN yang terkena hukuman disiplin			1.058.250.000		2.740.479.708		932.550.000							Seluruh OPD

352.268.680.827

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 pada sisa periode 5 (lima) tahun.

Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nunukan disajikan pada tabel 8.1, sedangkan tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan disajikan pada tabel 8.2.

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah
Pemerintahan Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target					
		2016 (realisasi)	2017 (realisasi)	2018 (proyeksi)	2019 (proyeksi)	2020 (proyeksi)	2021 (proyeksi)
I TUJUAN							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,24	6,78	6,8	6,85	6,9	6,95
2	Indeks Pembangunan Manusia	64,35	65,1	65,5	65,9	66,3	66,7
3	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-
4	Indeks Rasa Aman	n/a	0,65	0,681	0,711	0,742	0,772
5	Angka Kemiskinan	5,25	6,22	6	5,8	5,5	5
II SASARAN							
1	PDRB Sektor Pertanian (%)	23,81	21,59	22,36	22,50	22,65	22,76
2	PDRB Perdagangan (%)	5,58	5,71	6,00	6,30	6,58	6,70
3	Persentase peningkatan kualitas jalan yang terbangun antar kecamatan	78,95%		84,21%	89,47%	94,74%	100%
4	Persentase peningkatan areal lahan yang dialiri jaringan irigasi						
5	Persentase desa yang terhubung dengan jaringan komunikasi/ persentase desa yang blankspot	36%			68%	84%	100%
6	persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi darat dan air	17,14%			20%	22,86%	25,71%
7	Nilai realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	649			720	740	760
8	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Pariwisata (%)	1,01	0,96	1,01	1,06	1,11	1,17
9	Indeks kualitas lingkungan hidup	57,51% (kurang)			60,85% (cukup)	60,95% (cukup)	61% (cukup)
10	Rata-rata Lama Sekolah	7,57	7,65	7,91	8,13	8,34	8,56
11	Harapan Lama Sekolah	12,58	12,61	12,64	13,35	13,65	14,15
12	Angka Harapan Hidup	71,23	71,25	71,27	72	72,5	73
13	Persentase atlet berprestasi	33%		40%	45%	49%	53%
14	Nilai Capaian SAKIP	C		CC	B	B	B
15	Nilai LPPD			ST	ST	ST	ST
16	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			75%	90%	95%	100%
18	Indeks rasa aman						
19	cakupan kasus K3 yang diselesaikan	87%	90%	100%	100%	100%	100%
20	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	94%	95%	96%	97%	98%	99%
21	Indeks gini	0,280	0,284	0,280	0,276	0,272	0,268
22	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	7,24	7,24	6,74	6,24	5,74	5,24

Tabel 9.1
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Nunukan

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi awal RPJMD Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung Jawab
			2017 (realisasi)	2018 (proyeksi)	2019 (proyeksi)	2020 (proyeksi)	2021 (proyeksi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Pengawasan, Kepegawaian dan Persandian									
1	Pertumbuhan PDRB	0,54%	1,63%	2,72%	3,82%	4,91%	6%	6%	Bappeda dan Litbang
2	Laju Inflasi Kabupaten (%)	11,91 (2014)	14,46	11,68	8,6	6,33	4,66	3,43	Bappeda dan Litbang
3	PDRB Perkapita Kab. Nunukan (Juta)	15.099.195	16.000.000	16.300.000	16.500.000	16.800.000	17.000.000	17.200.000	Bappeda dan Litbang
Fokus Kesejahteraan Masyarakat									
Pendidikan									
1	Rata-rata Lama Sekolah	7,21	7,5	7,6	7,8	7,9	8	8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Harapan Lama Sekolah	12,41	12,5	13,15	13,35	13,65	14,15	14,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Angka Melek Huruf	91,32	91,45	91,58	91,80	92,12	92,65	92,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Angka Partisipasi Murni (APM)								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	a. SD/MI	81,29	83	85	87	89	92	92	
	b. SMP/MTs	58,8	59	60	63	65	67	67	
5	Angka Partisipasi Kasar (APK)								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	a. PAUD	72,26%	73,25%	74,25%	75,25%	76,25%	77,25%	77,25%	
	b. SD/MI	96,54%	97,54%	98,54%	99,54%	100,54%	101,54%	101,54%	
	c. SMP/MTs	61,65%	62,80%	63,65%	64,65%	65,65%	66,65%	66,65%	
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS)								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	a. SD/MI	90,22	92	94	96	98	100	100	
	b. SMP/MTs	63,59	65	67	68	71	74	74	
7	Rasio guru sekolah								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	a. SD/MI	12,02	12,1	12,15	12,2	12,25	12,3	12,3	
	b. SMP/MTs	13,29	13,35	13,4	13,45	13,5	13,55	13,55	

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi awal RPJMD Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung Jawab
			2017 (realisasi)	2018 (proyeksi)	2019 (proyeksi)	2020 (proyeksi)	2021 (proyeksi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Rasio Ketersediaan sekolah/ Penduduk Usia Sekolah	0,39%	0,40%	0,41%	0,42%	0,43%	0,44%	0,44%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kesehatan								
1	Angka kematian ibu melahirkan/100.000 kelahiran hidup	160	123	119	91	88	84	84	Dinas Kesehatan
2	Angka kematian bayi/1000 kelahiran hidup	17,6	13,8	12,1	10,5	9	7,6	7,6	Dinas Kesehatan
3	Angka balita gizi kurang	4,6	4	3,2	2,9	2,6	1,7	1,7	Dinas Kesehatan
4	Meningkatkan angka harapan hidup	70,8	71	71,5	72	72,5	73	73	Dinas Kesehatan
5	Cakupan rumah sehat	63%	65%	66%	67%	68%	70%	70%	Dinas Kesehatan
6	Jumlah peserta JKN	64,80%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
7	Cakupan pertolongan persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan	80%	82%	83%	84%	85%	86%	86%	Dinas Kesehatan
8	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	74%	76%	78%	80%	82%	82%	82%	Dinas Kesehatan
9	Persentase penemuan penderita HIV pada daerah resti	20%	30%	35%	40%	45%	50%	50%	Dinas Kesehatan
10	Persentase penemuan pasien TB baru BTA positif pada keluarga penderita TB	45,2%	47,0%	49%	50%	53%	55%	55%	Dinas Kesehatan
	Pertanahan								
1	Persentase tanah Pemda yang bersertifikat	14,14%	15,16%	17,21%	19,26%	21,31%	23,36%	23,36%	Dinas Pertanahan
2	Prosentase tanah Pemda yang di fasilitasi patok dan plang	N/A	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	Dinas Pertanahan
3	Prosentase penetapan alas hak tanah Pemda	N/A	2,19%	4,39%	6,58%	8,77%	10,96%	10,96%	Dinas Pertanahan
4	Prosentase fasilitasi penyelesaian konflik tanah Pemerintah dengan masyarakat	N/A	20%	34,29%	48,57%	62,86%	77,14%	77,14%	Dinas Pertanahan
	Ketenagakerjaan								
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,78	3,5	3,2	3	2,8	2,5	2,5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Prosentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan dan perjanjian kerja	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Prosentase perusahaan yang membentuk Lembaga kerja sama (LKS) Bipartit	N/A	3	3	3	3	3	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi awal RPJMD Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung Jawab
			2017 (realisasi)	2018 (proyeksi)	2019 (proyeksi)	2020 (proyeksi)	2021 (proyeksi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Prosentase perusahaan dalam pembentukan struktur skala upah	N/A	3	3	3	3	3	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Presentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama (PB)	7	3	3	3	3	3	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Presentase perusahaan yang mengikuti program pelayanan jaminan sosial tenaga kerja	56	30	30	30	30	30	30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	Tingkat pengangguran terbuka	3.78	3.72	3.70	3.65	3.60	3.50	3.50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Prosentase Regulasi yang mendukung penciptaan lapangan kerja	N/A	3	5	7	9	10	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Prosentase tenaga kerja yang membuka usaha mandiri	N/A	5	7	9	10	12	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	Prosentase tenaga kerja yang memperoleh Pelatihan Berbasis Kompetensi	N/A	90	90	90	90	90	90	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
Pendidikan									
1	Proporsi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	73,50%	75,15%	76,00%	78,00%	80,00%	81,25%	81,25%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Persentase Sekolah Ruang Kelas Kondisi Baik								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	a. SD/MI	25%	27%	28%	29%	30%	31%	31%	
	b. SMP/MTs	34%	35%	36%	37%	38%	39%	39%	
3	Persentase Sekolah Memiliki Perpustakaan								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	a. SD/MI	67%	68%	69%	70%	71%	72%	72%	
	b. SMP/MTs	73%	74%	75%	76%	77%	78%	78%	
4	Angka Putus Sekolah								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	a. SD/MI	0,31%	0,29%	0,27%	0,25%	0,21%	0,15%	0,15%	
5	b. SMP/MTs	0,36%	0,29%	0,27%	0,25%	0,21%	0,15%	0,15%	
6	Angka Kelulusan								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	a. SD/MI	99,58	99,6	99,65	99,7	99,75	99,8	99,8	

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi awal RPJMD Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung Jawab
			2017 (realisasi)	2018 (proyeksi)	2019 (proyeksi)	2020 (proyeksi)	2021 (proyeksi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b. SMP/MTs	99,71	99,8	99,8	99,9	99,95	99,95	100	
6	Angka Melanjutkan								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	a. SD/MI Ke SMP/ Mts	93,07%	93,11%	93,15%	93,25%	93,35%	93,50%	93,50%	
	b. SMP/MTs ke SMA / SMK	87,67%	87,75%	87,81%	87,85%	87,91%	88,12%		
	Kesehatan								
1	Angka kematian ibu melahirkan Per 100.000 KH	160	123	119	91	88	84	84	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	17,6	13,8	12,1	10,5	9	7,6	7,6	Dinas Kesehatan
3	Presentase kepesertaan JKN	64,8	80	90	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
4	GDR (Gross Death Rate)	23	23	21	20	19	18	18	Dinas Kesehatan
5	BOR (Bed Occupancy Ratio)	34	37	45	50	60	65	65	Dinas Kesehatan
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	Rasio Jaringan Irigasi	41.00%	45.00%	50.00%	55.00%	57.00%	61.36%	61.36%	DPUPRPKP
	Persentase penyediaan air baku	27%	30%	33%	50%	55%	60%	60%	DPUPRPKP
	Persentase normalisasi sungai	30%	35%	40%	45%	55%	60%	60%	DPUPRPKP
	Panjang Jalan Kabupaten yang terbangun	817.08 KM	38 KM	8 KM	24 KM	147 KM	1.3 KM	1,017.38 KM	DPUPRPKP
	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dipelihara	31.23 KM	2 KM	2 KM	2 KM	2 KM	2 KM	41.23 KM	DPUPRPKP
	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Nunukan Dalam Kondisi Mantap	41.37%	43.21%	46.66%	49.25%	52.51%	57.35%	57.35%	DPUPRPKP
	Persentase jumlah bangunan gedung pemerintahan yang dibangun / dipelihara	63.27%	65.31%	74.49%	82.65%	91.84%	100%	100%	DPUPRPKP
	Rumah tangga pengguna air bersih (KK)	7,966	8,205	9,025	9,928	10,424	10,946	10,946	DPUPRPKP
	Jumlah Produk Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah yang tersedia	4 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	14 Dok	DPUPRPKP
	Kesesuaian pemanfaatan pola ruang sesuai peruntukannya	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPUPRPKP
	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	21.58%	22.96%	22.95%	22.93%	22.92%	22.90%	22.90%	DPUPRPKP
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	19%	25%	30%	35%	40%	45%	45%	DPUPRPKP
	Persentase rumah layak huni	63%	65%	70%	75%	80%	85%	85%	DPUPRPKP

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi awal RPJMD Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung Jawab
			2017 (realisasi)	2018 (proyeksi)	2019 (proyeksi)	2020 (proyeksi)	2021 (proyeksi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang dikelola	50%	51%	52%	53%	45%	55%	55%	DPUPRPKP
	Luas Areal Pemakaman	26.0 Ha	26.10 Ha	26.10 Ha	29.10 Ha	31.10 Ha	31.10 Ha	31.10 Ha	DPUPRPKP
	Persentase jumlah pekerja pertamanan yang memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPUPRPKP
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
1	Tingkat ketaatan masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah.	73	80	83	85	89	90	90	Satpol. PP
2	Penyelesaian Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Keindahan.	100	100	100	100	100	100	100	Satpol. PP
3	Rasio Personil PPNS pada SATPOL PP.	20	30	40	50	60	80	80	Satpol. PP
4	Rasio Personil SATPOL PP yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Dasar.	64.60	64.60	82.30	82.30	100	100	100	Satpol. PP
5	Tingkat Konflik Sosial Berbau SARA	0 Konflik	0 Konflik	0 Konflik	0 Konflik	0 Konflik	0 Konflik	0 Konflik	Bakesbangpol
6	Jumlah LSM Aktif	109	15	15	15	15	15	75	Bakesbangpol
7	Tingkat waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	55,55%	59,00%	63,00%	67,00%	71,00%	75,00%	75,00%	Dinas Pemdam Kebakaran
8	Rasio satuan pengamanan perjumlah desa atau kelurahan	0,26%	0,26%	0,52%	0,78%	1%	1%	1%	Dinas Pemdam Kebakaran
	Sosial								
1	Persentase penduduk miskin	8%	7,50%	7,00%	6,50%	6,00%	5,50%	5,50%	Dinas Sosial
2	Presentase penanganan masalah kesejahteraan sosial	9,45%	11%	13%	15%	17%	20%	20%	Dinas Sosial
	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak								
1	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	94%	95%	96%	97%	98%	99%	99%	DP3AP2KB
2	Persentase perempuan yang diberdayakan	41,79%	47,05%	50,40%	53,30%	56,10%	59,00%	59,00%	DP3AP2KB

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi awal RPJMD Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung Jawab
			2017 (realisasi)	2018 (proyeksi)	2019 (proyeksi)	2020 (proyeksi)	2021 (proyeksi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
1	Cakupan peserta KB aktif	0,00%	62,3	64,3	66,3	68,3	70,30	70,30	DP3AP2KB
	Pangan								
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	45,47%	51,15%	57,53%	65,68%	72,83%	79,35%	79,35%	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
	Lingkungan Hidup								
1	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,51	57,91	60	60,85	60,95	61,00	61,01	Dinas Lingkungan Hidup
2	Indeks Kualitas Air	0	50,00	50,32	50,50	50,55	50,70	50,71	Dinas Lingkungan Hidup
3	Indeks Kualitas Udara	93,81	93,82	93,83	93,84	93,85	93,86	93,87	Dinas Lingkungan Hidup
4	Indeks Kualitas Tutupan Hutan	0	60	65	67,5	70	72,5	72,5	Dinas Lingkungan Hidup
5	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati hukum lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
6	Persentase penanganan pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti	NA	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
7	Persentase usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan	50	53	55	57	60	65	70	Dinas Lingkungan Hidup
8	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	7 Sekolah 2 Kecamatan	7 Sekolah 2 Kecamatan	7 Sekolah 2 Kecamatan	7 Sekolah 2 Kecamatan	7 Sekolah 2 Kecamatan	9 Sekolah 2 Kecamatan	9 Sekolah 2 Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
9	Capaian Adipura	65	70	73	75	75	75	75	Dinas Lingkungan Hidup
10	Jumlah Sekolah Adiwiyata	2	2	2	2	2	2	5	Dinas Lingkungan Hidup
11	Persentase penanganan sampah	65,92%	67,00%	69,00%	72,00%	74,00%	76,00%	76,00%	Dinas Lingkungan Hidup
	Penanggulangan Bencana								
1	Indeks risiko bencana daerah	N/A	167	161	155	149	143	143	BPBD
2	Prosentase penurunan tingkat kerentanan bencana	7,50%	7,12%	6,57%	5,48%	4,49%	3,72%	3,72%	BPBD
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Prosentase Akurasi data Kependudukan Kabupaten Nunukan	67,72%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	Disdukcapil
2	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP el)	69,54%	85%	86%	88%	90%	100%	100%	Disdukcapil

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi awal RPJMD Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung Jawab
			2017 (realisasi)	2018 (proyeksi)	2019 (proyeksi)	2020 (proyeksi)	2021 (proyeksi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	66,56%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Disdukcapil
4	Cakupan Penerbitan KK	82,55%	70%	75%	80%	85%	100%	100%	Disdukcapil
5	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdukcapil
6	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	59,62%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdukcapil
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Presentase Peningkatan status desa	N/A	19 desa	39 desa	58 desa	78 desa	97 desa	97 desa	DPMD
			8,60%	17,24%	25,85%	34,48%	43,10%	43,10%	DPMD
2	Persentase daya serap keuangan Desa	92%	92%	94%	96%	98%	99%	100%	DPMD
3	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	8,20%	18%	19%	19%	19%	18%	100%	DPMD
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,62%	2,6%	2,58%	2,56%	2,54%	2,52%	2,52%	DP3AP2KB
	Perhubungan								
1	Prosentase Pelabuhan Laut dan sungai /Terminal yang ditangani	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	Dinas Perhubungan
2	Prosentase Angkutan darat	0,065%	0,065%	0,065%	0,066%	0,066%	0,066%	0,066%	Dinas Perhubungan
3	Jumlah arus penumpang angkutan umum	598.429	600.000	605.000	605.000	610.000	610.000	610.000	Dinas Perhubungan
4	Jumlah uji kir angkutan umum	744	744	751	758	765	772	840	Dinas Perhubungan
5	Prosentase kepemilikan KIR angkutan umum	80,65%	80,65%	81,85%	83,05%	84,25%	85,45%	85,45%	Dinas Perhubungan
6	Prosentase penerimaan retribusi Uji KIR angkutan umum	91,54%	91,54%	92,47%	93,42%	94,37%	95,33%	95,33%	Dinas Perhubungan
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	55	55	50	45	45	40	40	Dinas Perhubungan
8	Rasio ijin trayek	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	Dinas Perhubungan
9	Prosentase pemasangan rambu-rambu	65%	65%	65%	70%	70%	75%	75%	Dinas Perhubungan
	Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase SKPD yang menerapkan pelayanan secara elektronik	25% (8 SKPD)	32%	41.90%	58.06%	77.42%	100%	100%	Diskominfo
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1	Prosentase Pertumbuhan Koperasi	268	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	55,00%	DKUKMP
2	Prosentase Pertumbuhan UKM(%)	2505 UKM	1%	1%	1%	1%	1%	5%	DKUKMP

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi awal RPJMD Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung Jawab
			2017 (realisasi)	2018 (proyeksi)	2019 (proyeksi)	2020 (proyeksi)	2021 (proyeksi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan formal	N/A	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	25,00%	DKUKMP
	Penanaman Modal								
1	Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	23	3	3	4	5	4	42	DPMPTSP
2	Kenaikan / penurunan Nilai realisasi PMDN (Milyar / Rupiah)	649	680	700	720	740	760	4.249	DPMPTSP
3	Kenaikan / penurunan Nilai realisasi PMDN/PMA (%)	15,27%	16,00%	16,47%	16,95%	17,42%	17,89%	100%	DPMPTSP
4	Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA)	9.936	90	125	200	250	300	10.901	DPMPTSP
5	Rasio daya serap tenaga kerja	65	70	90	100	110	105	540	DPMPTSP
	BIDANG PERIZINAN USAHA DAN TERTENTU								DPMPTSP
6	Prosentase ketepatan waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan (SOP)	914	500 (55%)	450 (60%)	460 (65%)	400 (70%)	500 (75%)	2300 (100%)	DPMPTSP
7	Prosentase ketepatan waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan (SOP)	100%	55%	60%	65%	70%	75%	100%	DPMPTSP
	Kepemudaan dan Olah Raga								
1	Cakupan pemuda pelopor	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	Persentase atlet yang berprestasi	33%	37%	41%	45%	49%	53%	53%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Statistik								
1	Buku Nunukan Dalam Angka	1	1	1	1	1	1	5	Diskominfo
	Kebudayaan								
1	Persentase pelestarian budaya lokal	70,00%	75,00%	80,00%	83,00%	85,00%	85,00%	85,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi awal RPJMD Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung Jawab
			2017 (realisasi)	2018 (proyeksi)	2019 (proyeksi)	2020 (proyeksi)	2021 (proyeksi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Prosentase cagar budaya yang dilestarikan	N/A	12,5	25	25	25	12,5	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Perpustakaan								
1	Jumlah Perpustakaan(IKK)	4 Perpustakaa	46	48	50	52	54	54 Perpustakaan	Dinas Perustakaan dan Kearsipan
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun (IKK)	23.869 Orang	25.301	27.325	29.785	32.465	35.712	53.382	Dinas Perustakaan dan Kearsipan
3	Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah (IKK)	8.382 Buku	49.382	50.382	51.382	52.382	53.382	53. 382 Buku	Dinas Perustakaan dan Kearsipan
	Kearsipan								
1	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan yang diimplementasikan	0 Aplikasi	0	1	1	2	2	2 Aplikasi	Dinas Perustakaan dan Kearsipan
2	Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku (IKK)	1 OPD	3	8	13	18	23	23 OPD	Dinas Perustakaan dan Kearsipan
	Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan dan Perikanan								
1	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	276.762,44	298.667,40	320.572,37	342.477,32	364.382,29	386.287,25	386.287,25	Dinas Perikanan
			7,91%	15,83%	23,74%	31,66%	39,57%	39,57%	
	a. Presentase Produksi Perikanan Tangkap (ton)	3.933,89	4.012,57	4.091,25	4.169,92	4.248,60	4.327,28	4.327,28	
		0	2%	4%	6%	8%	10%	10%	
	b. Presentase Produksi Perikanan Budidaya (ton)	272.828,55	294.654,83	316.481,12	338.307,40	360.133,69	381.959,97	381.959,97	
		0	8%	16%	24%	32%	40%	40%	
2	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan	N/A	101	101,1	101,2	101,3	101,4	101,4	Dinas Perikanan
	a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	N/A	101	101,1	101,2	101,3	101,4	101,4	
	b. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	N/A	101	101,1	101,2	101,3	101,4	101,4	
3	Presentase Penurunan Rumah Tangga Nelayan dan Pembudidaya Miskin (%)	6,12%	10,50%	14,87%	19,25%	23,62%	27,99%	27,99%	Dinas Perikanan
	a. Presentase Penurunan Rumah Tangga Nelayan Miskin (%)	8,62%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	15,14%	
	b. Presentase Penurunan Rumah Tangga Pembudidaya Miskin (%)	3,47%	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	41,67%	

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi awal RPJMD Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung Jawab
			2017 (realisasi)	2018 (proyeksi)	2019 (proyeksi)	2020 (proyeksi)	2021 (proyeksi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Presentase Cakupan Binaan Kelompok/Koperasi Nelayan dan Pembudidaya Ikan (%)	61,57%	5,24%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	Dinas Perikanan
	a. Presentase Cakupan Binaan Kelompok/Koperasi Nelayan (%)	11,67%	8,33%	8,33%	10,00%	10,00%	10,00%	58,33%	
	b. Presentase Cakupan Binaan Kelompok/Koperasi Pembudidaya (%)	79,29%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	100%	
	Pariwisata								
1	Jumlah kunjungan wisatawan	14.515	15.000	17.000	19.000	21.000	23.000	23.000	Dinas Pariwisata, Kepemuda dan Olahraga
2	Presentase destinasi pariwisata yang dikembangkan	0%	33,3%	33,3%	33,3%	66,7%	66,7%	66,7%	Dinas Pariwisata, Kepemuda dan Olahraga
	Pertanian								
	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura								DPKP
1	Produksi								DPKP
	a. Padi (Ton)	26.658	26.925	27.328	27.875	28.433	29.001	29.001	
	b. Pisang (Ton)	8.806	9.070	9.342	9.623	9.911	10.209	10.209	
2	Produktivitas								DPKP
	a. Padi (Kg/Ha)	4,85	4,9	4,95	4,99	5,04	5,09	5,09	
	b. Pisang (Kg/Rpn)	58,89	60,66	62,48	64,35	66,28	68,27	68,27	
3	Produktivitas								DPKP
	a. Sawit(Ton/Ha)	28	28	29	29	30	30	30	
	b. Kakao (Kg/Ha)	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.200	
4	Peningkatan populasi ternak :								DPKP
	Sapi (Ekor)	8.500	8.850	9.200	9.550	9.900	9.900	9.900	
5	Ketersediaan pangan utama	45,47%	51,15%	57,53%	65,68%	72,83%	79,35%	79,35%	DPKP
6	Nilai Tukar Petani (NTP)	-	102,46	102,96	103,75	104,39	105	105	DPKP
	Perdagangan								
	Prosentasi komoditi unggulan yang diserap pasar								Dinas Perdagangan
	a.padi (Ton)	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	Dinas Perdagangan
	b.pisang (Kg/Rpmn)	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	Dinas Perdagangan

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi awal RPJMD Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021	SKPD Penanggung Jawab
			2017 (realisasi)	2018 (proyeksi)	2019 (proyeksi)	2020 (proyeksi)	2021 (proyeksi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c.sawit (Ton)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perdagangan
	e.kakao (Kg/Ha)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perdagangan
	f.ikan (Ton)	3.933,89	4.012,57	4.091,25	4.169,92	1200	1250	1250	Dinas Perdagangan
	g.rumput laut (Ton)	272.828,55	294.654,80	316481	338.307,40	360.133,68	381.959,97	381.959,97	Dinas Perdagangan
	Persentase Jumlah Pasar yang terbangun (%)	1,03%	1,06%	1,16%	1,18%	1,23%	1,29%	1,29%	Dinas Perdagangan
	Presentase Peredaran Komoditas Perdagangan yang diawasi	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perdagangan
	Cakupan Pasar Murah dan pembinaan perdagangan pasar	36,84%	36,84%	42,11%	42,11%	47,37%	47,37%	47,37%	Dinas Perdagangan
	Perindustrian;								
1	Prosentase Pertumbuhan Industri	490 IKM	3,06%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	17,74%	DKUKMP
2	Prosentase pelaku usaha IKM yang mendapat binaan	490 IKM	8,16%	6,12%	8,16%	7,14%	8,16%	37,74%	DKUKMP
	Transmigrasi								
1	Terbangunnya 1 wilayah pengembangan transmigrasi (WPT)	0	0	1	0	1	0	2	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
2	Presentase masyarakat transmigrasi yang mandiri	0	10	15	20	30	50	50%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Pengawasan, Kepegawaian dan Persandian								
1	Capaian SAKIP	C	CC	CC	B	B	B	B	Sekretariat Daerah
2	Status Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	Sekretariat Daerah
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n/a	70%	75%	80%	95%	100%	100%	Sekretariat Daerah
4	Prosentase usulan musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam dokumen perencanaan RKPD	35%	40%	45%	50%	55%	60%	60%	Bappeda dan Litbang
5	Prosentase kesesuaian antara program, kegiatan dan target dalam RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA DAN DPA	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bappeda dan Litbang
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	86%	87%	88%	89%	90%	90%	90%	Inspektorat
7	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
8	Persentase Pertumbuhan Pendapatan	4%	3,73%	3,27%	3,16%	3,07%	3,22%	3,29%	BP2RD
9	Jumlah Wajib Pajak	31.055 WP	33.000 WP	35.000 WP	36.500 WP	37.000 WP	38.000 WP	38.000 WP	BP2RD

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi awal RPJMD Tahun 20 16	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir RPJMD Tahun 2021	SKP D Pena nggu ng Jawa h
			2017 (realisasi)	2018 (proyeksi)	2019 (proyeksi)	2020 (proyeksi)	2021 (proyeksi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	Persentase penyelesaian Propem Perda Inisiatif DPRD	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
11	Persentase Penyelerasan kompetensi dengan jabatan	49,20%	5,06%	30,34%	60,25%	90,17%	100%	100%	BKPSDM
12	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Diklat Dalam Jabatan	72%	71,77%	77,39%	83,01%	88,62%	94,24%	100%	BKPSDM
13	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan PNS	82,22%	87,22%	89,22%	91,22%	93,22%	95,22%	100%	BKPSDM
14	Persentase Penyerahan SK Pegawai Tepat Waktu	73,09%	73,69%	84,48%	85,38%	86,15%	86,92%	100%	BKPSDM
15	Kapabilitas APIP	Skor 1	Skor 2 (DC)	Skor 2	Skor 3 (DC)	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Inspektora t
16	Tingkat maturitas SPIP	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektora t

BAB IX

PENUTUP

Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Nunukan untuk sisa periode lima tahun kepemimpinan kepala daerah periode 2016-2021. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025, serta memperhatikan perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021.

9.1. PEDOMAN TRANSISI

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan pada saat akhir tahun perencanaan RPJMD, penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Nunukan 2005-2025, dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

RKPD Tahun 2022 antara lain disusun dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tahun pertama masa kepemimpinannya. Selanjutnya, RKPD Tahun 2022 sebagai masa transisi akan menjadi tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

9.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan RPJMD, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pencapaian target kinerja pembangunan, pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Perangkat daerah dilingkungan Kabupaten Nunukan melaksanakan program-program dalam Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 ini dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsi.
2. Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai Tahun 2020 dan tahun 2021, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. Perangkat daerah dilingkungan Kabupaten Nunukan, berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021. Selanjutnya, Perubahan Renstra-PD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja-PD) selama kurun waktu sisa 5 (lima) tahun.
4. Setiap kepala perangkat daerah dilingkungan Kabupaten Nunukan berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra-PD dan melaporkannya ke Bappeda untuk diverifikasi.
6. Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD 2016-2021, baik tahunan maupun di akhir masa jabatan Kepala Daerah. Materi pengendalian dan evaluasi RPJMD berasal dari evaluasi hasil RKPD dan Renja-PD setiap tahun.
7. Laporan evaluasi hasil RKPD setiap tahun menjadi masukan bagi perencanaan tahun berikutnya dan dasar bila akan melakukan perubahan RKPD.
8. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021.

Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Kabupaten Nunukan
Periode Pelaksanaan: tahun 2016 s.d tahun 2021

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah:

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Penilaian Kinerja	
							2017		2017		(18)		(19)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
		Bid. Urusan Pendidikan												
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase efisiensi penyerapan anggaran	90%	96%	200.097.979.306	1	3.532.081.274	1	3.532.081.274	95%	2%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang layak pakai	90%	96%	1.279.236.915	1	33.598.000	1	33.598.000	0,66	3%	Sedang	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					-	60.780.800	-	60.780.800	0,66	#DIV/0!	Sedang	#DIV/0!
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	72,26%	72,52%	11.745.227.437	1	6.237.361.000	1	6.237.361.000	0,66	53%	Sedang	Rendah
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM)			138.015.655.963		37.527.506.257		37.527.506.257	0,66	27%	Sedang	Sangat Rendah
			a. SD/MI	81,29%	92%		1		1		0,66	#DIV/0!	Sedang	#DIV/0!
			b. SMP/MTS	58,80%	67%		1		1		0,66	#DIV/0!	Sedang	#DIV/0!
			Angka Partisipasi Sekolah (APS)								0,66	#DIV/0!	Sedang	#DIV/0!
			a. SD/MI	90,22%	100%		1		1		0,66	#DIV/0!	Sedang	#DIV/0!
			b. SMP/MTS	63,59%	74%		1		1		0,66	#DIV/0!	Sedang	#DIV/0!
		Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf	91,32%	92,12%	10.852.265.112	1	814.749.136	1	814.749.136	0,66	8%	Sedang	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proporsi guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	73,50%	81%	46.963.512.758	1	8.226.877.156	1	8.226.877.156	0,66	18%	Sedang	Sangat Rendah
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase lembaga pendidikan yang tertib administrasi	NA	100%	16.309.269.328	1	2.018.839.519	1	2.018.839.519	0,66	12%	Sedang	Sangat Rendah
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Kebijakan di bidang Pelayanan Pendidikan		12 peraturan	1.570.750.000	1	20.535.800	1	20.535.800	0,66	1%	Sedang	Sangat Rendah
		Program Akhir Sekolah dan Ujian Nasional	Angka kelulusan			4.391.269.681		450.524.700		450.524.700	0,66	10%	Sedang	Sangat Rendah
			a. SD/MI	99,58%	99,75%						#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			b. SMP/MTS	99,71%	99,95%						#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		Program DAK Bidang Pendidikan				13.668.809.558		2.291.526.000		2.291.526.000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		Program Pendidikan Menengah				53.339.016.540		331.934.900		331.934.900	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pelestarian budaya lokal	NA	85%	8.161.447.534					#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						153.990.000		153.990.000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terlaksananya Dokumen Perencanaan	100%	100%	269.177.030					#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
											#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		Bid. Urusan Kesehatan									#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase efisiensi penyerapan anggaran		98%	113.888.951.948,00	90/100	9.357.533.152	90/100	9.357.533.152	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						9.806.584.615		9.806.584.615	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					30				#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Penilaian Kinerja		
					(6)		(12)		(12)		(18)		(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	kinerja	anggaran	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang layak pakai	85%	98%	17998970465	90/100	286.045.000	90/100	286.045.000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program peningkatan disiplin aparatur	Penurunan jumlah ASN yang terkena Hukuman disiplin (%)	N/A									Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan Fungsinya.	100%	100%	100%	100	1.022.250.018	100	1.022.250.018	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan yang di susun	10	10	dok	680968160,6	10/100	58.224.172	10/100	58.224.172	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya Obat dan kesehatan di Fasilitas Kesehatan	90%	95%	1,559E+11	1	40.532.582.278	1	40.532.582.278	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan									#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100	100	36.112.336.586,56	100	302.950.756	100	302.950.756	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat						2.404.269.610		2.404.269.610	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat						743.511.271		743.511.271	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat						991.376.124		991.376.124	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat						863.935.800		863.935.800	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat						750.739.000		750.739.000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat						454.722.300		454.722.300	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat						238.546.789		238.546.789	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat						490.537.514		490.537.514	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat						762.683.596		762.683.596	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat						258.186.793		258.186.793	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat						361.597.347		361.597.347	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat						32.999.600		32.999.600	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat									#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat									#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pangan, obat dan bahan Berbahaya yang di awasi	50%	75%	1.136.137.216,00	1	48.559.412	1	48.559.412	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	0	60%	5.276.001.464,61	0	11.180.000	0	11.180.000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	3.985.138.654,11	1	184.148.025	1	184.148.025	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan rumah sehat	63%	70%	2.017.070.400,00	1	-	1	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penderita penyakit menular yang ditangani	0,00%	90%	4.646.606.139,19	1	61.769.000	1	61.769.000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang tersedia	108 unit	113	45.076.379.260,00	109 unit	116.814.450	109 unit	116.814.450	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah peserta JKN	64,80%	100%	27.187.774.400,00	1		1		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase sarana penyedia jasa boga yang di awasi	71%	76%	1.785.956.570,14	1	32.699.000	1	32.699.000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	80%	86%	5.475.575.751,27	1	-	1	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program DAK Bidang Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang menggunakan DAK Reguler	6 unit	40	unit	682.885.994.108,10	10 unit	89.225.513.694	10 unit	89.225.513.694	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		Program DAK Bidang Kesehatan						3.417.947.621		3.417.947.621	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program BOK, Akreditasi dan Jampersal	Jumlah puskesmas yang menggunakan dana BOK, Akreditasi dan Jampersal	16 unit	16	unit	68.313.391.036,55	16 unit	6.362.084.688	16 unit	6.362.084.688	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		Program Perbaikan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	74%	82%	1.090.306.560,00	1		1		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
					0%	1.596.480.000,00	100		100		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah sumber data yang dihasilkan	8	8	360.215.725,28	8	24.090.000	8	24.090.000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	

		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlha honor yang dibayar	19 jenis	19	1.357.000.000,00	19	194.497.000	19	194.497.000	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	8	256.051.000,00					#REF!	#REF!	#REF!			
No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Penilaian Kinerja			
							2017		2017							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(12)		(12)		(18)		(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	kinerja	anggaran
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan	1 dokumen		50.000.000,00							#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Aparatur yang kompetensinya meningkat	6 orang	8	45.000.000,00							#REF!	#REF!	#REF!	
													#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	12 Bulan	20.990.093.175,81	100	3.514.618.290	100	3.514.618.290			#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai		100%	11.326.116.931,46	100	41.584.620	100	41.584.620			#REF!	#REF!	#REF!	
		Program peningkatan disiplin aparatur	Terciptanya Kualitas SDM Aparatur	265 Steel	530 Steel	810.900.000,00		-		-			#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatkan Kemampuan dan kapasitas serta pengetahuan personil satpol PP dalam melaksanakan tupoksi	2 Orang	8 Orang	2.289.310.076,72	100	232.120.000	100	232.120.000			#REF!	#REF!	#REF!	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meinngkatnya Sitempelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	9 Dokomen	202.898.151,26	100	14.548.450	100	14.548.450			#REF!	#REF!	#REF!	
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	terselesaikannya masalah permasalahan ketentraman, ketertiban dan keamanan (K3)	0	100%	3.495.258.024,63	85	401.290.500	85	401.290.500			#REF!	#REF!	#REF!	
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal											#REF!	#REF!	#REF!	
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal											#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di Daerah	Meningkatnya Ketaatan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah	73%	90%	2.423.368.331,63	108	1	108	1			#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terciptanya tertib administrasi pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan	100%	12 Bulan	7.991.226.056,06	100	1.155.406.236	100	1.155.406.236			#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan		9 Kecamatan	19 Kecamatan	2.171.069.295,14							#REF!	#REF!	#REF!	
													#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase efisiensi penyerapan anggaran	100%	100%	46.919.896.616,01	95	8.825.668.901	95	8.825.668.901			#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang layak pakai	100%	100%	3.502.970.736,00	87	377.330.550	87	377.330.550			#REF!	#REF!	#REF!	
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio satuan pengamanan per jumlah desa atau kelurahan	0%	1,00%	1.535.895.755,69	-	-	-	-			#REF!	#REF!	#REF!	
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	55,55%	75,00%	4.541.971.923,46	37	1	37	1			#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja	Tersedianya Jaminan Kesehatan (BPJS) bagi Staf dan Pekerja Non PNS	100%	100%	125.177.937,92							#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	97.668.672,00							#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan Fungsinya.	100%	100%	97.954.034,38							#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Siskamling	100%	19 kec.	1.428.000.000,00							#REF!	#REF!	#REF!	
													#REF!	#REF!	#REF!	
													#REF!	#REF!	#REF!	
													#REF!	#REF!	#REF!	
		Bid. Urusan Sosial											#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase efisiensi penyerapan anggaran	Paket	1 pkt	4.197.933.257,67	1	653.786.429	1	653.786.429			#REF!	#REF!	#REF!	

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang layak pakai	1 pkt	1 pkt	402.186.973,49	1	103.404.074	1	103.404.074	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan yang disusun	N/A	dokumen	147.459.381,70	1	9.554.000	1	9.554.000	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	rata-rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi sosial	N/A	100 org	4.778.258.028,94	1	72.796.800	1	72.796.800	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Presentase PMKS yang mendapat kesejahteraan sosial yang harmoni	N/A	75 org	15.149.605.195,42	0	130.818.318	0	130.818.318	#REF!	#REF!	#REF!	
No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio Capaian Akhir		Penilaian Kinerja	
							2017		2017		(%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(12)		(12)		(18)		(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	kinerja	anggaran
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial									#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial									#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan	N/A	5 kegiatan	1.228.677.801,01	0	56.210.200	0	56.210.200	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial									#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial									#REF!	#REF!	#REF!	
		Program perlindungan dan jaminan sosial	Presentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	N/A		1.594.321.826,50	1	10.012.000	1	10.012.000	#REF!	#REF!	#REF!	
		Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan									#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pembinaan Anak Terlantar	Presentase pembinaan anak terlantar yang ditangani	N/A	50	976.686.720,00					#REF!	#REF!	#REF!	
		program pembinaan eks penyandang penyakit sosial	Presentase pembinaa eks penyandang penyakit sosial yang ditangani	N/A	60 org	1.167.777.600,00					#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan fungsinya		20 org	212.323.200,00					#REF!	#REF!	#REF!	
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah yang pengelolaan keuangannya berbasis IT	34 org	dokumen	476.815.123,92	1	39.510.000	1	39.510.000	#REF!	#REF!	#REF!	
														Sangat Rendah
														Sangat Rendah
														Sangat Rendah
														Sangat Rendah
		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									#REF!	#REF!	#REF!	
		Bid. Urusan Tenaga Kerja									#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja	Persentase jumlah pekerja pertamanan yang memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan				1	75.524.900	1	75.524.900	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja	Tersedianya Jaminan Kesehatan (BPJS) bagi Staf dan Pekerja Non PNS				-	-	-	-	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				6.415.704.481,00	100	848.738.066	100	848.738.066	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				437.236.428,00	100	29.672.688	100	29.672.688	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100	4.319.000	100	4.319.000	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				990.658.935,00	9	31.979.130	9	31.979.130	#REF!	#REF!	#REF!	

		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan		100%	488.808.000	100,00	65.176.550	100,00	65.176.550	#REF!	#REF!	#REF!
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Presentase angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan			579.901.225,00	6	41.225.050	6	41.225.050	#REF!	#REF!	#REF!
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Presentase perusahaan melaksanakan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan			673.248.892,00	46	48.639.645	46	48.639.645	#REF!	#REF!	#REF!
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				1.346.299.216,00	100	56.472.000	100	56.472.000	#REF!	#REF!	#REF!
		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Prosentase kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi			857.945.492,00	-	118.525.000	-	118.525.000	#REF!	#REF!	#REF!
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				119.159.096,00					#REF!	#REF!	#REF!
											#REF!	#REF!	#REF!
											#REF!	#REF!	#REF!
		Bid. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									#REF!	#REF!	#REF!
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	12	12	2.323.992.353,46	100	363.278.217	100	363.278.217	#REF!	#REF!	#REF!

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPd Tahun Ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio Capaian Akhir		Penilaian Kinerja	
					(6)		(12)		(12)		(18)		(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	kinerja	anggaran
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)	12	12	1.210.512.960,00	12	27.170.095	12	27.170.095	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya laporan program dan kegiatan yang valid dalam mendukung administrasi perkantoran yang akuntabel	12	90%	1.276.479.113,60	13	1.700.000	13	1.700.000	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak		25%	1.313.918.608,22	100	148.468.250	100	148.468.250	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan									#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan komprehensif.	95%	99%	2.062.589.794,07	95	203.321.778	95	203.321.778	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Cakupan PUG yang dibina	95%	99%	494.564.412,95	100	53.070.985	100	53.070.985	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam pengelolaan program KKBPK	20%	70%	3.609.494.400,00					#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	Persentase Fasilitasi sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	0%	100%	424.646.400,00					#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Meningkatnya Dukungan Sarana Penyuluhan KB									#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	60,30%	70,30	1.094.367.973,25	39,04/5800	64	39,04/5800	64	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Presentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama	66,68%	65,00	1.127.014.857,48	68	142.460.700	68	142.460.700	#REF!	#REF!	#REF!	
		Prgram Meningkatnya Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan	Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi melalui media, audiensi, dan momentum KKBPK	0	80%	757.780.357,00	28	23.881.800	28	23.881.800	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK					79	103.193.830	79	103.193.830	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program meningkatnya dukungan sarana pelayanan KB									#REF!	#REF!	#REF!	
		Prog.Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Prosentase pemahaman perempuan tentang Perlindungan	0	75%	1.069.939.200,00					#REF!	#REF!	#REF!	
		Program pelayanan kontrasepsi	Prosentase peserta KB aktif MKJP	3,60%	4,50	2.123.232.000,00					#REF!	#REF!	#REF!	
		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Presentase kelompok bina keluarga balita yang aktif	70,02%	80%	636.969.600,00					#REF!	#REF!	#REF!	

	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Presentase masyarakat yang aktif melalui kelompok kegiatan	70,02%	88,06	3.184.848.000,00					#REF!	#REF!	#REF!	
	Program perencanaan pengendalian penduduk	Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (Pendataan keluarga) yang akurat dan tepat	100%	100%	1.196.152.590,00	60	113.763.470	60	113.763.470	#REF!	#REF!	#REF!	
	Program Kerjasama Pendidikan Kependudukan	Persentase masyarakat yang mengetahui tentang wawasan kependudukan	0	38%	1.486.262.400,00					#REF!	#REF!	#REF!	
	Program Analisis Dampak Kependudukan	Tersedianya kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis	0	90%	1.910.908.800,00					#REF!	#REF!	#REF!	
	Program Meningkatnya dukungan Operasional program KKBPK Lini Lapangan	Tersedianya dukungan dana operasional program KKBPK Lini Lapangan	0	90%	2.352.850.520,06					#REF!	#REF!	#REF!	
	Program peningkatan disiplin aparatur			100	85.990.896,00					#REF!	#REF!	#REF!	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		12	12	322.731.264,00					#REF!	#REF!	#REF!	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya laporan program dan kegiatan yang valid dalam mendukung administrasi perkantoran yang akuntabel	80%	90%	50.000.000,00					#REF!	#REF!	#REF!	

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio Capaian Akhir		Penilaian Kinerja			
							2017		2017		2017		2017			
							(12)		(12)		(12)		(12)		(18)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	kinerja	anggaran		
		Program Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, penggerakan, pembinaan program KKBPK dan sarana pengolahan dan pelaporan data/informasi program KKBPK					100	962.641.000	100	962.641.000	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah tenaga lini lapangan					75	49.230.000	75	49.230.000	#REF!	#REF!	#REF!			
		Bid. Urusan Pertanahan									#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya kelancaran pelayanan Administrasi perkantoran	100%	100%	3.041.270.026,29	1	325.926.240	1	325.926.240	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur	N/A	100%	283.285.207,22	1	21.621.297	1	21.621.297	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase tanah pemda yang bersertifikat	14,14%	23,36%	2.003.010.245,91	0	205.240.722	0	205.240.722	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah									#REF!	#REF!	#REF!			
		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah						10.100.000		10.100.000	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terfasilitasinya penyelesaian konflik Pertanahan	5,71%	77,14%	1.006.786.037,45	0	154.551.700	0	154.551.700	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan									#REF!	#REF!	#REF!			
		Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Kecamatan yang memiliki sistem informasi pertanahan berbasis IT	5,26%	42,11%	1.113.595.918,34	0	135.090.500	0	135.090.500	#REF!	#REF!	#REF!			
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Presentase peningkatan kapasitas ASN sesuai tupoksinya	N/A	100%	596.322.446,59					#REF!	#REF!	#REF!			
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase laporan pertanggungjawaban SKPD dilaporkan Tepat waktu.	100%	100%	1.456.557.462,84	1	196.877.000	1	196.877.000	#REF!	#REF!	#REF!			
		PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	Rancangan produk hukum daerah tentang urusan bidang pertanahan	20%	100%	631.976.516,30	0	102.829.486	0	102.829.486	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program pembangunan sistem pendaftaran tanah						1.500.000		1.500.000	#REF!	#REF!	#REF!			
											#REF!	#REF!	#REF!			
		Bid. Urusan Lingkungan Hidup									#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas SKPD dan fungsi SKPD	100%	100%	1.460,87	1	854.883.577	1	854.883.577	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	2.158,09	1	1.041.242.998	1	1.041.242.998	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		-		-		#REF!	#REF!	#REF!			
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsional SKPD	100%	100%	64,96	1	45.045.000	1	45.045.000	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Penanganan Sampah	65,92%	76,00%	7.577,71	1	6.687.817.331	1	6.687.817.331	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Angka Indeks Kualitas Lingkungan	57,51% (kurang)	61% (cukup)	3.495,91	57,91% (cukup)	1.163.248.081	57,91% (cukup)	1.163.248.081	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup									#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup									#REF!	#REF!	#REF!			

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Penilaian Kinerja			
							2017		2017							
							(12)		(12)		(18)		(19)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	kinerja	anggaran
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan Luasan Lahan yang di Pantau	36,84%	73,68%	1.116,38	47,37%	158.282.700	47,37%	158.282.700	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen	0		564,39		35.204.000		35.204.000	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program penataan hukum lingkungan	Persentase Penanganan Jumlah pengaduan yg ditindaklanjuti	Na	100%	665,12		7.989.000		7.989.000	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja	Persentase jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerja	100%	100%	289,07	1	308.063.196	1	308.063.196	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya pengadaan pakaian Dinas PNS dan Non PNS	100%	100%						#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	100%	72,50	1	49.655.000	1	49.655.000	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program peningkatan pengendalian polusi						22.803.100		22.803.100	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program pengelolaan persampahan						698.868.227		698.868.227	#REF!	#REF!	#REF!			
											#REF!	#REF!	#REF!			
											#REF!	#REF!	#REF!			
		Bid. Urusan Administrasi Kependudukan dan Cakil														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100%	100%	4.560.836.984,00	1	588.877.367	1	588.877.367	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasaran Kantor Terpelihara	100%	100%	616.673.236,00	1	79.956.282	1	79.956.282	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kualitas ASN Menngkat	100%	100%	267.768.176,00					#REF!	#REF!	#REF!			
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyampain Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	6 Dok	30 Dok	215.325.000,00	6 Dok	32.649.000	6 Dok	32.649.000	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Adminduk dengan Database Kependudukan Kabupaten yang Akurat	AN	100%	6.340.665.944,00	1	1.407.680.048	1	1.407.680.048	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Penataan Administrasi Kependudukan									#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan yang terealisasi		100%	75.000.000,00					#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Pengelolaan Keuangan	100%	100%	829.303.920,00	1	81.150.210	1	81.150.210	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Adminduk DAK	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Adminduk dengan Database Kependudukan Kabupaten yang Akurat	AN	100%	4.891.746.302,00		-		-	#REF!	#REF!	#REF!			
											#REF!	#REF!	#REF!			
											#REF!	#REF!	#REF!			
		Bid. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang prima	N/A		5.939.207.500,00	80	810.699.601	80	810.699.601	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase ketepatan waktu pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan SKPD	N/A	100%	345.000.000,00	100	38.691.200	100	38.691.200	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	rata -rata jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	N/A	80%	4.912.342.294,00	72	1.997.590.320	72	1.997.590.320	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						30.917.400		30.917.400	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						83.055.000		83.055.000	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						80.900.000		80.900.000	#REF!	#REF!	#REF!			
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						67.722.250		67.722.250	#REF!	#REF!	#REF!			

		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	persentase Desa yang memiliki BUMDES	N/A	80%	1.534.582.056,00	97	133.598.300	97	133.598.300	#REF!	#REF!	#REF!
		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	persentase Desa yang memiliki BUMDES					12.543.000		12.543.000	#REF!	#REF!	#REF!
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	persentase peningkatan status desa	N/A	80%	1.534.582.056,00	51	132.476.412	51	132.476.412	#REF!	#REF!	#REF!

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Penilaian Kinerja	
					(6)		(12)		(12)		(18)		(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	kinerja	anggaran
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				275.472.000,00		10.770.000		10.770.000	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa						4.500.000		4.500.000	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program penataan dan penguatan kelembagaan administrasi desa	persentase pemilihan kepala desa dan penataan kelembagaan administrasi desa	N/A	80%	2.441.855.600,00	67	515.301.988	67	515.301.988	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	persentase penyerapan keuangan desa berdasarkan APBDes	N/A	80%	2.744.848.325,00	103	88.039.800	103	88.039.800	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM Aparatur di DPMD	N/A	76%	700.000.000,00	86	178.603.400	86	178.603.400	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa									#REF!	#REF!	#REF!	
		Program pendayagunaan SDA dan TTG	persentase Posyantek aktif	N/A	80%	913.840.000,00	62		62		#REF!	#REF!	#REF!	
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					100	52.360.000	100	52.360.000	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah dan jenis kegiatan kelestarian sosial budaya masyarakat, keswadayaan, dan kegotongrovan masyarakat	N/A	80	488.000.000	100	942.083.590	100	942.083.590	#REF!	#REF!	#REF!	
		Bid. Urusan Perhubungan									#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase efisiensi penyerapan anggaran	100%	100%	33.906.179.225,60	79	4.016.251.816	79	4.016.251.816	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang layak pakai	100%	100%	5.416.322.560,00	93	82.971.316	93	82.971.316	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan Fungsinya.	NA	100%	1.083.264.512,00					#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase Pelabuhan Laut dan sungai /Terminal yang ditangani	80%	100%	2.437.345.152,00	106	208.427.000	106	208.427.000	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan	Persentase Angkutan darat	0,065%	0,066%	8.936.932.224,00	0	396.690.455	0	396.690.455	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio ijin trayek	0,0054	0,0054	10.291.012.864,00	0	1.238.628.107	0	1.238.628.107	#REF!	#REF!	#REF!	
			Persentase Pemasangan Rambu-rambu		75%				80		#REF!	#REF!	#REF!	
		DAK AFIRMASI Bidang Transfortasi						5.842.705.800		5.842.705.800	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah uji kir angkutan umum		772	1.895.712.896,00	1.543	114.240.000	1.543	114.240.000	#REF!	#REF!	#REF!	
			Prosentase kepemilikan KIR angkutan umum		85,45%		207		207		#REF!	#REF!	#REF!	
			Prosentase Penerimaan Retribusi Uji KIR angkutan umum		95,33%		168		168		#REF!	#REF!	#REF!	
			Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)		40		53		53		#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan									#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah arus penumpang angkutan umum	598.429	610.000	849.292.800,00					#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	100%	100%	3.249.793.536,00	100	50.683.600	100	50.683.600	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD	100%	100%	1.895.712.896,00	100	140.488.700	100	140.488.700	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya penyusunan dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKA SKPD)	100%	100%	406.224.192,00					#REF!	#REF!	#REF!	
		Bid. Urusan Komunikasi dan Informatika									#REF!	#REF!	#REF!	

		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	5.490.955.660,16	1	767.419.803	1	767.419.803	100,00	14%	ST	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						19.082.100		19.082.100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kompetensi SDM melalui bimtek dan diklat teknis	100%	100%	849.292.800,00				-	0%		Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD	100%	100%	206.321.267,20				-	0%		Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	prosentase kecamatan yang menggunakan aplikasi TIK	36%	100%	14.862.624.000,00				-	0%		Sangat Rendah	Sangat Rendah
No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio Capaian Akhir		Penilaian Kinerja	
					(6)		(12)		(12)		(18)		(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	kinerja	anggaran
		Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	persentase implementasi pentahapan road map IT	0	20%	4.246.464.000,00	-	121.355.400	-	121.355.400	-	3%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program kerjasama informasi dan Media Massa	Prosentase Pembentukan / Penerapan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada SKPD	0	100%	5.520.403.200,00	0	838.047.570	0	838.047.570	30,00	15%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program kerjasama informasi dan Media Massa	Persentase layanan aplikasi e-Government, akses internet dan layanan publik	0	100,00%	1.568.093.244,50	1	16.952.940	1	16.952.940	60,00	1%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			100%	636.969.600,00	1	19.760.000	1	19.760.000	60,00	3%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data statistik daerah	2	8	1.007.435.996,00	-	48.583.000	-	48.583.000	-	5%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah SDM bersertifikat di bidang KOMINFO	0	75%	1.442.167.967,20	-	31.348.500	-	31.348.500	-	2%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	100%	100%	874.931.200,00				-	0%		Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					1	22.950.000	1	22.950.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Bid. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah												
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya proses Administrasi Perkantoran Dengan Lancar	85%	85%	4.564.699.404,41	1	726.059.407	1	726.059.407	76,47	16%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai/siap pakai	90%	90%	513.464.805,93	1	83.345.525	1	83.345.525	77,78	16%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Pelaporan Yang Akuntabel	85%	85%	541.632.256,00	1	128.600.000	1	128.600.000	76,47	24%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pertumbuhan UKM(%)	2505 UKM	5%	3.107.124.349,98	0	169.340.908	0	169.340.908	20,00	5%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daeran	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi keuangan	90%	95%	1.378.183.275,39	1	149.500.000	1	149.500.000	95,79	11%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase Pertumbuhan Koperasi	268	55,00%	4.777.843.693,38	0	120.476.000	0	120.476.000	20,00	3%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan formal	5,00%	25,00%	2.968.968.635,71	0	115.904.000	0	115.904.000	20,00	4%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Prosentase pertumbuhan industri	490 IKM	17,74%	3.703.331.235,66	3,06%	322.726.000	3,06%	322.726.000	17,25	9%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Prosentase pelaku usaha IKM yang mendapat binaan	490 IKM	37,74%	7.362.684.112,10	8,16%	1.050.684.250	8,16%	1.050.684.250	21,62	14%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah												
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terciptanya ASN yang disiplin.	75%	75%	127.393.920,00					-	0	Sangat Rendah	Sangat Rendah

		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menunjang kerjanya.	85%	85%	424.646.400,00					-	0	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Dan Sasaran Kerja Yang Tepat	95%	95%	579.575.680,00	1		1		95,79	0	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Bid. Urusan Penanaman Modal														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pendukung Aktivitas Perkantoran	100%	1 Tahun	3.748.638.711,00	100	418.190.294	100	418.190.294	100	11%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	100%	1 Tahun	649.958.680,00	100	108.900.000	100	108.900.000	100	17%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	1 Tahun	176.030.480,00					0	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	100%	1 Tahun	541.632.200,00	100	49.043.000	100	49.043.000	100	9%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase Jumlah Izin Yang Terbit	100%	16 Kec.	6.077.140.686,00	100	382.794.781	100	382.794.781	6,25	6%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio Capaian Akhir		Penilaian Kinerja	
					(6)		(12)		(12)		(18)		(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	kinerja	anggaran
		Program pengembangan data/informasi	Optimalisasi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Data	100%	1 Tahun	424.747.900,00		58.879.000		58.879.000	0	14%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Optimalisasi pameran investasi dan potensi daerah	2 Pameran	1 Pameran	1.288.000.736,00	100	85.870.600	100	85.870.600	100	7%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi terhadap Penanaman Modal	100%		885.514.384,00		45.781.500		45.781.500	#DIV/0!	5%	#DIV/0!	Sangat Rendah
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian Laporan SKPD tepat waktu		1 Tahun	4.083.635.520,00		505.100.000		505.100.000	0	12%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur yang menggunakan pakaian khusus hari-hari tertentu			356.388.000,00					#DIV/0!	0%	#DIV/0!	Sangat Rendah
Bid. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga														
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Presentase kegiatan olahraga yang difasilitasi	33,33	100	3.553.107.599,36	35	298.669.800	35	298.669.800	0,35	8%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga						10.600.000		10.600.000				
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga												
Bid. Urusan Statistik														
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tersedianya data statistik daerah		8	1.007.435.996,00								
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Dasar Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Bidang Perikanan	100%	100%	3.297.318.600,00	3	124.617.440	3	124.617.440	3	4%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Bid. Urusan Kebudayaan														
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pelestarian budaya lokal	NA	85%	8.161.447.534,44		639.806.194		639.806.194	0	8%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Bid. Urusan Perpustakaan														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sumber daya yang memadai untuk pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	2.831.086.152,00	100	369.469.479	100	369.469.479	1	13%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Efisiensi pengadaan sarana dan prasarana kantor	87,15%	70,00	555.704.000,00	79	242.517.400	79	242.517.400	1,128571429	44%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase Peningkatan Kunjungan ke Perpustakaan	,15% dari tahun lal	10%	2.295.369.999,00	0	75.437.250	0	75.437.250	0,6	3%	Rendah	Sangat Rendah
		Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase Peningkatan Kunjungan ke Perpustakaan								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyampaian Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	100%	100	382.600.000,00	100	18.003.600	100	18.003.600	1	5%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah

		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase OPD yang menerapkan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis	0%	31,37	939.290.000,00	-	-	-	-	0	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase OPD yang dibina dalam rangka penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	1,96%	100	780.842.000,00	22	101.975.700	22	101.975.700	0,215686275	13%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	9 Agenda	19	768.087.000,00					0	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase arsip daerah yang dikelola oleh LKD dalam kondisi baik	0%	100	345.000.000,00					0	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Efisiensi pengadaan sarana penunjang kedisiplinan ASN	N/A%	70,00	157.500.000,00					0	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas ASN sesuai tupoksinya	12,00%	80,00	260.000.000,00					0	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib Penyampaian Laporan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah	100%	100	2.108.790.000,00	100	298.670.000	100	298.670.000	1	14%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rencana Kegiatan pada Renstra DPK yang terakomodir dalam DPA	68,75%	85,00	351.000.000,00					0	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah media publik yang menjadi sumber informasi pembangunan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan	2 Media	2	450.000.000,00					0	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Urusan Pilihan												
		Bid. Urusan Kelautan dan Perikanan												

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPDP Tahun Ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio Capaian Akhir		Penilaian Kinerja	
					(6)		(12)		(12)		(18)		(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	kinerja	anggaran
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pendukung Aktivitas Perkantoran	100%	100%	10.058.616.366,00	1	1.270.387.142	1	1.270.387.142	1	13%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana yang disediakan	100%	100%	1.407.426.400,00	1	85.881.375	1	85.881.375	1	6%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur	54 org	322 org	550.200.000,00	-	-	-	-	#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Program pengembangan budidaya perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	272,828.55 Ton	40%	25.664.484.615,00	0	3.359.943.898	0	3.359.943.898	0,2	13%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
			Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp juta)	129.205.377	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			Persentase Cakupan Binaan Kelompok Pembudidaya (%)	79,29%	100%		0		0		0,041420118	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!
			Persentase Produksi Perikanan Kelompok Pembudidaya (%)	186.619,27	40%		0		0		0,2	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!
			Jumlah pengembangan kawasan budidaya	1 Kawasan			1		1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	1 Dok	101,4		101		101		0,996055227	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!
		Program pengembangan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	N/A	10%	20.558.437.962,00	0	56.488.350	0	56.488.350	0,2	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
			Persentase cakupan binaan kelompok/koperasi Nelayan dan pembudidaya ikan	3,933.89 Ton	58,33%		0		0		0,142857143	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	11,67%	101,4		101		101		0,996055227	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!
		Program penanggulangan kemiskinan bidang kelautan dan perikanan		N/A							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Program pengembangan pembangunan perikanan	Nilai Kinerja dinas perikanan		B	1.154.960.000,00	B	334.153.000	B	334.153.000	#VALUE!	29%	#VALUE!	Sangat Rendah
			Tersedianya SOP Bidang Perikanan	N/A	8 Dok						#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!
		Program pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	N/A	40%	2.293.263.800,00	0	335.759.700	0	335.759.700	0,2	15%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
			Persentase Cakupan Binaan Kelompok Pembudidaya (%)	272,828.55 Ton	100%		0		0		0,041420118	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!
			Persentase penurunan Rumah Tangga Pembudidaya Miskin (%)	79,29%	41,67%		0		0		0,183333333	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!

			Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi)	3,47%	101,4		101		101		0,996055227	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!
		Program pemberdayaan nelayan kecil	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	N/A	10%	2.959.412.800,00	0	151.235.161	0	151.235.161	0,2	5%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
			Persentase cakupan binaan kelompok/ koperasi Nelayan (%)	3,933.89 Ton	46,67%		0		0		0,178558674	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!
			Persentase penurunan Rumah Tangga Nelayan Miskin (%)	11,67%	15,14%		0		0		0,086206897	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	8,62%	101,4		101		101		0,996055227	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!
		Program perizinan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Jumlah TPI yang di kelola	N/A	2	8.730.604.800,00	-	146.161.349	-	146.161.349	0	2%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
			Persentase perijinan usaha perikanan yang diterbitkan	N/A	20,94%		0		0		0,834983498	#DIV/0!	Sedang	#DIV/0!
			Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	16,62%	10%		0		0		0,2	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!
			Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	3.933,89	40%		0		0		0,2	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!
		Program Pemberdayaan Usaha Kecil		272.828,55							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Program pengembangan pembangunan perikanan									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Jumlah Aparatur yang menggunakan pakaian khusus hari-hari tertentu		500 stel	236.090.880,00	100 stel	44.550.000	100 stel	44.550.000	#VALUE!	19%	#VALUE!	Sangat Rendah
		PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai kinerja dinas perikanan	100 stel	B	199.256.000,00	B		B		#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Penyediaan sarana dan prasarana penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan		N/A				85.811.000		85.811.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Bid. Urusan Pariwisata												

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio Capaian Akhir		Penilaian Kinerja	
							2017		2017		2017		2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(12)		(12)		(18)		(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	kinerja	anggaran
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan kantor	100%	100%	4.327.641.725,44	90	838.146.436	90	838.146.436	90	19%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	100%	100%	324.979.353,60	75	168.053.996	75	168.053.996	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dipublikasikan	100%	100%	406.224.192,00	100	34.583.800	100	34.583.800	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah pengembangan pemasaran pariwisata	0	10	3.249.793.536,00	2	440.478.901	2	440.478.901	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah obyek wisata yang di bina	0	7	15.301.111.232,00	3	1.837.951.399	3	1.837.951.399	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program pengembangan Kemitraan	Jumlah kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat	0	5	812.448.384,00	1	86.907.860	1	86.907.860	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program pengembangan ekonomi kreatif	Presentase pengembangan produk ekonomi kreatif	0	100%	758.285.158,40	20	97.733.299	20	97.733.299	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Presentase organisasi kepemudaan /generasi muda yang berperan serta dalam kegiatan kepemudaan	0	95	2.031.120.960,00	20	485.540.000	20	485.540.000	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Presentase kegiatan olahraga yang difasilitasi	33,33	100	3.553.107.599,36	35		35		#REF!	#REF!	#REF!	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang dibangun		5	1.245.754.188,80					#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan									#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pengembangan ruang kreatif	Jumlah sarana prasarana ruang kreatif	0	5	677.040.320,00					#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase kegiatan pengembangan kepemudaan yang difasilitasi	0	100	406.224.192,00					#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pengembangan dan Pembinaan Kepramukaan	Presentase pembinaan	0	90	731.203.545,60					#REF!	#REF!	#REF!	

		Program upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah angka pengguna narkoba	78	28	270.816.128,00					#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Pengembangan Kebijakan dan Management Olahraga	Presentase kegiatan pembinaan manajemen organisasi dan tenaga keolahragaan yang difasilitasi	0	100	379.142.579,20					#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	0	1	50.000.000,00					#REF!	#REF!	#REF!	
		Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase pengelolaan keuangan	100%	100%	379.142.579,20	100	69.888.000	100	69.888.000	#REF!	#REF!	#REF!	
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100%	100%	81.244.838,40					#REF!	#REF!	#REF!	
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	0	10	270.816.128,00					#REF!	#REF!	#REF!	
											#REF!	#REF!		
		Bid. Urusan Pertanian												
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	18.655.016.000,00	100	2.634.724.231	100	2.634.724.231	#VALUE!	14%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Gedung Kantor (Unit)	0	15	1.323.334.400,00	100	62.185.200	100	62.185.200	6,666666667	5%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang terampil melalui pelatihan/BIMTEK	3	28	500.000.000,00					0	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan kegiatan OPD (Dokumen)	6	30	200.000.000,00					0	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Keikutsertaan petani/Gapoktan dalam PEDDA dan PENAS		110	2.726.190.200,00	9	540.611.650	9	540.611.650	0,081818182	20%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
			Pemberdayaan Gapoktan penerima dana PUAP (Gapoktan)	9	9		9		9		1	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Prod. Tan. Pangan			8.700.127.000,00		816.080.526		816.080.526	#DIV/0!	9%	#DIV/0!	Sangat Rendah
			1. Padi	26.658	29.001		28.273		28.273		0,974891757	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!
			2. Ubi Kayu	23.922	23.922		20.805		20.805		0,86970153	#DIV/0!	Sedang	#DIV/0!
			Prod. Hortikultura :								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			1. Pisang	8.806	10.209		12.696		12.696		1,243661268	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Penilaian Kinerja	
					(6)		(12)		(12)		(18)		(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	kinerja	anggaran
			2. Durian	1.452	1.603		1		1		0,000934425	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!
			3. Jeruk	1.011	1.290		1		1		0,000871101	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!
			Porduktivitas Tan pangan :								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			1. Padi (kw/ha)	48,5	50,09		4.900		4.900		97,82391695	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!
			2. Ubi Kayu(kw/ha)	217,28	217,28		219.000		#####		1007,916053	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!
			Porduktivitas holtikultura :								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			1. Pisang(Kg/rump)	58,89	68,27		61.660		61.660		903,183183	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!
			2. Durian(Kg/Phn)	125,83	138,93		128.500		#####		924,9496071	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!
			3. Jeruk(Kg/Phn)	84,99	106,41		89		89		0,838681979	#DIV/0!	Sedang	#DIV/0!
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	1. Ketersediaan Pangan Utama	45,47%	79,35%	7.229.970.400,00	72		72		90,66162571	0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
			2. Menurunnya jumlah rawan pangan	1%	1%						0	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!
			3. Keamanan pangan segar	Dibawah ambang batas	Dibawah ambang batas						#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!

	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1. Tersedianya sarana dan alat mesin pertanian dan mekanisasi pertanian (%)	27	34	4.475.210.000,00	6	102.450.920	6	102.450.920	0,175953079	2%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		2. Menumbuhkan home industri	-	9		1		1		0,111111111	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				6.242.378.400,00		183.155.000		183.155.000	#DIV/0!	3%	#DIV/0!	Sangat Rendah
		1. Sawit (Ton/Ha)	28	30		28		28		0,931333333	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!
		2. Kakao (Kg/Ha)	1.000	1.200		782		782		0,651791667	#DIV/0!	Rendah	#DIV/0!
		3. Pengembangan tanaman kopi (Ha)	0	20						0	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!
		4. Pengembangan tanaman cengkeh (Ha)	0	45						0	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!
		5. Pengembangan tanaman lada (Ha)	0	50		1		1		0,02	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!
		6. Pengembangan tanaman karet (Ha)	0	40						0	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!
		7. Pengembangan tanaman aren (Ha)	5	20		-		-		0	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!
		8. Pengembangan kelapa dalam (Ha)		20						0	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!
		9. Pengembangan kakao (ha)	0	200						0	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian	50%	85%	1.334.434.000,00	36	1.620.423.600	36	1.620.423.600	42,54117647	121%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1. Menurunnya tingkat kematian ternak	3,3%	2,5%	1.946.595.000,00	1	165.818.600	1	165.818.600	40	9%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		2. Jumlah pelaku usaha peternakan yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	0	2						0	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Peningkatan Populasi Ternak :			1.690.215.000,00		89.252.000		89.252.000	#DIV/0!	5%	#DIV/0!	Sangat Rendah
		1. Sapi (Ekor)	8.150	9.900		9.182		9.182		0,927474747	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!
		2. Kerbau (Ekor)	3.332	3.582		3.698		3.698		1,032384143	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!
		3. Kambing (Ekor)	2.342	2.892		2.485		2.485		0,859266943	#DIV/0!	Sedang	#DIV/0!
		4. Babi (Ekor)	4.349	4.849		4.499		4.499		0,927820169	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!
		5. Ayam Nunukan (Ekor)	100	100		250		250		2,5	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!
	Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian	1. Luas Lahan Terjangkau Irigasi (Ha)		1767	11.808.382.800,00	1	1.923.712.517	1	1.923.712.517	0,000565931	16%	Sangat Rendah	Sangat Rendah

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Penilaian Kinerja		
					(6)		(12)		(12)		(18)		(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	kinerja	anggaran	
			2. Luas lahan usaha tani yang disertifikasi (Bidang)	1.567	240	1		1		0,004166667	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!		
			3. Luas optimasi lahan pertanian	1.569	200	1		1		0,005	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!		
			4. Panjang JUT terbangun	0 Ha	10 km	1		1		#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!		
		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah Kelahiran dengan Iseminasi Buatan (ekor)	28 km	750	-	1.617.910.000,00	-	163.233.200	0	10%	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			Terpeliharanya demplot peternakan (unit)	100	3	3		3		1	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!		
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1. Porsentase Tingkat Pola Pangan harapan	3	94,20%		3.095.376.800,00		321.613.500	0	10%	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			2. Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari)	86,50%	2.077					0	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!		
		Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	1. Jumlah dokumen laporan/data statistik pertanian (dokumen)				1.058.643.000,00	1		#DIV/0!	0%	#DIV/0!	Sangat Rendah		
			2. Nilai Tukar Petani (NTP)	1	104,56					0	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!		
		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN	Jumlah pameran/ekspose yang diikuti	-	10 kali		200.000.000,00			#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah		
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH	Manajemen pengelolaan keuangan Dinas	1 kali	12 Bulan		585.000.000,00		43.950.000	#VALUE!	8%	#VALUE!	Sangat Rendah		
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya dokumen perencanaan	12 Bulan	1		155.000.000,00		-	0	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tersedianya pakaian dinas pegawai beserta perlengkapannya (Paket)	1	2					0	#DIV/0!	Sangat Rendah	#DIV/0!		
		DAK Kedaulatan Pangan		0					183.576.900	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Bid. Urusan Perdagangan													
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya pelayanan yang optimal terhadap masyarakat dengan fasilitas Sarana dan Prasarana yang memadai	80%	87%		3.614.525.867,74	1	527.060.290	1	527.060.290	0,91954023	15%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya nilai positif dari masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh SKPD	90%	93%		513.464.805,93	1	42.930.139	1	42.930.139	0,967741935	8%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya nilai positif dari masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh SKPD	90%	93%		-	1		1		0,967741935	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terciptanya Laporan Capaian Kinerja SKPD	90%	93%		587.670.997,76	1	62.633.000	1	62.633.000	0,967741935	11%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peredaran komoditas perdagangan yang diawasi	75%	100%		2.348.145.902,29	1	145.869.000	1	145.869.000	1	6%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Pesentase komoditi unggulan yang diserap pasar	48,33			4.524.912.859,19		594.320.196		594.320.196	#DIV/0!	13%	#DIV/0!	Sangat Rendah
			* Padi (ton)	60%	60%			1		1		1	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!
			* Pisang (Kg/Rmpn)	30%	30%			0		0		1	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!
			* Sawit (ton) Eksport Malaysia	100%	100%			1		1		1	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!
			* Kakao (kg/ha)	100%	100%			1		1		1	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!
			* Ikan (ton)	3.933,89	4.327,28			4.012,57		4.012,57		0,927273021	#DIV/0!	Sangat Tinggi	#DIV/0!

			* Rumput Laut (ton)	272.828,55	381.959,97		294.654,834		294.654.834	0,771428571	#DIV/0!	Sedang	#DIV/0!	
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase efisiensi jumlah usaha dan perdagangan	1,03%	5,92%	6.095.727.139,72	0	181.842.252	0	181.842.252	0,179054054	3%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Cakupan Pasar Murah dan Pembinaan Pedagang Pasar (%)	36,84%	215,79%	3.493.270.657,66	0	449.312.000	0	449.312.000	0,170731707	13%	Sangat Rendah	Sangat Rendah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Penilaian Kinerja	
					(6)		(12)		(12)		(18)		(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Dak bidang perdagangan	presentasi jumlah pasar yang terbangun	58,8	15 Pasar	13.892.867.366,40	73	1.759.011.400	73	1.759.011.400	#VALUE!	13%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terciptanya nilai positif dari masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh SKPD	NA	93%	127.393.920,00					0	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terciptanya nilai positif dari masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh SKPD	90%	93%	1.238.983.785,60	1	70.980.000	1	70.980.000	0,967741935	6%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Bid. Urusan Perindustrian									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Prosentase pertumbuhan industri		17,74%	3.703.331.235,66	100	163.092.108	100	163.092.108	563,6978579	4%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Prosentase pelaku usaha IKM yang mendapat binaan		37,74%	7.362.684.112,10	92	186.052.301	92	186.052.301	243,7731849	3%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang												
		Bid. Urusan Administrasi Pemerintahan												
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	N/A	20 kali	800.000,00	12	37.947.999	12	37.947.999	#VALUE!	4743%	#VALUE!	Sangat Tinggi
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran (12 bulan)	N/A	12 bln	645.090,00	12	11.963.835.344	12	11.963.835.344	#VALUE!	1854599%	#VALUE!	Sangat Tinggi
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana kerja aparatur (15 keg/thn)	N/A	100%	41.807.680,00	1	4.679.462.106	1	4.679.462.106	100%	11193%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah tanda pengenal ASN (5000 Tanda Pengenal)	500 TANDA PENGENAL	5.000 buah	900.000,00	1.000 buah	88.751.000	1.000 buah	88.751.000	#VALUE!	9861%	#VALUE!	Sangat Tinggi
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Setkab yang mengikuti Bintek (50 ASN)	0 ASN	40 ASN	600.000,00	-	14.624.850	-	14.624.850	#VALUE!	2437%	#VALUE!	Sangat Tinggi
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Keikutsertaan bimtek/pelatihan aparatur		22 camat	1.250.000,00	12 camat	144.191.138	12 camat	144.191.138	#VALUE!	11535%	#VALUE!	Sangat Tinggi
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Sangat Tinggi (3,01-4,00)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1.750.000,00	3,01 - 4,00 (Sangat Tinggi)	104.944.200	3,01 - 4,00 (Sangat Tinggi)	104.944.200	#VALUE!	5997%	#VALUE!	Sangat Tinggi
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	NILAI EVALUASI AKIP KAB (Kategori)	C	B	1.900.000,00	CC	227.645.484	CC	227.645.484	#VALUE!	11981%	#VALUE!	Sangat Tinggi
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD	N/A	100%	2.500.000,00	1	97.176.738	1	97.176.738	75%	3887%	Sedang	Sangat Tinggi
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Laporan Keuangan (2 keg/thn)	N/A	10 keg/Thn	8.942.110,00	2	65.766.500	2	65.766.500	#VALUE!	735%	#VALUE!	Sangat Tinggi
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Terlaksananya rakor dan konsultasi luar daerah	32 kali	32 kali	1.970.100,00	32 kali	285.503.500	32 kali	285.503.500	#VALUE!	14492%	#VALUE!	Sangat Tinggi
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah kunjungan/inspeksi Kepala daerah/ Wakil Kepala daerah dikabupaten nunukan	N/A	19 kec.	2.716.500,00	19 kec.	348.683.000	19 kec.	348.683.000	#VALUE!	12836%	#VALUE!	Sangat Tinggi
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase Terlayannya kegaitan kedinasan Kepala dan wakil kepala daerah (jumlah kegiatan)	N/A	100%	14.866.835,00	1	3.146.813.906	1	3.146.813.906	100%	21167%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Presentase sumber pendapatan yang harus tercapai	N/A	100%	1.450.000,00	1	304.209.700	1	304.209.700	60%	20980%	Rendah	Sangat Tinggi
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Penyusunan Peraturan Daerah yang terpadu, sistematis and tararah (100%)	N/A	100%	14.836.830,00	1	845.915.120	1	845.915.120	100%	5701%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PERANGKAT DAERAH yang TERTATA (50 SKPD)		100%	1.250.000,00	1	127.253.471	1	127.253.471	100%	10180%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			Persentase Tahapan Pelaksanaan REFORMASI BIROKRASI		25%	1.350.000,00	0		0		40%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah kegiatan penataan daerah otonomi baru		20 keg/tahun	7.147.500,00	4 keg/tahun	149.642.800	4 keg/tahun	149.642.800	#VALUE!	2094%	#VALUE!	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPDP Tahun Ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio Capaian Akhir		Penilaian Kinerja	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(12)		(12)		(18)		(19)	
		Program Pengembangan Data Informasi									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Program Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat	58.4 (kurang baik)	Baik (Nilai Min 62.51)	2.000.000,00	Baik (Nilai Min 62.51)	Baik (Nilai Min 62.51)	Baik (Nilai Min 62.51)	#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah	
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	PENYEDIAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH	5 % dari seluruh perda dan perbup	100%	1.034.500,00	0	78.858.200	0	78.858.200	20%	7623%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa						179.424.000		179.424.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan						165.674.000		165.674.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Program Pengembangan Kecamatan	Terlaksananya Paten Kecamatan dan Camat Berprestasi		100%	3.500.000,00					0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	grade dan nilai jabatan (50 SKPD)		100%	1.250.000,00					0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program kerjasama pembangunan	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan	N/A	2 kebijakan	1.354.080,64					#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Program Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa yang difasilitasi melalui ULP	N/A	100%	2.500.000,00					0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program peningkatan pendidikan dan pengembangan SDM melalui beasiswa	Fasilitasi peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (Jumlah Penerima)	N/A	4.300 org	11.500.000,00					#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan di Kab. Nunukan	N/A	25 kali	1.200.000,00					#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Program Penyelesaian Konflik-Konflik pertanahan	Persentase Kebijakan daerah Bidang Pertanahan yg selaras deg per UU	N/A	5 Laporan	750.000,00					#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Program peningkatan pelayanan angkutan umum	Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah bidang Peningkatan Pelayanan Perhubungan yg selaras dengan Per UU	N/A	100%	850.000,00					0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Produksi Pertanian	Persentase Kebijakan daerah bidang Pertanian pangan dan perkebunan yg selaras dengan Per UU	N/A	100%	1.250.000,00					0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kebijakan daerah dalam penanganan masalah lingkungan hidup dan Kehutanan yg selaras dengan Per UU	N/A	100%	1.000.000,00					0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Pembangunan Pengembangan bidang perikanan	Persentase Kebijakan daerah bidang perikanan yg selaras dengan Per UU	N/A	100%	750.000,00					0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian pembangunan daerah	N/A	100%	1.300.000,00					0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase realisasi Program SKPD dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	N/A	100%	1.609.150,00					0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Kebijakan di bidang Pelayanan Pendidikan	N/A	12 peraturan	1.570.750,00					#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah

		PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase Kebijakan Bidang Sosial di kab. Nunukan	N/A	100%	1.490.000,00				0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Persentase Reliasasi Kebijakan Pemerintah Daerah bidang pemberdayaan Masy. Desa	N/A	5 dok	1.450.000,00				#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah
		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase teralaksananya kebijakan bidang Kependudukan	N/A	100%	1.500.000,00				0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Realisasi Kebijakan pemerintah Daerah bidang Penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	N/A	100%	1.475.000,00				0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya kegaitan pelayanan kesejahteraan sosial (2 keg/thn)	N/A	10 Keg/tahun	2.455.680,00				#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya kegaitan sosial dan Forum Kerukunan Umat Beragama (%)	N/A	12.500 org	2.818.728,00				#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terfasilitasinya pembinaan pelaku keagamaan (%)	N/A	15.500 org	21.840.000,00				#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin (%)	N/A	155 org	1.450.000,00				#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Tepenuhnya pelayanan kesehatan lanjutan (%)	N/A	90%	1.200.000,00				0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Pengembangan destinasi pariwisata	Fasilitas kerjasama Antar pemerintah Daerah (mou)	N/A	8 peraturan	675.300,00				#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio Capaian Akhir		Penilaian Kinerja	
					(6)		(12)		(12)		(18)		(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	kinerja	anggaran
		Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Koordinasi antar SKPD (6 kali koordinasi)	N/A	6.530 org	684.000,00					#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pelaksanaan Monev dan pelaporan (2 keg/tahun)	N/A	5 laporan	833.360,00					#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	jumlah kebijakan pemerintah daerah bidang ketenagakerjaan	N/A	8 peraturan	836.405,00					#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah
		program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	fasilitasi permasalahan perusahaan	N/A	21 kali	2.668.750,00					#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Jumlah perusahaan yang terlibat dalam forum CSR	N/A	189 perusahaan	1.354.080,64					#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan	Persentase Realisasi Program Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan	N/A	100%	1.354.080,64					0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Persiapan Potensi Sumber Daya Sarana Sarana dan Prasarana Daerah	Kebijakan pemerintah daerah bidang Potensi Wilayah Perbatasan	N/A	5 kegiatan	1.354.080,64					#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Penyediaan Jasa Umum Perkantoran	Persentase Layanan jasa Umum Perkantoran	N/A	96%	16.292.500,00					0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pengembangan Wawasan kebangsaan melalui Peringatan HBN	N/A	25 kali	1.016.500,00	5 kali	32.362.000	5 kali	32.362.000	#VALUE!	3184%	#VALUE!	Sangat Tinggi
		Program Diseminasi dan Pendidikan HAM						15.247.779		15.247.779	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					1	4.800.000	1	4.800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					-	45.465.000	-	45.465.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat					1	68.313.613	1	68.313.613	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh						10.800.000		10.800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Program Kerjasama Pembangunan					2 kebijakan	193.370.866	2 kebijakan	193.370.866	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!
		Program Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan						13.430.000		13.430.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan dengan Baik dan lancar	90,79%	90%	24.200.892.329,21	1	3.365.678.260	1	3.365.678.260	73%	14%	Sedang	Sangat Rendah

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	77,18%	70%	14.942.226.969,78	1	3.120.103.000	1	3.120.103.000	78%	21%	Sedang	Sangat Rendah
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tersediaanya Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus bagi Aparatur dan DPRD	83,11%	100%	2.092.178.453,17	0	320.807.000	0	320.807.000	6%	15%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	96,64%	100%	878.263.526,39	-	-	-	-	0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Dokumen Program dan Kegiatan serta Pelaporan	85,10%	80%	656.140.945,24	0	49.700.000	0	49.700.000	3%	8%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD	90,90%	100%	39.488.750.651,64	3	11.092.029.220	3	11.092.029.220	337%	28%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Managemen Keuangan SKPD dapat berjalan lancar	80,14%	80%	1.208.094.859,93	0	87.860.000	0	87.860.000	3%	7%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan sesuai program kerja pemerintah daerah	98,29%	100%	904.676.161,66	0	186.000.000	0	186.000.000	4%	21%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Terlaksananya Publikasi kegiatan DPRD Kepada Masyarakat	66,61%	100%	8.395.975.575,87	0	1.262.518.500	0	1.262.518.500	15%	15%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Adanya Peraturan Daerah Kab. Nunukan sebagai acuan kegiatan sosial kemasyarakatan	96,74%	100%	2.320.006.126,62	0	616.400.000	0	616.400.000	12%	27%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran	n/a	100%	6.142.268.481,30	100	1.095.149.828	100	1.095.149.828	10000%	18%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio Capaian Akhir		Penilaian Kinerja	
					(6)		(12)		(12)		(18)		(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	kinerja	anggaran
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase Kualitas Pelayanan Pajak	n/a	100%	1.368.235.656,44	100	209.913.400	100	209.913.400	10000%	15%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	n/a	100%	724.433.142,40	100	59.932.654	100	59.932.654	10000%	8%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase penyampaian Laporan SKPD tepat waktu	n/a	100%	160.678.458,54	100	20.600.000	100	20.600.000	10000%	13%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	persentase penerimaan pendapatan daerah	n/a	100%	14.766.442.900,00	100	2.392.777.050	100	2.392.777.050	10000%	16%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	persentase pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan pendapatan daerah	20%	1000%	3.241.939.868,29	100	360.530.000	100	360.530.000	1000%	11%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Menurunnya jumlah keberatan atas pajak daerah	n/a	100%	586.420.000,00	100	54.655.000	100	54.655.000	10000%	9%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase pemanfaatan data nilai tanah untuk meningkatkan potensi PAD	n/a	90%	2.344.780.199,45	100	174.535.000	100	174.535.000	11111%	7%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan yang yang efektif dan efisien	33%	53%	2.378.257.914,00	100	419.598.763	100	419.598.763	18868%	18%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja seluruh bidang dalam BPBD	9%	29%	286.372.800,00					0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase penurunan tingkat kerentanan bencana	7.5%	3.72%	9.476.001.833,89	100	6.106.200.476	100	6.106.200.476	#VALUE!	64%	#VALUE!	Rendah
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin kerja BPBD	18%	38%	143.307.231,99					0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan BPBD	37%	57%	3.190.001.128,78	100	474.110.000	100	474.110.000	17544%	15%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas BPBD	0%	20%	211.103.539,36	100	2.985.000	100	2.985.000	50000%	1%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan kemahiran aparatur BPBD	75%	75%	513.923.231,98	100	25.371.841	100	25.371.841	13333%	5%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah

		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas BPBD	0,0%	7.5%	50.000.000,00	-	-	-	-	#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah
Bid. Urusan Pengawasan														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian sistem penyelenggaraan administrasi perkantoran berkualitas	98%	100%	722.966.402,25	1	95.468.318	1	95.468.318	100%	13%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang layak pakai	100%	100%	828.697.351,68	1	43.057.576	1	43.057.576	100%	5%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	100%	63.696.960,00	-	-	-	-	0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja Inspektorat	96%	100%	934.857.273,86	1	53.360.000	1	53.360.000	100%	6%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	86%	90%	11.820.830.422,52	1	2.275.100.739	1	2.275.100.739	97%	19%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP	1	3	1.083.264.512,00	2 DC	226.371.594	2 DC	226.371.594	#VALUE!	21%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase realisasi RAD-PPK	60%	85%	1.579.264.250,43	1	148.030.350	1	148.030.350	88%	9%	Sedang	Sangat Rendah
		Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tingkat maturitas	NA	Level 3	362.351.980,00	2	41.880.667	2	41.880.667	#VALUE!	12%	#VALUE!	Sangat Rendah
Bid. Urusan Perencanaan														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase efisiensi penyerapan anggaran		100%	4.974.892.271,36	100%	680.723.406	100%	680.723.406	100%	14%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana		100%	1.286.376.608,00	100%	239.206.900	100%	239.206.900	100%	19%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur		100%	81.244.838,40	-	-	-	-	0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio Capaian Akhir		Penilaian Kinerja	
					(6)		(12)		(12)		(18)		(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	kinerja	anggaran
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD		100%	50.000.000,00	100%	36.125.000	100%	36.125.000	100%	72%	Sangat Tinggi	Sedang
		Program pengembangan data dan informasi	Prosentase Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	9.478.564.480,00	100%	56.503.285	100%	56.503.285	100%	1%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program perencanaan pembangunan daerah	Sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah Periode pembangunan selanjutnya		100%	2.329.018.700,80	100%		100%		100%	0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
			Jumlah dokumen perencanaan		1	50.000.000,00	-		-		0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Perencanaan Pembangunan perekonomian	Prosentase perencanaan bidang ekonomi		10 dokumen	1.917.935.407,62	100%	320.888.315	100%	320.888.315	#VALUE!	17%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Prosentase perencanaan bidang sosial budaya		10 dokumen	4.861.701.196,80	100%	31.870.535	100%	31.870.535	#VALUE!	1%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	Prosentase perencanaan bidang Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana		10 dokumen	7.357.134.261,02	100%	-	100%	-	#VALUE!	0%	#VALUE!	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Kemampuan IPTEK dan Inovasi	Prosentase perencanaan IPTEK dan Inovasi		100%	4.062.241.920,00	100%	-	100%	-	100%	0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan Fungsinya.		100%	200.000.000,00		-		-	0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat						67.075.000		67.075.000				
		Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan						106.077.274		106.077.274				
		Program Perencanaan Tata Ruang						130.270.293		130.270.293				
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh						133.925.840		133.925.840				

		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam						137.838.499		137.838.499						
Bid. Urusan Keuangan																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sumber daya yang memadai untuk pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%			14.647.057.867,84	100%	1.282.422.683	100%	1.282.422.683	100%	9%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan prasarana Aparatur yang terpenuhi	100%	100%			2.628.020.806,78	100%	1.581.754.990	100%	1.581.754.990	100%	60%	Sangat Tinggi	Rendah
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyampaian Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	100%	100%			687.455.810,50	1	110.866.660	1	110.866.660	100%	16%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Penyampaian Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	100%			45.963.563.220,06	1	6.933.445.283	1	6.933.445.283	100%	15%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan disiplin Aparatur	Prosentase Pakaian Dinas Atas Kebutuhan ASN	NA	0			204.000.000,00	0%	-	0%	-	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti Diklat	75%	75%			302.518.095,36					0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Persentase OPD yang dibina dalam rangka penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	NA	100%			358.826.208,00	1	84.406.900	1	84.406.900	100%	24%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rencana Kegiatan pada Renstra yang terakomodir dalam DPA	1	1	Dokumen		50.000.000,00	-	-	-	-	0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Bid. Urusan Kepegawaian																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan dan Administrasi Kantor dengan Baik	100%	100%			6.696.557.652,86	1	846.085.792	1	846.085.792	100%	13%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Kebutuhan Perlengkapan Kantor dan Kendaraan Dinas Operasional	65%	91%			1.305.551.066,90	1	33.918.521	1	33.918.521	76%	3%	Sedang	Sangat Rendah
		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Terlaksananya Penyerahan SK Purna Tugas Tepat Waktu bagi PNS yang telah Selesai Melaksanakan Tugas	70%	98%			618.368.547,50	1	44.620.520	1	44.620.520	76%	7%	Sedang	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Pelaksanaan Diklat Penjenjangan, Teknis dan Fungsional.	70%	98%			2.960.688.424,48	1	641.789.486	1	641.789.486	76%	22%	Sedang	Sangat Rendah
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya Managemen Pengelolaan Keuangan yang Baik	80%	100%			318.155.220,10	1	49.300.000	1	49.300.000	100%	15%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio Capaian Akhir		Penilaian Kinerja	
					(6)		(12)		(12)		(18)		(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	kinerja	anggaran
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya PNS yang Profesional Sesuai dengan Kompetensinya	70%	7,00%	32.519.713.298,50	1	3.273.049.121	1	3.273.049.121	1070%	10%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Pegawai BKDD Kabupaten Nunukan	80%	98%	270.816.128,00					0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Baik	90%	98%	270.816.128,00					0%	0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja (%)														
Predikat kinerja														

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd kabupaten/kota berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya:

Petunjuk Pengisian Formulir E.58:

- Sasaran pembangunan jangka menengah:

Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi.

Isikan nama kabupaten/kota serta periode pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.

- Kolom (1) diisi dengan urut program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja sasaran jangka menengah kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2006	Target pada Akhir Tahun Perencanaan 2021		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-		Capaian pada akhir ta perencanaan	
							2017	2017	2017	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(12)		(12)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota seperti tertulis dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD kabupaten/kota tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun

1

Kolom

(17)(K)

= [Kolo

m
(12)(K)
:
Kolom
(7)(K)]
x
100%
tahun
1
Kolom
(17)(R
p)
=[Kolo
m
(12)(R
p) :
Kolom
(7)(Rp)
] x
100%
tahun
2
Kolom
(18) =
Kolom
(13) :
Kolom
(8) x
100%
tahun
2
Kolom
(18)(K)
=[Kolo
m
(13)(K)
:
Kolom
(8)(K)]
x

100%
 tahun
 2
 Kolom
 (18)(R
 p)
 =[Kolo
 m
 (13)(R
 p) :
 Kolom
 (8)(Rp)
] x
 100%
 dan
 seteru
 snya

Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan

Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).

$Kolom (23)(K) = [Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] \times 100\%$

$Kolom (23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp)] \times 100\%$.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten/kota.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya

diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.

- 2 Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.58, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
- 3 Bupati/wali kota menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada gubernur.
- 4 Jadwal penyampaian terhadap hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota oleh bupati/wali kota kepada gubernur adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD kabupaten/kota yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten/kota.
- 5 Gubernur menilai laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD setiap kabupaten/kota, dengan menyusun ke dalam Formulir E.59 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarkabupaten/kota, sebagai berikut: